



**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA**  
**PERIODE 2019 – 2022**

**Jakarta, Desember 2022**

## DAFTAR ISI

Bagian I : Pengantar dan Pendahuluan

Pengantar Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat  
Pendahuluan

Bagian II : Laporan Kegiatan

1. Bidang Pengawasan Isi Siaran
2. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran
3. Bidang Kelembagaan
4. Bidang Kesekretariatan

Bagian III : Profil Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2019-2022

Bagian IV : Lampiran  
Peraturan-Peraturan KPI, MoU, PKS dan Surat Edaran

**BAGIAN I:**

**PENGANTAR DAN PENDAHULUAN**

## **PENGANTAR KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Salam sejahtera bagi kita semuanya,*

*Om Swastiastu,*

*Namo Buddhaya,*

*Salam kebajikan.*

Dukungan dari Bapak/Ibu menjadi semangat yang paling besar bagi kami dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Penyiaran selama kepengurusan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019 - 2022. Atas dukungan Bapak/Ibu semua, *alhamdulillah*, masa kepengurusan ini berjalan dengan khidmah dan paripurna.

Kami merasakan betul bagaimana merekontekstualisasi penyiaran di tengah pandemi. Mengatur skema kegiatan-kegiatan agar tetap relevan dan tepat sasaran. Bersama-sama dengan Pemerintah mendukung upaya penanggulangan dan pencegahan covid-19 melalui televisi dan radio. Menghimbau melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dan menghadirkan konten yang berkualitas bagi masyarakat agar tetap di rumah dan menerapkan protokol kesehatan.

Barangkali dalam perjalanannya kami tidak sempurna, ada kendala yang menjadi celah evaluasi, akan tetapi kami terus menjaga semangat dan komitmen agar protokol kesehatan tidak kendor hingga masa pemulihan. Di tengah upaya itu, kami juga ikut serta terlibat aktif dalam suksesi digitalisasi penyiaran yang merupakan agenda nasional.

Koordinasi dengan Pemerintah – dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika RI – dalam suksesi digitalisasi dilakukan secara intens dan masif. Sementara dalam perluasan sosialisasi dan distribusi perangkat siaran televisi digital di seluruh daerah, pelibatan KPI Daerah sebagai lokomotif utama, juga ikut bergerak dan terlibat.

Alasan dari keterlibatan ini tentu saja tidak lepas dari tanggung jawab KPI untuk menghadirkan dan meningkatkan konten agar lebih beragam. Masyarakat mempunyai banyak pilihan program siaran dengan segmentasi sesuai kebutuhan. Bagi KPI siaran televisi digital bukan semata perubahan fundamental dalam aspek teknologi, akan tetapi juga meliputi hal fundamental lainnya seperti budaya dan pola pikir masyarakat akan penyiaran.

Laporan Kinerja yang saat ini ada di tangan Bapak/Ibu semua, merupakan kegiatan yang sudah kami kerjakan selama masa kepengurusan, selain dua hal yang sudah disebutkan di atas. Laporan Kinerja ini kami peruntukkan sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi KPI dalam menjalankan tugas sesuai amanah regulasi dan diharapkan menjadi pijakan kegiatan sebagai referensi untuk masa kepengurusan selanjutnya.

Di dalam Laporan Kinerja ini, juga dituangkan respon KPI terhadap isu aktual penyiaran seperti media baru. KPI berperan aktif memberikan masukan dan saran tentang media baru di dalam rencana Revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran mulai dari redefinisi penyiaran agar lebih kontekstual sampai dengan pengaturan rating, melakukan FGD dengan melibatkan para ahli baik yang berlatar praktisi atau akademisi, serta melakukan kajian implementasi regulasi dan pengawasan media baru di berbagai negara.

Terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kominfo RI, Kementerian dan Lembaga, serta stakeholder penyiaran seperti Asosiasi Televisi dan Radio dan Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas peran masyarakat dalam memberikan saran dan masukan bagi kami baik yang bersifat evaluatif atau mendukung kinerja-kinerja KPI dalam perbaikan dunia penyiaran ke depan. Kepada para Komisioner, Jajaran Sekretariat dan seluruh Staff KPI, semoga selama tiga tahun ini kita bekerja, menjadi amal sosial yang menabur manfaat untuk bangsa dan negara.

Salam.

Agung Suprio

## PENDAHULUAN

Sembilan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2019-2022 ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang ditandatangani pada 26 Juli 2019. Kemudian pada Hari Senin, 5 Agustus 2019 dilakukan pengukuhan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara di Kantor Kominfo Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Seperti periode sebelumnya, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode tahun 2019 – 2022 melakukan rapat pleno perdana pada tanggal 2 Agustus 2019, di kantor KPI Pusat Jalan Ir. H.Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat. Rapat pleno membahas dan menetapkan struktur lembaga di KPI Pusat. Pada Bidang Kelembagaan menetapkan koordinator Irsal Ambia, anggota Yuliandre Darwis, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Nuning Rodiyah. Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), Koordinator Mohamad Reza, anggota: Aswar Hasan, dan Agung Suprio. Bidang pengawasan isi Siaran, koordinator: Mimah Susanti dan anggota Mulyo Hadi Purnomo. Di dalam rapat ini juga menetapkan Ketua terpilih Agung Suprio dan Wakil Ketua, Mulyo Hadi Purnomo.

Selama tiga tahun berjalan, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode tahun 2019 - 2022 bekerja untuk menjalankan visi Komisi Penyiaran Indonesia yang telah ditetapkan oleh Anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode sebelumnya. Visi Komisi Penyiaran Indonesia adalah *“Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”*.

Kegiatan-kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat disusun dan dilaksanakan dengan semangat misi:

1. Membangun kelembagaan KPI sebagai Lembaga Negara yang berwibawa dan bersinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan penyiaran.
2. Meningkatkan kompetensi profesi sumber daya manusia penyiaran dan kualitas lembaga penyiaran.
3. Meningkatkan pengaturan, pengembangan dan pengawasan isi siaran.
4. Meningkatkan sikap dan daya kritis masyarakat terhadap penyiaran.
5. Mengembangkan pengelolaan struktur dan sistem penyiaran yang menyeimbangkan hak dan kewajiban *stakeholder* penyiaran serta mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Sejalan dengan perkembangan penyiaran, Indonesia tengah dilanda pandemi Covid 19, pandemi ini sempat mempengaruhi seluruh aktivitas KPI Pusat.

Buku laporan ini cukup memberikan gambaran program apa saja yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat selama tiga tahun lebih. Program-program tersebut meliputi bidang Pengawasan Isi Siaran, Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran; dan bidang Kelembagaan serta dukungan Kesekretariatan.

Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019 – 2022 yang seharusnya berakhir pada bulan Juli 2022, dilakukan perpanjangan masa jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 69/P Tahun 2022 tertanggal 24 Juni 2022.

Sepanjang periode 2019- 2022, dalam menjalankan fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) bidang Pengawasan Isi Siaran melakukan penambahan pengawasan JPN, O Channel dan MyTV. Dalam upaya untuk meningkatkan dan memotivasi lembaga penyiaran dalam memproduksi program siaran yang berkualitas, Komisi Penyiaran Indonesia Periode 2019-2022 juga melaksanakan kegiatan yang bersifat apresiasi yaitu Anugerah KPI, Anugerah Siar Ramadan, dan Anugerah Penyiaran Ramah Anak.

Komisi Penyiaran Indonesia periode 2019-2022 khususnya Bidang Kelembagaan juga melakukan penguatan Kelembagaan KPI melalui kegiatan-kegiatan yang dijalankan, diantaranya Rakornas KPI tahun 2020, 2021 dan 2022, Rapim KPI tahun 2019, Revisi P3SPS KPI, Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi, Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa yang dilaksanakan di berbagai daerah dan pada periode ini KPI juga menetapkan 3 (tiga) peraturan baru yang diputuskan dalam Rakornas KPI 2022 yaitu; PKPI tentang Kelembagaan, PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Komisi Penyiaran Indonesia dan PKPI tentang Rekomendasi Pencabutan IPP Karena Tidak Melakukan Siaran.

Dalam upaya menjalankan fungsi Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran hal yang telah dilakukan selama periode 2019 – 2022 adalah mengupdate data lembaga penyiaran Televisi dan Radio, mengadakan Evaluasi Tahunan lembaga penyiaran swasta Televisi berjaringan, membuat aplikasi pengelolaan struktur dan sistem penyiaran (aplikasi SSJ dan Smilled), melaksanakan riset kebutuhan program siaran lembaga penyiaran nasional (MKK) dan melaksanakan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP).

Bagian akhir laporan ini memuat lampiran berupa dokumen-dokumen penting yang dikeluarkan selama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat periode 2019-2022, seperti Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Standar Operasional Prosedur, Surat Edaran, Komitmen Bersama, dan Nota Kesepahaman.

# **BAGIAN II**

## **LAPORAN KEGIATAN**

**BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN**

Komisi Penyiaran Indonesia mengalami beragam dinamika dalam pemantauan lembaga penyiaran. Sepanjang kurun waktu 2019-2020, KPI memantau 16 Lembaga Penyiaran yang bersiaran dengan sistem siaran berjaringan, 21 provider Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) dan 15 Lembaga Penyiaran (LP) Radio. Sementara pada tahun 2021-2022 KPI masih melakukan pemantauan langsung terhadap 18 lembaga penyiaran sistem siaran jaringan, 5 provider LPB dan 15 LP Radio. Berkurangnya provider LPB yang dipantau dikarenakan akses terhadap LPB tidak dapat dilakukan pada tahun tersebut.

Ada sejumlah hal terkait aktivitas pemantauan TV, misalnya tentang iklan. KPI melakukan pemantauan terhadap Iklan Layanan Masyarakat yang berisi imbauan Pemerintah terkait pandemi Covid-19 di lembaga penyiaran. Di sisi lain, tim pemantau juga melakukan perhitungan prosentase Iklan niaga pada 14 (empatbelas) LPS TV sistem siaran berjaringan yang laporannya dapat dilihat secara detail di bawah ini.

Selain itu, tim pemantau di tahun 2022 mulai menerapkan instrumen pengawasan terhadap 15 (limabelas) LP sistem siaran berjaringan, melalui aspek penilaian berdasarkan aspek: “Nyaman, Layak, Manfaat dan Menarik”.

Selain fungsi pengawasan atau pemantauan, KPI juga menerima aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyiaran. Dari hasil aduan tersebut dilakukan kajian dan verifikasi kemudian diproses sesuai Standar Operasional Prosedur.

Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022, KPI menerima aduan sebanyak 8.661 dari 1.091 program siaran. Setelah interpretasi, kategorisasi, dan klasifikasi, terdapat 5.829 aduan dari 911 program siaran yang tidak sesuai atau tidak ditemukan potensi pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS). Rata-rata aduan yang tidak sesuai dengan P3SPS karena aduan bersifat umum, tidak jelas dan tidak lengkap, deskripsi atau keterangan tidak sesuai dengan objek yang diadakan. Sementara, aduan yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran P3SPS sebanyak 2.832 dari 362 program siaran. Jika melihat pola pengaduan sejak tahun 2019 sampai 2022, terjadi penurunan setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan karena masyarakat cenderung fokus informasi terkait pandemi Covid-19. Namun bisa juga karena kualitas program siaran yang semakin baik dengan adanya pembinaan KPI. Selama ini memang belum ada metode atau riset terhadap persepsi publik terkait soal pengaduan masyarakat. Harapan ke depan, dengan aplikasi pengaduan akan terbaca mengenai pola pengaduan masyarakat.

Kecenderungan aduan dari empat tahun terakhir itu, aduan terbanyak terletak pada program Variety Show, menyusul Sinetron Seri dan Talk. Tahun 2022 isu yang mencuat adalah pengaduan terhadap “Sinetron Buku Harian Seorang Istri” dan ”Layangan Putus”. Kedua sinetron itu sarat adegan dewasa, bahkan untuk Layangan Putus tidak pantas ditampilkan pada jam primetime. Hasil penilaian atau pemeriksaan potensi pelanggaran yang telah diverifikasi oleh bagian pemantauan dan pengaduan yang dinilai berpotensi melanggar, diteruskan kepada bagian penjatuhan sanksi.

Tulisan di bawah ini akan memuat mekanisme Penjatuhan Sanksi yang merupakan proses administratif terhadap lembaga penyiaran yang dinilai KPI melanggar P3SPS, berupa perbandingan jumlah sanksi dari tahun 2019-2022, dimana KPI telah mengeluarkan teguran tertulis sebanyak: 257, teguran tertulis kedua sebanyak: 27, dan penghentian sementara. Isi laporan juga mengupas sanksi teguran tertulis berdasarkan lembaga penyiaran, teguran tertulis kedua berdasarkan lembaga penyiaran, sanksi penghentian sementara berdasarkan lembaga penyiaran, sanksi berdasarkan kategori program siaran, dan data sanksi berdasarkan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemantauan langsung, ditambah akan dipaparkan pula mediasi dan klarifikasi.

Lebih lanjut, laporan ini juga akan menjelaskan beragam kegiatan Bidang Pengawasan Isi Siaran, dari Sekolah P3SPS, Bimbingan Teknis SDM KPI, sampai pada Kegiatan FGD yang dilaksanakan secara tematik. Dalam FGD, tertuang latar belakang pelaksanaan serta rekomendasi hasil dari kegiatan FGD. Tidak luput dari itu, KPI juga memberikan Apresiasi kepada TV dan Radio dalam bentuk Anugerah, yakni Anugerah Syiar Ramadan, Anugerah Ramah Anak dan Anugerah KPI (*KPI Award*), sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan yang diberikan kepada insan dan lembaga penyiaran yang memiliki konten yang baik.

## **I. DATA PROSES PEMANTAUAN ISI SIARAN 2019 - 2022**

### **A. PROSES PEMANTAUAN ISI SIARAN**

Kegiatan pemantauan langsung merupakan bagian dari pengejawantahan amanat UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 tentang kewenangan yang melekat pada Komisi Penyiaran Indonesia. Pada pasal 8 ayat 2 bagian (c) disebutkan bahwa KPI mempunyai kewenangan *mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS)*. Atas dasar perintah UU Penyiaran tersebut, KPI membentuk tim pemantauan langsung yang bertugas mengawasi seluruh konten siaran di Lembaga Penyiaran.

Kurun waktu 2019-2022, lembaga penyiaran yang dipantau oleh KPI mengalami penambahan dan pengurangan. Pada tahun 2019-2020 KPI memantau 16 LP Berjaringan, 21 provider LP Berlangganan dan 15 Lembaga Penyiaran Radio. Sementara pada tahun 2021-2022 KPI melakukan pemantauan langsung terhadap 18 LP Berjaringan, 5 provider LP Berlangganan dan 15 LP Radio. Berkurangnya provider LP Berlangganan yang dipantau dikarenakan akses terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan yang tidak dapat dilakukan pada tahun tersebut. Berikut Lembaga Penyiaran yang dipantau Komisi Penyiaran Indonesia periode tahun 2019-2022:

No	LEMBAGA PENYIARAN BERJARINGAN			
	2019	2020	2021	2022
1	Trans TV	Trans TV	Trans TV	Trans TV
2	Trans 7	Trans 7	Trans 7	Trans 7
3	Indosiar	Indosiar	Indosiar	Indosiar
4	SCTV	SCTV	SCTV	SCTV
5	MNC TV	MNC TV	MNC TV	MNC TV
6	RCTI	RCTI	RCTI	RCTI
7	G TV	G TV	G TV	G TV
8	I News	I News	I News	I News
9	Metro TV	Metro TV	Metro TV	Metro TV
10	TVRI	TVRI	TVRI	TVRI
11	ANTV	ANTV	ANTV	ANTV
12	TV One	TV One	TV One	TV One
13	Net.	Net.	Net.	Net.
14	RTV	RTV	RTV	RTV
15	Kompas TV	Kompas TV	Kompas TV	Kompas TV
16	JPM	JPM	JPM	JPM
17			myTV	myTV
18			O Channel	O Channel

Tabel 1. Daftar Lembaga Penyiaran Televisi dengan Sistem Siaran Berjaringan yang dipantau KPI tahun 2019-2022

No	LEMBAGA PENYIARAN RADIO			
	2019	2020	2021	2022
1	GLOBAL FM	GLOBAL FM	GLOBAL FM	GLOBAL FM
2	RDI	RDI	RDI	RDI
3	I Radio	I Radio	I Radio	I Radio
4	RRI Pro 1 FM	RRI Pro 1 FM	RRI Pro 1 FM	RRI Pro 1 FM
5	RRI Pro 2 FM	RRI Pro 2 FM	RRI Pro 2 FM	RRI Pro 2 FM
6	RRI Pro 3 FM	RRI Pro 3 FM	RRI Pro 3 FM	RRI Pro 3 FM
7	Sonora FM	Sonora FM	Sonora FM	Sonora FM
8	Trax FM	Trax FM	Trax FM	Trax FM
9	Elshinta FM	Elshinta FM	Elshinta FM	Elshinta FM

10	Prambors FM	Prambors FM	Prambors FM	Prambors FM
11	Gen FM	Gen FM	Gen FM	Gen FM
12	Female FM	Female FM	Female FM	Female FM
13	Hard Rock FM	Hard Rock FM	Hard Rock FM	Hard Rock FM
14	Delta FM	Delta FM	Delta FM	Delta FM
15	MNC (Sindo) Trijaya	MNC (Sindo) Trijaya	MNC (Sindo) Trijaya	MNC (Sindo) Trijaya

Tabel 2. Daftar Lembaga Penyiaran Radio yang dipantau KPI tahun 2019-2022

No	LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN			
	2019	2020	2021	2022
1	First Media	First Media	First Media	First Media
2	My Republik	My Republik	My Republik	My Republik
3	K-Vision	K-Vision	K-Vision	K-Vision
4	Trans Vision	Trans Vision	Trans Vision	Trans Vision
5	MNC vision	MNC vision	MNC vision	MNC vision
6	Big TV	Big TV		
7	Ok Vision	Ok Vision		
8	Citra TV	Citra TV		
9	I Sky Net	I Sky Net		
10	Topas TV	Topas TV		
11	Smart Vision	Smart Vision		
12	Matrix TV	Matrix TV		
13	MCTV	MCTV		
14	Skynet TV	Skynet TV		
15	Orionsky	Orionsky		
16	IMTV	IMTV		
17	Orange TV	Orange TV		
18	SM Vision	SM Vision		
19	ICTA TV	ICTA TV		
20	MEGA VISION	MEGA VISION		
21	NEXT MEDIA	NEXT MEDIA		

Tabel 3. Daftar Lembaga Penyiaran Berlangganan yang dipantau KPI tahun 2019-2022

Lembaga penyiaran berjangkauan yang dipantau pada tahun 2021-2022 bertambah menjadi 18, yaitu dengan menambahkan mytv dan O Channel dalam proses pemantauan langsung yang dilakukan KPI Pusat. Namun demikian, karena masih relatif baru, maka jam pantau untuk 2 lembaga penyiaran tersebut ditambah dengan JPM sebagai lembaga penyiaran berjangkauan yang relative baru juga hanya 12 jam saja. Hal ini dilakukan untuk terlebih dahulu dilakukan *mapping* program dan *tracking* dugaan pelanggaran siaran di lembaga penyiaran tersebut untuk selanjutnya bisa didapatkan informasi terkait sebaran program siaran, waktu siaran dan perlu tidaknya dilakukan pemantauan selama 24 jam terhadap terhadap 3 lembaga penyiaran tersebut. Oleh karena itu, dalam laporan ini,

dipisahkan antara 15 lembaga penyiaran yang dipantau selama 24 jam dengan 3 lembaga penyiaran yang dipantau selama 12 jam.

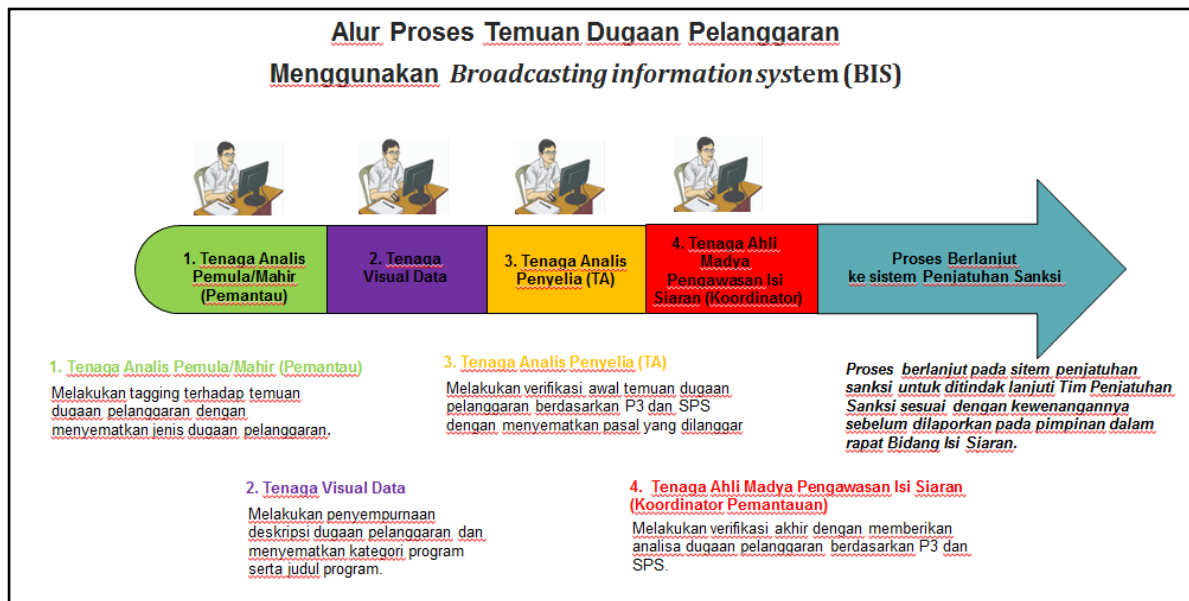
Sementara untuk provider lembaga penyiaran berlangganan yang dipantau selama tahun 2021-2022 dari 5 provider yang masih terpasang hanya 2 provider saja yang aktif digunakan untuk memantau Lembaga Penyiaran Berlangganan. Pada tahun-tahun sebelumnya, KPI merencanakan memantau 25 provider LP Berlangganan, namun seiring berjalanya waktu banyak provider LP Berlangganan yang sudah tidak beroperasi lagi. Sehingga hanya tersisa 5 provider saja yang saat ini terpasang dan bisa diakses oleh KPI, yaitu First Media, My Republik, MNC Vision, Transvision, dan K-Vision. Kemudian dari 5 provider yang terpasang, 3 diantaranya yaitu MNC Vision, Transvison dan K-Vision digunakan untuk memantau 3 LP dari MNC group yang tidak dapat terpantau bila hanya menggunakan akses sistem parabola, karena terkendala hak siar. Maka 3 provider tersebut digunakan masing-masing untuk dapat mengakses MNCTV, GTV dan RCTI. Dengan demikian, selama tahun 2021 KPI hanya memantau konten dalam 2 provider LP Berlangganan, First Media dan My Republik.

Sedangkan untuk LP Radio yang dipantau tahun 2021 berjumlah 15 LP Radio. 15 radio tersebut dipantau secara *random* bergantian setiap minggunya.

Dalam melakukan pengawas terhadap seluruh lembaga penyiaran di atas, KPI memiliki Tim Pemantauan langsung yang berjumlah 160 orang, terdiri dari 1 Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran/Koordinator Pemantauan, 6 Tenaga Analis Penyelia (TA), 16 Tenaga Visual Data (Pada bulan November 2021 bertambah menjadi 18 orang, dengan dua penambahan untuk menindaklanjuti hasil temuan 2 lembaga penyiaran berjaringan baru, mytv dan O Channel), dan 112 Tenaga Analis Pemantauan Langsung Dengan pembagian tugas sebagai berikut:

1. **84 orang** bertugas memantau 15 lembaga penyiaran berjaringan yang dipantau selama 24 jam.
2. **8 orang** bertugas memantau 3 lembaga penyiaran berjaringan yang dipantau selama 12 jam
3. **10 orang** bertugas memantau lembaga penyiaran berlangganan yang dipantau selama 12 jam
4. **14 orang** memantau lembaga penyiaran radio yang dipantau selama 12 jam.

Untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Radio tidak dipantau bersamaan, melainkan dipilih secara acak (*random*) dan dipantau bergantian selama 1 minggu sekali setelah sebelumnya dilakukan *mapping* terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pelanggaran pada masing-masing chanel siaran. Dalam proses pemantauan langsung, masing-masing personel memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut alur proses temuan potensi pelanggaran hingga masuk pada rapat bidang Isi Siaran dan Pleno Penjatuhan Sanksi:



Gambar 1. Alur Proses Temuan Potensi Dugaan Pelanggaran

Tenaga Analis Pemantauan Langsung bertugas melakukan *tagging* (Penandaan secara sistem) bila ditemukan konten siaran yang berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

Tenaga Visual Data bertugas menyempurnakan deskripsi analisis dari seluruh hasil *tagging* Tenaga Analis Pemantauan Langsung, selain penyempurnaan deskripsi analisis tenaga visual data juga bertugas melakukan mengidentifikasi program dan format siarannya.

Tenaga Analis Penyelia (TA) bertugas melakukan verifikasi awal sebagai langkah pertama untuk menentukan temuan potensi pelanggaran tersebut memang memiliki dugaan pelanggaran P3 dan SPS dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Adanya kesesuaian antara deskripsi analisis hasil temuan potensi pelanggaran dengan tayangannya.
2. Adanya pasal dalam P3 dan SPS yang diduga dilanggar dalam temuan potensi pelanggaran.

3. Pertimbangan aspek teknis seperti posisi kamera dalam pengambilan gambar sebuah objek yang diduga melanggar dan penempatan STLS serta klasifikasi yang sesuai dengan regulasi P3 dan SPS.

Tenaga Ahli Madya Pengawasan Isi Siaran (Koordinator Pemantauan) bertugas melakukan verifikasi akhir sebagai proses validasi atas seluruh temuan yang akan dilaporkan pada Komisioner bidang Isi Siaran. Dalam proses verifikasi akhir ini mempertimbangkan beberapa aspek dalam analisis, yaitu :

1. **Frekuensi**, untuk melihat keberulangan dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam program siaran tertentu.
2. **Durasi**, untuk mengukur lama waktu dugaan pelanggaran tersebut dilakukan.
3. **Analogi**, sebagai proses perbandingan untuk memastikan bahwa kasus serupa yang memiliki kemiripan indikasi pelanggaran pernah diberikan tindakan oleh KPI.

Selain mempertimbangkan 3 aspek analisis tersebut, koordinator pemantauan juga melakukan koordinasi dengan bagian pengaduan untuk melihat **respon publik** terhadap sebuah program acara.

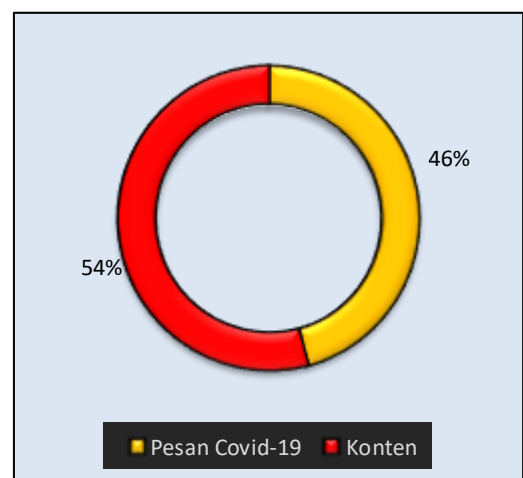
Setelah melalui proses verifikasi akhir, sebelum dilaporkan pada Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran melalui rapat bidang, seluruh temuan dugaan pelanggaran secara sistem masuk pada bagian penjatuhan sanksi untuk ditelusuri history sanksinya dan memberikan *secound opinion* dalam melihat dugaan pelanggaran.

## B. TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN

### 1. Lembaga Penyiaran Televisi Berjaringan

Lembaga Penyiaran Berjaringan yang dimaksud pada laporan ini adalah 17 Lembaga Penyiaran Swasta dan 1 Lembaga penyiaran publik. Lembaga Penyiaran Berjaringan yang selama ini telah dipantau KPI Pusat, yaitu: TV One , Trans TV, I News TV, Kompas TV, MNC TV, RCTI, SCTV, Trans 7, Net, ANTV, Metro TV, Indosiar, RTV, GTV, Jawa Pos Multimedia (JPM), my tv, o'channel dan TVRI

Hasil pantauan terhadap 18 LP berjaringan periode tahun 2019-2022 tercatat 162.104 *tagging*-an Tim Pemantauan, 162.104 tersebut tidak semuanya merupakan potensi pelanggaran tayangan, karena



Grafik 1. Persentase Hasil Pemantauan konten siaran dan ILM tentang Covid

selain melakukan pantauan terhadap konten siaran yang berpotensi melanggar P3 dan SPS, pemantauan langsung KPI Pusat sejak tahun 2020-2022 juga melakukan pendataan terhadap program siaran Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang diproduksi oleh lembaga penyiaran, asosiasi lembaga penyiaran, kementerian dan lembaga Negara lainnya dengan pesan pencegahan pandemic Covid-19. ILM tersebut didata untuk mengukur partisipasi lembaga penyiaran dalam mensosialisasikan himbauan pemerintah tentang pencegahan pandemic Covid-19.

Dari 162.104 hasil *tagging*-an tersebut, 74.345 atau 46 % merupakan data ILM dan Iklan Niaga dengan pesan pencegahan Covid-19 dan 87.759 atau 54 % merupakan temuan potensi pelanggaran tayangan.

Peran serta lembaga penyiaran dalam mensosialisasikan himbauan pemerintah terkait pencegahan Covid-19 sangatlah penting. Mengingat penetrasi lembaga penyiaran terutama televisi yang begitu besar menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Informasi apapun yang disampaikan lembaga penyiaran akan cepat diakses oleh masyarakat.

74.345 data partisipasi Lembaga penyiaran dalam *mensosialisasikan* himbauan pemerintah terkait pencegahan Covid-19 terbagi dalam berbagai bentuk, yaitu:

- Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan pesan pencegahan Covid-19 yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran, asosiasi lembaga penyiaran, Satgas Penanganan Covid-19, Kementerian, Lembaga Negara serta Organisasi masyarakat.
- Iklan Niaga dengan pesan pencegahan Covid-19
- Superimpose dalam program siaran
- Tagar yang ditampilkan pada program siaran ataupun pada saat promo program siaran



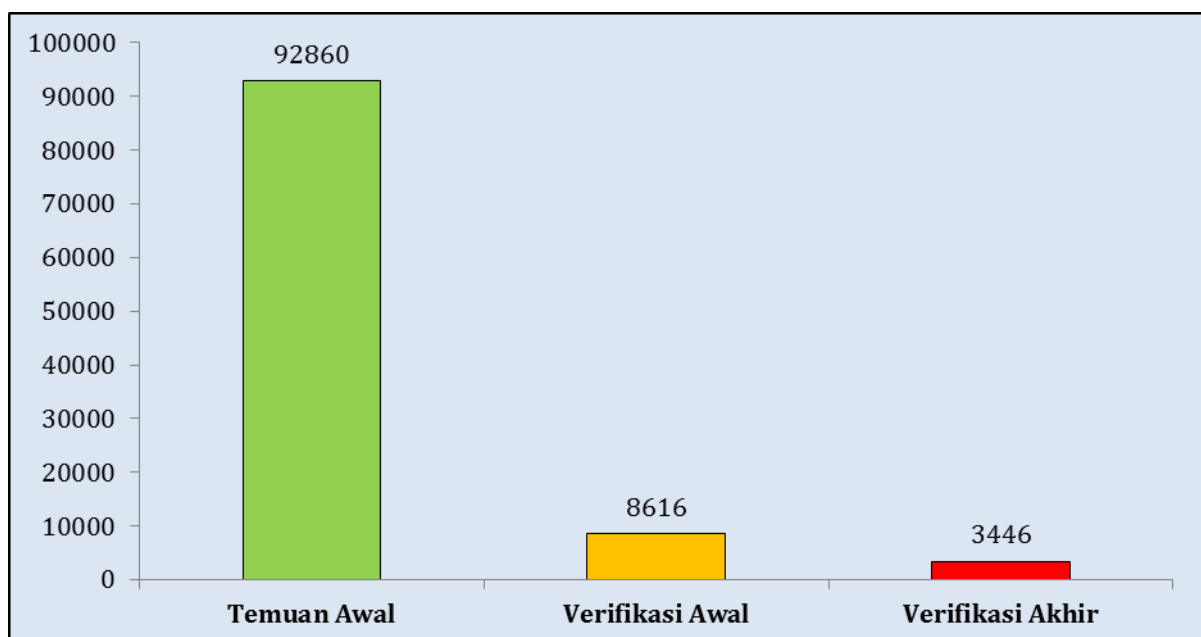
Grafik 2: Data *tagging* terhadap Lembaga Penyiaran yang menyiarkan Iklan Layanan Masyarakat Imbauan Pemerintah terkait pencegahan Covid 19

Metro TV dengan jumlah 13.821, selama kurun waktu 2020-2022 ikut serta mensosialisasikan himbuan pemerintah terkait pencegahan Covid-19 melalui ILM yang dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran, Asosiasi Lembaga Penyiaran, Kementerian dan Lembaga pemerintah.

Berikut beberapa sampel partisipasi lembaga penyiaran dalam mensosialisasikan pencegahan Covid-19:



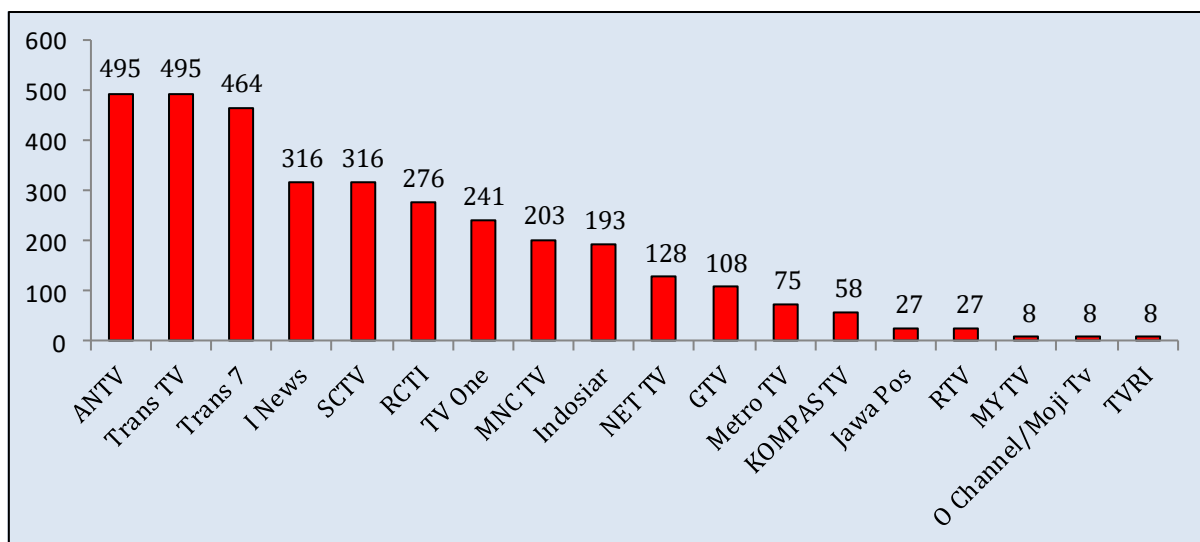
Gambar 2. Contoh partisipasi lembaga penyiaran dalam pencegahan Covid 19



Grafik 3. Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran selama periode 2019-2022

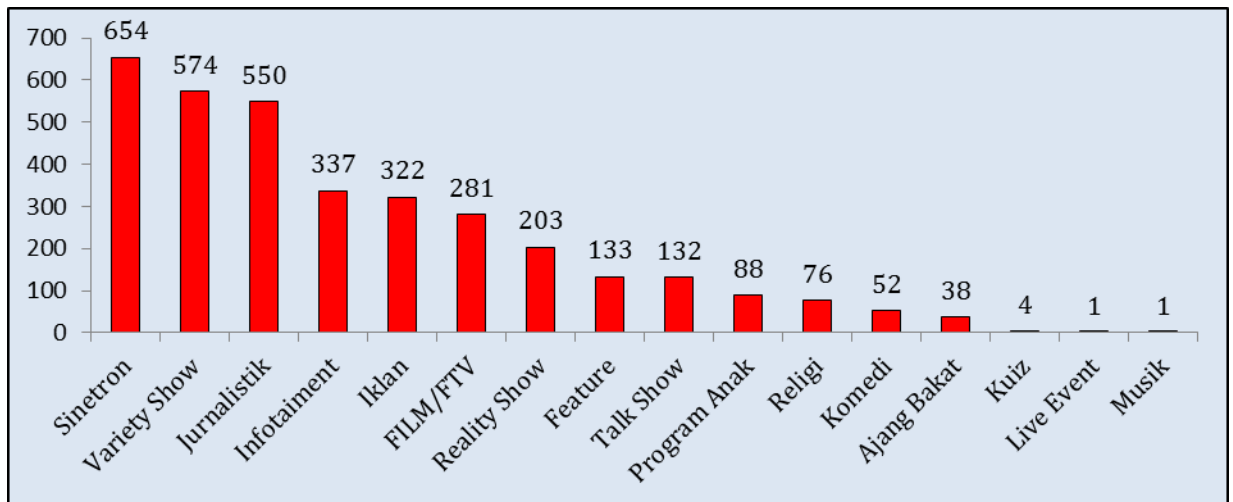
Selanjutnya, untuk temuan dugaan pelanggaran, selama periode 2019-2022 tercatat 92.860 temuan potensi pelanggaran. Hasil tagging analisis yang berjumlah 92.860 tersebut tersebar dalam 459 program siaran di lembaga penyiaran berjangkaran. Setelah dilakukan verifikasi awal, jumlah *tagging*-an yang dikonfirmasi masuk pada proses verifikasi berjumlah 8.616, dan setelah dilakukan verifikasi akhir jumlah temuan yang diduga melanggar P3 dan SPS berjumlah 3.446 temuan yang tersebar dalam 315 program siaran. Seluruh temuan dugaan pelanggaran tersebut selanjutnya disampaikan pada pimpinan pada rapat bidang isi siaran.

Temuan dugaan pelanggaran selama periode 2019-2022 yang berjumlah 3.060 tersebut secara beragam tersebar di 18 lembaga penyiaran berjangkaran.



Grafik 4. Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran Pada Masing-Masing Stasiun TV

Sejumlah Temuan dugaan pelanggaran tersebut di atas tersebar dalam berbagai format program siaran. Dari hasil verifikasi akhir, pada format program variety show paling banyak ditemukan dugaan pelanggaran selama tahun 2019-2022.



Grafik 5. Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran di TV Berdasarkan Format Siaran

Sinetron mendominasi temuan dugaan pelanggaran pada tahun 2019-2022 karena masih banyak ditemukan muatan perilaku tidak pantas, bullying, kekerasan/perkelahian, mistik horror, supranatural dan muatan lainnya yang tidak sesuai dengan klasifikasi program dan peruntukan khalayak penonton saat sinetron tersebut ditayangkan.

Bila dikelompokkan format program dengan jenis dugaan pelanggaran yang dominan terjadi pada setiap format program siaran adalah sebagai berikut:

No.	Format Program	Dugaan Pelanggaran
1	Sinetron	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muatan kekerasan fisik (perkelahian) yang ditampilkan pada jam tayang anak dan remaja</li> <li>• Muatan kata-kata kasar dan makian yang ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja</li> <li>• Muatan mistik, horor dan supranatural yang ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja</li> <li>• Muatan adegan yang tidak pantas ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja (bullying, konflik rumah tangga dan eksplotasi adegan percintaan)</li> <li>• Muatan adegan dengan setting dunia pendidikan yang menampilkan perilaku bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan</li> </ul>
2	Variety Show	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokol kesehatan</li> <li>• Norma Kesopanan dan Kesusilaan</li> <li>• Muatan perilaku tidak pantas ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja</li> </ul>

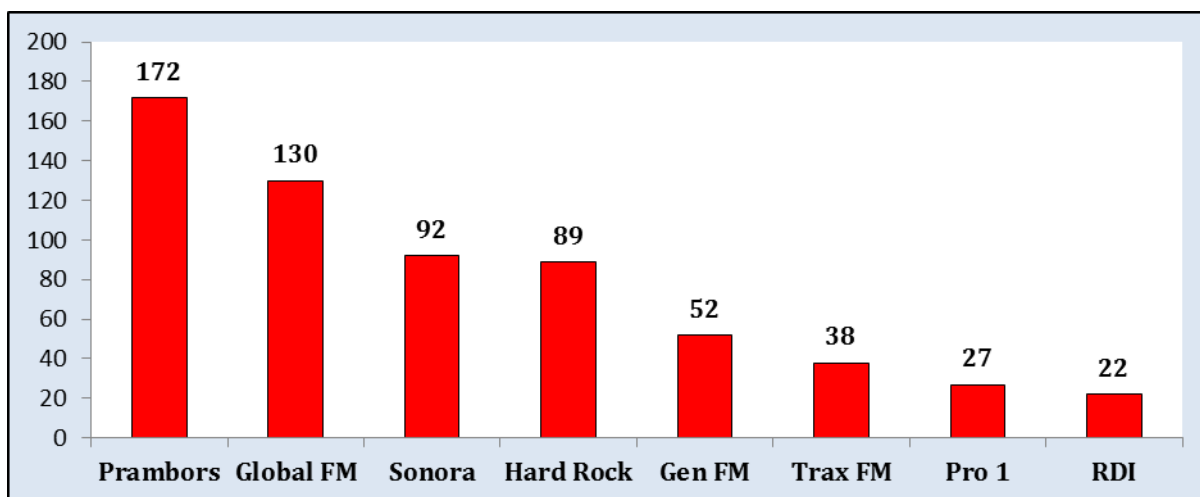
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hipnotis dan paraktek sejenisnya yang dijadikan sebagai materi lawakan dengan secara tidak semestinya</li> <li>• Perlindungan terhadap kelompok masyarakat tertentu</li> </ul>
3	Iklan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penayangan Iklan cegah stunting dengan ber-KB yang dipersembahkan DKT dan BKKBN ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja</li> <li>• Superimpose produk rokok pada program jurnalistik/liputan khusus (SUKUN)</li> <li>• Beberapa iklan produk yang dinilai melanggar norma kesopanan dan kesusilaan seperti iklan shopee yang menampilkan goyangan beberapa perempuan dengan pakaian minim serta iklan produk vitamin dengan klaim pencegahan terhadap Covid-19 seperti iklan V-Pro G</li> <li>• Iklan yang diproduksi oleh produsen rokok dan ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja</li> <li>• Advetorial produk kesehatan yang tidak menampilkan izin dari lembaga yang berwenang</li> <li>• Iklan produk makanan dan minuman yang menampilkan visualisasi pengkonsumsian makanan dan minuman pada saat jam berpuasa di bulan Ramadhan</li> </ul>
4	Jurnalistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban penyamaran Identitas</li> <li>• Penayangan interogasi kepolisian terhadap tersangka kejahatan</li> <li>• Peliputan bencana</li> <li>• Muatan kekerasan dalam footage pemberitaan</li> <li>• Muatan seksualitas dalam footage pemberitaan</li> </ul>
5	Reality Show	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokol Kesehatan</li> <li>• Muatan hedonistik dan gaya hidup konsumtif</li> </ul>
6	Infotainmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eksploitasi konflik pribadi</li> <li>• Mutan hedonistik dan gaya hidup konsumtif</li> <li>• Mistik, horor dan supranatural</li> <li>• Seksualitas</li> </ul>
7	Film/FTV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Muatan kekerasan fisik (perkelahian) yang ditampilkan pada jam tayang anak dan remaja</li> <li>• Muatan kata-kata kasar dan makian yang</li> </ul>

		<p>ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muatan mistik, horor dan supranatural yang ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja</li> <li>• Muatan adegan yang tidak pantas ditayangkan pada jam tayang anak dan remaja (bullying, konflik rumah tangga dan eksplotasi adegan percintaan)</li> </ul>
8	Talkshow	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma Kesopanan dan kesusilaan</li> <li>• Muatan seksual /asosiatif</li> </ul>
9	Program Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menampilkan STLS di awal penayangan program</li> <li>• Muatan Kekerasan</li> </ul>
10	Religi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mistik, horor dan supranatural</li> <li>• Muatan asosiatif</li> </ul>
11	Feature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma Kesopanan dan kesusilaan</li> <li>• Muatan kekerasan dan tidak pantas yang ditampilkan dalam cuplikan video dengan sumber media baru</li> <li>• Mistik, horor dan supranatural</li> </ul>
12	Ajang Bakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma kesopanan dan kesusilaan</li> </ul>

Tabel 4. Hasil Temuan Dugaan Pelanggaran Berdasarkan Format Siaran yang Dominan

## 2. Lembaga Penyiaran Radio

Temuan dugaan pelanggaran tayangan pada radio Sementara itu untuk temuan potensi pelanggaran yang berjumlah 12.155, setelah dilakukan verifikasi awal menjadi 2.367 temuan dugaan pelanggaran. Dan setelah melalui proses verifikasi akhir menjadi 622 dugaan pelanggaran konten siaran



Grafik 6. Hasil temuan dugaan pelanggaran pada masing-masing stasiun radio

Adapun dugaan pelanggaran yang ditemukan pada lembaga penyiaran radio terbagi dalam 3 isu besar, yaitu:

1. Kata-kata kasar dan muatan seksual dalam lirik lagu yang belum sepenuhnya dilakukan sensor oleh lembaga penyiaran radio yang menyiarkannya.
2. Muatan candaan asosiatif yang disampaikan oleh penyiar
3. Iklan produk atau jasa kesehatan yang disiarkan tanpa adanya keterangan izin dari lembaga yang berwenang

Pada tahun 2020, dilakukan *tracking* untuk lagu-lagu yang sudah melalui radio edit dan belum melalui radio edit. Hal ini dilakukan sebagai langkah tindak lanjut dari hasil temuan pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, dimana temuan dugaan pelanggaran radio lebih didominasi oleh lagu-lagu asing ataupun lokal dengan lirik-lirik mengandung unsur kekerasan dan seksualitas.

Setelah melakukan *tracking* terhadap 10 radio, terdapat 573 temuan lagu yang telah melalui radio edit dan telah melakukan sensor terhadap lirik lagu yang dianggap mengandung muatan kekerasan dan seksualitas. Berikut tabel temuan pemantauan langsung terhadap lembaga penyiaran Radio:

No	Lembaga Penyiaran	Temuan Awal
1	HARD ROCK	170
2	Prambors	155
3	Global FM	113
4	SONORA	67
5	GEN	42
6	Pro 1	8
7	TRAX	8

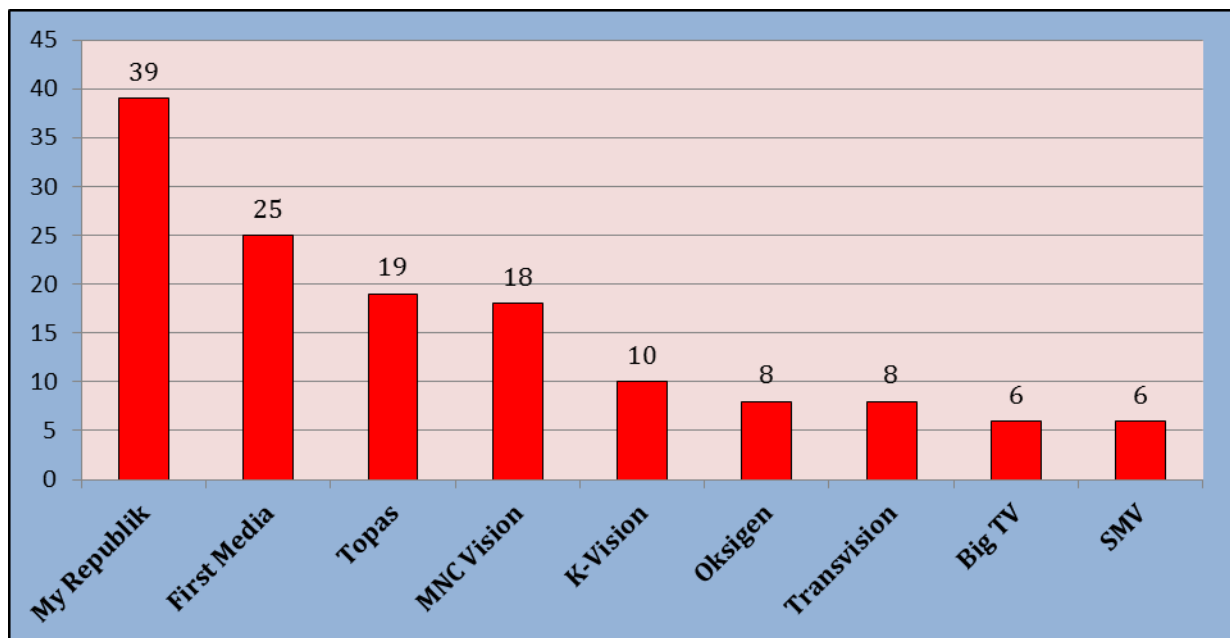
8	ELSHINTA	6
9	iRadio	2
10	RDI	2

Tabel 5. Temuan pemantauan langsung terhadap lembaga penyiaran radio

### 3. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Hasil temuan dugaan pelanggaran pada lembaga penyiaran berlangganan berjumlah 2.501. Setelah dilakukan verifikasi awal menjadi 325 temuan dugaan pelanggaran. Dan setelah melalui proses verifikasi akhir menjadi 118 dugaan pelanggaran

Temuan dugaan pelanggaran tersebut tersebar dalam berbagai provider yang dipantau KPI selama periode tahun 2019-2022, provider tersebut adalah sebagai berikut:



Grafik 7 Hasil temuan dugaan pelanggaran pada masing-masing provider

Adapun dugaan pelanggaran yang banyak ditemukan dalam program siaran LPB adalah sebagai berikut:

1. Dugaan promosi LGBT yang ditayangkan pada channel Blueand Entertainment dengan judul acara *Firstdates S7*. Program tersebut merupakan program reality show yang mempertemukan 2 orang yang apabila merasa cocok bisa terus melanjutkan hubungan. Dalam program tersebut ditampilkan kencan antara 2 orang sesama jenis, ada sesama wanita (lesbian) dan sesama pria (Gay).
2. Masih ditemukan tayangan kekerasan mengarah pada sadistik

3. Muatan seksualitas, walaupun sudah tidak vulgar seperti tahun-tahun sebelumnya, masih ditemukan adengan seksualitas yang diduga melanggar P3 dan SPS.

## Lembaga Penyiaran Digital

Televisi digital yang dimaksud dalam laporan ini adalah lembaga penyiaran digital baru yang belum dipantau oleh KPI. Pada bulan Desember 2022, dari 46 channel Televisi Digital yang sudah ditraccking oleh KPI menggunakan beberapa STB, 23 diantaranya telah dipantau secara bergantian.

Siaran televisi analog yang telah mengudara selama hampir 60 tahun di Indonesia akan digantikan oleh siaran televisi digital. Siaran televisi digital menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih, suara yang lebih jernih dan canggih teknologinya bagi masyarakat Indonesia.

Peralihan siaran digital selambat-lambatnya pada 2 Desember 2022, beralih dari siaran TV Analog atau ASO (*Analog Switch Off*) untuk selanjutnya beralih ke siaran TV Digital. sementara di area jabodetabek sendiri sudah dilakukan peralihan per tanggal 5 Desember 2022.

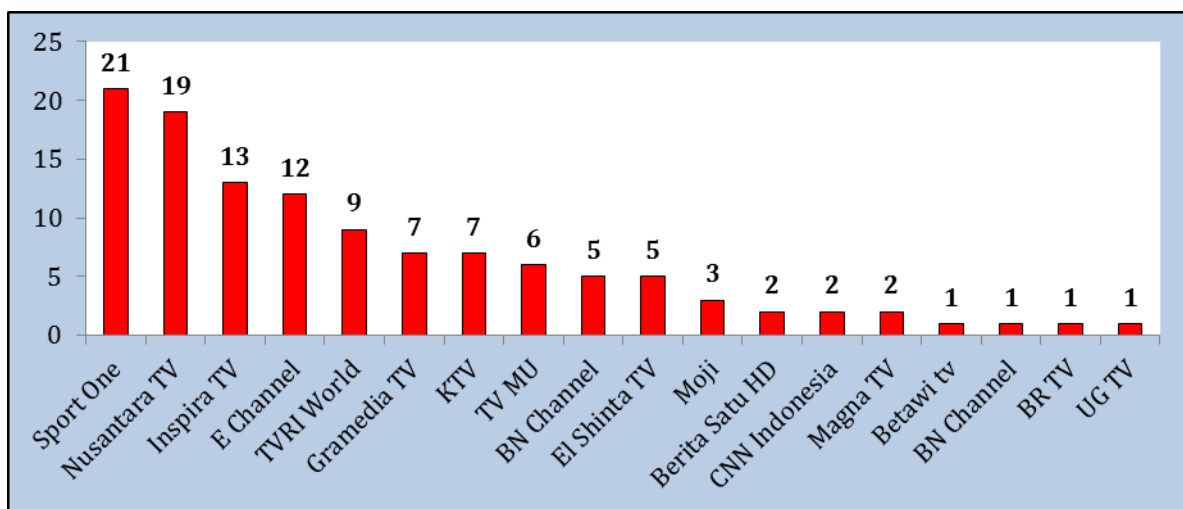
Sesuai dengan amanat UU penyiaran No 32 tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan Isi siaran. Untuk mencapai cita-cita penyiaran yang ideal dan sesuai dengan amanat UU Penyiaran pasal 8 ayat 2 huruf a hingga c, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyusun dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS) dan mengawasi pemberlakuan P3 SPS tersebut oleh Lembaga Penyiaran dalam proses memproduksi dan menayangkan program tayangannya. Sebagai bagian dari wujud untuk menjalankan amanat UU Penyiaran tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan proses pemantauan langsung terhadap Isi Siaran.



Gambar 3. Nama 46 Televisi Digital

Karena keterbatasan akses pada sistem, serta masih terbatasnya peralatan, anggaran serta SDM Pemantau yang ada. Maka pemantauan siaran digital belum dapat dilakukan secara menyeluruh/sepurna. Pemantauan TV Digital tetap dilakukan dengan sistem Rolling SDM dan Switching Channel secara berkala. Dan mulai Efektif dilakukan pemantauan per bulan September 2022. Dimana sebelumnya dilakukan penelusuran tangkapan channel oleh tim IT KPI dan perombakan jadwal dan sistem di sdm pemantauan

Selama periode September-Desember 2022, ditemukan beberapa potensi pelanggaran tayangan pada televisi digital. Berikut jumlah temuan potensi pelanggaran dari masing-masing televisi digital yang ditemuakn oleh Tenaga Pemantauan Isi Siaran:



Grafik 8. Hasil temuan dpotensi pelanggaran pada televisi digital

Sejumlah temuan dugaan pelanggaran tersebut di atas tersebar dalam berbagai jenis pelanggaran. Berikut temuan potensi pelanggaran tayangan pada TV digital berdasarkan jenis pelanggaran program siaran:

Jenis Pelanggaran	Jumlah
Seksualitas	30
STLS/Klasifikasi	20
Jurnalistik	19
Perlindungan Anak dan Remaja	15
Kekerasan	9
perlindungan kepentingan publik	7
Kata kasar/makian	6
Rokok, NAPZA dan Minuman beralkohol	4

<b>Privasi</b>	3
<b>Mistik, Horor dan Supranatural</b>	2
<b>Perlindungan Kelompok Masyarakat Tertentu</b>	1
<b>SARA</b>	1

Tabel 6. Hasil temuan potensi pelanggaran pada televisi digital berdasarkan jenis pelanggaran

### C. PENGHITUNGAN PROSENTASE IKLAN

Iklan Televisi di Indonesia sangat berkaitan erat dengan perilaku pemirsa sebagai sasaran konsumen sebuah produk. Iklan adalah bagian dari bauran promosi (*promotion mix*) dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran (*marketing mix*). Secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Sedangkan periklanan (advertising) adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi nonpribadi dalam bentuk gagasan, barang atau jasa (Kotler and Armstrong, 2002:153).

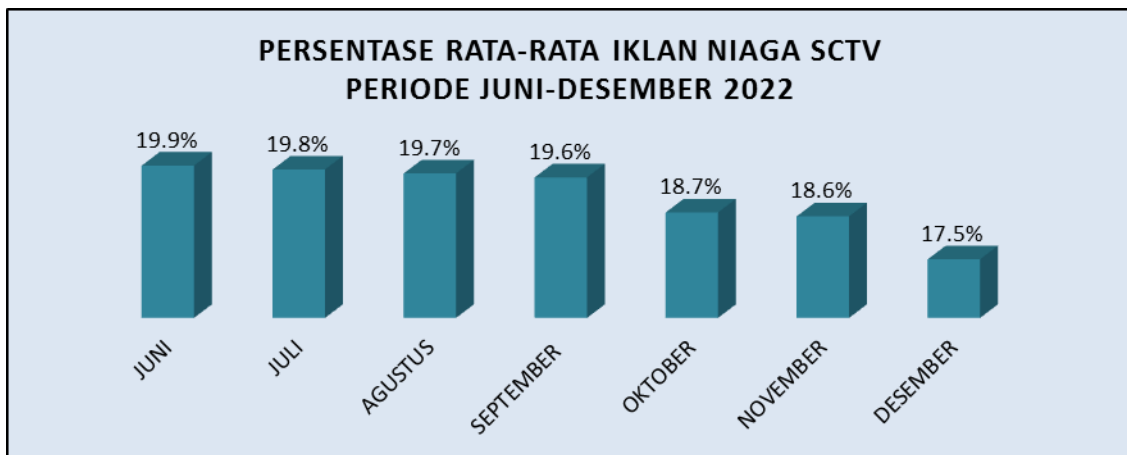
Iklan di Televisi (TV) memiliki kelebihan dibanding dengan media promosi lainnya, yaitu produk dapat ditunjukkan dan diterangkan pada waktu yang bersamaan, dapat menjangkau wilayah geografis yang sangat luas dan fleksibel dalam penyampaian pesan. Pada prinsipnya, perilaku iklan TV dapat kita bandingkan pada masing-masing tv tersebut. Khusus di Indonesia, TV berjangkauan swasta terdapat 14 TV yang dipantau Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP). Dalam hal ini, dapat dipetakan perilaku iklan pada masing-masing TV.

Iklan niaga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi lembaga penyiaran Televisi di Indonesia. Untuk itu, iklan sangat penting untuk keberlangsungan bisnis siaran televisi. Saat ini di Indonesia, penayangan iklan niaga pada lembaga penyiaran Televisi diatur dalam regulasi penyiaran dalam peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). Yang tertulis dalam Pasal 58 SPS ayat (2) menyatakan bahwa Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari.

#### 1. SCTV

SCTV (singkatan dari Surya Citra Televisi) adalah sebuah jaringan televisi swasta nasional di Indonesia. Kepemilikan SCTV dikuasai oleh grup Elang Mahkota Teknologi

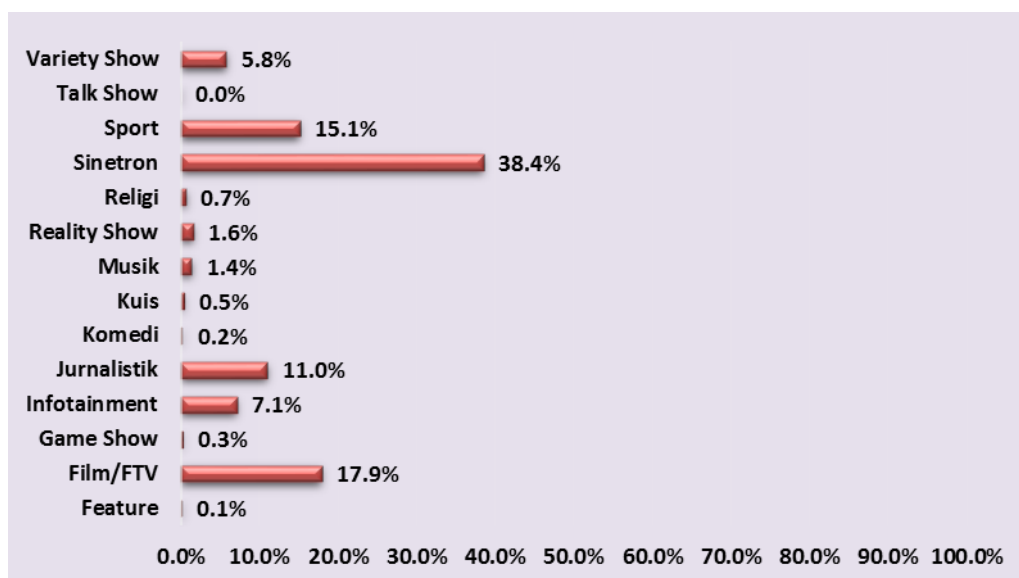
(EMETK) melalui Surya Citra Media (SCM). Berikut persentase rata-rata iklan niaga SCTV pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 9. Presentase rata-rata iklan niaga SCTV, periode Juni- Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran SCTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

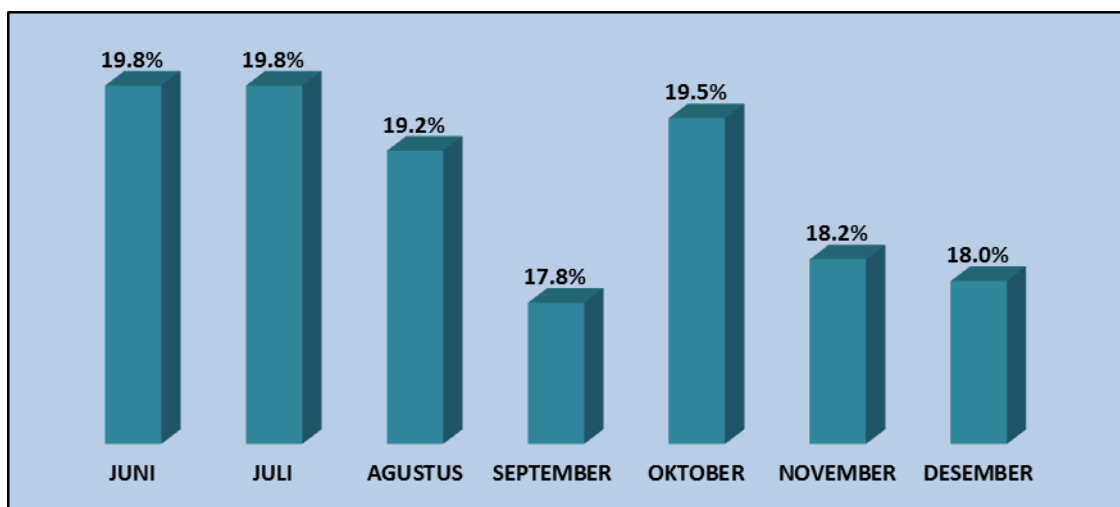


Grafik 10 : Sebaran Iklan Niaga SCTV pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di SCTV, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program sinetron. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara sinetron yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran SCTV di tahun 2022.

## 2. NET.

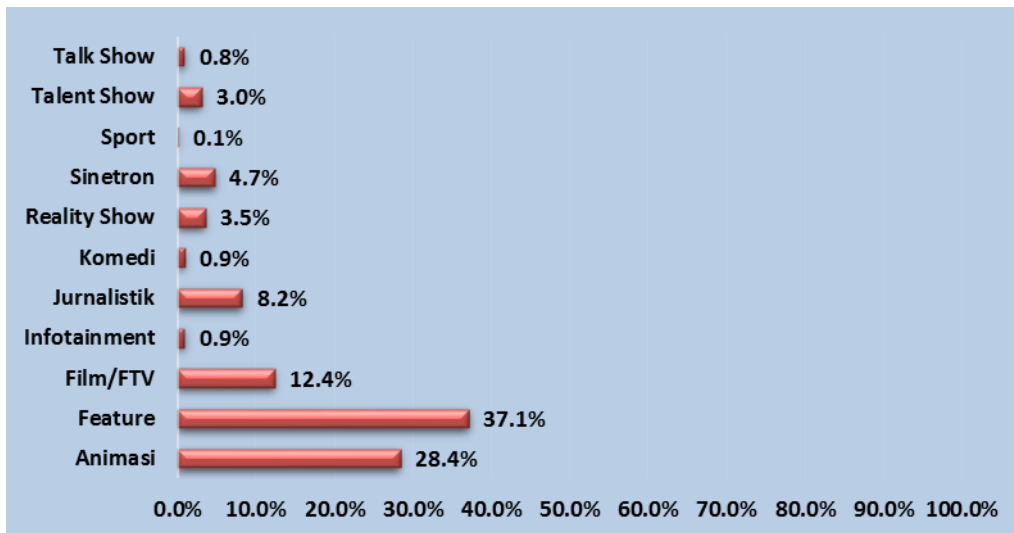
NET. (singkatan dari News and Entertainment Television) adalah sebuah stasiun televisi nasional di Indonesia yang sebagian sahamnya sebesar 95% telah diambil alih oleh Indika Group. NET. Memiliki slogan *Kini Makin Asik* sejak 1 Januari 2022-sekarang. Berikut persentase rata-rata iklan niaga NET pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 11 : Presentase rata-rata iklan niaga NET., periode Juni – Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran NET. masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

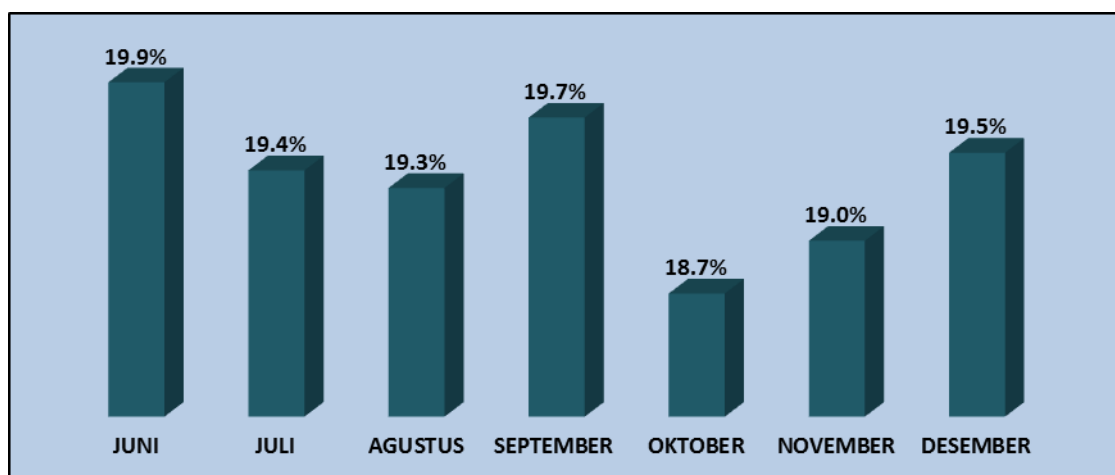


Grafik 12: Sebaran Iklan Niaga NET. pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di NET, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program feature. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori feature yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran NET di tahun 2022.

### 3. ANTV

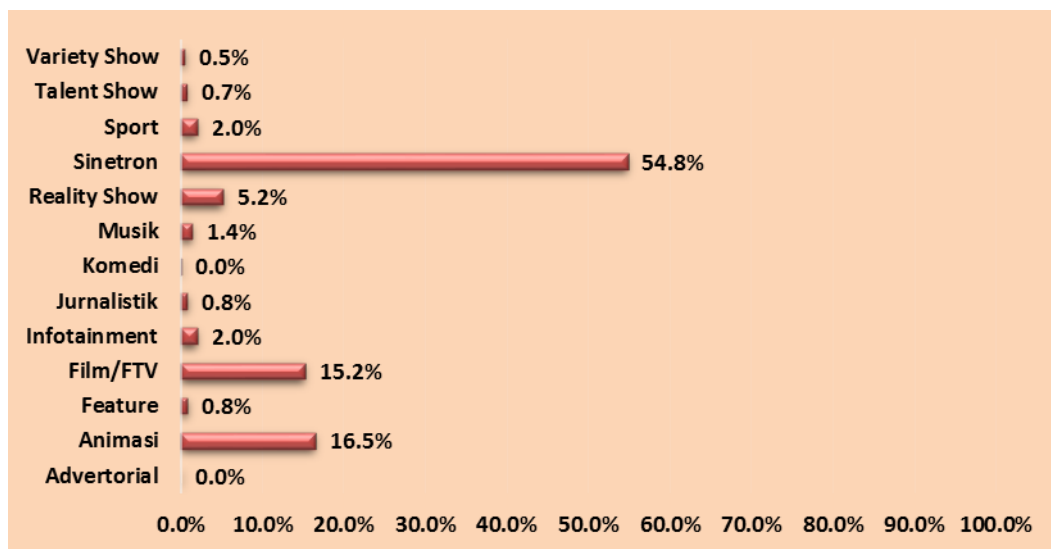
ANTV adalah sebuah jaringan televisi swasta nasional di yang berhasil menayangkan sinteron India dan bertahan lama. Bahkan, program tersebut mampu mendorong *rating* ANTV yang sebelumnya di papan tengah menjadi nomor 1, dan jelas tentu saja juga menaikkan pemasukan iklannya. Berikut persentase rata-rata iklan niaga ANTV pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 13 : Persentase rata-rata iklan niaga ANTV, periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran ANTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

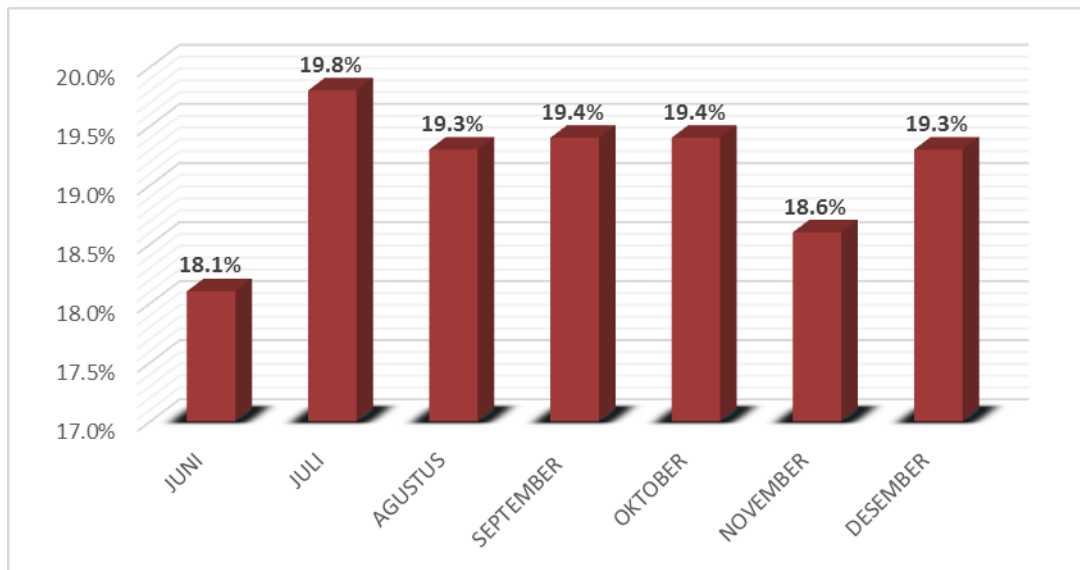


Grafik 14 : Sebaran Iklan Niaga ANTV pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di ANTV, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program sinetron. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori sinetron dari produksi India yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran ANTV di tahun 2022.

#### 4. RTV

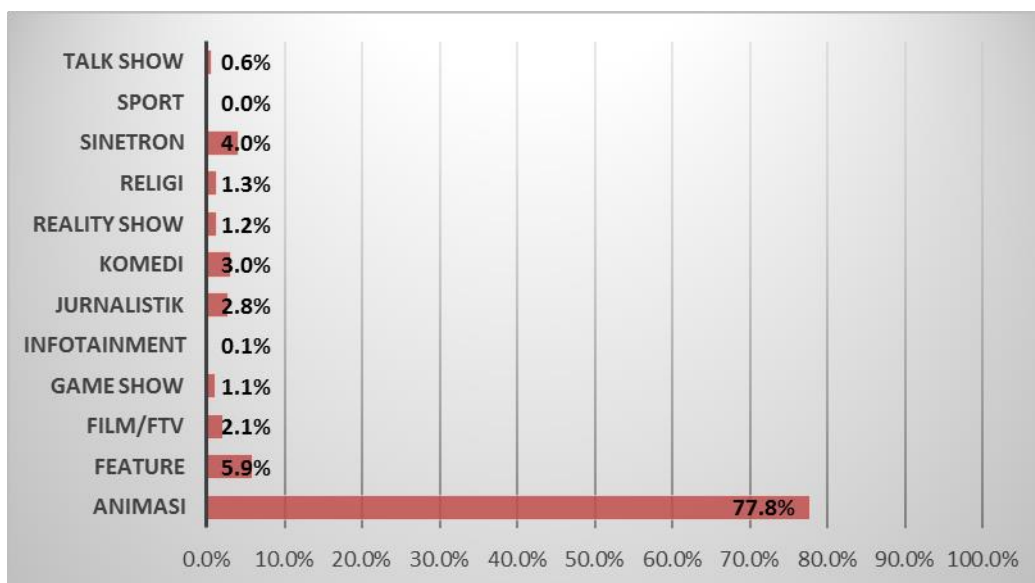
Rajawali Televisi (RTV) adalah sebuah jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Rajawali Corpora. Saat ini, program RTV sendiri lebih difokuskan pada acara hiburan, terutama untuk anak-anak dan keluarga. Berikut persentase rata-rata iklan niaga RTV pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 15 : Persentase rata-rata Iklan Niaga RTV, Periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran RTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.



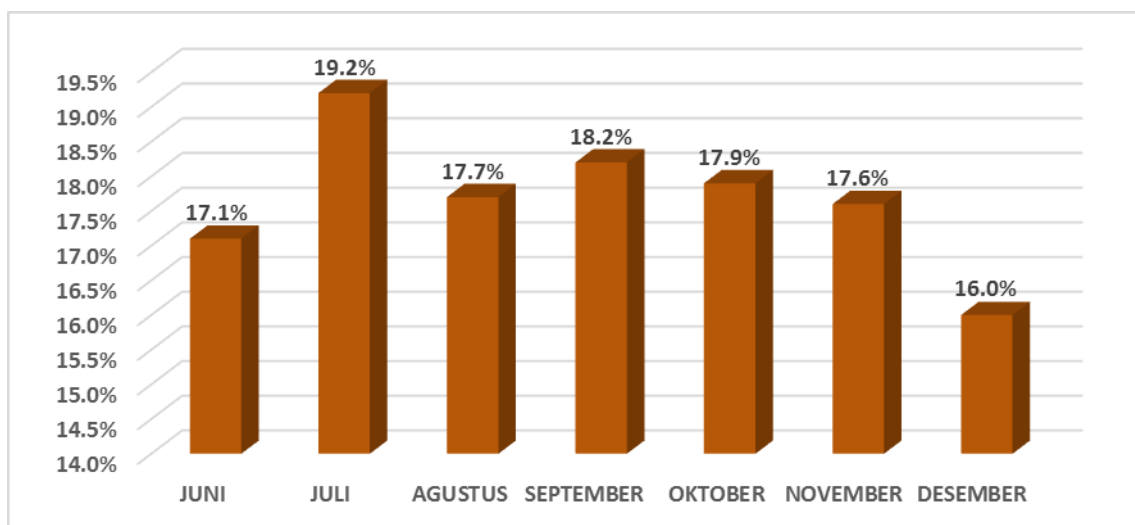
Grafik 16 : Sebaran Iklan Niaga RTV pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di RTV, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program animasi. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori animasi yang

ditayangkan oleh lembaga penyiaran RTV, bahkan RTV mendeklarasikan sebagai TV Keluarga yang ramah anak di tahun 2022.

## 5. TRANS 7

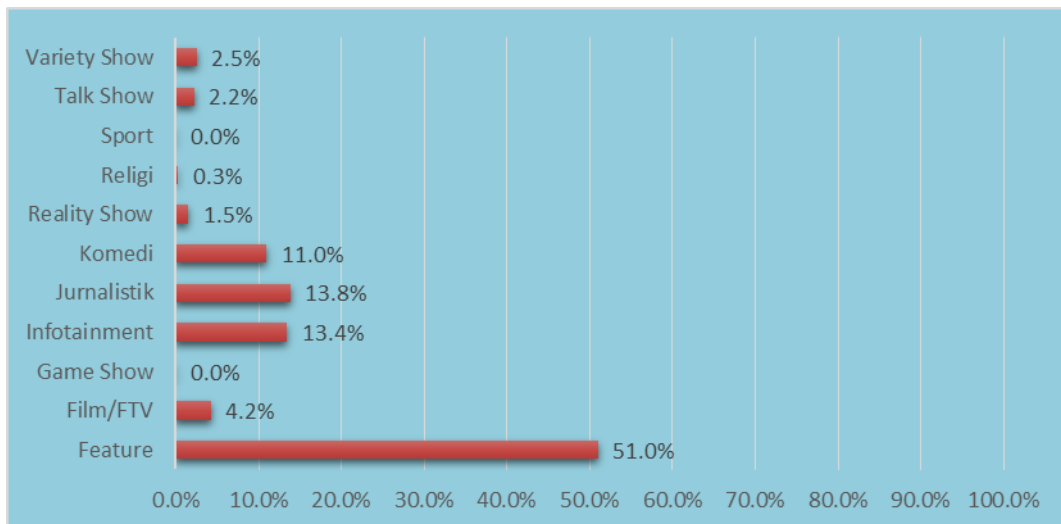
Trans7 adalah sebuah jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Trans Media dengan moto *Milik Kita Bersama*. Trans7 adalah anak perusahaan dari Trans Media dengan Induk Perusahaan Trans Corp dan kelompok usaha CT Corp. Berikut persentase rata-rata iklan niaga TRANS7 pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 17 : Persentase rata-rata iklan niaga Trans7, periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran TRANS7 masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

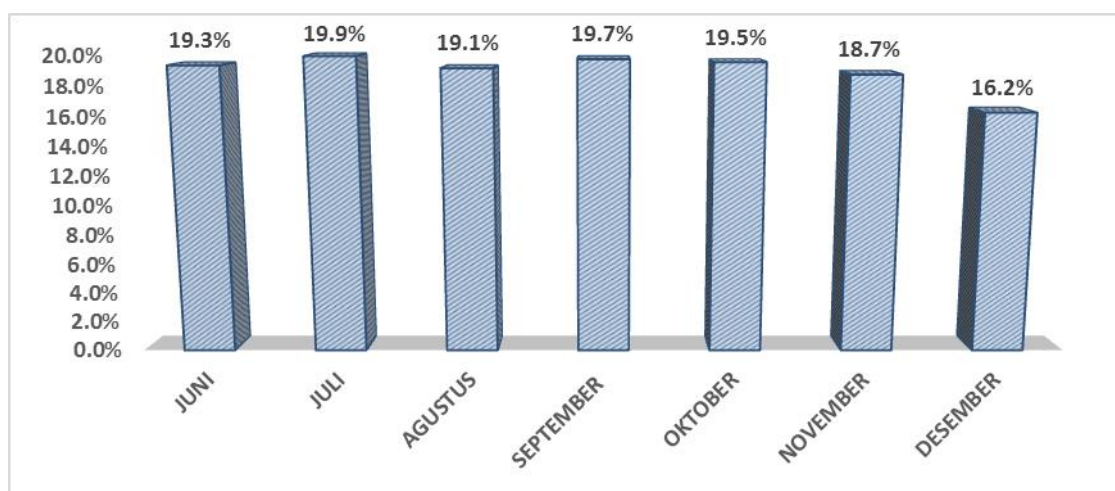


Grafik 18 : Sebaran Iklan Niaga Trans7 pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di TRANS7, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program feature. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori feature yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran TRANS7 di tahun 2022. Bahkan, TRANS7 banyak mendapatkan penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terkait program unggulannya.

## 6. MNCTV

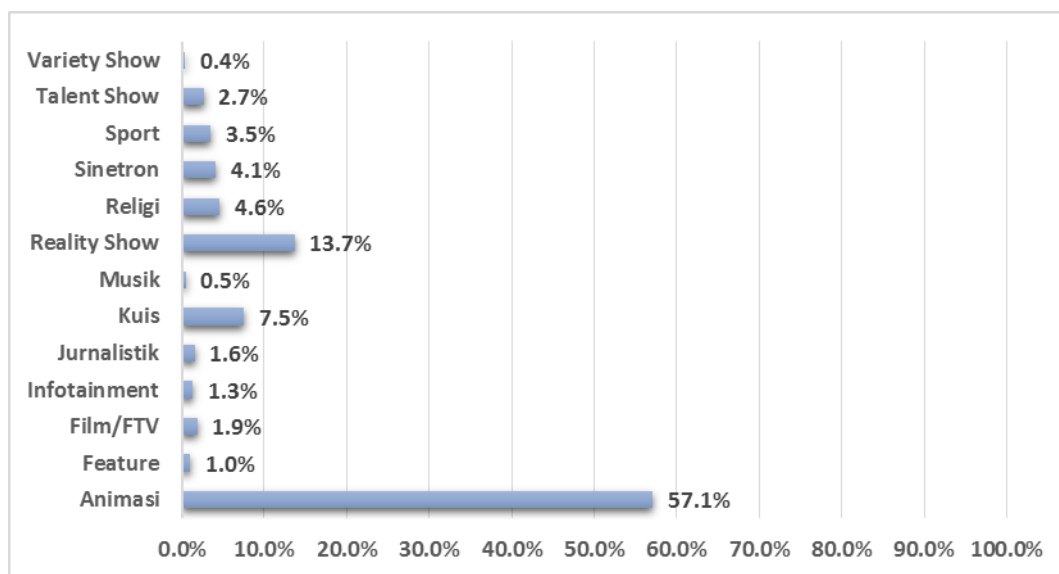
MNCTV singkatan dari Media Nusantara Citra Televisi yang sebagian besar dimiliki Media Nusantara Citra dengan Induk perusahaan Global Mediacom dan kelompok usaha MNC Corporation. Berikut persentase rata-rata iklan niaga MNCTV pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 19 : Persentase rata-rata iklan niaga MNCTV, periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran MNCTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

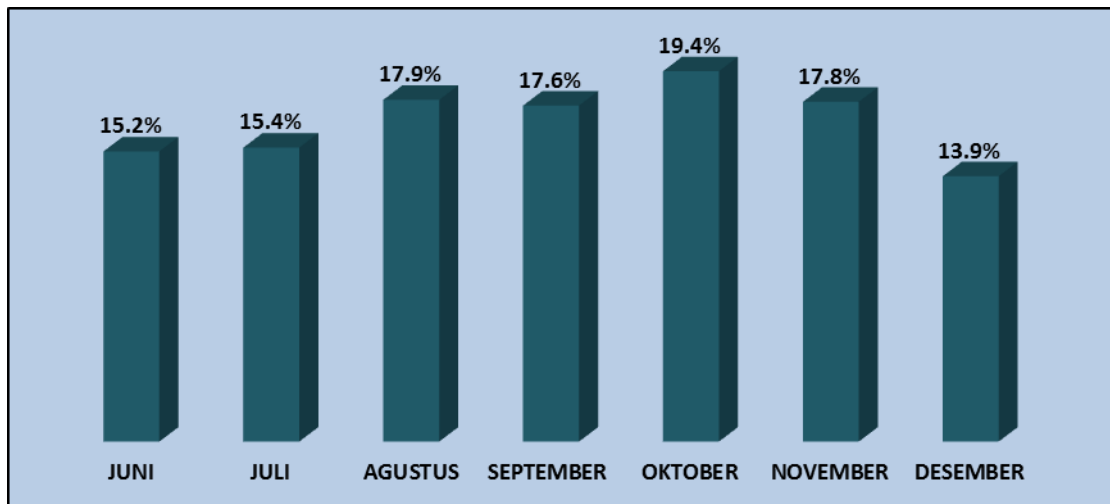


Grafik 20 : Sebaran Iklan Niaga MNCTV pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di MNCTV, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program animasi. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori animasi dari Malaysia yaitu Upin dan Ipin yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran MNCTV di tahun 2022.

## 7. TRANSTV

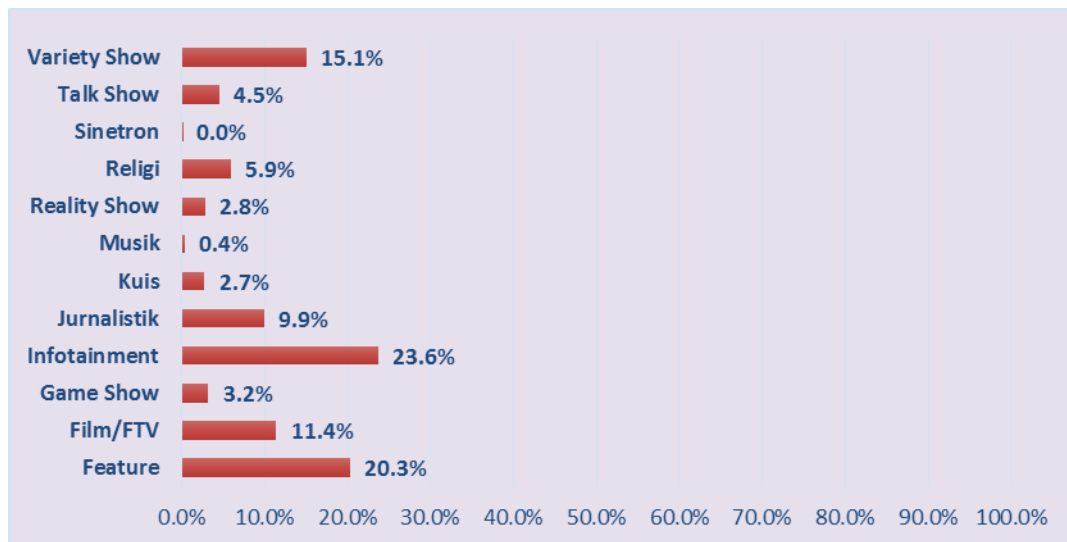
Televisi Transformasi Indonesia (TRANSTV) adalah sebuah jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Trans Media dengan moto *Milik Kita Bersama*. Trans7 adalah anak perusahaan dari Trans Media dengan Induk Perusahaan Trans Corp dan kelompok usaha CT Corp. Berikut persentase rata-rata iklan niaga TRANSTV pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 21 : Persentase rata-rata iklan niaga Trans TV, periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran TRANSTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

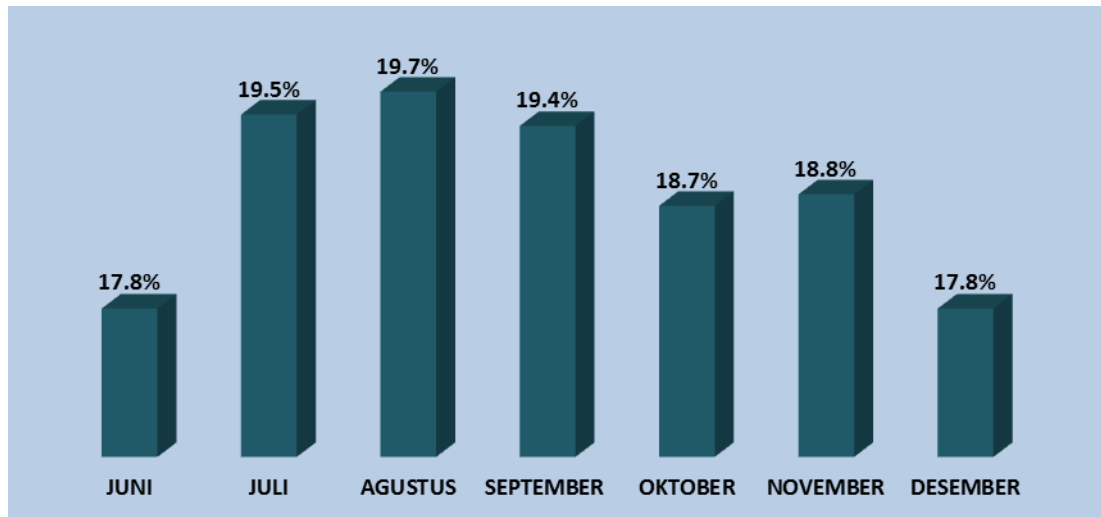


Grafik 22 : Sebaran Iklan Niaga TransTV pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di TRANSTV, rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program infotainment atau berita selebriti. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori infotainment berjudul Insert yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran TRANSTV di tahun 2022.

## 8. INDOSIAR

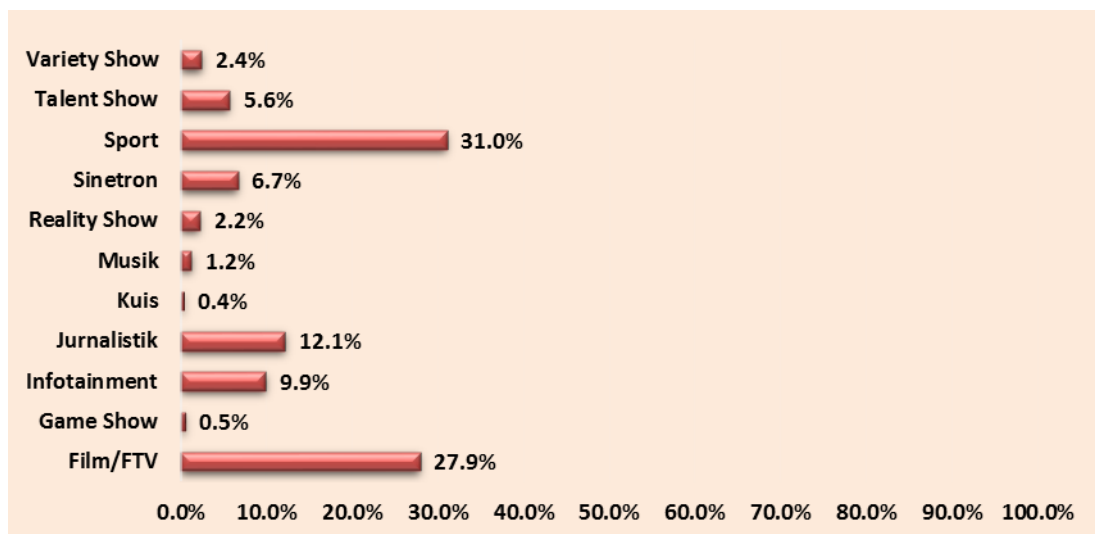
Indosiar adalah salah satu stasiun televisi swasta Indonesia yang dimiliki oleh Surya Citra Media (SCM) dengan Induk Perusahaan PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. Berikut persentase iklan niaga di Indosiar pada Oktober 2022. Berikut persentase rata-rata iklan niaga INDOSIAR pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 23 : Persentase rata-rata iklan niaga Indosiar, periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran INDOSIAR masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

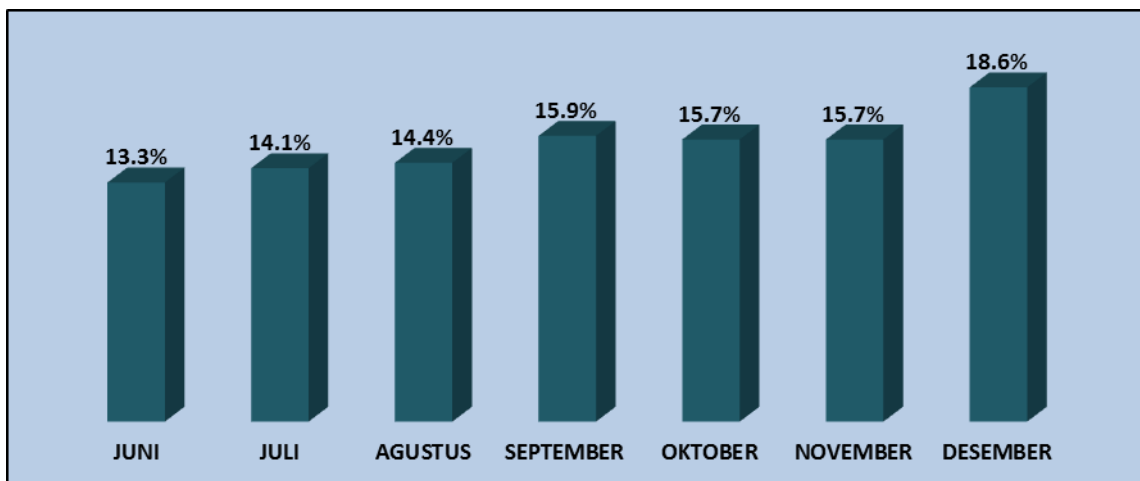


Grafik 24 : Sebaran Iklan Niaga Indosiar pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di INDOSIAR rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program Film/FTV dan Sport. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori Film/FTV Pintu Berkah, Kisah Nyata, dan Catatan hati Istri dan Sport yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran INDOSIAR di tahun 2022.

## 9. GTV

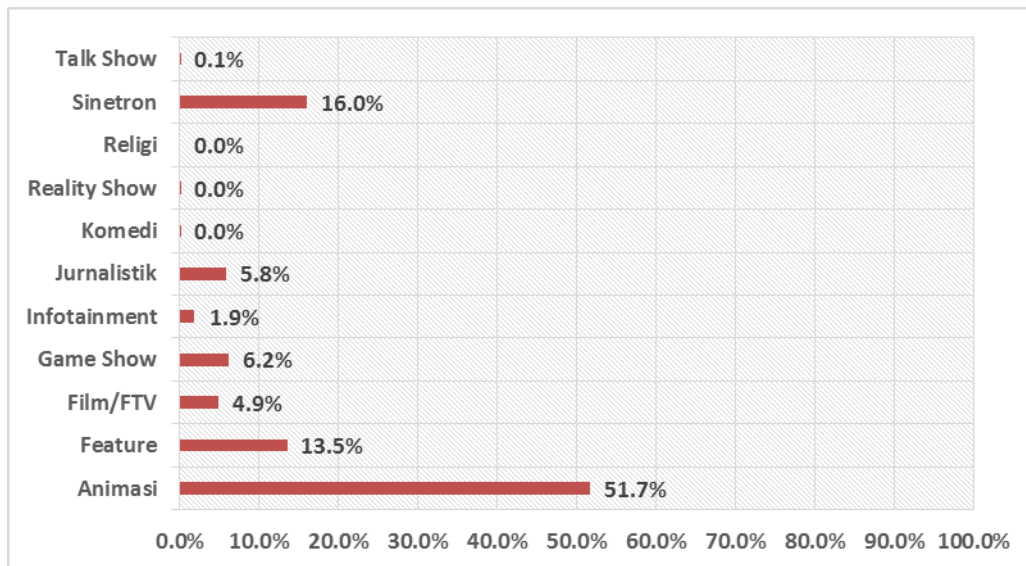
GTV adalah salah satu jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang dimiliki oleh Media Nusantara Citra (MNC) dengan induk perusahaan Global Mediacom dan kelompok usaha MNC Corporation. Berikut persentase rata-rata iklan niaga GTV pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 25 : Persentase rata-rata iklan niaga GTV, periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran GTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

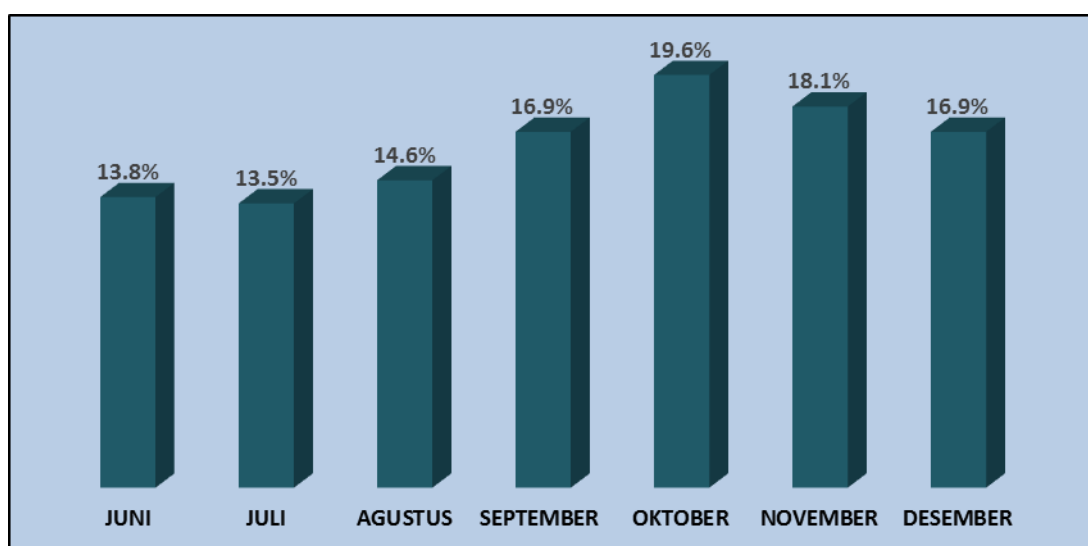


Grafik 26 : Sebaran Iklan Niaga GTV pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di GTV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program animasi. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori animasi Spongebob yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran GTV di tahun 2022.

## 10. RCTI

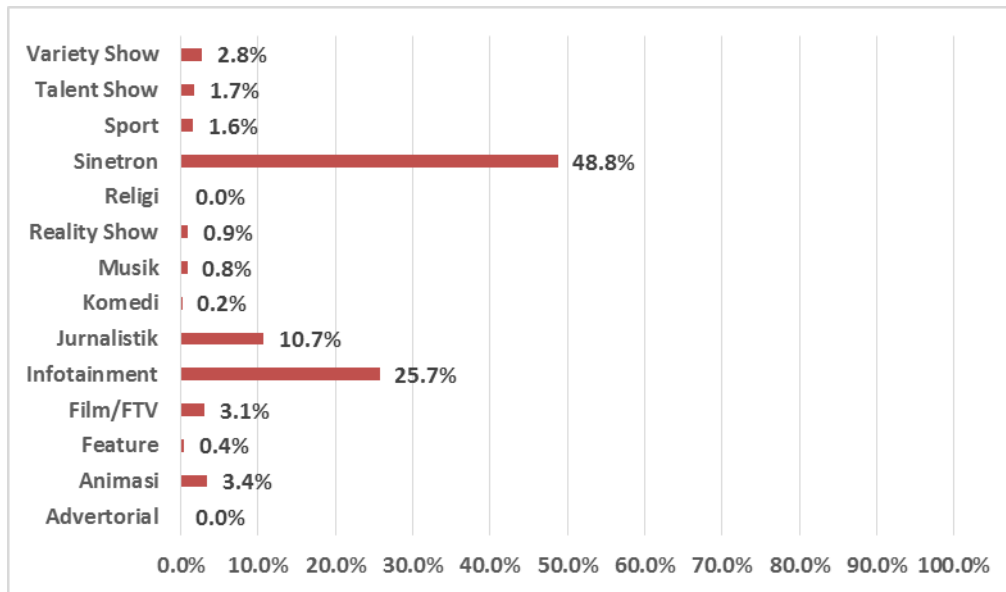
Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) adalah salah satu jaringan televisi swasta di Indonesia yang dimiliki oleh Media Nusantara Citra (MNC) dengan Induk Perusahaan Global Mediacom dan kelompok usaha MNC Corporation. Berikut persentase rata-rata iklan niaga RCTI pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 27 : Persentase rata-rata iklan niaga RCTI, periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran RCTI masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

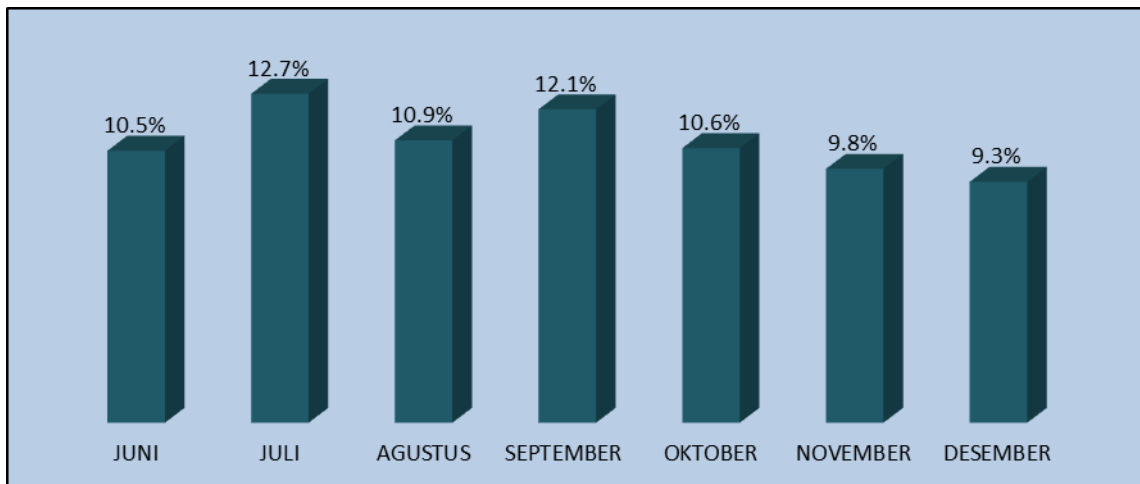


Grafik 28 : Sebaran Iklan Niaga RCTI pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di RCTI rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program sinetron. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori sinetron yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran RCTI di tahun 2022.

## 11. KOMPASTV

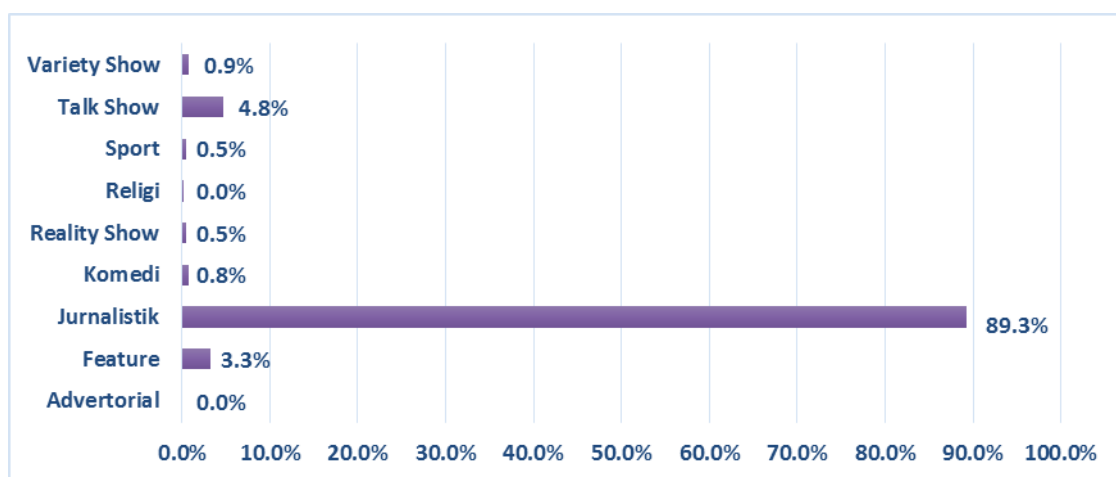
Kompas TV adalah salah satu jaringan televisi swasta nasional di Indonesia yang berfokus pada konten berita. Kompas TV dimiliki oleh KG Media, anak usaha Kompas Gramedia. Berikut persentase rata-rata iklan niaga KOMPASTV pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 29 : Persentase rata-rata iklan niaga KompasTV, periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran KOMPASTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

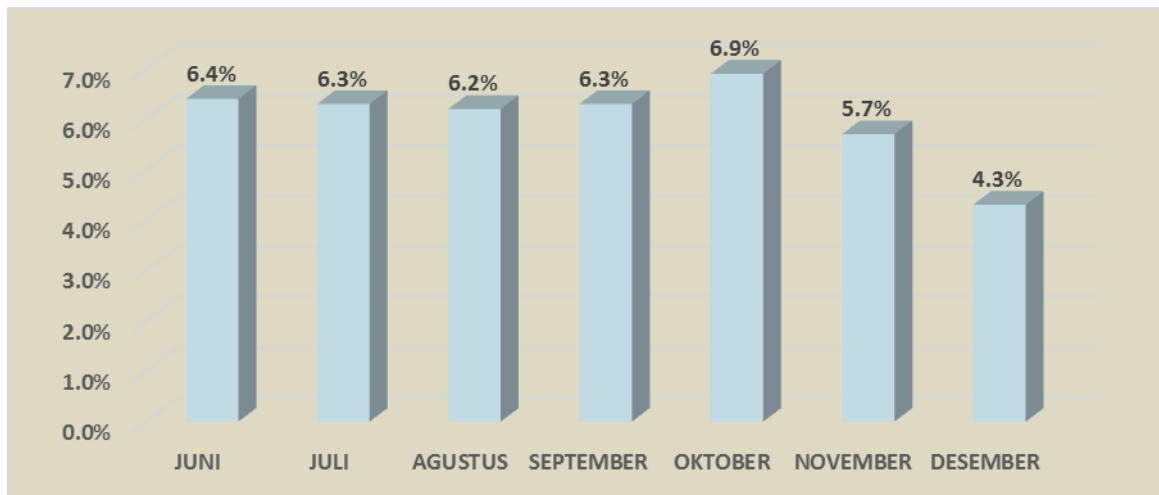


Grafik 30 : Sebaran Iklan Niaga KompasTV pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di KOMPASTV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori jurnalistik yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran KOMPASTV di tahun 2022. Bahkan, TV ini dikenal dengan TV Berita.

## 12. METROTV

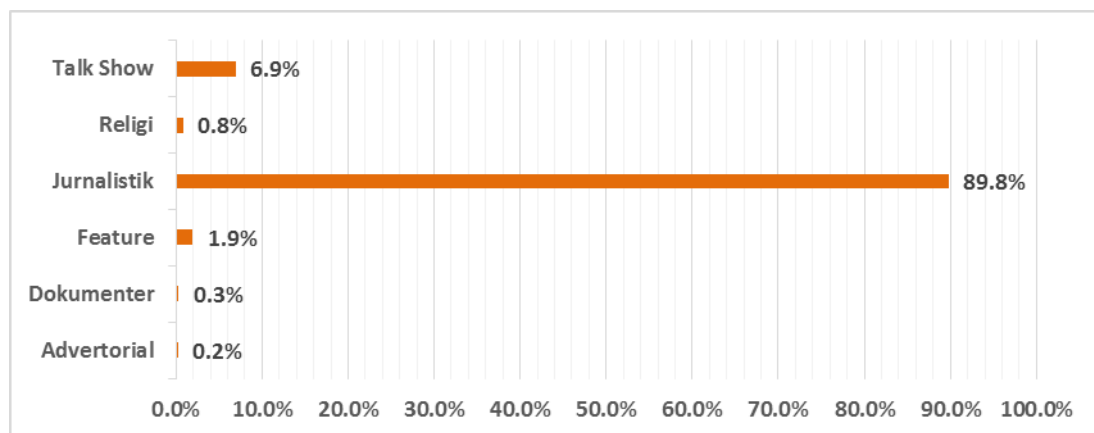
MetroTV adalah sebuah jaringan televisi swasta yang didirikan oleh PT Media Televisi Indonesia. Metro TV adalah anak perusahaan dari MEDIA GROUP yang mendeklarasikan sebagai TV berita. Berikut persentase rata iklan niaga METROTV pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 31 : Persentase rata-rata iklan niaga MetroTV, periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran METROTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

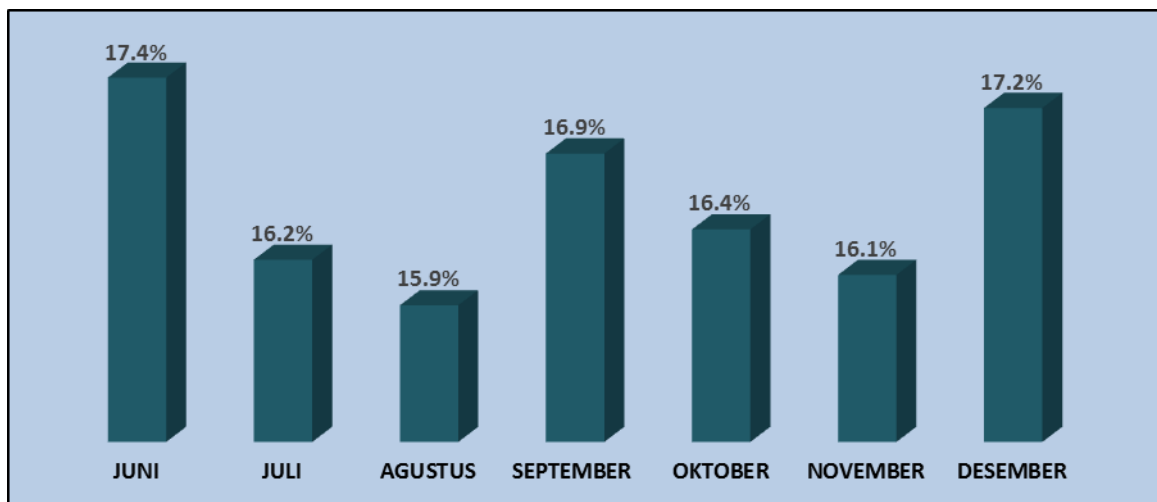


Grafik 32 : Sebaran Iklan Niaga MetroTV pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di METROTV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori jurnalistik yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran METROTV di tahun 2022. Bahkan, TV ini dikenal dengan TV Berita milik Media Group.

### 13. TVONE

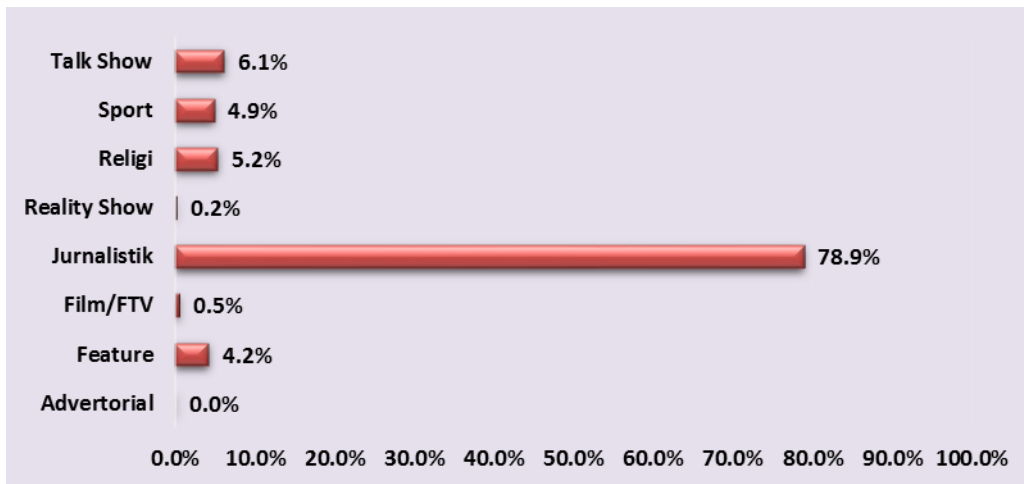
TVOne adalah sebuah jaringan televisi nasional di Indonesia yang berfokus pada konten berita yang dimiliki oleh Visi Media Asia dengan induk perusahaan Bakrie Group dengan tagline “Memang Beda”. Berikut persentase rata-rata iklan niaga TVONE pada periode Juni - Desember 2022.



Grafik 33 : Persentase rata-rata iklan niaga TVOne, periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran TVONE masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.

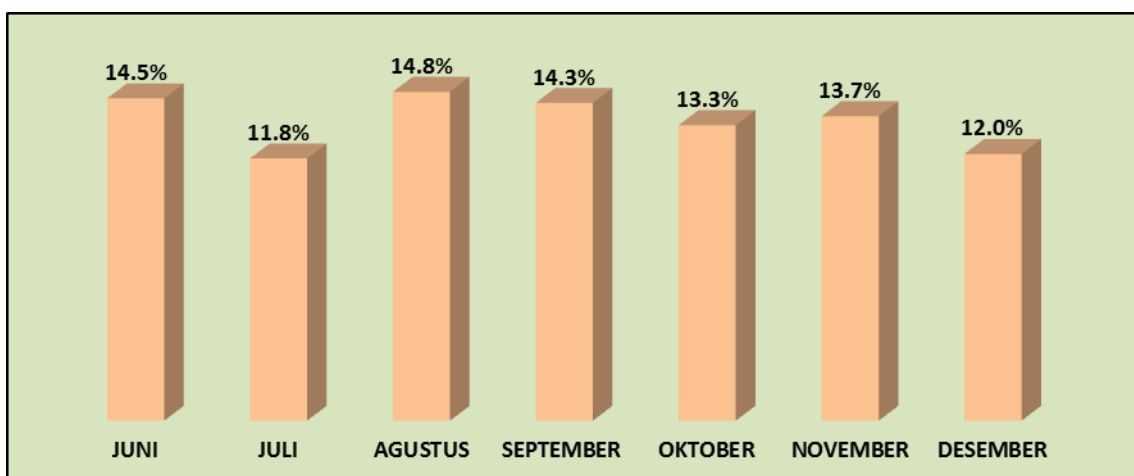


Grafik 34 : Sebaran Iklan Niaga TVOne pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di TVONE rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori jurnalistik yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran TVONE di tahun 2022. Bahkan, TV ini dikenal dengan TV Berita milik VIVA Group.

#### 14. INEWSTV

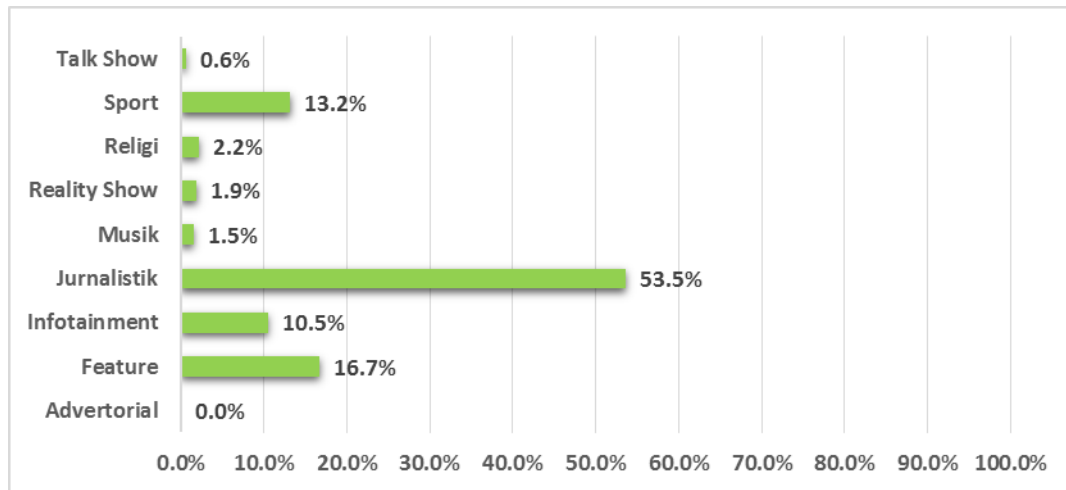
iNews adalah jaringan televisi swasta yang fokus pada konten berita selama 24 jam di Indonesia milik Media Nusantara Citra (MNC) dengan induk perusahaan Global Mediacom dan bagian dari kelompok MNC Corporation. Berikut persentase rata-rata iklan niaga INEWSTV pada Desember 2022.



Grafik 35 : Persentase rata-rata iklan niaga iNewsTV, periode Juni-Desember 2022

Jika mengacu pada Pasal 58 SPS ayat (2) bahwa program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari, maka lembaga penyiaran INEWSTV masih kategori aman atau tidak melanggar batas yang ditetapkan lebih dari 20%.

Untuk melihat sebaran persentase ke dalam kategori program, maka akan terpetakan sebagai berikut.



Grafik 36 : Sebaran Iklan Niaga iNewsTV pada Kategori Program

Sebaran iklan niaga di INEWSTV rata-rata bersiaran paling banyak pada jenis kategori program jurnalistik. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah acara kategori jurnalistik yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran INEWSTV di tahun 2022. Bahkan, TV ini dikenal dengan TV Berita milik MNC Group.

#### D. PENILAIAN PROGRAM SIARAN

Lembaga penyiaran yang diberikan penilaian program masih pada 15 lembaga penyiaran yang dipantau selama 24 jam. Instrumen ini dibuat untuk memberikan penilaian terhadap setiap program siaran yang ditayangkan secara reguler di setiap lembaga penyiaran. Penilaian dilakukan dengan memberikan score 1- 10 pada setiap akhir program tersebut ditayangkan setiap harinya. Hasil penilaian akan dijumlahkan dan dirata-rata (dengan pembulatan) pada setiap minggu untuk selanjutnya dipublikasikan sebagai panduan menonton bagi masyarakat.

Aspek penilaian meliputi:

1. KENYAMANAN : dinilai berdasarkan jumlah potensi pelanggaran (*tagging*) yang ditemukan dalam sebuah program siaran dengan ketentuan sbb:

Score 10 : 0 potensi pelanggaran  
Score 9 : 1 potensi pelanggaran  
Score 8 : 2 potensi pelanggaran  
Score 7 : 3 potensi pelanggaran  
Score 6 : 4 potensi pelanggaran  
Score 5 : 5 potensi pelanggaran  
Score 4 : 6 potensi pelanggaran  
Score 3 : 7 potensi pelanggaran  
Score 2 : 8 potensi pelanggaran  
Score 1 : 9 potensi pelanggaran  
Score 0 :  $\geq 10$  potensi pelanggaran

2. **KELAYAKAN** : khusus diberikan terhadap program siaran yang ditayangkan pada pukul 05.00-22.00 sebagai wujud perlindungan terhadap anak-anak (2-12th) dan remaja sebagaimana dimaksudkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kelayakan/keramahan suatu program ditonton oleh anak-anak dan remaja. Standar penilaian dibagi menjadi dua segmen:

- a. *Standar anak-anak*: diterapkan terhadap program siaran yang ditayangkan pada pk. 05.00 – 18.00  
b. *Standar remaja*: diterapkan terhadap program siaran yang ditayangkan pada pk.18.00 – 22.00

Aspek penilaian ini lebih mengacu pada jam tayang dan tanpa memperhatikan label klasifikasi yang disematkan pada setiap program yang ditayangkan (P/A/R)

Penilaian diberikan selain berdasarkan *potensi pelanggaran yang ditemukan* (aspek kenyamanan), juga mencakup: *kesesuaian tema/pokok materi, adegan, cara berpakaian, tutur kata, dan iklan*

3. **KEMANFAATAN** : diukur berdasarkan indikator: *muatan pendidikan, informasi, perekat dan kontrol sosial (kebangsaan), budaya, serta dampak ekonomi bagi objek dan wilayah ttt*. Aspek-aspek penilaian ini tidak harus keseluruhan ada dalam setiap program, namun dapat pula dilihat dari aspek yang menonjol dari salah satu aspek tsb.
4. **KEMENARIKAN** : diukur berdasarkan indikator: *nilai hiburan (yang sehat), kreativitas, kebaruan, dan keindahan* dalam setiap program

Berikut hasil penilaian program siaran periode Januari-Desember 2022:

LP	Kenyamanan	Kelayakan	Kemanfaatan	Kemenarikan	Rata-Rata
TVRI	8,4	7,9	7,8	7,7	7,9
METRO TV	8,4	7,7	7,7	7,5	7,8
RTV	8,5	7,9	7,4	7,4	7,8
RCTI	8,5	7,8	7,3	7,4	7,8
KOMPAS TV	8,3	7,7	7,6	7,4	7,8
TV ONE	8,1	7,7	7,6	7,3	7,7
TRANS 7	8,3	7,6	7,4	7,4	7,6
NET.	8,2	7,6	7,3	7,4	7,6
MNC TV	7,8	7,5	7,3	7,2	7,5
iNEWS TV	8,1	7,5	7,2	7,0	7,4
TRANS TV	8,0	7,4	7,1	7,1	7,4
SCTV	8,2	7,4	7,0	7,0	7,4
INDOSIAR	7,9	7,3	7,0	7,1	7,3
GTV	7,8	7,3	6,7	6,8	7,1
AN TV	7,6	7,1	6,6	6,7	7,0

Tabel 7. Hasil Penilaian Program Siaran Periode Januari-Desember 2022

Hasil penilaian terhadap seluruh program siaran periode Januari-Desember 2022 di atas menunjukkan bahwa:

1. **KENYAMANAN:** Hasil penilaian kenyamanan program siaran menunjukkan angka yang baik, 7,6 – 8,5. Nilai tersebut memberikan gambaran bahwa dalam setiap masing-masing program siaran yang ditayangkan ditemukan rata-rata 2 s/d 3 dugaan pelanggaran saja. Angka ini menunjukkan trend positif di mana lembaga penyiaran sudah semakin mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
2. **KELAYAKAN:** Hasil penilaian terhadap kelayakan program siaran menunjukkan angka dengan 7,1 – 7,9. Nilai tersebut menunjukkan *kesesuaian tema/pokok materi, adegan, cara berpakaian, tutur kata, dan iklan* pada program siaran yang ditayangkan di lembaga penyiaran televisi cukup sesuai dengan sebaran jam tayang yang diutamakan bagi khalayak penonton anak dan remaja.
3. **KEMANFAATAN:** Hasil penilaian terhadap aspek kemanfaatan menunjukkan angka 6,6-7,8. Nilai ini menunjukkan beberapa lembaga penyiaran sudah cukup memenuhi muatan pendidikan, informasi, perekat dan kontrol sosial (kebangsaan), budaya, serta dampak ekonomi bagi objek dan wilayah tertentu. Akan tetapi, masih ditemukan lembaga penyiaran dengan nilai kemanfaatan di bawah 7. Hal ini tentunya menjadi cacatan penting bagi lembaga penyiaran tersebut agar ke depan bisa menyajikan program siaran yang memenuhi unsur penilaian kemanfaatan dari sebuah program siaran.

4. **KEMENARIKAN:** Hasil penilaian terhadap aspek kemenarikan menunjukkan angka 6,7-7,7. Nilai tersebut menunjukkan beberapa lembaga penyiaran televisi sudah cukup kreatif menyajikan program siaran yang menghibur dengan konsep baru. Akan tetapi, masih ditemukan juga lembaga penyiaran dengan nilai kemenarikan di bawah 7. Nilai tersebut menjadi catatan bagi lembaga penyiaran tersebut agar mampu menghadirkan program siaran dengan nilai hiburan (yang sehat), kreativitas, kebaruan, dan keindahan dalam setiap program siaran.

## **II. PENGADUAN PENYIARAN TAHUN 2019-2022**

### **I. Prosedur Pengaduan Penyiaran**

Sebagaimana bunyi Pasal 8 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (Undang-Undang Penyiaran), salah satu tugas KPI adalah menampung, meneliti, menindaklanjuti pengaduan, sanggahan dan kritik serta apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Tugas ini dilaksanakan dalam rangka menjaga dan melindungi publik dari dampak-dampak media penyiaran. Secara operasional, tugas ini dikoordinasikan penanganannya oleh bidang Pengawasan Isi Siaran dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;
2. Kajian dan monitoring, verifikasi terhadap sanggahan, kritik dan apresiasi, serta;
3. Menindaklanjuti pengaduan yang memiliki *legal standing* untuk ditangani.

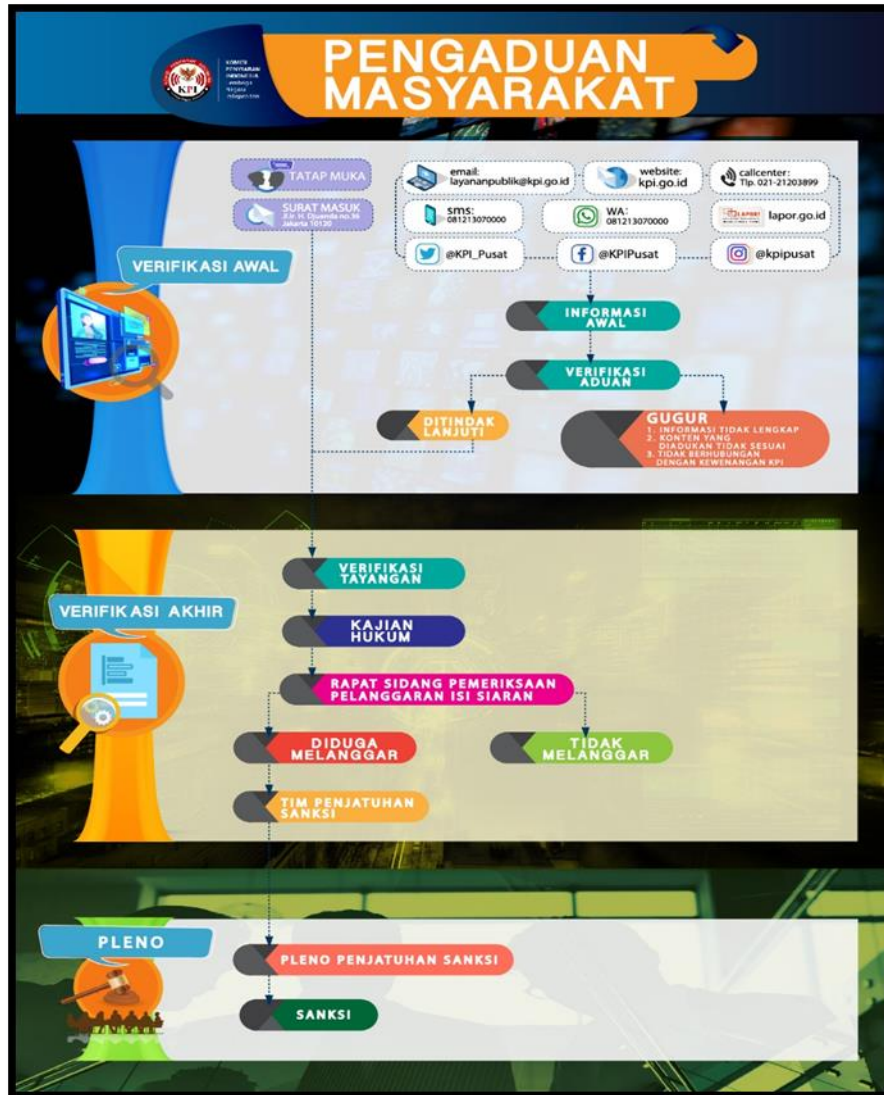
Yang dimaksud dengan pengaduan yang memiliki "*legal standing*" adalah pengaduan yang diduga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Jika pengaduan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran, maka akan diklasifikasikan sebagai jenis pengaduan yang tidak memiliki *legal standing*. Oleh karena itu, jenis pengaduan ini tidak termasuk dalam penanganan sebagaimana yang diatur dalam tata acara pengaduan penyiaran.

Gambaran mengenai bagaimana pola pengaduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti pada tahun 2019-2022 tersaji di bagian ini. Secara berturut-turut deskripsi mengenai pola pengaduan dan penanganannya disajikan dengan beberapa variasi:

- a) Jumlah data berdasarkan saluran pengaduan yang digunakan;
- b) Jumlah data berdasarkan pengaduan substansi yang diadakan;
- c) Jumlah pengaduan menurut media sebagai obyek pengaduan;

d) Data pengaduan menurut program siaran dan kategori genre program siaran yang diadakan.

Gambaran mengenai pola pengaduan dan penanganannya dapat dilaporkan sebagai berikut:



Gambar 4: Prosedur dan Tindak Lanjut Pengaduan Penyiaran

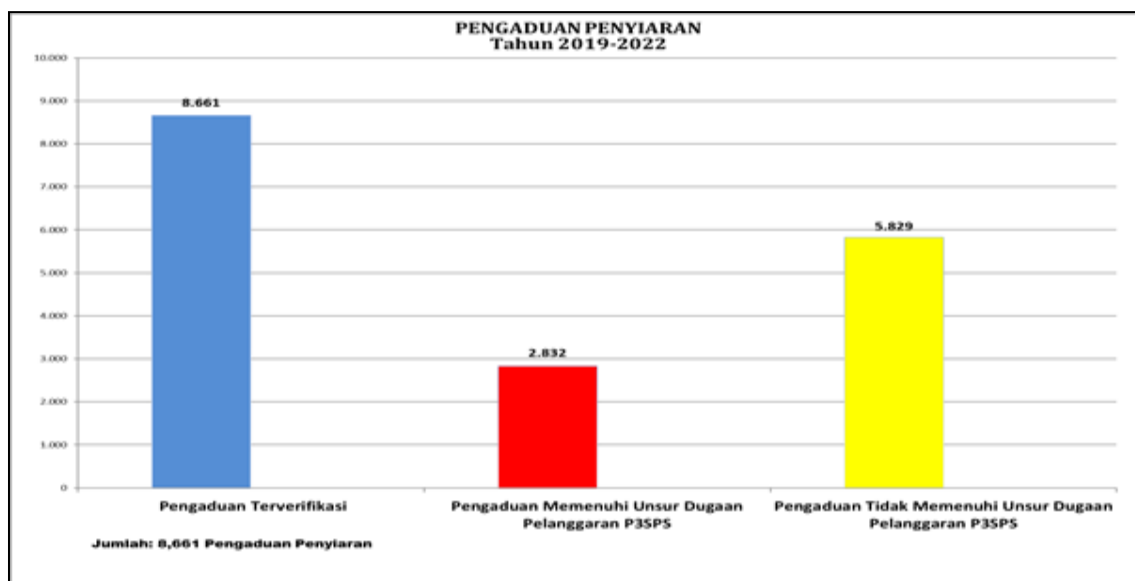
Hasil tindak lanjut pengaduan yang masuk dalam Sistem Informasi Pengaduan (SIP) periode tahun 2019-2022 sebanyak “8.661” pengaduan dari “1.091” program siaran. Pengelola pengaduan melakukan interpretasi data, kategorisasi, dan klasifikasi data pengaduan. Terdapat “5.829” pengaduan dari “911” program siaran yang tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran P3SPS. Setelah dilakukan verifikasi pengaduan, analisis, serta pengecekan tayangan yang diadakan oleh masyarakat, pengaduan tersebut bersifat general/umum, deskripsi tidak jelas, pengaduan yang disampaikan tidak lengkap dan tidak mencantumkan waktu penayangan program, serta isi pengaduan

yang tidak sesuai. Selanjutnya pengelola pengaduan melakukan pengecekan tayangan serta melakukan analisis bahwa pengaduan yang dimaksud tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran P3SPS.

Hasil verifikasi yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran P3SPS sebanyak “2.832” pengaduan dari “362” program siaran yang diproses secara *ticketing* melalui SIP untuk diteruskan kepada bidang Penjatuhan Sanksi dan diproses dalam rapat pemeriksaan bidang isi siaran. Jika hasil temuan pengaduan tersebut terbukti benar melanggar P3SPS, maka tahap selanjutnya akan menjadi pembahasan komisioner dalam rapat pleno penjatuhan sanksi berdasarkan hasil dari kajian dan analisis terhadap laporan pengaduan yang diduga melanggar P3SPS. Berikut grafik di bawah ini yang menjelaskan hasil verifikasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat:

NO	PENGADUAN PENYIARAN	JUMLAH PENGADUAN				
		2019	2020	2021	2022	TOTAL
1	Pengaduan Terverifikasi	4.599	1.992	1.559	511	8.661
2	Pengaduan Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran P3SPS	1.142	899	671	120	2.832
3	Pengaduan Tidak Memenuhi Unsur Dugaan Pelanggaran P3SPS	3.457	1.093	888	391	5.829

Tabel 8. Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2019-2022



Grafik 37. Tindak Lanjut Pengaduan

## A. Verifikasi Data Pengaduan Masyarakat

### 1. Informasi Awal Data Pengaduan Masyarakat

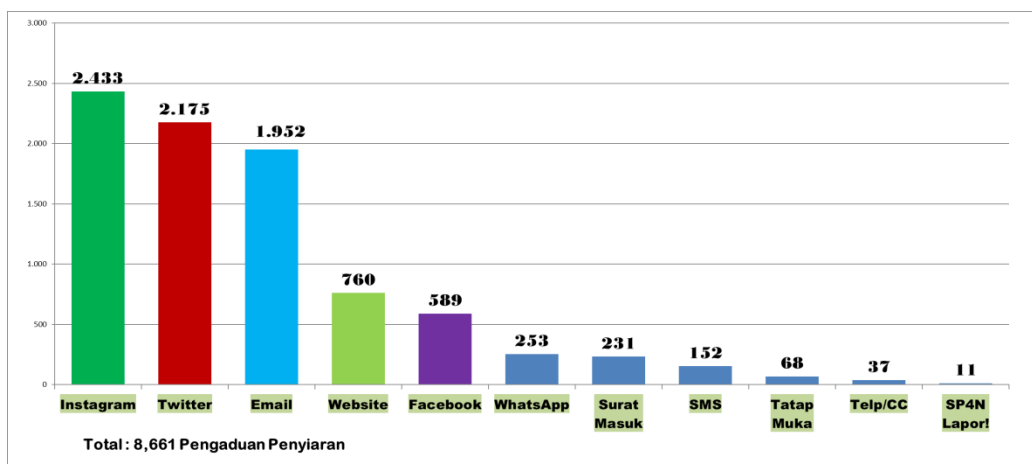
Verifikasi data pengaduan adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan pengaduan atau fakta atas data yang dikumpulkan. Pengelola pengaduan melakukan verifikasi pengaduan masyarakat berdasarkan data yang masuk ke sistem kemudian dianalisis berdasarkan bukti tayangan televisi atau radio.

### 2. Saluran / Media Pengaduan







Berdasarkan saluran pengaduan atau media yang dipakai untuk mengadu, terdapat 11 (sebelas) jenis saluran pengaduan yang digunakan yaitu 2 saluran resmi pengaduan yang teregistrasi, 1 saluran mitra/lembaga yang terhubung dengan aplikasi KPI dan 8 saluran yang bisa dijadikan informasi awal. Dari “8.661” jumlah pengaduan yang masuk, periode tahun 2019 – 2022 saluran *twitter* yang paling banyak mendapatkan pengaduan yaitu sebanyak “2.175” pengaduan. Berikutnya, saluran pengaduan lainnya yaitu melalui *instagram* sebanyak “2.433” pengaduan, *email* sebanyak “1.952” pengaduan, *website* sebanyak “760” pengaduan, *facebook* sebanyak “589” pengaduan, *whatsApp* sebanyak “253” pengaduan, *surat masuk* sebanyak “231” pengaduan, *SMS* sebanyak “152” pengaduan, *tatap muka* sebanyak “68” pengaduan, *Telp/call center* sebanyak “37” pengaduan dan *SP4N Lapor!* sebanyak “11” pengaduan.






No.	PERIODE (TAHUN)	SALURAN PENGADUAN											Jumlah
		Surat Masuk	Tatap Muka	Email	SMS	WhatsApp	Telp / CC	SPAN-LAPOR!	Website	Twitter	Facebook	Instagram	
1	TAHUN 2019	104	54	1.814	127	8	18	0	0	861	246	1.367	4.599
2	TAHUN 2020	70	9	31	6	175	8	10	1	883	229	570	1.992
3	TAHUN 2021	39	3	86	18	45	11	1	496	328	77	455	1.559
4	TAHUN 2022	18	2	21	1	25	0	0	263	103	37	41	511
Jumlah		231	68	1.952	152	253	37	11	760	2.175	589	2.433	8.661

Tabel 9. Saluran Pengaduan Masyarakat



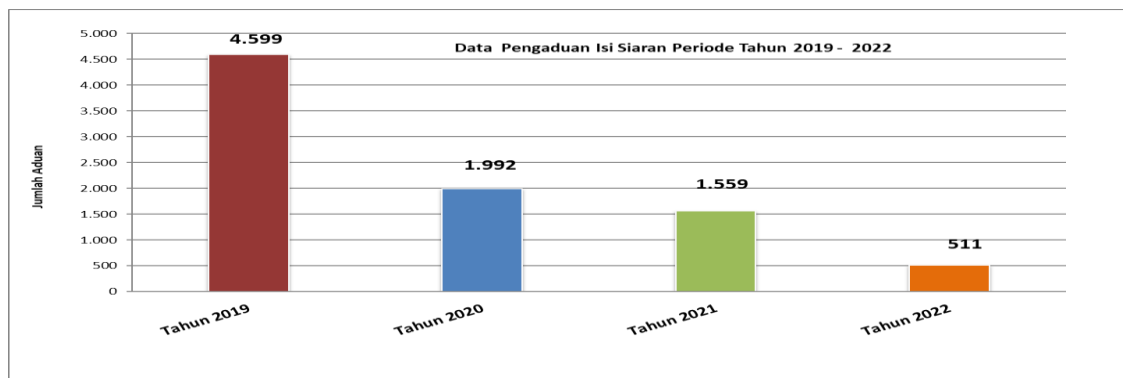
Grafik 38. Saluran Pengaduan Masyarakat

-  **Twitter (@KPI\_Pusat)**  
 Saluran Sosial media Twitter dengan total “2.175” pengaduan masuk, hasil analisis awal terdapat 339 program siaran yang dibawa ke dalam rapat internal isi siaran .
-  **Instagram (@kpi pusat)**  
 Saluran Sosial media Facebook dengan total “2.433” pengaduan masuk, hasil analisis awal terdapat 211 program siaran yang dibawa ke dalam rapat internal isi siaran.
-  **Email ([pengaduan@kpi.go.id](mailto:pengaduan@kpi.go.id))**  
 Saluran Email dengan total “1.952” pengaduan masuk berdasarkan informasi awal , hasil analisis awal terdapat 328 program siaran yang dibawa ke dalam rapat internal isi siaran.
-  **Website ([www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id))**  
 Saluran website dengan total “760” pengaduan masuk, hasil analisis awal terdapat 209 program siaran yang dibawa ke dalam rapat internal isi siaran.
-  **Facebook (@KPIPusat)**  
 Saluran Sosial media Facebook dengan total “589” pengaduan masuk, hasil analisis awal terdapat 163 program siaran yang dibawa ke dalam rapat internal isi siaran.
-  **WhatsApp (081213070000)**  
 Saluran online melalui WhatsApp dengan total “253” pengaduan masuk berdasarkan informasi awal terdapat 153 program siaran yang dibawa ke dalam rapat internal isi siaran.

-  **Surat Masuk (Jl.Ir.H. Juanda No.36 Jakarta Pusat 10120)**  
 Saluran Surat Masuk dengan total “231” pengaduan masuk dan 231 program siaran yang teregister akan secara otomatis dibahas dalam rapat internal isi siaran.
-  **SMS (081213070000)**  
 Saluran SMS dengan total “152” pengaduan masuk dan 74 program siaran yang dibawa ke dalam rapat internal isi siaran.
-  **Tatap Muka (KPI Pusat)**  
 Saluran Tatap Muka dengan total “68” pengaduan masuk dan 41 program siaran yang teregister akan secara otomatis dibahas dalam rapat internal isi siaran.
-  **Call Center (021-21203889)**  
 Saluran Lapor Sp4n! dengan total “37” pengaduan masuk dan 27 program siaran yang teregister akan secara otomatis dibahas dalam rapat internal isi siaran.
-  **Lapor SP4N! (SMS 1708, www.lapor.go.id)**  
 Saluran Lapor SP4N! dengan total “11” pengaduan masuk dan “10” program siaran yang dibawa ke dalam rapat internal isi siaran.

## B. Data Pengaduan

Berdasarkan grafik yang terlihat, data pengaduan masyarakat yang disampaikan ke KPI Pusat tahun 2019-2022, tergambar pola atau banyaknya pengaduan yang cenderung menurun setiap tahunnya. Turunnya angka pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada KPI Pusat dipengaruhi beberapa faktor di antaranya, kualitas program siaran yang semakin baik dan pengawasan serta pembinaan yang dilakukan KPI Pusat terhadap lembaga penyiaran.



Grafik 39. Data Pengaduan Masyarakat Tahun 2019 – 2022

Berikut penggambaran isu yang menyebabkan banyaknya pengaduan kepada KPI Pusat, berdasarkan program siaran yang paling banyak mendapatkan pengaduan masyarakat:

**Tahun 2019 :** Pada tahun 2019 total pengaduan sebanyak “4.559”. Terdapat beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya pengaduan yang masuk ke KPI Pusat pada tahun tersebut.

- Penggambaran adegan dalam program siaran sinetron yang masih menyajikan materi terkait kekerasan perkelahian remaja, seperti dalam program siaran “*Anak Langit*” di lembaga penyiaran SCTV pada tahun 2019 kembali menjadi sorotan bagi masyarakat yang merasa khawatir menjadi pengaruh negatif bagi anak dan remaja.
- Isu muatan mistik dan horor dalam Program Siaran “Siraman Qalbu Bersama Ust. Dhanu” di program siaran MNCTV juga mempengaruhi banyaknya pengaduan masuk pada tahun ini. Masyarakat menilai, muatan kesurupan pada peserta pengobatan dalam siaran yang bertajuk keagamaan ini tidak tepat dan bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang junjung oleh masyarakat.

**Tahun 2020 :** Pada tahun 2020 total pengaduan sebanyak “1.992”. Terdapat beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya pengaduan masuk ke KPI Pusat pada tahun tersebut.

- Sinetron “Dari Jendela SMP” di lembaga penyiaran SCTV yang menayangkan penggambaran adegan seorang siswi SMP yang menduga dirinya hamil karena berdekatan dengan seorang siswa, terdapat pula penggambaran adegan serta dialog yang mengarah pada percakapan terkait kehamilan pada usia remaja, hal ini mendapatkan respon negatif atas penayangan sinetron tersebut.
- Lembaga penyiaran ANTV yang pada saat itu menayangkan program siaran “Garis Tangan” dengan muatan siaran yang berisikan tayangan seputar perjodohan pria dan wanita, pembahasan terkait privasi seseorang, percakapan yang mengarah pada seksualitas, mendorong masyarakat mengadukan program siaran tersebut ke KPI Pusat.

**Tahun 2021** : Pada tahun 2021 total pengaduan sebanyak “1.559”. Terdapat beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya pengaduan masuk ke KPI Pusat pada tahun tersebut.

- Masyarakat banyak mengadakan program siaran “Pagi-Pagi Ambyar” yang disiarkan oleh lembaga penyiaran TRANS TV. Muatan siaran yang berisi goyangan wanita dengan menonjolkan gerakan bagian tubuh seperti bokong dan dada, menyanyi dan menari dari atas tiang besi, penerapan protokol kesehatan terkait Covid-19 menjadi hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat dari penayangan program tersebut.
- Penayangan pernikahan artis Atta dan Aurel yang disiarkan oleh lembaga penyiaran RCTI banyak diadukan oleh masyarakat yang merasa keberatan bahwa frekuensi publik digunakan untuk menyiarkan tayangan yang tidak memiliki kemanfaatan bagi publik terkait durasi penayangannya hingga persoalan privasi yang dibawa ke ruang publik.
- Penayangan prosesi akad nikah, pengajian, siraman Lesti Kejora & Rizky Billar yang disiarkan oleh lembaga penyiaran ANTV dan INDOSIAR banyak diadukan oleh masyarakat yang merasa keberatan bahwa frekuensi publik digunakan untuk menyiarkan tayangan yang tidak memiliki kemanfaatan bagi publik.
- Penayangan adegan beberapa wanita berbaju putih abu-abu yang disiarkan di lembaga penyiaran TRANS 7 dalam program siaran “Lapor Pak!” diminta bermain games menyebutkan kata ber-awalan “nge”, wanita kedua menyebutkan kata “ngentog”, perkataan tersebut menimbulkan keberatan dari pengadu terkait pengucapan kata yang bernada samar seolah-olah sebagai kata bermakna asosiatif.
- Penayangan pemberitaan segmen “Nikita Diduga Melecehkan Bacaan Shalat”, menampilkan potongan video tiktok Nikita Mirzani, Wawancara dengan Ustadz. Dasád Latif mengomentari video Nikita Mirzani dalam program berita iNews Room weekend – iNews.
- Penayangan dalam pemberitaan “Polisi Gerebek Kantor Pinjol Ilegal” menampilkan gambar bermuatan adegan seksual atau kelamin wanita di layar monitor kantor pinjol, gambar di zoom in dalam program siaran jurnalistik Metro Malam – Metro TV dan Breaking News tvOne.
- Penayangan prosesi resepsi pernikahan selebriti di MNC TV yang tayang secara live “Halaqah Cinta Ricis Ryan-Resepsi Eps. Live Resepsi Pernikahan Ria Ricis Teuku Ryan“ diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan serta masyarakat merasa keberatan bahwa frekuensi publik digunakan untuk menyiarkan tayangan yang tidak memiliki kemanfaatan bagi publik.

**Tahun 2022** : total pengaduan sebanyak “511”. Terdapat beberapa isu yang mempengaruhi banyaknya pengaduan masuk ke KPI Pusat pada tahun tersebut.

- Masyarakat banyak mengadukan program siaran sinetron “Buku Harian Seorang Istri” yang disiarkan oleh lembaga penyiaran SCTV. Muatan siaran yang sering menampilkan hal-hal yang mencoreng martabat seorang wanita, memalsukan surat keterangan dokter menyatakan keperawanan nya hilang melanggar kode etik profesi dokter. Tanggal 30 September 2021 menampilkan seorang wanita yang bernama Dewi masuk ke kamar suami sedang tidur bahkan memaksa suami sahabatnya sendiri keluar dinner berdua di café diam-diam tanpa sepengetahuan istri laki-laki ini dengan cara mengancam laki-laki ini dengan menunjukkan surat keterangan dokter menyatakan keperawanannya hilang, apakah ini pantas dicontohkan oleh anak-anak gadis jika di sinetron Buku Harian Seorang Istri yg tayang di SCTV menampilkan seorang wanita menggoda suami orang lain.
- Masyarakat banyak mengadukan program siaran sinetron “Layangan Putus” yang disiarkan oleh lembaga penyiaran RCTI. Muatan siaran yang menampilkan adegan wanita berbaju coklat mendatangi kamar wanita motif bunga dan mendapati wanita tersebut sedang bersama pria berbaju putih (bukan pasangan suami-sstri) berada dalam kamar hotel, menampilkan adegan pria berbaju hitam dan wanita berbaju coklat (bukan pasangan suami-istri) berada dalam kamar hotel keduanya berbincang di atas tempat tidur dan pria dalam keadaan tidak memakai baju. Kedua adegan tersebut menggambarkan adegan yang mengesankan perselingkuhan atau adanya hubungan di luar pernikahan dan secara tema alur cerita dinilai oleh masyarakat sebagai tayangan yang tidak layak ditampilkan pada jam primetime ditinjau juga dari STLS serta Klasifikasi.

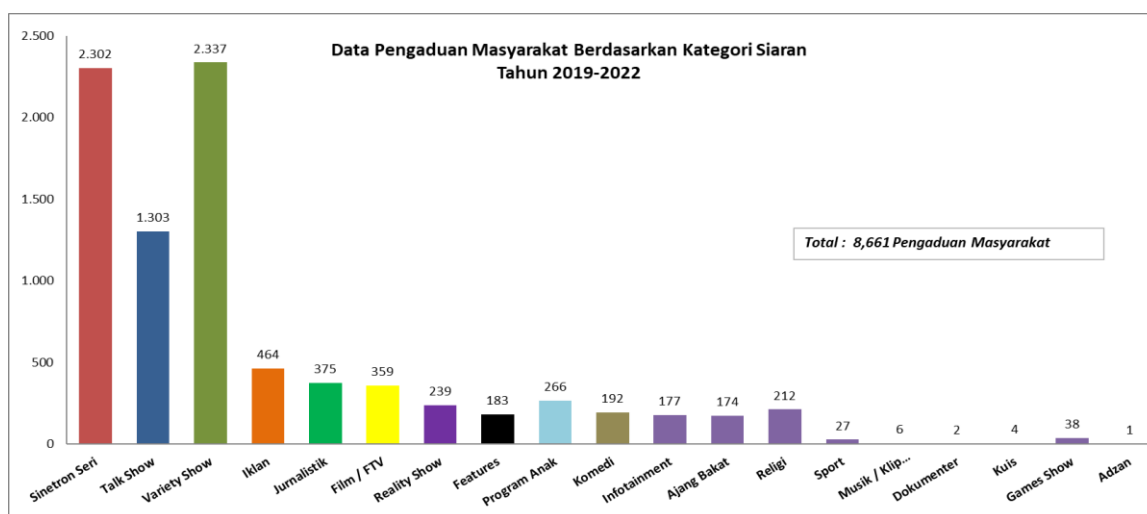
## C. Verifikasi Awal Pengaduan

### 1. Data Pengaduan Berdasarkan Kategori Program

Hasil verifikasi data pengaduan yang dijadikan sebagai informasi awal pengaduan serta telah diklasifikasi dan kategorisasi sebagai data pengaduan yang bisa ditindaklanjuti dan dianalisis tayangannya berdasarkan aduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui saluran pengaduan resmi KPI Pusat (media online dan sosial media). Berdasarkan kategori program siaran yang paling banyak diadukan masyarakat yaitu program *sinetron* sebanyak 2.302 pengaduan (26,58%), *talkshow* sebanyak 1.303 pengaduan (15,04%), *variety show* sebanyak 2.337 pengaduan (26,98%). Secara lengkap, data tersebut tergambar pada tabel berikut:

No.	Kategori Program	Periode (Tahun)				Jumlah Aduan	%
		2019	2020	2021	2022		
1	Sinetron Seri	727	583	790	202	2.302	26,58%
2	Talk Show	718	466	89	30	1.303	15,04%
3	Variety Show	1.761	285	191	100	2.337	26,98%
4	Iklan	239	151	59	15	464	5,36%
5	Jurnalistik	179	85	78	33	375	4,33%
6	Film / FTV	166	117	55	21	359	4,15%
7	Reality Show	81	42	99	17	239	2,76%
8	Features	58	70	36	19	183	2,11%
9	Program Anak	190	51	15	10	266	3,07%
10	Komedi	78	43	53	18	192	2,22%
11	Infotainment	89	28	27	33	177	2,04%
12	Ajang Bakat	74	40	51	9	174	2,01%
13	Religi	184	20	7	1	212	2,45%
14	Sport	14	4	9	0	27	0,31%
15	Musik / Klip Video	1	5	0	0	6	0,07%
16	Dokumenter	0	2	0	0	2	0,02%
17	Kuis	3	0	0	1	4	0,05%
18	Games Show	37	0	0	1	38	0,44%
19	Adzan	0	0	0	1	1	0,01%
TOTAL		4.599	1.992	1.559	511	8.661	100%

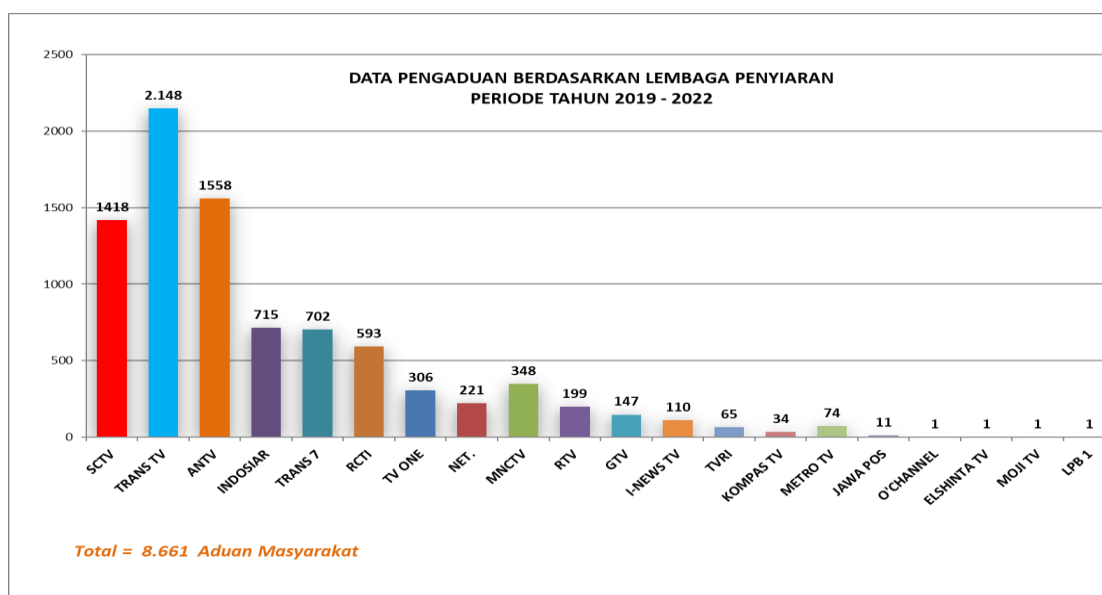
Tabel 10. Verifikasi Aduan Berdasarkan Kategori Program Siaran



Grifik 40. Verifikasi Data Pengaduan Berdasarkan Kategori Program Siaran

**a. Data Pengaduan Berdasarkan Lembaga Penyiaran (Stasiun TV)**

Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke KPI Pusat, respon tinggi masyarakat terhadap program acara yang ditampilkan oleh beberapa stasiun televisi yang paling banyak diadukan masyarakat yaitu *TRANSTV* sebanyak 2.148 *pengaduan*, *ANTV* sebanyak 1.558 *pengaduan* dan *SCTV* sebanyak 1.418 *pengaduan*. *Data selengkapnya dapat disimak di tabel berikut;*

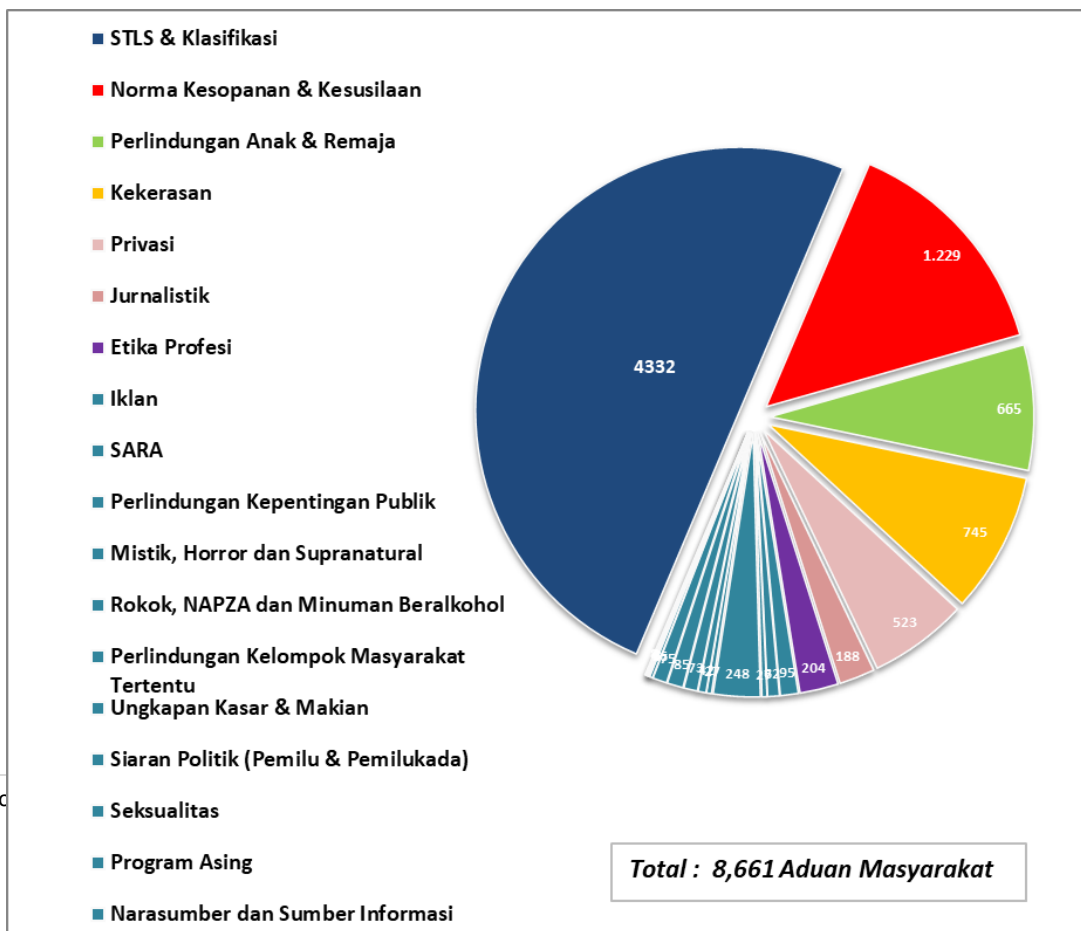


Grifik 41. Verifikasi Data Pengaduan Berdasarkan Lembaga Penyiaran

**b. Data Pengaduan Berdasarkan Kategori Pelanggaran**

Dari “8.661” pengaduan yang disampaikan masyarakat, berdasarkan kategori pelanggaran paling banyak diadukan terkait “Klasifikasi Program dan Norma Kesopanan dan Kesusilaan” dan secara lengkap digambarkan dalam bentuk grafik:

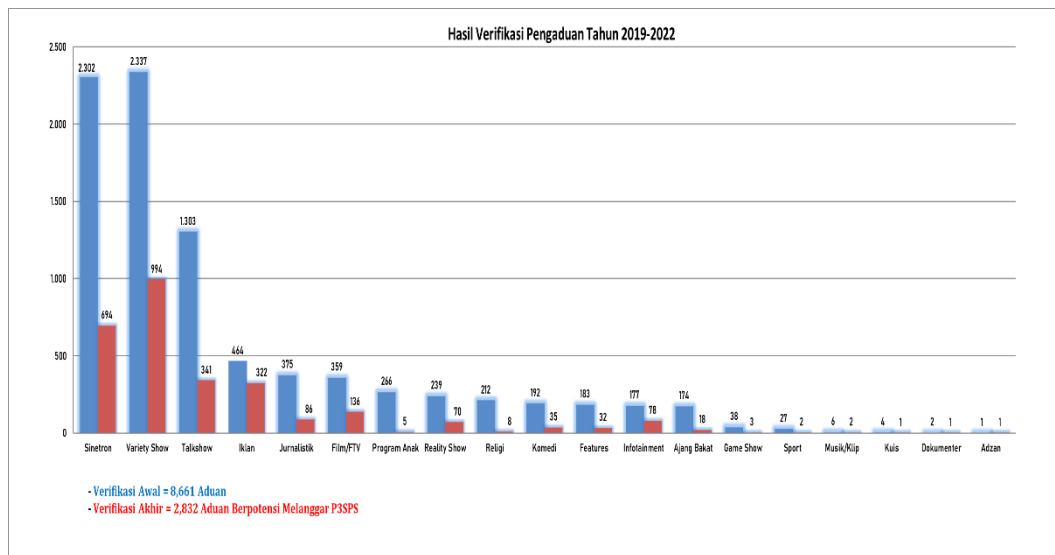
- “*Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dan Klasifikasi*” sebanyak “4.332” pengaduan yaitu masyarakat masih mengeluhkan jam penayangan program, kesesuaian tayangan dengan klasifikasi program, muatan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis anak dan remaja, muatan konten yang membenarkan sisi negatif sebagai hal yang lumrah bagi kehidupan anak dan remaja, muatan konten iklan yang produk atau jasanya tidak sesuai dengan klasifikasi anak dan remaja.
- “*Norma Kesopanan/Kesusilaan*” sebanyak “1.229” pengaduan yaitu masyarakat keberatan dengan tayangan yang ditampilkan televisi dengan menampilkan tarian wanita yang menggoyangkan bagian tubuh tertentu dengan erotis. Berdasarkan keberatan masyarakat adegan tersebut tidak ternilai sebagai adegan seksualitas tetapi dapat ternilai sebagai bentuk pengabaian norma yang dijunjung keberagaman khalayak pada sisi adegan tarian/goyangan yang diperlihatkan merujuk pada kesesuaian jam tayang serta klasifikasi program.



Grafik 42. Hasil Verifikasi Data Pengaduan Berdasarkan Kategori Pelanggaran

## 2. Verifikasi Pengaduan Berdasarkan Fakta Siaran yang Berpotensi Melanggar P3SPS

Verifikasi data pengaduan adalah “*pemeriksaan tentang kebenaran laporan pengaduan atau fakta atas data yang dikumpulkan*”. Pengelola pengaduan melakukan verifikasi pengaduan masyarakat berdasarkan data yang masuk kedalam sistem/aplikasi KPI Pusat yang kemudian dianalisis berdasarkan bukti rekaman tayangan televisi dan radio dalam sistem tersebut



Grafik 43. Hasil Verifikasi Pengaduan Masyarakat

Selanjutnya setelah dilakukan pendataan data pengaduan untuk dikategorisasi, klasifikasi pengaduan sebagai informasi awal, tahap berikutnya akan dilakukan verifikasi pengaduan untuk dibuatkan kajian hukum, apakah pengaduan tersebut melanggar atau tidak melanggar P3SPS serta dilakukan pengecekan fakta tayangan oleh tenaga ahli/analisis penyelia pengaduan yang akan menganalisis lebih dalam (*In-Depth Analysis*) terhadap tayangan atau program yang diduga melanggar P3SPS berdasarkan temuan pengaduan apakah layak untuk dijadikan materi atau sebagai bahan pengaduan untuk disampaikan dan dilaporkan dalam rapat sidang pemeriksaan potensi pelanggaran bidang isi siaran serta rapat pleno penjatuhan sanksi.

## II. DATA PENJATUHAN SANKSI 2019-2022

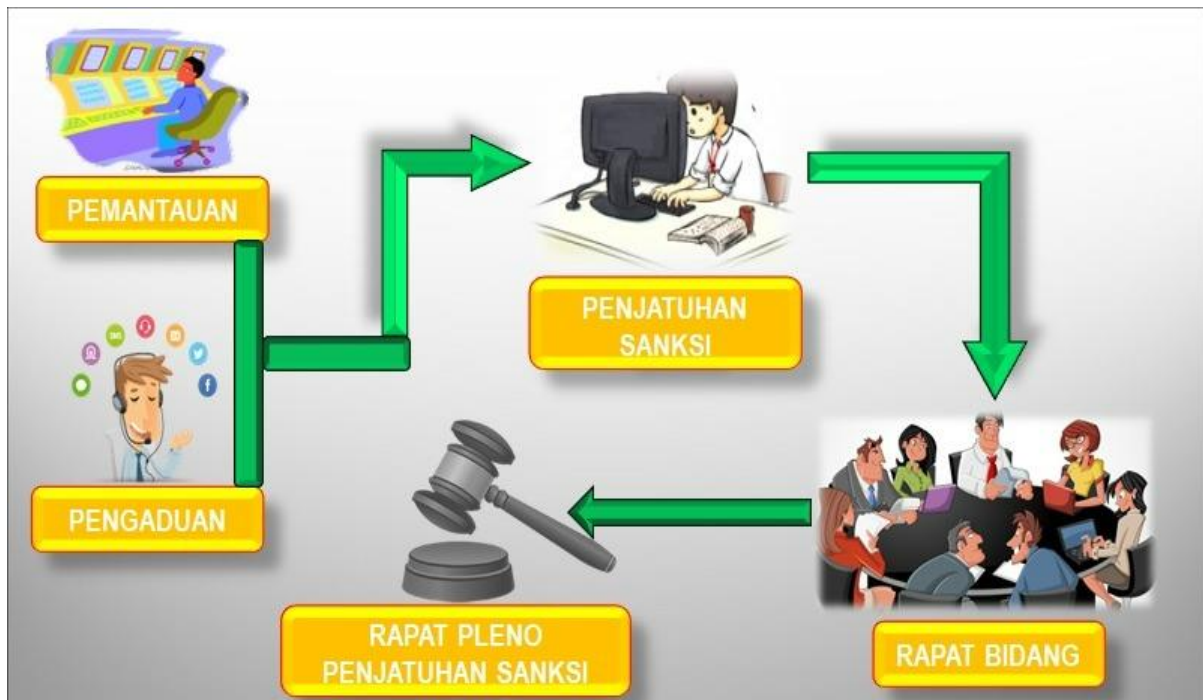
### Dasar Hukum

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Selain itu, KPI juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap lembaga penyiaran yang melanggar peraturan. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 8 Ayat (2) huruf d UU Penyiaran, *“KPI mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran”*. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 72 Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012, *“KPI mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran Standar Program Siaran”*. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan landasan hukum, moral, etik, serta pedoman bagi lembaga penyiaran agar mempunyai batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran. Hal ini bertujuan agar seluruh lembaga penyiaran dapat memberikan sebuah sajian informasi yang santun, beradab, dan memperkokoh persatuan bangsa.

### Sistem Penjatuhan Sanksi

Sebelum memberikan sanksi administratif, KPI melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada program siaran yang dianggap berpotensi melakukan pelanggaran melalui pengawasan secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat). Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh bagian penjatuhan sanksi.

Melalui pemantauan langsung, KPI telah melakukan pengawasan secara internal selama 24 jam dengan tujuan mengawasi kegiatan penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap P3SPS. Selain itu, KPI juga melakukan pengawasan secara eksternal yaitu menindaklanjuti pengaduan masyarakat dengan cara menerima pengaduan maupun keberatan dari masyarakat terhadap program siaran dan/atau isi siaran yang dinilai tidak sesuai. Pengaduan tersebut dapat disampaikan melalui beberapa saluran, di antaranya tatap muka, *call center*, SMS, *instagram*, *facebook*, *twitter*, dan lain sebagainya.



Gambar 5. Alur Penjatuhan Sanksi

Dari hasil pemeriksaan potensi pelanggaran yang telah diverifikasi oleh bagian pemantauan dan pengaduan, dokumen yang dinilai berpotensi melanggar diteruskan kepada bagian penjatuhan sanksi dan dilakukan verifikasi serta kajian oleh penjatuhan sanksi. Dalam tahapan ini, bagian penjatuhan sanksi akan membawa dokumen pelanggaran tersebut ke dalam rapat bidang isi siaran untuk direkomendasikan kepada komisioner berdasarkan dampak di masyarakat (sosiologis), tata bahasa sebuah peraturan (gramatikal), dan secara tindakan atau keputusan di masa lalu (historis/yurisprudensi). Dari rapat bidang tersebut akan dilihat dan dinilai oleh komisioner bidang isi siaran berdasarkan P3SPS yang kemudian akan dibahas di rapat putusan/pleno.

Dalam rapat putusan/pleno tersebut, penilaian akan dilakukan oleh seluruh komisioner yang akan menghasilkan Berita Acara. Berita Acara tersebut akan ditindaklanjuti kembali oleh penjatuhan sanksi yang tentunya berkoordinasi kembali dengan komisioner bidang isi siaran. Hasil pleno tersebut antara lain, sanksi administratif, pembinaan, mediasi dan klarifikasi, dan lain sebagainya.

#### A. Teguran Tertulis

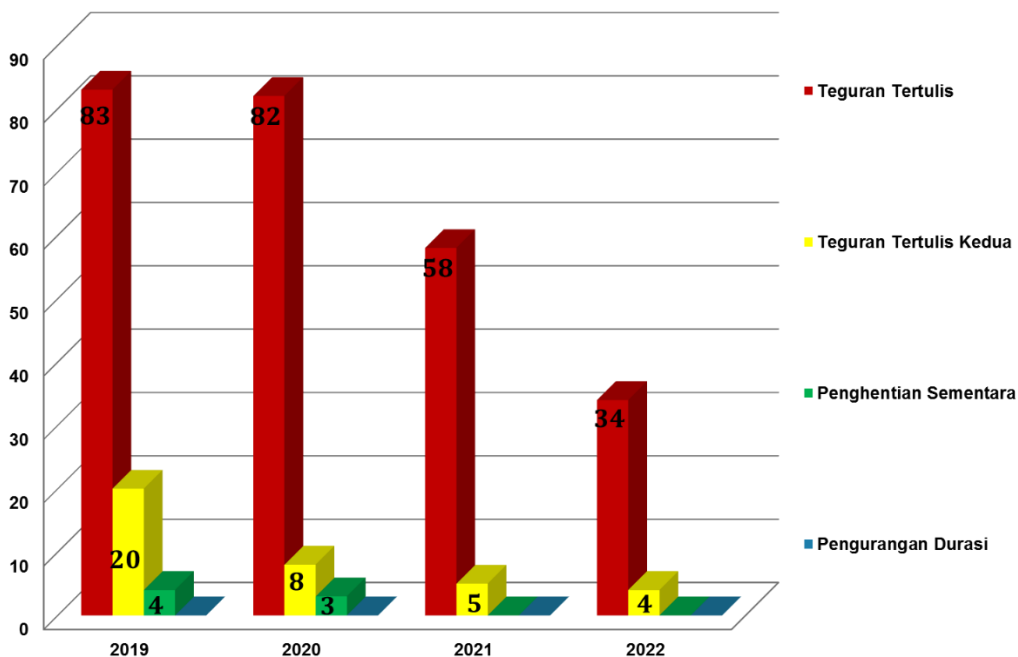
Teguran Tertulis merupakan sanksi administratif KPI terhadap lembaga penyiaran terkait dengan sebuah program siaran yang telah melanggar. Hal ini merupakan langkah awal dalam memberikan sebuah sanksi terhadap lembaga penyiaran yang tidak mematuhi

aturan dan ketentuan dalam P3SPS. Teguran tertulis ini terbagi menjadi dua yaitu teguran tertulis pertama dan teguran tertulis kedua. Untuk program siaran yang telah mendapatkan teguran tertulis kedua maka KPI mengambil sikap untuk melanjutkan perkara ini ke tahap selanjutnya yang bisa berujung pada penjatuhan sanksi.

Dalam melakukan proses sanksi administratif teguran tertulis maupun teguran tertulis kedua terhadap lembaga penyiaran, bagian penjatuhan sanksi melakukan alur pekerjaan, di antaranya:

- Melakukan rapat bidang isi siaran yang bahannya diperoleh dari hasil temuan pemantauan atau pengaduan masyarakat;
- Memberikan masukan dan rekomendasi terkait sebuah tayangan hasil temuan pemantauan dan pengaduan masyarakat, yang dilaksanakan dalam rapat bidang isi siaran untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh komisioner bidang isi siaran dan rapat putusan/pleno;
- Membuat konsep dan mengirimkan surat sanksi administratif teguran tertulis maupun teguran tertulis kedua terhadap lembaga penyiaran;
- Melakukan tata kelola arsip sanksi administratif teguran tertulis maupun teguran tertulis kedua yang telah dikirimkan terhadap lembaga penyiaran.

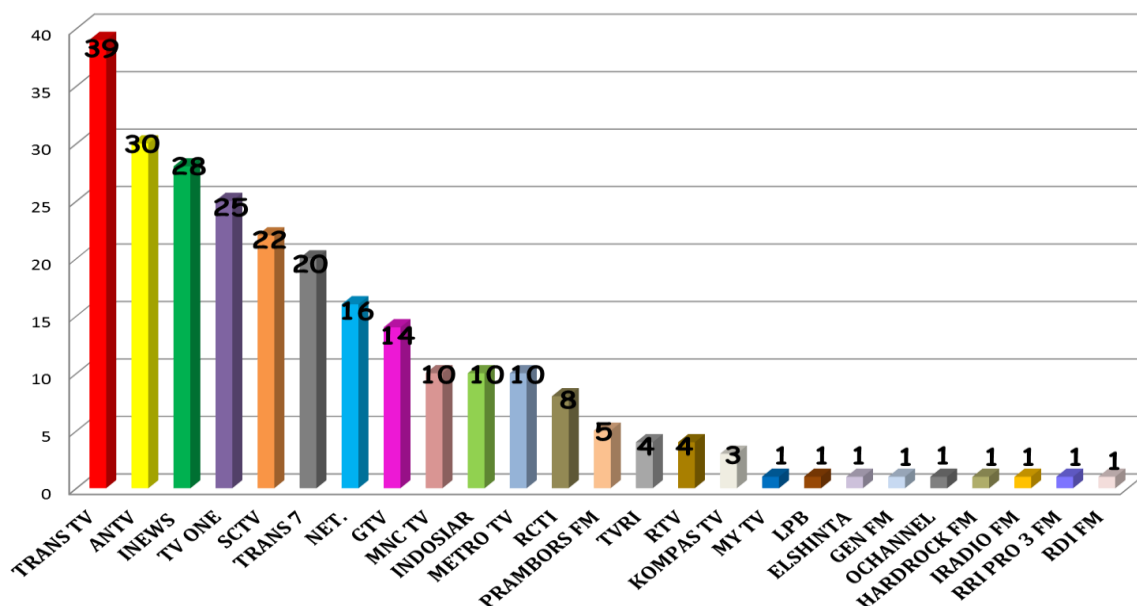
Pada tahun 2019-2022, KPI telah mengeluarkan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran. Berikut data keseluruhan penjatuhan sanksi:



Grafik 44. Perbandingan Jumlah Sanksi Tahun 2019-2022

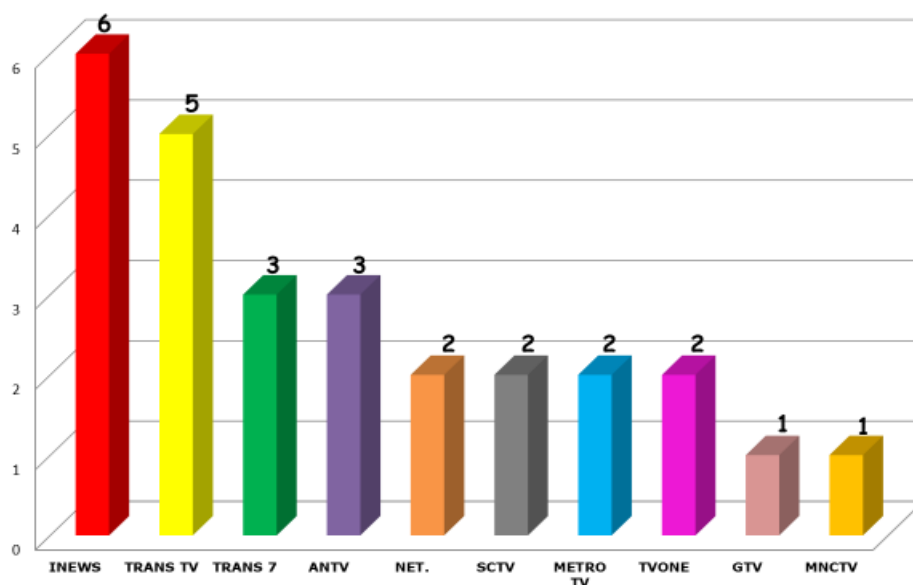
Pada tahun 2019-2022, penjatuhan sanksi telah melakukan proses verifikasi program siaran dan merekomendasikan kepada komisioner melalui rapat bidang isi siaran dan pleno, yang menghasilkan keputusan berupa sanksi administratif Teguran Tertulis dan Teguran Tertulis Kedua.

**SANKSI TEGURAN TERTULIS BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN**  
TAHUN 2019-2022  
JUMLAH 257



Grafik 45. Sanksi Teguran Tertulis Berdasarkan Lembaga Penyiaran Tahun 2019-2022

**SANKSI TEGURAN TERTULIS KEDUA BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN**  
TAHUN 2019-2022  
JUMLAH 27



## **B. Penjatuhan Sanksi**

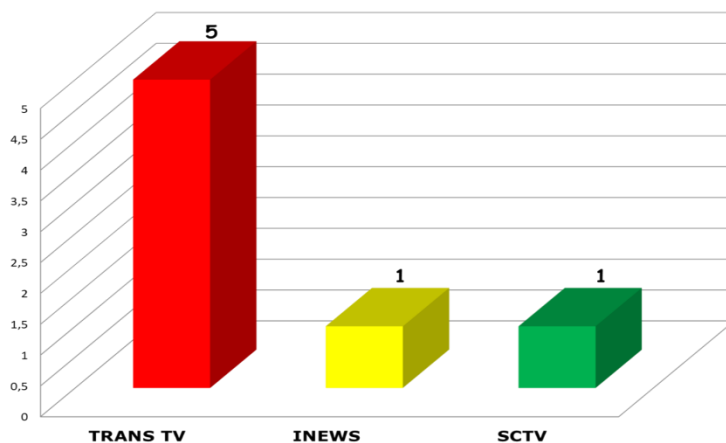
Penjatuhan Sanksi merupakan langkah hukum yang diambil KPI kepada lembaga penyiaran dengan bentuk pengurangan durasi atau penghentian sementara. Keputusan ini diambil melalui tahapan-tahapan yang diputuskan pada rapat pleno komisioner. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa jera kepada lembaga penyiaran agar mematuhi peraturan tentang penyiaran sehingga lembaga penyiaran dapat menjadikan media sebagai sarana informasi yang mencerdaskan publik.

Dalam melakukan pengambilan kebijakan untuk penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran, berikut alurnya:

- Melakukan rapat bidang isi siaran yang bahannya diperoleh dari pemantauan isi siaran atau pengaduan masyarakat;
- Memberikan masukan dan rekomendasi terkait sebuah tayangan hasil temuan pemantauan dan pengaduan masyarakat, yang dilaksanakan dalam rapat bidang isi siaran untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh komisioner bidang isi siaran dan rapat putusan/pleno;
- Melakukan verifikasi data hasil klarifikasi maupun mediasi sebagai bahan untuk melakukan penjatuhan sanksi terhadap program siaran;
- Membuat risalah terhadap data dokumen dan tayangan yang sudah diverifikasi untuk dapat dijadikan bahan masukan kepada komisioner bidang isi siaran dalam proses penjatuhan sanksi program siaran;
- Melakukan koordinasi hasil keputusan rapat pleno yang dilakukan oleh 9 (sembilan) komisioner terkait sanksi yang akan diberikan kepada lembaga penyiaran;
- Membuat konsep dan mengirim surat undangan penjatuhan sanksi terhadap lembaga penyiaran;
- Membuat Berita Acara penjatuhan sanksi;
- Melakukan tata kelola arsip terkait penjatuhan sanksi yang diberikan KPI kepada lembaga penyiaran;
- Membuat laporan hasil proses penjatuhan sanksi program siaran terhadap lembaga penyiaran.

Pada tahun 2019-2022, KPI telah mengeluarkan keputusan sanksi administratif Penghentian Sementara dan Pengurangan Durasi kepada lembaga penyiaran, yakni sebagai berikut:

**SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN**  
TAHUN 2019-2022  
JUMLAH 7

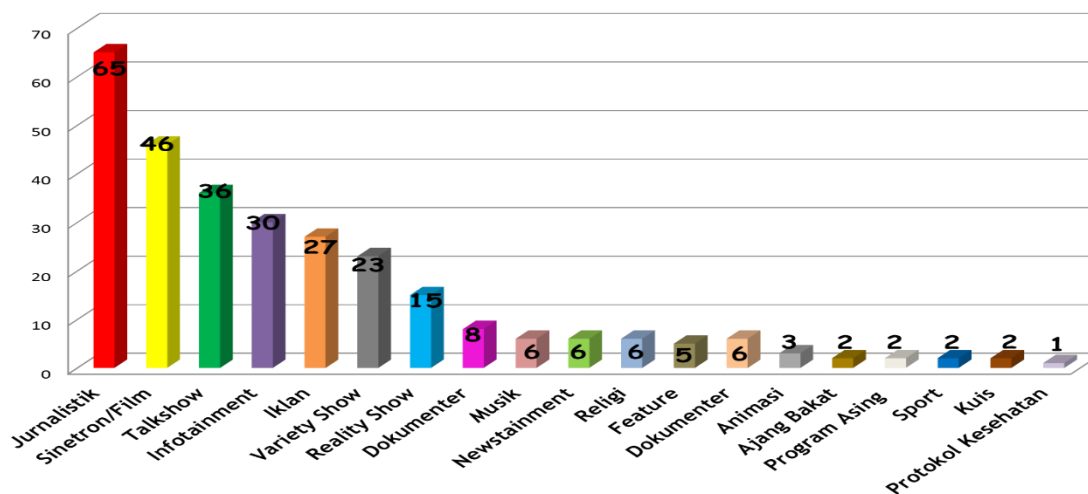


Grafik 47. Sanksi Penghentian Sementara Berdasarkan Lembaga Penyiaran Tahun 2019-2022

### C. Data Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Kategori Program

KPI telah mengeluarkan berbagai macam keputusan terhadap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran terhadap P3SPS. Ada pun keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang ada. Data sanksi tersebut didapatkan melalui hasil tindak lanjut sistem pengawasan KPI secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat). Berikut data penjatuhan sanksi berdasarkan tindak lanjut pada tahun 2019-2022:

**SANKSI BERDASARKAN KATEGORI PROGRAM SIARAN**  
TAHUN 2019-2022

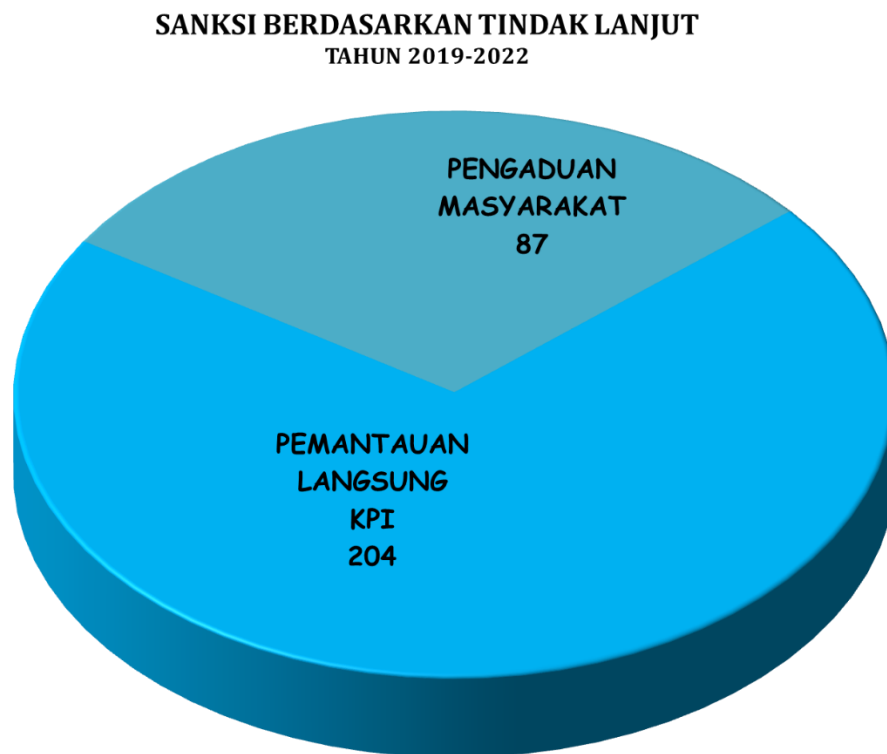


Grafik 48. Sanksi Berdasarkan Kategori Program Siaran Tahun 2019-2022

Berdasarkan data tersebut, jumlah sanksi yang dikeluarkan KPI terhadap lembaga penyiaran sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) dan terdiri dari 19 (sembilan belas) kategori program siaran, dan kategori yang paling banyak melanggar yaitu jurnalistik.

#### D. Data Penjatuhan Sanksi Berdasarkan Pengaduan dan Pemantauan Langsung

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dari keseluruhan data sanksi tersebut didapatkan melalui hasil tindak lanjut sistem pengawasan KPI secara internal (pemantauan langsung) dan eksternal (pengaduan masyarakat). Berikut data penjatuhan sanksi berdasarkan tindak lanjut pada tahun 2019-2022:



Grafik 49. Sanksi Berdasarkan Tindak Lanjut Tahun 2019-2022

#### E. Mediasi dan Klarifikasi

Mediasi merupakan proses mempertemukan dan mendengarkan keterangan beberapa pihak yang bersengketa, dalam hal ini KPI berperan sebagai penengah (mediator). Dalam melakukan mediasi berdasar pada pengaduan dari salah satu pihak (masyarakat sebagai individu maupun kelompok atau organisasi) dan ditujukan

kepada pihak lain (lembaga penyiaran sebagai pihak teradu). Kemudian, KPI akan mempertimbangkan sejumlah faktor mengenai urgensi dilakukannya mediasi guna mencapai kesepakatan bersama berdasarkan prinsip *win-win solution*.

Sedangkan pemeriksaan pelanggaran atau klarifikasi biasanya dilakukan dengan cara memanggil lembaga penyiaran untuk diperkenankan menyampaikan keterangan atas konten program siaran yang dinilai terdapat potensi pelanggaran. Keterangan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar pertimbangan KPI dalam menjatuhkan sanksi atau menentukan sikap lainnya dalam rapat pleno untuk tercapainya sebuah keputusan atas perkara yang terjadi.

Dalam melakukan sebuah proses mediasi dan klarifikasi terhadap lembaga penyiaran, tim penjatuhan sanksi melakukan sebuah alur pekerjaan, di antaranya:

- Melakukan rapat bidang isi siaran yang bahannya diperoleh dari pemantauan isi siaran atau pengaduan masyarakat;
- Memberikan masukan dan rekomendasi terkait sebuah tayangan hasil temuan pemantauan dan pengaduan masyarakat, yang dilaksanakan dalam rapat bidang isi siaran untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh komisioner bidang isi siaran dan rapat putusan/pleno;
- Melakukan verifikasi ulang terhadap data dokumen dan tayangan program siaran yang diperoleh dari sub bagian pengaduan maupun pemantuan isi siaran sebagai bahan untuk melakukan mediasi dan klarifikasi program siaran;
- Membuat risalah terhadap data dokumen dan tayangan yang sudah diverifikasi untuk dapat dijadikan bahan masukan kepada komisioner bidang isi siaran dalam melakukan proses mediasi dan klarifikasi program siaran;
- Melakukan koordinasi kepada komisioner bidang isi siaran terkait sebuah proses mediasi dan klarifikasi program siaran;
- Membuat konsep dan mengirim surat undangan mediasi dan klarifikasi terhadap lembaga penyiaran;
- Melakukan sebuah proses mediasi dan klarifikasi program siaran terhadap lembaga penyiaran;
- Membuat Berita Acara mediasi dan klarifikasi;
- Melakukan tata kelola arsip terkait mediasi dan klarifikasi yang diberikan KPI kepada lembaga penyiaran;

- Membuat laporan hasil proses mediasi dan klarifikasi program siaran terhadap lembaga penyiaran.

Berikut proses Mediasi maupun Klarifikasi yang telah dilakukan KPI pada tahun 2019-2022:

NO	NO SURAT	LEMBAGA PENYIARAN/ INSTANSI	PROGRAM SIARAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	29/K/KPI/31.2/01/2019	NET.	Visi Presiden: Episode Infrastruktur	21 Januari 2019
2	30/K/KPI/31.2/01/2019	INEWS	Special Event	21 Januari 2019
3	31/K/KPI/31.2/01/2019	KOMPAS TV	Sapa Indonesia Malam: “Visi Presiden: Episode Infrastruktur”	21 Januari 2019
4	32/K/KPI/31.2/01/2019	INDOSIAR	Visi Presiden: Episode Infrastruktur	21 Januari 2019
5	33/K/KPI/31.2/01/2019	TV ONE	Visi Presiden: Episode Infrastruktur Apa Kabar Indonesia Malam	21 Januari 2019
6	72/K/KPI/31.2/02/2019	METRO TV	Beberapa siaran pemberitaan Capres dan Cawapres yang ditayangkan oleh METRO TV pada tanggal 3, 9, 18 Januari 2019	18 Februari 2019
7	73/K/KPI/31.2/02/2019	MNC TV	Siraman Qalbu Bersama Ust. Dhanu	18 Februari 2019
8	74/K/KPI/31.2/02/2019	MNC TV	Pemberitaan partai politik yang ditayangkan oleh MNC TV	18 Februari 2019
9	74/K/KPI/31.2/02/2019	GTV	Pemberitaan partai politik yang ditayangkan oleh GTV	18 Februari 2019

10	74/K/KPI/31.2/02/2019	RCTI	Pemberitaan partai politik yang ditayangkan oleh RCTI	18 Februari 2019
11	74/K/KPI/31.2/02/2019	INEWS	Pemberitaan partai politik yang ditayangkan oleh iNews	18 Februari 2019
12	89/K/KPI/31.2/02/2019	INEWS	iNews Pagi	21 Februari 2019
13	135/K/KPI/31.2/03/2019	FIRST MEDIA	Diskusi Bersama Prabowo	18 Maret 2019
14	350/K/KPI/31.2/08/2019	ELSHINTA	Radio Talk Bersama Tafsir Al-quran	26 Agustus 2019
15	356/K/KPI/31.2/08/2019	TRANS TV	Brownis	4 September 2019
16	357/K/KPI/31.2/08/2019	ANTV	Janji Suci dan Rahasia Hidup	30 Agustus 2019
17	358/K/KPI/31.2/08/2019	TRANS TV	Gank Prank	4 September 2019
18	359/K/KPI/31.2/08/2019	TRANS TV	Pagi Pagi Pasti Happy	4 September 2019
19	360/K/KPI/31.2/08/2019	GEN FM	DJ Sore	30 Agustus 2019
20	398/K/KPI/31.2/09/2019	INEWS	Hotman Paris Show	6 September 2019
21	402/K/KPI/31.2/09/2019	TRANS 7	Opera Van Java	6 September 2019
22	406/K/KPI/31.2/09/2019	TV ONE	Kabar Utama	9 September 2019
23	472/K/KPI/31.2/10/2019	TRANS 7	Ini Baru Empat Mata	3 Oktober 2019
24	5347/K/KPI/31.2/11/2019	SCTV	Anak Langit	18 November 2019

25	555/K/KPI/31.2/11/2019	TV ONE	Indonesia Lawyers Club	28 November 2019
26	556/K/KPI/31.2/11/2019	TAPPAI	Indonesia Lawyers Club	28 November 2019
27	584/K/KPI/31.2/11/2019	ANTV	Pesbukers	11 Desember 2019
28	03/K/KPI/31.2/01/2020	NET.	Jalan Kesembuahan: Angga Praja Buana	9 Januari 2020
29	51/K/KPI/31.2/01/2020	TRANS 7	Redaksi Sore	3 Februari 2020
30	18/K/KPI/31.2/01/2020 50/K/KPI/31.2/01/2020	TAPPAI dengan TV ONE	Indonesia Lawyers Club	13 Februari 2020
31	83/K/KPI/31.2/02/2020	LPB: Fox Action Movies	Dead Trigger Unkilled The Super Living Among Us The Ranger	17 Februari 2020
32	126/K/KPI/31.2/03/2020	TVONE	Kabar Siang	5 Maret 2020
33	-	O'CHANNEL	Shoope Liga 1	9 Maret 2020
34	142/K/KPI/31.2/03/2020	METRO TV	Q&A	13 Maret 2020
35	206/K/KPI/31.2/04/2020	SCTV	Anak Langit dan Samudra Cinta	27 April 2020
36	231/K/KPI/31.2/05/2020	NET.	Jatanras	14 Mei 2020
37	274/K/KPI/31.2/06/2020	NET.	Malam Malam	30 Juni 2020
38	275/K/KPI/31.2/06/2020	SCTV	Buanglah Cinta Dihatiku	30 Juni 2020

39	319/K/KPI/31.2/07/2020	TVONE	Apa Kabar Indonesia Pagi	16 Juli 2020
40	424/K/KPI/31.2/09/2020	LIVI ZHENG dengan METRO TV	Q&A	18 September 2020
41	485/K/KPI/31.2/10/2020	TRANS TV	Rumpi No Secret	15 Oktober 2020
42	564/K/KPI/31.2/11/2020	TVONE	Coffee Break	23 November 2020
43	565/K/KPI/31.2/11/2020	TRANS TV	Rumpi No Secret	23 November 2020
44	567/K/KPI/31.2/11/2020	TVRI	Klik Indonesia Pagi	23 November 2020
45	566/K/KPI/31.2/11/2020	TRANS 7	Ragam Indonesia	24 November 2020
46	591/K/KPI/31.2/11/2020	INEWS	Silet	7 Desember 2020
47	09/K/KPI/31.2/01/2021	TRANS 7	Selebrita Siang	18 Januari 2021
48	19/K/KPI/31.2/01/2021	ANTV	Program Siaran Asing	25 Januari 2021
49	32/K/KPI/31.2/01/2021	RTV	Program Siaran Asing	4 Februari 2021
50	336/K/KPI/31.2/04/2021	TVRI	Indonesia Sehat	15 April 2021
51	337/K/KPI/31.2/04/2021	GTV	Azan Subuh	15 April 2021
52	421/K/KPI/31.2/06/2021	NET.	Ruqyah	14 Juni 2021
53	507/K/KPI/31.2/08/2021	MNCTV RCTI	Iklan Cegah Stunting Iklan Pria Ber-KB Itu Keren	6 Agustus 2021

54	136/K/KPI/31.2/03/2022	INEWS	Morning Update	15 Maret 2022
55	373/K/KPI/31.2/07/2022	INEWS	Sergap	22 Juli 2022
56	561/K/KPI/31.2/12/2022	INEWS	Lapor Pak!	9 Desember 2022

Tabel 11. Mediasi dan Klarifikasi Tahun 2019-2022

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan data sanksi dari tahun 2019-2022 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah sanksi dari setiap tahunnya baik sanksi administratif teguran tertulis maupun penghentian sementara. Jika dilihat dari sanksi administratif teguran tertulis, selama tahun 2019-2022 terdapat tiga lembaga penyiaran yang berada di angka tertinggi yaitu Trans TV (39), Antv (30), dan iNews (28). Untuk sanksi teguran tertulis kedua, iNews (6), Trans TV (5), Trans 7 (3) merupakan lembaga penyiaran dengan jumlah sanksi tertinggi. Sedangkan pada sanksi administratif penghentian sementara, Trans TV juga menjadi lembaga penyiaran dengan sanksi tertinggi.

Tidak hanya sanksi administratif, kebijakan KPI lainnya yaitu mediasi dan klarifikasi juga mengalami penurunan pada tahun 2019-2022. Dengan jumlah penurunan data tersebut, harapannya kualitas tontonan yang disajikan lembaga penyiaran juga lebih baik dan sesuai dengan ketentuan P3SPS sehingga tidak hanya bersifat menghibur tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat.

## I. APRESIASI DAN ANUGERAH KPI 2019-2022

### 1. Anugerah Syiar Ramadan (ASR)



Sepanjang periode 2019-2022, pemberian apresiasi terhadap karya-karya terbaik insan media penyiaran pada Bulan Ramadan tetap dilaksanakan meskipun dalam situasi pandemi Covid-19. Tahun 2019/1440H, ASR dilaksanakan tanggal 15 Juli 2019 di Wisma mandiri I, Jakarta Pusat. ASR 2019 masih dibawah tanggung jawab komisioner periode 2016-2019. Kemudian sejak tahun 2020 sampai 2022, dilaksanakan oleh komisioner terpilih periode 2019-2022. Tahun

2020 ASR dilaksanakan di Kantor KPI Pusat, JL.Ir.H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, pada 11 Juli 2020/1441H secara virtual (*online*). Sementara tahun 2021 ASR dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2021/1442H di Auditorium Abdurahman Saleh gedung Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), disiarkan Youtube media center KPI Pusat. Tahun 2022, untuk pertama kali sejak pandemi, KPI melaksanakan ASR di Auditorium TVRI secara langsung. Pelaksanaan dilakukan pada 1 Juli 2022, disiarkan di TVRI dan Youtube KPI tanggal 3 Juli 2022.

Anugerah Syiar Ramadan setiap tahunnya bekerjasama antara KPI, Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan diselenggarakannya ASR ini untuk memicu semangat lembaga penyiaran yang bersangkutan, membuat sesuatu yang baik, positif serta berkualitas dalam upaya peningkatan nilai spiritual masyarakat.

Dari tahun 2019 sampai dengan 2022 terjadi penambahan kategori, dari 9 (sembilan) kategori pada ASR 2019, kemudian ASR 2020 berubah 10 (sepuluh), ASR 2021 ada 13 (tigabelas) kategori dan ASR 2022 menjadi 16 (enambelas) kategori. KPI memperluas cakupan kategori agar semakin memacu semangat berkarya dari lembaga penyiaran dalam berkompetisi menyajikan konten-konten terbaiknya.

Rekomendasi ASR, perlunya lebih memperkuat pesan-pesan keagamaan yang menambah ketakwaan dalam konten Ramadan, meningkatkan religius, meski dikemas dengan hiburan, namun tidak meninggalkan kesakralan kaum muslim yang berpuasa. Seperti penayangan iklan makanan dan minuman, tidak dikemas dengan vulgar dan detail terlihat orang minum dan makan pada saat siang hari sampai waktu berbuka.

<b>Tentang :</b>	<b>15 Juli 2019</b>	<b>11 Juli 2020</b>	<b>22 Oktober 2021</b>	<b>1 Juli 2022</b>
<b>Tema</b>	<i>“Industri Syariah untuk Kebangkitan Perekonomian Umat”</i>	<i>“Spiritualitas Siaran Ramadan di Tengah Pandemi”</i>	<i>“Syiarkan Siaran yang Membawa Kebaikan”</i>	<i>“Bangkit, Masalah untuk Indonesia yang Kuat”</i>
<b>Disiarkan</b>	Sosial Media KPI	Sosial Media KPI	Sosial Media KPI dan RRI Jakarta	Disiarkan tanggal 3 Juli 2022 oleh TVRI dan Sosial Media
<b>Verifikasi Program</b>	Dari verifikasi 111 program di stasiun TV dan Radio, didapatkan 40	Dari verifikasi 74 program didapatkan 39 program yang	Sebanyak 84 program siaran berasal dari 14 stasiun TV dan	Sebanyak 108 Program acara TV dan 75 acara Radio yang kemudian

	program yang menjadi nominasi dari 9 penganugerahan	menjadi nominasi dari 9 kategori penganugerahan	Radio yang kemudian diverifikasi.	diverifikasi.
<b>Juri</b>	14 Juri (KPI, MUI, Komisi I DPR RI, Kemenpora, Kemenag, PBNU dan PP Muhammadiyah)	14 Juri (KPI, Komisi I DPR RI, MUI, PBNU, PP Muhammadiyah)	15 Juri (KPI, MUI, Kemenpora dan Kemenag)	16 Juri (KPI, MUI, Kemenpora, Kemenag dan Tokoh Agama)
<b>Peserta</b>	TVRI dan LPS Televisi dengan Sistem Siaran Berjaringan	TVRI dan LPS Televisi dengan Sistem Siaran Berjaringan	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan Sistem Siaran Berjaringan, dan Radio Lokal	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan Sistem Siaran Berjaringan, dan Radio Lokal
<b>Kategori Anugerah dan Pemenang</b>	<p>9 Kategori Program dan Pemenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumenter: Menjemput Berkah (Trans7)</li> <li>2. Wisata Budaya Ramadan: Muslim Travellers/Eps. Jeju Korea Selatan (NET.)</li> <li>3. Talk Show : Halo Ustadz/ 17 Mei 2019 (iNews)</li> <li>4. Kultum : Mutiara Hati Quraish Shihab (SCTV)</li> <li>5. Ceramah: Indahnya Ramadan/Eps.1 3 Mei 2019 (tvOne)</li> <li>6. Sinetron : Para Pencari Tuhan Jilid 12 “ganti nasib”/Eps. 9 (SCTV)</li> <li>7. Reality Show: Kupenuhi PanggilanMu/Eps. Budi-Difabel Pembuat Kaki Palsu (NET.)</li> <li>8. Pencarian Bakat:</li> </ol>	<p>10 Kategori Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liputan Ramadan : Seputar iNews Pagi (Anak Pesantren) (RCTI)</li> <li>2. Future dan Dokumenter: Mesjid Bersejarah Nusantara (RTV)</li> <li>3. Wisata Budaya: Muslim Travelers (NET.)</li> <li>4. Dakwah Talk Show: Sahur Time (KompasTV)</li> <li>5. Dakwah Non Talk Show (Kultum): Mutiara Hati (SCTV)</li> <li>6. Dakwah Non Talk Show (Ceramah): Asmaul Husna (MetroTV)</li> <li>7. Film Animasi: Lorong Waktu (SCTV)</li> <li>8. Sinetron: Para Pencari Tuhan Jilid 13 (SCTV)</li> <li>9. Ajang Bakat: Beraksi di</li> </ol>	<p>13 Kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liputan Ramadan: Ramadan Kita (MetroTV)</li> <li>2. Future dan Dokumenter: Jalan Penyeru Kebaikan (RCTI)</li> <li>3. Wisata Budaya: Muslim Travelers (NET.)</li> <li>4. Dakwah Talk Show Televisi: Hikmah Podcast (RTV)</li> <li>5. Dakwah Non Talk Show (Kultum): Jelang Berbuka (tvOne)</li> <li>6. Dakwah Non Talk Show (Ceramah): Asmaul Husna (MetroTV)</li> <li>7. Anak: Doa Anak Sholeh</li> </ol>	<p>16 Kategori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Liputan Ramadan: Meniti Jalan Ilahi (RCTI)</li> <li>2. Future: Jalan Penyeru Kebaikan (RCTI)</li> <li>3. Dokumenter: Jejak Islam (TVRI)</li> <li>4. Film/FTV Religi: Ketika Cinta Bertasbih (iNews)</li> <li>5. Wisata Budaya: Muslim Travelers (NET.)</li> <li>6. Dakwah Talk Show Televisi (Dialog): Cerita Santri Ramadan (tvOne)</li> <li>7. Dakwah Non Talk Show (Kultum): Mengetuk Pintu Hati (SCTV)</li> <li>8. Dakwah Non Talk Show (Ceramah): Ustadz On The Road (RTV)</li> <li>9. Animasi Indonesia: Doa Anak Sholeh</li> </ol>

	<p>Akademi Sahur Indonesia (AKSI)/Eps. 14 Mei 2019 (Indosiar)</p> <p>9. TV Terbaik ASR 2019 : NET.</p> <p>Kategori Muda 2019 ASR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da'i Muda Inspiratif : Suwandi (AKSI Indosiar)</li> <li>- Grup Musik Muda Inspiratif: Aleehya</li> <li>- Host Muda Inspiratif: Muthia Amalia (Muslim Travelers – NET.)</li> <li>- Aktor Muda inspiratif: Silvia Anggraini (PPT-SCTV)</li> <li>- Production House Inspirasi Pemuda Indonesia: The Little Giantz (NUSSA-NET.)</li> <li>- Program Inspirasi Pemuda Indonesia: Titik Balik (iNews)</li> </ul> <p>Kategori Spesial Syariah ASR 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Literasi Keuangan Syariah: Metro TV “<i>Economics Challenges Special Ramadan</i>”</li> <li>- <i>Halal Lifestyle</i>:</li> </ul>	<p>Rumah Saja (Indosiar)</p> <p>10. TV Terbaik ASR 2020: SCTV</p> <p>10 Kategori Pemuda-Pemudi Inspiratif, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktor Muda Inspiratif: Syakir Daulay</li> <li>- Aktris Muda Inspiratif: Betari Ayu Almadania Laksminingrum</li> <li>- Penyanyi Pria Inspiratif: Fildan Rahayu</li> <li>- Penyanyi Wanita Muda Inspiratif: Nada Umayatul Awaliyah</li> <li>- Da'i Muda Inspiratif: Muhammad Azhari Nasution</li> <li>- Da'iyah Muda Inspiratif: Mumpuni Handayayekti</li> <li>- Qori Muda Inspiratif: Muzammil Hasballah</li> <li>- Qori'ah Muda Inspiratif: Nadia Hawasyi</li> <li>- Host Muda Inspiratif Lesti Kejora</li> <li>- Grup Musik Muda Inspiratif: The Amazing Putri Bani Harun (TAPBH)</li> </ul>	<p>(MNCTV)</p> <p>8. Sinetron: Para Pencari Tuhan Jilid 14 (SCTV)</p> <p>9. Ajang Bakat: Da'i Spesial Indonesia (iNews)</p> <p>10. Variety Show: Jelang Bedug (TVRI)</p> <p>11. Dakwah Radio: Pengajian Kauman (Radio Swadesi 107.8 FM Yogyakarta)</p> <p>12. Iklan: Susu Bear Brand</p> <p>13. TV Terbaik ASR 2021: Metro TV</p> <p>10 Kategori Pemuda-Pemudi Inspiratif, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktor Muda Inspiratif: Miqdad Addausy</li> <li>- Aktris Muda Inspiratif: Adinda Azani</li> <li>- Penyanyi Pria Inspiratif: Muhammad Ulul Azmi Askandar al-abshor (Gus Azmi)</li> <li>- Penyanyi Wanita Muda Inspiratif: Ummu Salamah</li> </ul>	<p>(MNCTV)</p> <p>10. Animasi Asing: Kisah Para Nabi Episode Nabi Nuh (Trans7)</p> <p>11. Sinetron: Amanah Wali 6 (RCTI)</p> <p>12. Ajang Bakat: Hafiz Indonesia (RCTI)</p> <p>13. Variety Show: Kemenangan Penuh Syukur (MetroTV)</p> <p>14. Dakwah Radio: Cawisan Sahur (RRI Palembang)</p> <p>15. Penghargaan Khusus: Para Pencari Tuhan (SCTV)</p> <p>16. TV Terbaik ASR 2022: RCTI</p> <p>11 Kategori Pemuda-Pemudi Inspiratif, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktor Muda Inspiratif: Lavicky Nicholas</li> <li>- Aktris Muda Inspiratif: Dinda Kirana</li> <li>- Penyanyi Pria Inspiratif: Fauzul Abadi (Faul Lida)</li> <li>- Penyanyi Wanita Muda Inspiratif: Syarifah Veryal Eisha Aqila Zulfikar Basyaiban (Veve Zulfikar)</li> <li>- Da'i Muda Inspiratif: Doni &amp; Dion Dharmawan</li> <li>- Da'iyah Muda Inspiratif: Shovi</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- NET. “<i>Muslim Travellers</i>”</li> <li>- Hijrah Lifestyle: MetroTV “<i>Dakwah on The Spot</i>”</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- (Alma)</li> <li>- Da’i Muda Inspiratif: Rian Adji Prasetyo (Gus Rian)</li> <li>- Da’iyah Muda Inspiratif: Syifa Nurfadhilah</li> <li>- Qori Muda Inspiratif: Syamsuri Firdaus</li> <li>- Qori’ah Muda Inspiratif: Nabila Abdul Rahim Bayan</li> <li>- Host Muda Inspiratif: Shaza Belladona</li> <li>- Grup Musik Muda Inspiratif: Adam (grup vokal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maryam Qori Muda Inspiratif: Syamsuri Firdaus</li> <li>- Qori’ah Muda Inspiratif: Fathmah Muthi’ah</li> <li>- Host Muda Inspiratif: Rania Sukandari</li> <li>- Pemuda Hebat Difabel Inspiratif: Aditya</li> <li>- Grup Musik Muda Inspiratif: Qasidah Ezzura</li> </ul>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 12. Pelaksanaan Anugerah Syiar Ramadan 2019-2022

## 2. Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA)

Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2019 dilaksanakan pada 25 Juli 2019 di Auditorium Abdurahman Saleh, Gedung Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta Pusat. Kegiatan ini masih dibawah tanggung jawab Komisioner Periode 2016-2019, sementara tahun 2020 sampai 2022 sudah dipegang

oleh komisioner periode 2016-2019. APRA 2020 dilaksanakan di Kantor KPI Pusat. Tahun 2021 dan 2022 penyelenggaraan APRA di Auditorium Abdurahman Saleh, Gedung Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta Pusat.

Anugerah Penyiaran Ramah Anak setiap tahun bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA). Adapun tujuan APRA untuk memicu peningkatan kesadaran lembaga penyiaran agar menyuguhkan program siaran anak yang sehat dan berkualitas.

Rekomendasi dari APRA adalah perlunya memasifkan literasi media di kalangan anak dan remaja, tujuannya agar anak dan remaja mendapat pemahaman yang baik tentang penggunaan media. APRA 2020 sampai 2022 mulai melibatkan radio untuk berpartisipasi memberikan program terbaiknya untuk berkompetisi.

Sementara tema tahun 2022, “Bangga Budaya Cinta Indonesia” bermaksud menanamkan kepedulian terhadap budaya Indonesia melalui penyiaran anak. Melalui siaran yang di dalamnya mengandung nilai-nilai tentang kebanggaan pada budaya akan menanamkan dan menimbulkan rasa cinta terhadap negeri ini, khususnya pada anak-anak.

<b>Tentang:</b>	<b>25 Juli 2019</b>	<b>11 Juli 2020</b>	<b>27 November 2021</b>	<b>13 Agustus 2022</b>
<b>Tema</b>	<i>“Berkarya Cerdas, untuk Anak Indonesia”</i>	<i>“Siaran Ramah, Anak Sehat di Rumah”</i>	<i>“Anak Indonesia, Inspirasi Kita”</i>	<i>“Bangga Budaya Cinta Indonesia”</i>
<b>Disiarkan</b>	Media Sosial KPI	Media Sosial KPI	Media Sosial KPI dan RRI Jakarta	Media Sosial KPI
<b>Juri</b>	12 Juri (KPI, Komisi I dan Komisi VIII DPR RI, Kemen-PPPA RI, Komisi Perlindungan Anak (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Yayasan Pengembangan Media Anak, Akademisi, LSM/pemerhati soal anak)	17 Juri (KPI, Komisi I dan X DPR RI, Kemen-PPPA RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pemerhati Anak)	17 Juri (KPI, Komisi I DPR RI, Kemen-PPPA RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pemerhati Anak dan Akademisi)	16 Juri (KPI, Komisi I, V, X DPR RI, Kemen-PPPA RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pemerhati Anak dan Akademisi)
<b>Peserta</b>	TVRI dan LPS Televisi dengan Sistem Siaran	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan

	Berjaringan	Sistem Siaran Berjaringan, dan Radio Lokal	Sistem Siaran Berjaringan, dan Radio Lokal	Sistem Siaran Berjaringan, dan Radio Lokal
<b>Kategori Anugerah dan Pemenang</b>	7 Kategori Program: 1. Animasi Indonesia: Petualangan Si Unyil (Trans7) 2. Animasi Asing: Pada Zaman Dahulu (MNCTV) 3. Variety Show: Fun Time (RTV) 4. Feature/Dokumenter: Laptop Si Unyil (Trans7) 5. Sinetron anak/remaja: Lenong Legenda (MNCTV) 6. Anak Radio : Pelangi Nusantara (RRI Jember) 7. Favorit Anak-Anak: Nussa (NET)	10 Kategori Program: 1. Animasi Indonesia: Petualangan Si Unyil (Trans7) 2. Animasi Asing: Upin Ipin : MNCTV 3. Dokumenter: Cerita Minggu Pagi (TVRI) 4. Feature: Si Bolang (Trans7) 5. Variety Show: Dubi Dubi Dam (RTV) 6. Pendidikan Anak Indonesia: Laptop si Unyil: Trans7 7. Anak Radio: Lagu dan Belajarnya Anak Wamena (LABEWA) – RRI Wamena 8. Peduli Anak 2020 : Dunia Anak (RRI Pontianak) 9. Televisi Terbaik Program Anak: Trans7 10. Televisi Ramah Anak 2020: TVRI	11 Kategori Program: 1. Animasi Indonesia: Petualangan Si Unyil (Trans7) 2. Animasi Asing: Upin Ipin : MNCTV 3. Dokumenter: Anak Indonesia (TVRI) 4. Feature: Si Bolang (Trans7) 5. Variety Show: Buah Hatiku Sayang (TVRI) 6. Pendidikan Anak Indonesia: Michel Tjandra Luar Biasa Eps. Keluarga Jagoan (RTV) 7. Anak Radio: Sekar Rere/Dolanan Anak-Anak Budaya Bali (Radio Nuansa Giri) 8. Televisi Terbaik Program Anak 2021: Trans7 9. Televisi Ramah Anak 2021 : RTV 10. Televisi Peduli Pendidikan Anak 2021 : TVRI 11. Radio Peduli Anak 2021 : Radio Konota 100.9 FM (Surakarta)	13 Program: 1. Animasi Indonesia: Riko The Series (RTV) 2. Animasi Asing: Treasure Trekkers (Trans7) 3. Variety/Reality Show: Idola Cilik (RCTI) 4. Feature/Dokumenter: Si Otan (Trans7) 5. Keluarga Indonesia: Ibu Pintar (Trans7) 6. Dongeng Radio: Kreativitas Anak (RRI Bogor) 7. Anak Radio: Belajar dari Permainan (RRI Atambua) 8. Pendidikan Anak: Michael Tjandra Luar Biasa (RTV) 9. Penghargaan Khusus: Si Bolang (Trans7) 10. Televisi Terbaik APRA 2022: Trans7 11. Televisi Ramah Anak : RTV 12. Televisi Peduli Pendidikan Anak Indonesia: TVRI 13. Radio Peduli Anak: Tetjo Buntung 99.4 FM Yogyakarta

Tabel 13. Tabel. Pelaksanaan Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2019-2022

### 3. Anugerah KPI



Anugerah KPI diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap lembaga penyiaran atas kerja insan televisi dan radio, dalam menghadirkan program siaran yang edukatif dan berkualitas. Tahun 2019 penyelenggaraan pada tanggal 4 Desember 2019 di Grand Studio Metro TV. Tahun 2020 Anugerah KPI diadakan tanggal 9 Desember 2020 di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional, di bilangan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, untuk tahun 2021 menjadi perhelatan yang ke 16 bagi Anugerah KPI yang berlangsung pada 17 Desember 2021 di Indosiar. Sementara tahun 2022 diselenggarakan di Studio Kompas TV, pada 15 Oktober 2022. Acara ini dimeriahkan pula oleh host dan artis ibukota sebagai hiburan. Kategori penghargaan mengalami perluasan setiap tahunnya, hal ini disebabkan dalam situasi pandemi, banyak industri TV yang mengalami keterpurukan baik dari sisi SDM maupun pendapatan. Maka KPI memberikan semangat bangkit dengan bersimpati dalam bentuk penghargaan terhadap beberapa kategori khusus, seperti: lembaga penyiaran peduli pandemi TV dan Radio, lembaga penyiaran peduli potensi muda Indonesia, dan perguruan tinggi peduli penyiaran.

Sementara konsentrasi di tahun 2022 penambahan kategori pada kategori ajang bakat dan konten TV lokal non berjaringan. Tujuannya untuk mengapresiasi kreativitas daerah yang pada akhirnya mampu bersaing di tingkat nasional atau bahkan global. Hadirnya kategori baru ini harapannya akan menumbuhkan talenta talenta dan kreativitas baru yang hadir di berbagai wilayah di Indonesia sehingga keberagaman konten pun dapat terus eksis di Televisi dan Radio.



Gambar 6. Panitia Anugerah KPI, penyelenggara (Indosiar), dan para tamu berfoto bersama (di antaranya terdapat komisioner KPI Pusat, KPID, LSF dan dari Kompas)

Respon baik datang dari Presiden RI, Joko Widodo, Menteri Kominfo RI, Johnny G. Plate yang memberikan apresiasi dan dukungan dalam bentuk pesan video singkat penyelenggaraan Anugerah KPI 2021 menambah semarak acara, dan rekomendasi yang muncul untuk kegiatan ini agar media penyiaran (TV dan radio) mampu meningkatkan level kompetensinya dengan media-media berbasis internet. Yang terpenting media penyiaran harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan tidak tergoda oleh sensasi sesaat yang hanya mengejar rating dan share. Tahun 2022, pesan video juga disampaikan oleh Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid melalui VT. Dalam sambutannya mereka berharap, dengan adanya Anugerah KPI lembaga penyiaran termotivasi secara pekerjaan dan kreativitasnya.

Tentang:	4 Desember 2019	9 Desember 2020	17 Desember 2021	15 Oktober 2022
<b>Tema</b>	“Digitalisasi untuk Negeri”	“Semangat Kreativitas di Tengah Wabah”	“New Normal TV dan Radio”	“Bangkit Bersama Penyiaran Indonesia”
<b>Disiarkan</b>	Metro TV	Media Sosial KPI	Indosiar	Kompas TV
<b>Verifikasi Program</b>	KPI menerima 185 tayangan TV dan 130 siaran radio yang tersebar dalam 16	KPI menerima 235 Program acara TV serta 144 program	KPI menerima 143 siaran radio dari 50 stasiun radio, setelah diseleksi	KPI menerima 245 materi tayangan dari 18 televisi dan 81 materi tayangan

	kategori penghargaan	acara radio, program ini akan memperebutkan 23 kategori penghargaan.	menghasilkan 38 program memperebutkan 12 nominator.  KPI menerima 205 program siaran TV dari 19 stasiun TV, menghasilkan 172 program siaran yang dinilai juri untuk 14 kategori penghargaan	dari 54 radio. Proses seleksi awal menghasilkan 214 tayangan program siaran televisi dan 28 tayangan program siaran radio, yang dinilai juri untuk 23 kategori penghargaan.
<b>Juri</b>	21 Juri (KPI, Komisi I DPR RI, psikolog, sutradara, kritikus film, praktisi perfileman, pengamat penyiaran, akademisi)	30 Juri (KPI, Komisi I DPR RI, perwakilan kementerian dan lembaga, LSF, Budayawan, akademisi, pengamat media, jurnalis senior)	30 Juri (KPI, Komisi I DPR RI, perwakilan kementerian dan lembaga, LSF, Budayawan, akademisi, pengamat media, jurnalis senior)	30 Juri (KPI, Komisi I dan IX DPR RI, perwakilan kementerian dan lembaga, LSF, PWI, Dewan Pers, BBC Media Action, akademisi, pengamat media, jurnalis senior)
<b>Peserta</b>	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan Sistem Siaran Berjaringan, dan Radio Lokal, rekomendasi KPID untuk LPK	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan Sistem Siaran Berjaringan, dan Radio Lokal, rekomendasi KPID untuk LPK dan pemda peduli penyiaran, kepala daerah peduli penyiaran dan konten lokal	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan Sistem Siaran Berjaringan, dan Radio Lokal, rekomendasi KPID untuk LPK dan pemda peduli penyiaran, kepala daerah peduli penyiaran dan konten lokal	LPP (TV dan Radio), LPS Televisi dengan Sistem Siaran Berjaringan, dan Radio Lokal, rekomendasi KPID untuk TV Lokal Non Berjaringan, LPK dan Pemda Peduli penyiaran
<b>Kategori Anugerah dan Pemenang</b>	<b>13 Penghargaan Program Televisi Kategori :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anak: Si Bolang “Pewaris Budaya Dayak Deah” (Trans 7)</li> <li>Animasi: Adit Sopo Jarwo “Eyang Bikin Pesawat Semua Sepakat” (MNC TV)</li> <li>Drama Seri: Para Pencari Tuhan, Eps. 12, Ganti Nasib (SCTV)</li> <li>Film Televisi:</li> </ol>	<b>13 Penghargaan Program Televisi, Kategori:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anak : Si Bolang (Trans 7)</li> <li>Animasi : Petualangan Si Unyil (Trans 7)</li> <li>Drama Seri: Amanah Wali 4 (RCTI)</li> <li>Film Televisi : Sinema Wajah Indonesia</li> </ol>	<b>14 Penghargaan Program Televisi, Kategori:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anak : Si Bolang (Trans 7)</li> <li>Animasi : Petualangan Si Unyil (Trans 7)</li> <li>Drama Seri: Para Pencari Tuhan Jilid 14 (SCTV)</li> <li>Film Televisi : Preman Pensiun “Manusia Merdeka” (RCTI)</li> <li><i>Talkshow Berita</i></li> </ol>	<b>16 Penghargaan Program Televisi, Kategori:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anak : Si Otan Eps. Millestone Tanjung Puting (Trans 7)</li> <li>Animasi : Bima (RCTI)</li> <li>Wisata Budaya Televisi: Indonesia Authentic Places: labuan Bajo (MNCTV)</li> <li>Konten Lokal Televisi Berjaringan:</li> </ol>

	Sinema Wajah Indonesia, Eps. Lubang Tikus (SCTV)	(Episode Senyummu Surgaku) SCTV	: Apa Kabar Indonesia Malam (tvOne)	Pesona kepulauan Maluku (NET.)
5.	Talkshow Berita: Aiman (Kompas TV)	5. <i>Talkshow Berita</i> : Mata Najwa (Trans 7)	6. <i>Talkshow Non-Berita</i> : Kalam Hati (KompasTV)	5. <i>Talkshow Non-Berita</i> : Kick Andy Episode Hingga Diantara Hitam dan Putih (MetroTV)
6.	Talkshow Non-Berita: Kick Andy “Dua Hati Berbagi” (Metro TV)	6. <i>Talkshow Non-Berita</i> : Michael Tjandra Luar Biasa (RTV)	7. Televisi Wisata Budaya: Pesona Indonesia (TVRI)	6. <i>Talkshow Berita: ROSI</i> : Skenario Sambo dan Diamnya Sang Istri (KompasTV)
7.	Wisata Budaya: Jejak Petualang (Trans 7)	7. Wisata Budaya : Sapa Nusantara (Episode Sumenep) (Kompas TV)	8. Berita/Jurnalistik: Realitas (MetroTV)	7. Berita/Jurnalistik : FAKTA: duka di Kaki Semeru (tvOne)
8.	Berita/Jurnalistik: Seputar iNews Siang (RCTI)	8. Berita/Jurnalistik: CNN Indonesia Connected (Trans TV)	9. Peduli Perempuan : Perempuan Bicara (tvOne)	8. Peduli Perempuan: Dokter Trevelers Episode Samosir (TransTV)
9.	Peduli Perempuan: Bicara Indonesia, Eps. 5 (Jawa Pos TV)	9. Peduli Perempuan : Berkas Kompas (Kompas TV)	10. Peduli Disabilitas : Sapa Indonesia Malam (KompasTV)	9. Iklan Layanan Masyarakat Televisi: ILM Digital (GTV)
10.	Peduli Disabilitas: Inspirasi Indonesia “Man Jadda WaJada (TVRI)	10. Peduli Disabilitas : Berkas Kompas (Episode Derita Ganda Anak Berkebutuhan Khusus) (Kompas TV)	11. Dokumenter: The Legend Susi Susanti “Nasionalisme Susi Susanti” (MetroTV)	10. Drama Seri: Ikatan Cinta (RCTI)
11.	Dokumenter: Indonesia Dalam Peristiwa (TV ONE)	11. Dokumenter : Melawan Lupa (Metro TV)	12. Televisi Iklan Layanan Masyarakat: Harmonisasi Warisan Kemanusiaan dan Budaya (Trans7)	11. Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal televisi: Tapal Batas: Menanti Cahaya Bulan di Pulau Timur (TVRI)
12.	Iklan Layanan Masyarakat: Stop Hoax (Indosiar)	12. Iklan Layanan Masyarakat : ILM Peduli Covid-19 versi Presenter tvOne (tvOne)	13. Televisi Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal : Bakti Untuk Negeri (Metro TV)	12. Peduli Disabilitas: Hikmah 17 Juli 2022 (Trans7)
13.	Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal: The Nation “Air Untuk Sumba” (Metro TV)	13. Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal : Melihat	14. Konten Lokal Lembaga Penyiaran Berjaringan: Indosiar	13. Dokumenter: The Unfold Story – Pemuda dalam Pusaran Sejarah (iNews)
	<b>3 Penghargaan Program Radio, Kategori:</b>		<b>3 Penghargaan Program Radio, Kategori:</b>	14. Ajang Bakat: D’Academy Season 5 (Indosiar)
1.	Wisata Budaya: Grebeg Suran Baturaden (RRI Purwokerto)		1. Radio Wisata Budaya: RRI	15. Film Televisi:
2.	Iklan Layanan Masyarakat: Kursi Prioritas (MNC Trijaya)			
3.	Program			

	<p>Penyiaran Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal: Aku Pulang Padamu Indonesia (RRI Boven Digoel)</p> <p><b>3 Penghargaan KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Radio Komunitas Terbaik: Perkumpulan Radio Komunitas Swara Pendidikan Singkawang (Rapensi) Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>2. Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran: Provinsi Jawa Barat</li> <li>3. Pengabdian Seumur Hidup: Ismid Hadad</li> </ol>	<p>Indonesia (METRO TV)</p> <p><b>3 Penghargaan Program Radio, Kategori:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wisata Budaya : Surga di Balik Seribu Musamus RRI Merauke)</li> <li>2. Iklan Layanan Masyarakat : PSA Pilkada (Prambors Rado)</li> <li>3. Penyiaran Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal: Tak Patah Semangat Belajar Walau Minim Sinyal (RRI Sintang)</li> </ol> <p><b>7 Penghargaan KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Radio Komunitas Terbaik: Perkumpulan Lembaga Penyiaran Komunitas RADIO HANACAR AKA FM DIY</li> <li>2. Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran: PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR</li> <li>3. Program</li> </ol>	<p>Banjarmasin</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Radio Iklan Layanan Masyarakat: RRI Fak-Fak</li> <li>3. Radio Penyiaran Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal Radio: RRI Tarakan</li> </ol> <p><b>8 Penghargaan KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Radio Komunitas Terbaik: Radio Komunitas Taratak, Sumatera Barat</li> <li>2. Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran: Kepulauan Riau</li> <li>3. Lembaga Penyiaran Televisi Peduli Pandemi : TVRI</li> <li>4. Lembaga Penyiaran Radio Peduli Pandemi : Elshinta</li> <li>5. Kepala Daerah Inspirasi Penyiaran: Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny Pomanto) (Walikota Makasar)</li> <li>6. Lembaga Penyiaran Peduli Potensi Muda Indonesia : Indosiar</li> <li>7. Perguruan tinggi peduli penyiaran : 12 Perguruan tinggi</li> <li>8. <i>Lifetime Achievement:</i> Jacob Oetama</li> </ol>	<p>Sinema Wajah Indonesia – Mencari Imam (SCTV)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>16. Televisi Lokal Non Berjaringan: Mimpi Jadi Nyata - Kasih Tak Terbatas (DAAI TV Jakarta)</li> </ol> <p><b>3 Penghargaan Program Radio, Kategori:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wisata Budaya Radio: Mutiara yang Diwarisi (RRI Bukit Tinggi)</li> <li>2. Iklan Layanan Masyarakat Radio: Jauhi Radikalisme (RRI Kediri)</li> <li>3. Penyiaran Peduli Perbatasan dan Daerah Tertinggal Radio: Sejumput Asa Berlampung Dahar (RRI Lhoksumawe)</li> </ol> <p><b>4 Penghargaan KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran: Pemerintah Provinsi Bali dan Sumatera Barat</li> <li>2. Radio Komunitas Terbaik: Radio Komunitas Panji FM Pangandaran</li> <li>3. Penghargaan Khusus Televisi : Kompas TV</li> <li>4. <i>Lifetime</i></li> </ol>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Konten Lokal Lembaga Penyiaran: Sapa Sulteng – Palu (Episode Suara Perdamaian dari Perempuan Poso) KOMPAS TV</p> <p>4. Lembaga Penyiaran Televisi Peduli Pandemi : METRO TV</p> <p>5. Lembaga Penyiaran Radio Peduli Pandemi : RRI PRO 3 JAKARTA</p> <p>6. Kepala Daerah Inspirasi Penyiaran: WALIKOTA ACEH, Bapak H. Aminullah Usman, SE, Ak. M.M</p> <p>7. Lembaga Penyiaran Peduli Pendidikan di Masa Pandemi: TVRI</p>		<p><i>Achievement:</i> Sambas Mangundikarta</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------

Tabel 14. Pelaksanaan Anugerah KPI 2019-2022

## II. BIMTEK SDM PENYIARAN KPI

### Sekolah P3 & SPS

Sebagai regulator penyiaran, KPI memiliki tugas memastikan bahwa pelaku dan insan penyiaran harus memahami arah penyiaran Indonesia dan kompeten dibidangnya. Upaya ini mau tidak mau harus melihat hulu, pelaku dan insan penyiaran dengan harapan mereka memahami dan memperhatikan arah penyiaran kita. Selain itu bagian hilir, yakni masyarakat selaku penonton siaran Televisi dan Radio. Maka, bentuk pemenuhan tugas dan fungsi KPI dalam menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran, dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis atau yang lebih dikenal dengan Sekolah P3SPS.

Selain itu, pembentukan Sekolah P3SPS, bermula dari fenomena penemuan kesalahan atau pelanggaran berulang yang terjadi pada siaran Televisi dan Radio. KPI ingin ada penyamaan dalam pemahaman teknis dan etika yang harus dijalani praktisi penyiaran di Indonesia. Melalui Sekolah, KPI mengundang peserta yang terdiri dari praktisi penyiaran, akademisi, mahasiswa dan masyarakat.



Gambar 7. Narasumber (Komisioner) dan Peserta Sekolah P3SPS berfoto bersama di akhir kegiatan Sekolah P3SPS Angkatan 44, 5-6 Februari 2022 di Bali

Sedikit mengulas kilas balik Sekolah P3SPS. Peluncuran Sekolah P3SPS dimulai sejak tanggal 21 April 2015 bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Hingga kini, Sekolah P3SPS telah menjadi program tetap KPI, dan di tahun 2022, Sekolah P3SPS telah mencapai Angkatan ke-45. Untuk setiap angkatan, KPI membuka 30-40 peserta. Dalam

perkembangannya, di tahun 2020, KPI mengeluarkan Modul Sekolah P3SPS dalam bentuk Buku yang dibagikan kepada pengajar maupun peserta Sekolah P3SPS.

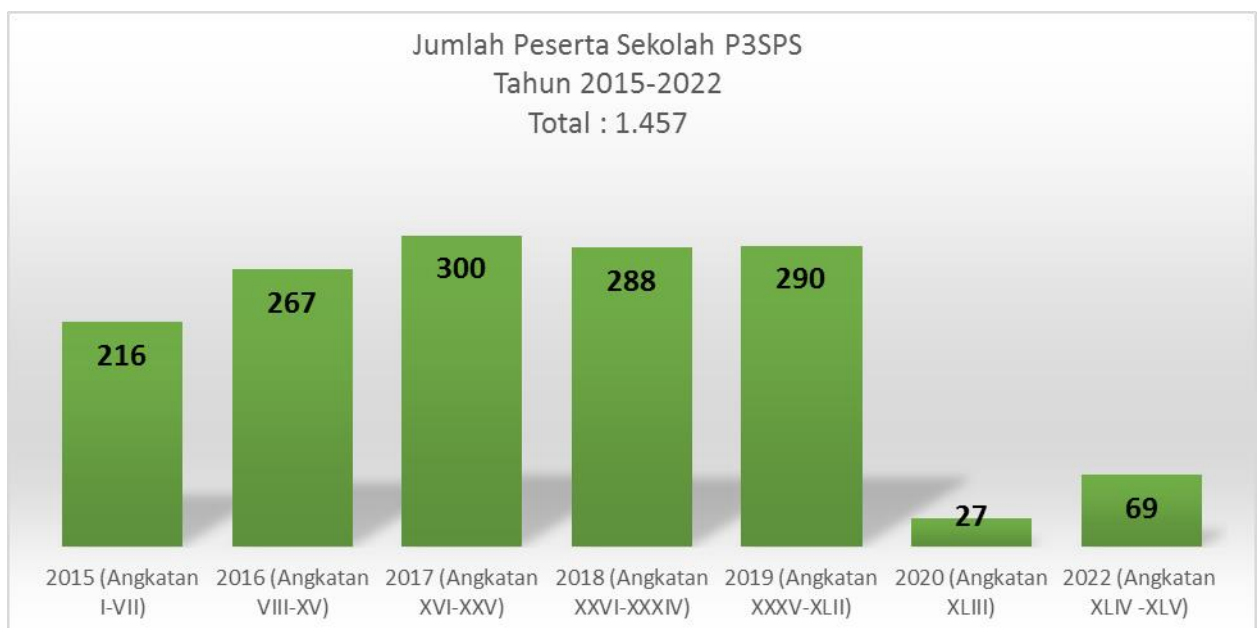
Kurikulum pendidikan yang dilaksanakan selama 2-3 hari berisi studi kasus dari tayangan yang hadir sehari-hari agar teori di dalam P3SPS dapat dipahami dengan benar. Nantinya peserta mendapat tugas atau ujian akhir berupa paper analisis tayangan, sehingga mereka bisa melihat dan mengkritisi apa yang salah dari lembaga penyiaran mereka untuk perbaikan ke depannya.

Beberapa hal yang membuat Sekolah P3SPS terlihat berbeda selama periode 2019-2020, yakni pergantian Komisioner periode 2016-2019 ke Periode 2019-2022. Sekolah P3SPS tentu saja mengalami penyesuaian dan perkembangan. Pergantian ini termasuk kepala sekolah yang periode sebelumnya diemban Mayong Suryo Laksono, digantikan periode oleh Mulyo Hadi Purnomo. Kemudian pada periode 2019-2022 telah terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya pelaksanaan Sekolah P3SPS. Sekalipun dijalankan, secara teknis KPI harus menerapkan kepada peserta mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan menjaga jarak, memakai masker, peserta melakukan antigen dan vaksin, dan dilakukan *full* melalui daring (*online*), seperti Sekolah P3SPS atas kerjasama KPI dan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), dan kombinasi daring dan luring pada Angkatan XLIV di Bali.

No.	Angkatan	Tanggal	Tempat	Peserta	Dosen Tamu
<b>Tahun 2019</b>					
1.	XXXV	24 – 25 Januari 2019	Kendari	35	Prof. Dr. M. Zamrun Firihi (Rektor Universitas Halu Oleo)
2.	XXXVI	12 – 14 Februari 2019	Jakarta	35	Imam Wahyudi (Dewan Pers)
3.	XXXVII	29 – 30 Maret 2019	Banjarmasin	35	Prof. Dr. H. Sutarto Hadi, M. Si., M.Sc (Rektor ULM Banjarmasin)
4.	XXXVIII	10 -11 April 2019	Palembang	35	Indra Gunawan (Deputi V KPPPA)
5.	XXXIX	25 -26 Juni 2019	Bogor	35	Sri Danti Anwar (Staf Khusus Menteri KPPPA)
6.	XL	16-18 Juli 2019	Jakarta	35	Maman Suherman
7.	XLI	18-20 Sept 2019	Jakarta	38	Maman Suherman
8.	XLII	26-28 November 2019	Jakarta	42	Mayong Suryo Laksono
<b>Tahun 2020</b>					

9.	XLIII	30-31 Maret 2020	Solo	27	Ezki Suyanto (Pengamat Media) Hari Wiryawan (Akademisi/Pengamat Media)
<b>Tahun 2021</b>					
10.		30-31 Juli 2021	Jakarta		Kerjasama dengan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) (dilakukan <i>online</i> )
<b>Tahun 2022</b>					
11.	XLIV	5-6 Februari 2022	Bali	29	Agus Sunarto (Direktur VOA Jakarta) Eva Mazrieve (Editor Senior, VOA Indonesia di Washington) Dr. Nengah Muliarta (Akademisi) I Gede Agus Astapa (Ketua KPID Bali Periode 2021-2024)
12.	XLV	17-18 Maret 2022	Jogjakarta	40	H.Sukamta, Ph.D (Anggota Komisi I DPR RI) Darmanto, S.Pd.,MPA (Pengamat Media) Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A (Ketua KPID DIY Periode 2020-2023)

Tabel 15. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis SDM Penyiaran (Sekolah P3SPS) Tahun 2019-2022



Grafik 50. Grafik. Jumlah Keseluruhan Peserta Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis SDM Penyiaran (Sekolah P3SPS) Tahun 2015 - 2022

Tabel di atas adalah rincian pelaksanaan Sekolah P3SPS sepanjang periode 2019-2022. Sementara grafik batang di atas menggambarkan jumlah peserta dari angkatan pertama sampai dengan Angkatan 45 (2015-2022), total jumlah peserta Sekolah P3SPS sebanyak **1.457 orang**.

Sementara di tahun 2021, masih dalam suasana pandemi Covid-19, KPI bekerjasama dengan ATSDI pada tanggal 30-31 Juli 2021 telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Penyiaran Televisi di bawah naungan ATSDI yang beranggotakan 68 stasiun TV Digital. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut perkembangan proses digitalisasi penyiaran, terutama berkaitan dengan percepatan transformasi digital khususnya bidang penyiaran. Ditambah kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan MOU antara KPI dan ATSDI. Peserta yang dilibatkan di dalam Sekolah P3SPS hasil kerjasama dengan ATSDI sekitar **60 an peserta** yang dilakukan secara *daring*.

Pada tanggal 24 Maret 2022, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran juga memenuhi undangan TransTV yang menginginkan Sekolah P3SPS bagi SDM di lingkungan Transmedia yang berjumlah **sekitar 50 orang**. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dalam produksi dan penyiaran program siaran. Adapun bentuk pertemuan tersebut berupa diskusi penyamaan persepsi pemahaman P3SPS dan regulasi penyiaran.

Rekomendasi dari pelaksanaan Sekolah P3SPS, KPI harus memiliki strategi meningkatkan pengawasan di era digitalisasi penyiaran, baik peningkatan secara teknis peralatan, kualitas SDM KPI (Internal), dan meningkatkan profesionalitas serta pemahaman regulasi SDM dan insan Penyiaran (eksternal). Kedua, KPI harus meyakinkan ke masyarakat bahwa lembaga penyiaran Televisi dan Radio masih menjadi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan karena masih dalam pengawasan KPI. Ketiga, KPI harus bekerjasama dengan berbagai pihak (mitra dan *stakeholder*) untuk penguatan kelembagaan terkait kewenangan dan kebijakan pengawasan media lainnya.

### **Bimtek Tenaga Pemantau Siaran KPI Pusat**

Jika Sekolah P3SPS bertujuan meningkatkan SDM Penyiaran yang profesional baik internal (tenaga pemantau KPI) maupun eksternal (praktisi penyiaran). Maka KPI juga menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis yang ditujukan kepada tenaga pemantau isi

siaran KPI dengan tema: “Bimbingan Teknis Pendalaman Materi P3SPS”, pada Rabu-Jumat, 27-29 April 2020 di Hotel Alana, Sentul Bogor.

Kegiatan yang dimulai dengan pre test dan diakhiri dengan post test ini dilaksanakan secara daring dan luring. Narasumber yang dihadirkan antara lain : Prof. Dr. Antar Venus (akademisi), Aris Ananda (Praktisi Media), M.Riyanto (Praktisi Media), Asep Setiawan (Dewan Pers), Bambang Sumaryanto (Dewan Periklanan Indonesia) dan Idy Muzayad (Pemerhati Media). Setelah pemberian materi, kegiatan berlanjut pada permainan yang bertujuan meningkatkan tim work peserta.



Gambar 8. Peserta Bimtek Menyimak Penjelasan Narasumber

Masih di tahun 2020, KPI mengadakan kembali *Capacity Building* SDM Pemantauan KPI dengan tema: “Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Pemantauan menuju Penyiaran Digital” pada 16-18 November 2020 di Royal Safari Garden Resort and Convention, Cisarua, Bogor. Dalam kesempatan itu KPI mengundang narasumber dari luar antara lain: M.Riyanto (Praktisi Media) dan Ezki Suyanto (Pemerhati media), narasumber lainnya adalah dari Komisioner KPI Pusat.

Tahun 2021, KPI melakukan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM dengan tema: “Peningkatan Kualitas SDM KPI Menghadapi Transformasi Digital”, di *Jeep Station Indonesia*, Megamendung, Bogor pada 21-23 Desember 2021. Narasumber yang dihadirkan adalah: Prof.Judhariksawan (Akademisi dari universitas Hasanudin, Makasar), Ismail Fahmi (Pengamat Media), Christina Yulita Purbawati (Komnas Perempuan), Muhammad Syauqi (SCB Consulting) dan Dian Kartika Sari (Ketua Tim Penanganan Kasus Kekerasan di KPI). Peserta Bimtek SDM yang berjumlah 238 orang peserta ini mengikuti kegiatan selama 3

(tiga) hari, salah satu kegiatannya adalah outbond, dan ditutup dengan malam keakraban dan pentas seni.



Gambar 9. Peserta Bimtek SDM mengikuti kegiatan outbond di halaman JSI, 21-23 Desember 2021

Tahun 2022, Bimbingan Teknis peningkatan Kualitas SDM KPI mengangkat tema: *“Kerja Cerdas, Kerja Cermat, untuk Lebih Bermanfaat”*, pada 21-23 Desember 2022 di Green Forest, Bogor. Narasumber yang dihadirkan adalah: Maman Suherman (Pengamat Media) yang membawa tema: *“P3SPS Menjawab Kekosongan Aturan dalam Perkembangan Program Siaran di Era Digital”*, narasumber kedua, Bayu Wardhana (Koalisi Reformasi Nasional Penyiaran) yang menampilkan judul materi: *“Kualitas Pengawasan KPI”* dan narasumber motivator, Apud Kusaeri yang menyajikan presentasi tentang *“Internalisasi Budaya Kerja di KPI”*. Peserta Bimtek SDM yang berjumlah 266 orang peserta ini mengikuti kegiatan selama 3 (tiga) hari, salah satu kegiatannya adalah outbond, dan ditutup dengan malam keakraban (*“Cerita Malam Jumat”*). Dalam Bimtek SDM ini menghasilkan rekomendasi, Bimtek SDM membentuk karakter SDM KPI menjadi lebih baik dalam bekerja dan bekerja sama dengan tim. Ada baiknya tidak diadakan setahun sekali namun lebih dari satu kali dalam setahun. Kedua, Masukan di dalam diskusi menjadi referensi kebijakan komisioner dalam menghadapi penyiaran digital, terutama terkait pemantauan dan pengawasan konten siaran TV dan Radio.



Gambar 10. Peserta Bimtek SDM KPI, 21-23 Desember 2022

### ***Training Of Trainer Pengawasan isi Siaran***

Menuju era digital akan banyak yang harus dipersiapkan, jumlah TV dan kontennya kian bertambah. Tidak hanya persiapan teknis dalam sistem pengawasan siaran digital, tetapi juga harus didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan cekatan. Oleh sebab itu KPI menyelenggarakan kegiatan Training of Trainer Pengawasan isi Siaran yang mengambil tema: “*Peningkatan Kapasitas SDM Penyiaran di Era Digital*”. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 29-31 Mei 2022 di Hotel Swiss Belinn, Bogor.

Narasumber kegiatan diisi oleh para motivator dan pengajar adalah: Ulil Abshar Abdala (Ketua Lapesdam PBNU), Totok Suryanto (Dewan Pers), Ade Yaya Suryana (Kombes Polri), Dede Apriadi (ATVNI), dan Gilang Iskandar (ATVSI). Selebihnya Sekretaris KPI Pusat, Umri dan komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, Mulyo Hadi Purnomo, Irsal Ambia dan Mohamad Reza memberikan arahan kepada peserta. Komisioner lainnya hadir secara daring.

TOT yang menghadirkan 41 (empat puluh satu) peserta ini mempunyai rekomendasi: agar KPI mempersiapkan rencana pembuatan skema pemantauan atau pengawasan secara langsung yang canggih, mudah dan efisien untuk diterapkan di seluruh KPI. Dalam hal ini, KPI harus memikirkan terobosan pemantauan secara langsung. Selain itu, penanganan pengaduan dari masyarakat juga dikelola dengan baik melalui aplikasi, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat. Keluaran (*output*) SDM KPI, melahirkan tenaga yang siap menjadi pendamping komisioner jika harus turun ke lapangan memberikan pencerahan kepada masyarakat akan siaran yang baik dan berkualitas.



Gambar 11. Komisioner dan Peserta TOT setelah mengikuti kegiatan selama 3 (tiga) hari

Jika digambarkan dalam bentuk tabel, kegiatan Bimbingan Teknis KPI sepanjang periode 2019-2022 terlihat sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Tempat	Tema	Narasumber	Jumlah Peserta
<b>Rabu-Jumat, 27-29 April 2020</b>	Hotel Alana, Sentul Bogor ( <i>Online dan Daring</i> )	“Bimbingan Teknis Pendalaman Materi P3SPS”,	Prof. Dr. Antar Venus (akademisi), Aris Ananda (Praktisi Media), M.Riyanto (Praktisi Media), Asep Setiawan (Dewan Pers), Bambang Sumaryanto (Dewan Periklanan Indonesia) dan Idy Muzayad (Pemerhati Media)	118 Peserta (Komisioner KPIP dan KPID, seluruh tenaga ahli isi siaran KPIP)
<b>Senin-Rabu, 16-18 November 2020</b>	Royal Safari Garden Resort and Convention, Cisarua, Bogor.	<i>Capacity Building</i> SDM Pemantauan KPI: “Peningkatan Efektivitas dan Kualitas Pemantauan menuju Penyiaran Digital”	M.Riyanto (Praktisi Media) dan Ezki Suyanto (Pemerhati media), narasumber lainnya adalah dari Komisioner KPI Pusat	233 Peserta (Komisioner KPIP dan KPID, seluruh tenaga pemantau isi siaran KPIP)
<b>Selasa-Kamis, 21-23</b>	<i>Jeep Stasion Indonesia,</i>	Bimbingan Teknis Peningkatan	Prof.Judhariksawan (Akademisi dari	238 Peserta (Komisioner

<b>Desember 2021</b>	Megamendung, Bogor	Kapasitas SDM dengan tema: “Peningkatan Kualitas SDM KPI Menghadapi Transformasi Digital”	universitas Hasanudin, (Makasar), Ismail Fahmi (Pengamat Media), Christina Yulita Purbawati (Komnas Perempuan), Muhammad Syauqi (SCB Consulting) dan Dian Kartika Sari (Ketua Tim Penanganan Kasus Kekerasan di KPI)	KPIP dan KPID, seluruh tenaga pemantau isi siaran dan staf KPIP)
<b>Minggu-Selasa, 29-31 Mei 2022</b>	Hotel Swiss Belinn, Bogor (Online dan Daring)	<i>Training of Trainer: “Peningkatan Kapasitas SDM Penyiaran di Era Digital”.</i>	Uilil Abshar Abdala (Ketua Lapeddam PBNU), Totok Suryanto (Dewan Pers), Ade Yaya Suryana (Kombes Polri), Dede Apriadi (ATVNI), dan Gilang Iskandar (ATVSI).	41 Peserta (Komisioner KPIP dan KPID, Tenaga Pemantau KPI Pusat)
<b>Rabu-Jumat, 21-23 Desember 2022</b>	Hotel Green Forest Bogor (The Forest Resort, Hotel and Convention)	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia KPI: “ <i>Kerja Cerdas, Kerja Cermat, untuk Lebih Bermanfaat</i> ”	Maman Suherman (Pengamat Media), Muhammad Apud Kusaeri (Motivator dari Trusco Vipta Madani), dan Bayu Wardhana (Pengurus Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran	266 Peserta (Komisioner KPIP, seluruh tenaga pemantau isi siaran, staf KPIP)

Tabel 16. Kegiatan Bimtek SDM KPI 2020-2022

#### IV. FGD BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN

Bidang Pengawasan Isi Siaran melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* demi menjawab dan lebih memastikan bahwa KPI Pusat dalam menerapkan peraturan P3 dan SPS sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, ada beberapa FGD yang dianggap penting untuk dilaksanakan oleh bidang Pengawasan Isi Siaran antara lain:

Bidang Pengawasan Isi Siaran melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* demi menjawab dan lebih memastikan bahwa KPI Pusat dalam menerapkan peraturan P3 dan SPS sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Ada beberapa FGD yang dianggap penting untuk dilaksanakan oleh bidang Pengawasan Isi Siaran antara lain:

#### FGD TAHUN 2019

- Kamis, 5 Desember 2019 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* “*Persiapan Pengawasan Atas Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pada Pilkada Tahun 2020 Di Televisi dan Radio*”. Dilaksanakan di Hotel Yello Hotel Harmoni pukul 10.00 sampai selesai.



Gambar 12. Suasana Diskusi terkait Iklan Kampanye

Yang melatarbalakangi kegiatan ini ialah Bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 akan dilaksanakan secara serentak di 270 daerah (9 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, 37 Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota).

Oleh sebab itu, untuk memberikan perlakuan yang adil dan mendapat ruang yang sama dalam pemberitaan, Penyiaran, dan iklan kampanye di televisi dan radio dalam masa kampanye, lembaga penyiaran perlu melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pada Pilkada tahun 2020 di televisi maupun radio. Hal tersebut sesuai dengan asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan aksesibilitas.

Ada 6 (enam) tujuan mengapa kegiatan ini diselenggarakan”

1. Mempersiapkan pengawasan dan pemantauan terhadap program siaran Pilkada tahun 2020 di televisi dan radio terkait pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;
2. Mendorong lembaga penyiaran untuk menyiarkan program siaran Pilkada yang adil dan berimbang sesuai dengan kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan aturan perundang-undangan;
3. Menindaklanuti laporan hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pada Pilkada tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan himbauan dalam rangka pencegahan pelanggaran dan pemberian sanksi kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan tentang pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;
5. Adanya pembahasan dan kesimpulan terkait dengan persiapan pengawasan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;
6. Tersedianya data, informasi, dan dokumentasi terkait dengan hasil pengawasan dan dugaan pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pada Pilkada tahun 2020



Gambar 13. Peserta Diskusi Berfoto Bersama Usai Kegiatan

Adapun narasumber yang hadir adalah Arief Suditomo (Pimpinan redaksi Metro TV), Titin Rosmasari (Kepala Divisi News Trans7), Neil R Tobing (Direktur PT Visi Media Asia Tbk), Mimah Susanti (Komisioner KPI Pusat), dan Mulyo Hadi

Purnomo (Komisioner KPI Pusat) dan peserta yang hadir, selain pejabat dan staf KPI Pusat, diundang pula sejumlah pimpinan dari lembaga penyiaran.

Ada 3 (tiga) kesimpulan pada kegiatan tersebut

1. Saran pengesahan Regulasi kepada Komisi II, KPU dan Bawaslu
2. Mempersiapkan stasiun jaringan lokal
3. Revisi UU akan kita dorong bersama

- Rabu, 13 Desember 2019 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema “*Program Siaran Ramah Anak dan Perempuan*”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Redtop Jl. Pecenongan No.2 No.72, RT.2/RW.4, Kebon Kelapa. Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat.

Latar belakang FGD yang memiliki tema “*Program Siaran Ramah Anak dan Perempuan*” ini adalah, karena ada regulasi yang berbeda antara LSF dan KPI. Terkait soal usia, bagi KPI, klasifikasi tontonan ada beberapa kategori yakni P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+). Tayangan Dewasa atau 18+ hanya dapat ditayangkan pukul 22.00 – 03.00. Sementara LSF, dewasa 17+ dan 21+.



Gambar 14. Tampak Mimah Susanti (Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran) menjelaskan materinya kepada peserta

Ada 4 (empat) tujuan mengapa kegiatan tersebut penting untuk dilaksanakan, yakni:

1. Mendapatkan masukan dan saran perihal tayangan ramah anak, remaja, dan perempuan di televisi dan radio;

2. Mendorong masyarakat untuk mengawasi atau memantau program siaran ramah anak, remaja, dan perempuan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
3. Merefleksikan program - program siaran yang tidak sesuai dengan Peraturan KPI; dan
4. Tersedianya data, informasi, dan dokumentasi yang berkenaan dengan tayangan ramah anak, remaja, dan perempuan.



Gambar 15. Foto bersama usai kegiatan FGD “*Program Siaran Ramah Anak dan Perempuan*”

Adapun peserta pada kegiatan tersebut adalah KPAI, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas HAM, Migrant Care, Koalisi Perempuan Indonesia, Wahid Institute, LBH Apik, Jurnal Perempuan, Seknas Koalisi Perempuan Indonesia DKI Jakarta, Sahabat Yatim Indonesia, Forum Anak, Institute KAPAL Perempuan, LBH Jakarta, Kopri PMII DKI Jakarta, Kohati HMI DKI Jakarta, Komisioner KPI Pusat, Kabag dan Kasubbag Bidang Pengawasan Isi Siaran, Tenaga Ahli bidang Pengawasan Isi Siaran, Asistensi, dan Sekretaris.

Sedangkan untuk narasumber pada kegiatan tersebut adalah Christiana Aryani, SE, SH, MH (Anggota Komisi I DPR RI Periode 2019-2024), Masruchah (Aktivis Perempuan/ Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Periode 2010-2014), Mimah Susanti dan Mulyo Hadi Purnomo (Komisioner KPI Pusat).

## **Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengawasan Penyiaran Pilkada Serentak Tahun 2020**

Pilkada yang dilakukan secara serentak tahun 2020 adalah pilkada pertama dalam suasana Pandemi Covid-19. Namun demi menjaga keadilan, keberimbangan, dan proporsional sesuai dengan peraturan P3 dan SPS KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran tetap gencar melakukan koordinasi dan bimbingan teknis ke KPI di daerah-daerah.

Adapun kegiatan Rapat Koordinasi untuk Pemilihan Kepala Daerah di 4 (empat) daerah yakni Lampung tanggal 19 Oktober 2020, Palembang tanggal 23 Oktober 2020 Bali tanggal 13 November 2020, dan Yogyakarta 28 Oktober 2020 akan disajikan secara singkat dan jelas.



Gambar 16. Suasana rapat koordinasi Pengawasan penyiaran pilkada 2020 di Yogyakarta

Bahwa yang melatarbelakangi mengapa kegiatan tersebut penting dilaksanakan adalah salah satu hal yang menjadi sorotan publik adalah metode kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah melalui media cetak dan elektronik. Hal tersebut dikarenakan, penggunaan media cetak dan elektronik dalam kampanye sangat efektif untuk menyampaikan visi, misi, dan program ke para pemilih. Oleh karena itu, Kampanye melalui pesan yang beredar secara serempak tersebut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 17. Tampak Peserta pada Saat Rapat Koordinasi di Bali

Ada 5 (lima) tahapan pemilihan kepala daerah yang menjadi perhatian KPI Pusat dan KPI Daerah yakni :

NO	KEGIATAN	AWAL PELAKSANAAN	AKHIR PELAKSANAAN
1	Penetapan Pasangan Calon	23 Sept 2020	23 Sept 2020
2	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain;	26 Sept 2020	5 Des 2020
3	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon;	26 Sept 2020	5 Des 2020
4	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik;	22 Nov 2020	5 Des 2020
5	Masa tenang dan pembersihan alat peraga.	6 Des 2020	8 Des 2020

Tabel 17. Lima Tahapan Pemilihan Kepala Daerah



Gambar 18. Suasana Diskusi pada Rapat Koordinasi di Lampung

Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah

1. Mensosialisasikan pengawasan penyiaran Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam rangka mengawasi pelaksanaan penyiaran dan iklan kampanye di Televisi dan Radio;
2. Mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penyiaran Pilkada Serentak Tahun 2020;
3. Mendorong keaktifan masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran penyiaran di Pilkada Serentak Tahun 2020; dan
4. Para peserta rapat koordinasi pengawasan penyiaran Pilkada Serentak di 270 diberbagai kota dan kabupaten diharapkan dapat memahami regulasi dan turut andil dalam melakukan pengawasan di media televisi dan radio dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Dengan output partisipasi masyarakat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, dan Pengawasan Kampanye di media penyiaran oleh KPID Se-Indonesia.



Gambar 19. Saat Pembukaan Diskusi di Rapat Koordinasi di Lampung

Kegiatan Rapat Koordinasi Penyiaran Pilkada menghasilkan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 merupakan tanggung jawab bersama, dan dalam pelaksanaannya baik pra maupun pasca, tetap memperhatikan Protokol Covid 19 yang telah diwajibkan Pemerintah;
2. Proses Pilkada adalah demokrasi yang terwujud oleh sesuatu yang positif bagi ruang publik, salah satunya adalah ketegasan kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing instansi : Kominfo, KPI, KPU dan Bawaslu;
3. Tahapan kampanye di Media Penyiaran akan berlangsung pada tanggal 22 November – 5 Desember 2020, harapannya media penyiaran dapat menjangkau di seluruh Wilayah.

#### FGD TAHUN 2020

Di tahun 2020 Bidang Pengawasan Isi Siaran melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* untuk memastikan bahwa KPI Pusat dalam menerapkan peraturan P3 dan SPS sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Ada beberapa FGD yang dianggap penting untuk dilaksanakan oleh bidang Pengawasan Isi Siaran antara lain:

- *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema “*Menjaga Etika Siaran Ramadhan 2020*”. Dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat Utama KPI Pusat lantai 2, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengadakan kegiatan

Adapun latar belakang FGD adalah: “*Menjaga Etika Siaran Ramadhan 2020*” dan diselenggarakan karena Siaran Ramadhan harus bisa menjadi tuntunan masyarakat, ajaran Islam disampaikan secara utuh/*kaffah*, tidak menjadikan topik agama sebagai bahan olok- olok, tidak menampilkan konflik atau perbedaan pandangan keagamaan secara tajam sehingga menimbulkan kecemasan sosial, dan lain sebagainya.

Ada 4 (empat) tujuan dalam kegiatan tersebut yakni:

1. Menyamakan persepsi tentang siaran Ramadhan yang bermartabat;
2. Mewujudkan siaran Ramadhan yang sesuai dengan spirit Ramadhan;
3. Membangun konsensus tentang penciptaan siaran Ramadhan yang bermartabat; dan
4. Mengevaluasi tayangan siaran Ramadhan yang bermasalah.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD tersebut adalah pertama Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Kabag Isi Siaran, Kasubag Isi Siaran, tenaga ahli dari pengawasan isi siaran, pengaduan, dan penjatuhan sanksi, asistensi, dan sekretaris.



Gambar 20. Suasana FGD di ruang rapat utama lantai 2 Gedung KPI Pusat

Sedangkan untuk narasumber terdiri dari Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, KH. M.Cholil Nafis. Asisten Deputy II Kemenko Polhukam RI, Drs. Mustahidin, MM., Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo. Korbid. Pengawasan Isi

Siaran, Mimah Susanti. Komisioner Bidang PS2P, Aswar Hasan. Koorbid. Kelembagaan, Irsal Ambia.

Ada 4 (empat) kesimpulan yang berhasil di dapat dalam FGD tersebut:

1. KPI Pusat, MUI dan Kemenko Polhukam sepakat perlunya lembaga penyiaran lebih berhati-hati dalam menayangkan program-programnya di Bulan Ramadhan.
2. Pada prinsipnya, Surat Edaran untuk lembaga penyiaran tahun 2019 tentang tayangan Ramadhan tidak jauh berbeda untuk diterapkan tahun ini. KPI tahun ini akan menerbitkan kembali Surat Edaran khusus untuk Ramadan tahun 2020.
3. Lembaga Penyiaran yang hadir pada diskusi ini kebanyakan yang mengampu program religi. Sementara yang banyak dikenakan sanksi adalah program hiburan.
4. Fakta Ramadhan 2019 menyebutkan Ramadhan ruang kebersamaan keluarga, penontonnya kebanyakan usia anak-anak, maka kontennya harus diperhatikan sebab itu konten dewasa.



Gambar 21. KH. M.Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah dan Perkembangan Masyarakat MUI Pusat sedang memberikan materinya

Kemudian ada 7 (tujuh) rekomendasi yang dihasilkan:

1. Lembaga penyiaran sebaiknya menampilkan da'i yang bersertifikat. Da'i yang tampil di lembaga penyiaran harus paham etika dan kebijakan penyiaran (P3SPS dan UU Penyiaran).

2. Talen dan host yang ditampilkan di lembaga penyiaran juga harus memahami aturan penyiaran yang berlaku, disesuaikan dengan etika serta spirit di Bulan Ramadhan. Menayangkan gosip yang inspiratif dan bermutu, serta aktivitas kerohanian dan sosial.
  3. Dalam trend kepemirsaaan di bulan Ramadhan, peak nya pada waktu menjelang buka dan menjelang sahur. Di P3SPS memang dibolehkan iklan rokok pada jam-jam menjelang sahur, maka lembaga penyiaran harus berhati-hati dalam mengemas iklan rokok.
  4. Kehati-hatian dalam menyampaikan materi keagamaan, jangan sampai terjadi pelafalan ayat Al Qur'an yang salah. Karena kerap mencomot talen yang paham agama ternyata salah dalam menulis/mengucap ayat Al Qur'an.
  5. Program siaran hiburan memperhatikan kekhusukkan tayangan Ramadhan.
  6. Memperhatikan materi siaran dengan perlindungan pada anak dan remaja dengan memperhatikan perubahan pola menonton pada anak.
  7. Durasi pemirsa TV menonton sehari bisa 5 jam, lembaga penyiaran program hiburan cenderung menempelkan tema keislaman pada semua kategori programnya. Sehingga ketika di dalamnya hanya 1 segmen dan dakwahnya hanya 5 menit. Lainnya hiburan, misalnya joged erotis dan lain-lain, maka lembaga penyiaran harus berhati-hati ketika "bermain-main" di wilayah program Ramadhan.
- Memasuki pandemi Covid-19 KPI Pusat tetap melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "*Rekaman Proses Interogasi Kepolisian pada Program Siaran Jurnalistik*". Dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, bertempat di Hotel Harris Vertu Jakarta Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat secara offline dan online.

Sebagai informasi bahwa latar belakang mengapa FGD dengan tema "*Rekaman Proses Interogasi Kepolisian pada Program Siaran Jurnalistik*" diselenggarakan karena komisi Penyiaran Indonesia ("KPI") Pusat masih menemukan beberapa potensi pelanggaran di beberapa lembaga penyiaran terkait penayangan proses interogasi kepolisian. Dan ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan dengan lembaga penyiaran terkait proses tersebut. Oleh karena itu, KPI Pusat bekerjasama dengan berbagai Stakeholder untuk membentuk harmonisasi dalam penayangan proses interogasi kepolisian sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran ("P3SPS") dan Kode Etik Jurnalistik ("KEJ").



Gambar 22. Kabag Anev. Biro PID Humas Polri, Kombes Drs. Sugeng Hadi Sutrisno sedang memaparkan materinya

Ada 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut, yakni:

1. Memperoleh masukan dari berbagai Stakeholder terkait proses interogasi kepolisian pada program siaran jurnalistik;
2. Membentuk kesepahaman dalam proses interogasi kepolisian antara KPI Pusat, Lembaga Penyiaran dan Stakeholder lainnya;
3. Menghasilkan kesepakatan mengenai ketentuan dalam penayangan proses interogasi kepolisian sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“P3SPS”) dan Kode Etik Jurnalistik (“KEJ”).

Adapun peserta yang hadir pada acara FGD tersebut terdiri dari Komisioner KPI Pusat, Sekretaris KPI Pusat, Kabag dan Kasubbag Isi Siaran, Staf PNS Isi Siaran, para tenaga ahli pemantauan, pengaduan, dan penjatuhan sanksi, serta asistensi dan sekretaris komisioner Bidang Isi Siaran.

Sedangkan untuk narasumber yang hadir pada acara FGD tersebut adalah Koordbid Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mimah Susanti, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yudi Hendriana. Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmawijaya. Kabag Anev. Biro PID Humas Polri, Kombes Drs. Sugeng Hadi Sutrisno.



Gambar 23. Foto Bersama Peserta dan Narasumber

Ada beberapa kesimpulan yang berhasil dirangkum dalam kegiatan FGD tersebut diantaranya:

1. Bahwa tidak semua kegiatan yang dibolehkan oleh pihak kepolisian untuk diliput, boleh juga ditampilkan untuk publik. Yang boleh hanya dokumentasi;
  2. Bahwa intrograsi adalah bagian dari penyelidikan, Berbeda dengan wawancara. Dalam intrograsi dibuatkan berita acara (BA) dan dilakukan penyidik atau penyidik; dan
  3. Bahwa syuting di lokasi penyidikan itu tidak boleh dilakukan karena dapat menghambat proses.
- *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema “*Problematika Program Siaran Iklan di Lembaga Penyiaran*”. Dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2020 bertempat di Hotel Haris Vertu, Harmoni, Jakarta Pusat.

Latar belakang mengapa tema “*Problematika Program Siaran Iklan di Lembaga Penyiaran*” diangkat adalah sebuah iklan Lembaga Penyiaran haruslah berpedoman pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 58 Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) dan berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat), Bidang Pengaduan menerima sejumlah aduan sebanyak 15 aduan terkait iklan dari beberapa lembaga negara maupun masyarakat. Senada dengan itu, Bidang Pemantauan KPI Pusat juga banyak menemukan adanya potensi dugaan pelanggaran dalam iklan yang

disiarkan oleh Lembaga Penyiaran. Banyaknya temuan dan aduan perihal beberapa dugaan pelanggaran yang menyangkan siaran iklan baik produk ataupun jasa, KPI Pusat merasa perlu mengundang beberapa narasumber yang kompeten untuk berdiskusi membicarakan persoalan Etika Pariwara Indonesia. Hal tersebut guna melindungi masyarakat dari produk atau jasa yang dianggap menyesatkan sesuai dengan Pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.



Gambar 24. Suasana pelaksanaan FGD secara *hybrid (online dan offline)*

Tujuan kegiatan FGD tersebut adalah:

1. Memperoleh masukan dari berbagai Stakeholder terkait etika pariwara Indonesia;
2. Mendorong Lembaga Penyiaran agar lebih selektif dalam menerima iklan komersial baik berupa produk ataupun jasa;
3. Melindungi masyarakat atau konsumen dari siaran iklan berupa produk atau jasa yang diduga kuat menyesatkan;
4. Menghasilkan kesepakatan mengenai ketentuan dalam penayangan siaran Iklan sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“P3SPS”) dan Etika Pariwara Indonesia



Gambar 25. Foto bersama narasumber dan peserta diskusi

Adapun peserta pada acara tersebut antara lain para komisioner KPI Pusat, lembaga penyiaran, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Kabag dan Kasubbag Bidang Isi Siaran, para staf bidang Pengawasan Isi Siaran, dan Humas KPI Pusat.

Sedangkan untuk narasumber adalah 2.Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si (Plt. Kepala Biro Hubungan Dukungan Strategis Masyarakat BPOM RI), Ir. Bambang Sumaryanto, MBA, Msi (Ketua Badan Musyawarah Etika DPI), Ivan Fithriyanto, S.T., M.S.E (Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan RI), dan Mulyo Hadi Purnomo (Wakil Ketua KPI Pusat).

Acara FGD tersebut menyimpulkan:

1. Bahwa semua iklan harus memenuhi etika dan memenuhi peraturan yang berlaku;
2. Bahwa komersial mempunyai tujuan dan ada transaksi. Kalau non komersil iklan-nya tanpa mencantumkan *korporate*. Kalau yang komersil itu mencantumkan *korporate*; dan
3. Testimoni bisa dilakukan kalau benar dilakukan oleh orang yang pernah mengalaminya

- Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “*Penyamaan Persepsi Regulasi Penyiaran Antara KPI Dengan LSF*”. Dilaksanakan pada hari Kamis, 08 Oktober 2020, bertempat di Hotel Red Top, Jakarta Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.

Latar belakang mengapa tema “*Penyamaan Persepsi Regulasi Penyiaran Antara KPI Dengan LSF*” diangkat adalah perbaikan poin-poin dalam MoU serta Perjanjian Kerjasama (PKS).



Gambar 26. Rommy Fibri Ketua LSF Menyampaikan Sambutan dalam FGD

Ada 4 (empat) tujuan untuk kegiatan tersebut:

1. Mewujudkan penyiaran yang sehat dan bermartabat;
2. Menyamakan persepsi tentang regulasi penyiaran antara KPI dengan LSF soal klasifikasi usia dan lain-lain;
3. Mendapatkan masukan untuk revisi P3SPS tentang beberapa klausul: klasifikasi usia, dan lainnya;
4. Memberikan literasi media kepada lembaga penyiaran tentang kebijakan lembaga negara dalam pengawasan siaran.

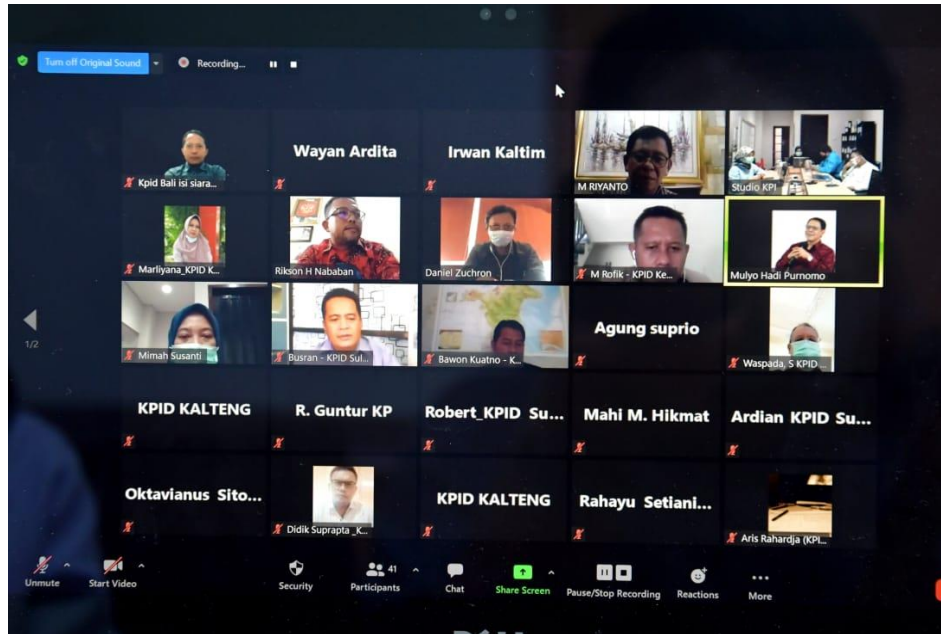


Gambar 27. Foto bersama KPI dan LSF setelah MoU

Adapun peserta pada acara tersebut antara lain para komisioner KPI Pusat, lembaga penyiaran, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Kabag dan Kasubbag Bidang Isi Siaran, para staf bidang Pengawasan Isi Siaran, dan Humas KPI Pusat.

Sedangkan untuk narasumber adalah Anggia Ermarini (Ketua Umum PP Fatayat NU), Lena Maryana Mukti (Koordinator MPI), Rommy Fibri Hardiyanto (Ketua LSF), dan Ibu Mimah Susanti (Komisioner KPI Pusat). FGD bertemakan “*Penyamaan Persepsi Regulasi Penyiaran Antara KPI Dengan LSF*” menghasilkan MoU antara KPI Pusat dengan Lembaga Sensor Film (LSF).

- Kamis, 12 November 2020, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema “*Finalisasi Penyusunan Pedoman Pengawasan Penyiaran Pilkada Serentak 2020*”. Dilaksanakan secara *hybrid (online dan offline)* di ruang Rapat Wakil Ketua KPI Pusat, lantai 2 Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120



Gambar 28. Diskusi melalui zoom soal Penyusunan Pengawasan Penyiaran Pilkada Serentak

Yang melatarbelakangi kegiatan tersebut adalah pedoman buku pengawasan penyiaran menjadi tujuan akhir dari rangkaian rapat koordinasi yang diadakan di 4 (empat) daerah yakni Lampung, Palembang, Bali, dan Yogyakarta seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, buku pedoman pengawasan penyiaran dipandang penting, sebab pemilihan kepala daerah sebelum-sebelumnya tidak ada pedoman yang menjadi acuan secara eksplisit anggota KPID dalam menjalankan regulasi.



Gambar 29. Suasana Diskusi di Kantor KPIP

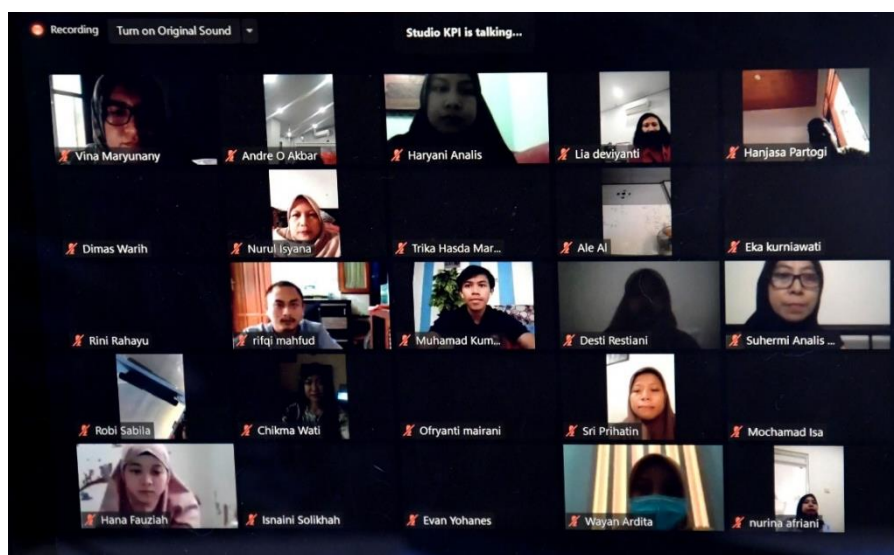
Adapun tujuan dalam FGD tersebut adalah

1. Mengidentifikasi potensi pelanggaran penyiaran Pilkada Serentak Tahun 2020.
2. Menyusun langkah-langkah pengawasan pencegahan sebagai upaya antisipasi bagi KPI/KPID atas penyiaran dan iklan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. Mendapatkan masukan dan saran dari peserta dalam penyusunan buku pedoman pengawasan penyiaran dan iklan kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 yang disusun berdasarkan FGD sebelumnya

Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan ini Mochamad Riyanto (Ketua KPI Pusat, 2010-2013), Daniel Zuchron (Dosen Filsafat Unusia, Komisioner Bawaslu RI, 2012-2017), Mimah Susanti (Komisioner KPI Pusat), dan Moderator Mulyo Hadi Purnomo (Wakil Ketua KPI Pusat).

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD “Penyusunan Modul Pengawasan Penyiaran Pilkada Serentak 2020” Komisi Penyiaran Indonesia adalah terdiri dari Komisioner KPI Pusat, Lembaga Penyiaran, Para Kabag dan Kasubag KPI Pusat, TA, Asisten dan Sekretaris Komisioner KPI Pusat.

- Sabtu, 05 Desember 2020 bertempat di Ruang Rapat Utama KPI Pusat, Jakarta, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema “*Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penyiaran Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada Serentak 2020 di Lembaga Penyiaran*” secara *hybrid* (online dan offline).



Gambar 30. Suasana Diskusi melalui *Zoom Meeting*

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi karena aturan P3SPS Pasal 40 huruf (a) Peraturan KPI Nomor No.01/P/KPI/03/2012 yang menyatakan “Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut: akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampurkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan”.



Gambar 31. Sambutan Ketua KPI Pusat, Agung Suprio

Untuk memaksimalkan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, serta iklan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 tersebut, menjadi hal yang sangat penting KPI Pusat dan KPI Daerah melakukan persiapan pengawasan penyiaran di Pilkada Serentak tahun 2020 agar lembaga penyiaran menyajikan program-program siaran Pilkada serentak tahun 2020 bisa berjalan secara adil, proporsional dan berimbang.

Ada 4 (empat) tujuan dalam kegiatan tersebut

1. Mensosialisasikan pengawasan penyiaran Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam rangka mengawasi pelaksanaan penyiaran dan iklan kampanye di Televisi dan Radio;
2. Mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penyiaran Pilkada Serentak Tahun 2020;

3. Mendorong keaktifan masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran penyiaran di Pilkada Serentak Tahun 2020; dan
4. Para peserta rapat koordinasi pengawasan penyiaran Pilkada Serentak di 270 diberbagai kota dan kabupaten diharapkan dapat memahami regulasi dan turut andil dalam melakukan pengawasan di media televisi dan radio dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Adapun narasumber yang hadir adalah Ratna Dewi Petalolo (Anggota Bawaslu RI), Ilham Syahputra (Anggota KPU RI), Mulyo Hadi Purnomo (Wakil Ketua KPI Pusat). Sedangkan peserta yang hadir pada acara tersebut adaalah Komisioner KPI Pusat, KPI Daerah, Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, lembaga penyiaran, dan sekretariat KPI Pusat. Kesimpulan dari kegiatan tersebut adalah

1. Ada pembatasan secara fisik dalam debat terbuka dikarenakan masih dalam suasana Covid-19
  2. Khusus Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) belum ada aturannya terkait iklan kampanye dan debat publik;
  3. Iklan kampanye itu fasilitasi KPU dan dananya bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
  4. Bahwa sesuai dengan ketentuan tadi maka iklan kampanye di media cetak dan elektronik tetap di fasilitasi oleh KPU dengan jangka waktu 14 hari.
- Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “*Lokakarya Proyeksi Pengawasan Isi Siaran Pasca Undang-undang Cipta Kerja*”. Dilaksanakan pada tanggal 17-19 Desember 2020, bertempat di Hotel Oni, Bogor, Jawa Barat.

Latar belakang kegiatan, oleh karena ditetapkan Undang-undang Cipta Kerja, mengakibatkan adanya perubahan metode pengawasan, yakni pemantauan, penanganan pengaduan masyarakat, dan penjatuhan sanksi pada penyiaran di lembaga penyiaran.

Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah

1. Untuk menampung dan menyerap saran, masukan serta gagasan dari narasumber yang diundang dalam kegiatan ini, sebagai bahan penyusunan proyeksi pengawasan penyiaran pasca UU Cipta Kerja disahkan.

2. Tersusunnya proyeksi model pengawasan penyiaran yang akan diimplementasikan KPI dalam menyelenggarakan pengawasan penyiaran pasca UU Cipta Kerja disahkan

Kemudian, untuk narasumber pada kegiatan tersebut yakni Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, Koordinator Kelembagaan KPI Pusat Irsal Ambia, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, Ketua KPI Pusat Periode 2011-2013 M. Riyanto, Anggota KPI Pusat Periode 2010 - 2013 Prof. Dr. Iswandi Syahputra, M.Si. Komisioner KPI Pusat Periode 2010 – 2013 Ezki Tri Rejeki Widiyanti, S.H., M.A. Wakil Ketua KPI Pusat 2010 – 2013 Dr. Nina Mutmainnah Armando, M.Si.

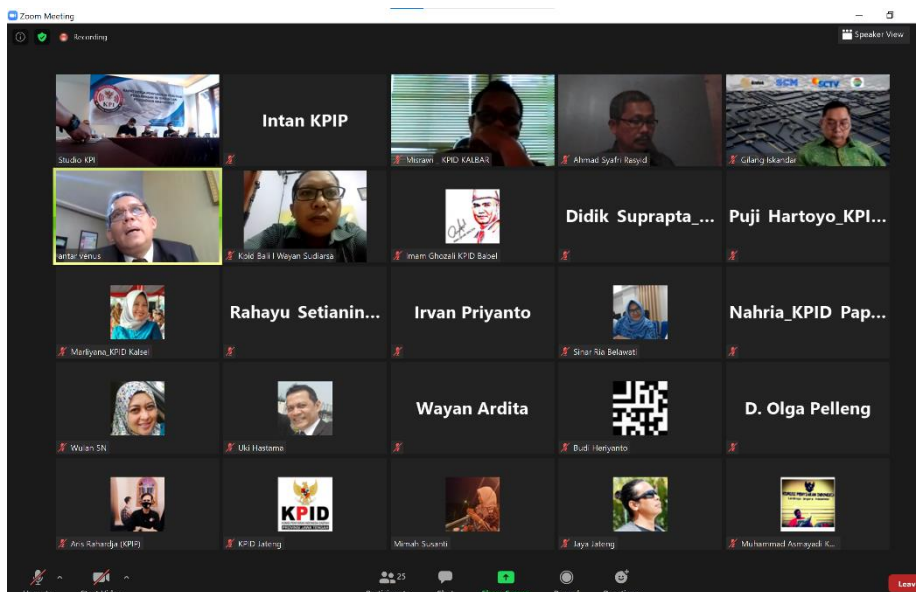


Gambar 32. Foto bersama usai kegiatan

Untuk peserta yang hadir pada kegiatan tersebut adalah para komisioner KPI pusat, pejabat ASN bidang pengawasan isi siaran, tenaga ahli dan analis isi siaran, asistensi dan sekretaris bidang isi siaran.

Harapan kegiatan ini adalah dapat menyusun bahan proyeksi pengawasan isi siaran pasca UU Cipta Kerja ditetapkan, namun KPI Pusat menyadari masih butuh forum-forum lainnya untuk menyempurnakan bahan-bahan penyusunan proyeksi pengawasan isi siaran di masa yang akan datang. Kegiatan ini juga mengundang kehadiran peserta via zooming, untuk mencegah persebaran covid-19 yang sedang mewabah di Indonesia.

- Selasa, 22 Desember 2020, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengadakan kegiatan dengan judul ”*Rapat Kerja Penyusunan Publikasi Pengawasan Isi Siaran dan Pengaduan Masyarakat*”. Dilaksanakan di Hotel Sheraton Belitung Jl. Pantai Penarikan, Dusun Timur Jaya, Tj. Binga Bangka, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung 33414 secara hybrid (online dan offline).



Gambar 33. Narasumber dan Peserta Hadir Virtual

Latar belakang kegiatan tersebut adalah, agar laporan dari pengaduan, pemantauan, dan penjatuhan sanksi yang akan dipublikasikan diharapkan sempurna dalam menyajikan data-data dan rekomendasi dari KPI Pusat dan KPI daerah.

Narasumber yang hadir pada acara tersebut adalah DR. Antar Venus (Wakil Rektor UPN Veteran Jakarta), Gilang Iskandar (Sekjen Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), Agung Suprio (Ketua KPI Pusat), Mimah Susanti (Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat), dan Mulyo Hadi Purnomo (Wakil Ketua KPI Pusat). Sedangkan peserta yang hadir secara *online* adalah KPID se Indonesia, dan yang hadir secara *offline* adalah KPID Banten, dan KPID Babel, serta Sekretariat KPI Pusat.

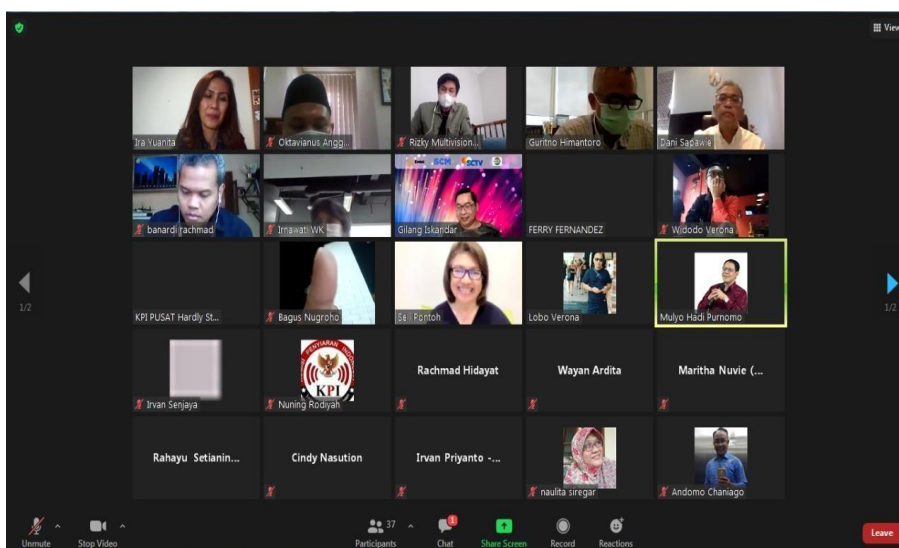


Gambar 34. Komisioner Irsal Ambia selaku moderator membuka sesi diskusi Kegiatan Rapat Kerja Penyusunan Publikasi pengawasan Isi Siaran dan Pengaduan Masyarakat sebagai berikut :

1. Kegiatan penyusunan publikasi ini haruslah dilakukan setiap tahun, hal tersebut untuk memberikan informasi kepada publik; dan
2. Proses pengaduan masyarakat harus disikapi dengan baik dan sesuai peraturan P3SPS.

### FGD TAHUN 2021

- *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema “*Menciptakan Kembali Sinetron yang Sehat dan Berkualitas*”. Dilaksanakan secara online melalui link zoom pada hari Senin, 15 Februari 2021.



Gambar 35. Suasana diskusi melalui *Zoom Meeting*

Ada 3 (tiga) tujuan dalam kegiatan tersebut yakni:

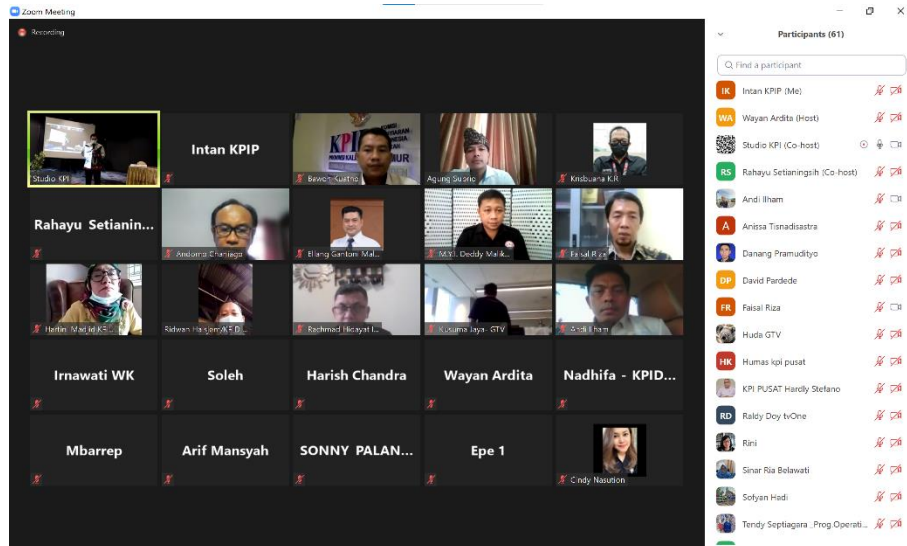
1. Mendapatkan masukan mengenai kreativitas dan teknis dalam produksi program sinetron;
2. Mendorong lembaga penyiaran agar lebih mentaati regulasi Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS; dan
3. Menghasilkan kesepakatan mengenai peraturan yang dilarang dan diperbolehkan sesuai dengan UU Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta aturan lainnya terkait penyiaran.

Adapun peserta pada kegiatan tersebut adalah komisioner KPI Pusat, lembaga penyiaran, dan sekretariat KPI Pusat. Sedangkan untuk narasumbernya adalah Wakil Ketua DPR Dr. H. M. Azis Syamsuddin, MH. Ketua Lembaga Sensor Film, Rommy Fibri Hardiyanto.

Dalam diskusi FGD tersebut menyimpulkan bahwa program sinetron masih banyak yang tidak sesuai dengan alur cerita yang sudah dibuat. terkadang, karena ratingnya tinggi episodenya ditambah dan alur ceritanya menjadi tidak jelas. Kekerasan dan konflik masih menjadi andalan dalam meningkatkan *rating*.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir pelanggaran, ada 3 (tiga) solusi yang ditawarkan:

1. Memberikan waktu khusus bagi program Sinetron misal ditayangkan menjelang pukul 22.00 sehingga sinetron dewasa bisa ditayangkan;
  2. Membuat bingkai cerita yang baik sehingga tidak sinetron akan habis sesuai cerita tidak lagi membuat tambahan-tambahan cerita; dan
  3. Perihal regulasi yang belum selaras DPR mengusulkan agar KPI bersurat ke DPR.
- Senin, 22 Maret 2021, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah mengadakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan tema “*Merumuskan Batasan Hedonisme, Konsumerisme, dan Kepentingan Publik*”. Dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Jl. Sutomo No.1, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235, dan Zoom Meeting.



Gambar 36. Tampak peserta diskusi melalui *zoom meeting*

Latar belakang kegiatan ini adalah, banyak program siaran dibanjiri tontonan hiburan dengan tayangan-tayangan yang memamerkan harta kekayaan, benda-benda koleksi yang mewah, dan perilaku konsumtif lainnya. Padahal, kita ketahui bersama bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang dilanda berbagai bencana seperti wabah Covid-19, banjir bandang, longsor dan bencana lainnya. Tayangan-tayangan tersebut, tentu tidak mencerminkan rasa empati terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana ataupun terpapar Covid-19.

Narasumber yang hadir pada kegiatan ini adalah Faisal Riza (Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumut), Agus Sudibyo (Dewan Pers), dan Devie Rachmawati (Pengamat Sosial UI). Sedangkan untuk peserta yang hadir secara online adalah lembaga penyiaran dan KPID Se Indonesia, serta sekretariat KPI Pusat hadir secara offline.

Adapun kesimpulan pada diskusi ini adalah sebagai berikut :

1. Komisioner KPI Pusat, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Wakil KPI Pusat memberikan arahan awal dan pemantik diskusi dalam FGD ini.
2. Faisal Riza menekankan pada pentingnya kemanfaatan publik dalam program siaran.
3. Agus Sudibyo mengatakan, agar kunci agar media bertahan hidup, perlu ada differensiasi produk, kalau *bad* konten identik dengan medsos, maka dihindari. Perlu kedekatan dengan pemirsa, dan media kembali pada nilai lokal. Ada hal yang di *highlight*, nilai yang dapat ditiru oleh masyarakat.
4. Devie mengatakan, manusia dipertontonkan sajian yang membuat tidak puas dan bahagia, wujudnya adalah uang. Sangat terukur ketika seorang tidak puas. Ketika

orang memenuhi fantasinya, ujung-ujungnya akan rela melakukan apapun termasuk berhutang. Ketika tidak punya uang maka mereka melakukan tindakan kriminal. Inilah yang mendorong korupsi, karena bujuk rayu fantasi. Kapital sengaja diciptakan menyedot ekonomi setiap orang.

5. Di dalam FGD ini juga menerima masukan dari KPID dan peserta diskusi antara lain:
  - Konten TV harus memberikan kemanfaatan bagi publik
  - Persoalan konten dibahas secara komprehensif dengan memperhatikan konteks.
  - Menutrut lembaga penyiaran : soal batasan kemudian menjadi pelarangan, harus diawali dengan spirit melakukan analisa yang holistic dan komprehensif. Sebaiknya berangkat dari pemikiran, bahwa jika tidak dibatasi akan menimbulkan dampak negatif maka dapat menjadi dasar untuk melegitimasi ketika kita melakukan pembatasan. TV mengaku melakukan riset dan survey dalam membuat program.

Hal privat menarik publik wajar jika ditampilkan dengan durasi yang tidak terlalu panjang agar tidak terlihat dominan

- *Focus Group Discussion (FGD)* dan Evaluasi dengan tema “*Pra Anugrah Syiar Ramadhan 2021/1442H Syiarkan Siaran yang Membawa Kebaikan*”. Dilaksanakan secara *online* melalui *link zooming* dan *offline* di Hotel Alana Sentul Bogor 4-6 Mei 2021.



Gambar 37. Tampak Koordinator Tim Pemantauan, Guntur Karyapati menjelaskan Hal terkait Tayangan Ramadan 2020

Latar belakang kegiatan dengan tema tersebut adalah melihat fenomena Ramadan tahun 2019 dan 2020, tampak bahwa siaran Ramadan di TV masih jauh dari keinginan bersama. Dalam catatan KPI Pusat, terdapat sejumlah pengaduan dan hasil pemantauan KPI Pusat terhadap siaran Ramadan berisi hal yang kurang pas. Bagi KPI, aduan masyarakat itu sebagai respon balik publik terhadap siaran Ramadan televisi yang mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara isi siaran Ramadan dengan ‘suasana kebatinan’ Ramadan.

Ada 4 (empat) tujuan mengapa kegiatan tersebut dilakukan:

1. Menyamakan persepsi tentang siaran Ramadan yang bermartabat;
2. Mewujudkan siaran Ramadan yang sesuai dengan spirit Ramadan;
3. Membangun konsensus tentang penciptaan siaran Ramadan yang bermartabat;  
dan
4. Mengevaluasi tayangan siaran Ramadan yang bermasalah



Gambar 38. Foto bersama usai kegiatan

Untuk narasumber pada kegiatan tersebut adalah H.Asrori S.Karni, M.H, Wakil Sekjen MUI Bidang Infokom, DR.H. Juraidi, MA, Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Dr.H. Asrori Niam Sholeh, MA Deputy Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, dan Mulyo Hadi Purnomo, Wakil Ketua KPI Pusat.

Sedangkan untuk peserta yang hadir *offline* pada kegiatan tersebut adalah Komisioner, bidang pengawasan isi siaran, Kabag dan Kassubag bidang Isi siaran, Tenaga Ahli bidang isi sairan, dan Humas KPI Pusat, dan ada 64 peserta yang hadir secara online.

Kegiatan Evaluasi dan FGD Pra ASR 2021 menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Usulan lembaga penyiaran untuk memberikan kriteria penilaian berdasarkan usulan publik. Kemudian ada kriteria terbaik dan terfavorit;
2. Perlunya kesepakatan tiga lembaga : MUI, Kemenpora dan Kemenag dalam pembuatan kriteria penilaian ASR 2021;
3. Program Ramadhan yang menurut KPI baik, dapat menjadi acuan bagi yang akan memproduksi tayangan Ramadhan bagi lembaga penyiaran;
4. KPI akan mempertimbangkan keterlibatan Radio sebagai peserta ASR 2021.

Adapun kesimpulan kegiatan ini adalah :

- ✓ Acara ini menambah optimisme mendorong kualitas program, dari stakeholder tambahan mitra kemenag
  - ✓ Ada dua poin, pertama, memberikan surat pada lembaga penyiaran untuk memberikan masukan program yang perlu diperhatikan dalam seleksi awal. Kedua tambahan kategori radio mau dicoba kemungkinan ketercukupan anggaran, nanti KPI akan berkirim surat pada KPID dengan dukungan yang sangat luar biasa, ASR 2021 sukses berjalan lancar memberikan kemanfaatan kita semua.
  - ✓ MUI – Kemenpora dan kemenag mendukung KPI dalam kegiatan ini dan siap bersinergi.
- Senin-Selasa, 13-14 Desember 2021, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengadakan kegiatan Evaluasi Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) di Hotel Aston Sentul *Lake Resort & Conference* Bogor, Jawa Barat.



Gambar 39. Komisioner Mimah Susanti memberikan arahan terkait evaluasi Anugerah Penyiaran Ramah Anak

Latar belakang kegiatan tersebut, adalah KPI sebagai sebuah lembaga negara independen yang mengatur dunia penyiaran di Indonesia diberi mandat oleh undang-undang untuk mewujudkan kualitas isi siaran yang sehat dan bermartabat. Oleh karena itu Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) yang sudah dilaksanakan tanggal 28 November 2021 di Auditorium RRI Jakarta Pusat harus dilakukan evaluasi, dengan harapan kedepan akan lebih baik lagi.



Gambar 40. Suasana Rapat Evaluasi APRA

Ada 4 (empat) tujuan dalam acara tersebut

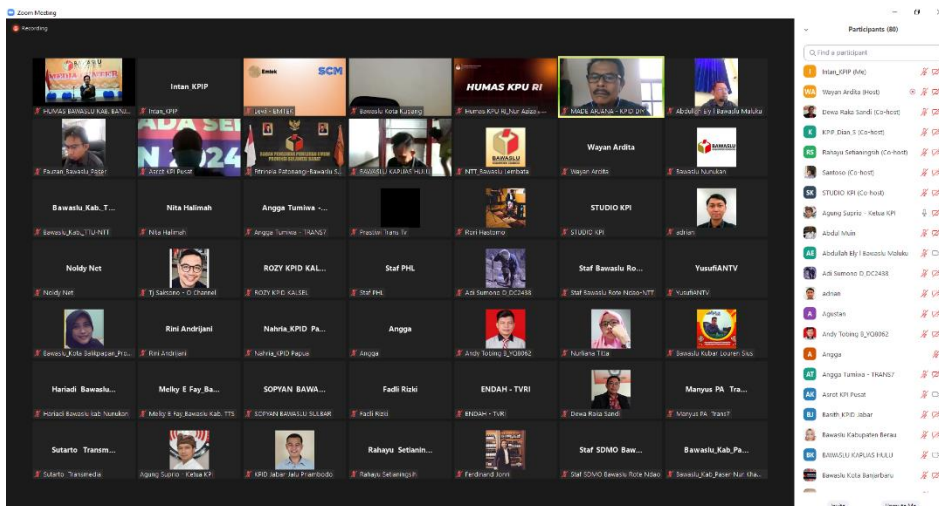
1. Merumuskan draft awal penyusunan laporan hasil pengawasan isi siaran;
2. Merekapitulasi hasil pemantauan, pengaduan masyarakat, dan penindakan pelanggaran penyiaran;
3. Menyusun buku laporan hasil pengawasan isi siaran selama tahun 2021; dan
4. Buku laporan pengawasan isi siaran tahun 2021

Adapun narasumber yang hadir adalah Mimah Susanti (Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran), Mulyo Hadi Purnomo (Wakil Ketua KPI Pusat), Kepala Bagian Isi Siaran, dan Kepala Sub Bagian Isi Siaran. Sedangkan peserta yang hadir adalah tenaga ahli, tim asistensi, tim sekretaris Bidang Isi Siaran KPI Pusat, serta Humas KPI Pusat.

Kegiatan tersebut berhasil melahirkan 7 (tujuh) rekomendasi:

1. Dalam hal kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan *stake holder* terkait, kita harus melakukan MOU di awal tahun, dan melakukan persiapan acara jauh hari sebelum waktu pelaksanaan. Perlu kita bicarakan teknis Kerjasama dan kontribusi masing-masing pihak.
2. Lebih mendasarkan pada kompetensi utk melakukan proses seleksi awal. Pembagian tugas tidak sekedar pembagian jatah pekerjaan dan pendapatan tapi Lebih didasarkan pada kompetensi

3. Untuk memudahkan proses verifikasi radio, diperlukan data keterangan pendukung yang lebih lengkap.
  4. Pembaca nominasi awal diutamakan dibacakan oleh pihak internal lebih dahulu. Dilakukan *briefing* kepada pembaca nominasi dari pihak eksternal agar tidak terjadi mis, dan lebih menguasai apa yang dibacakannya
  5. Jadi saya menilai bahwa pengisi acara akan sangat berpengaruh terhadap viewers, jadi kedepan jika kita memilih pengisi acara/talent juga bisa mempertimbangkan jumlah pengikut/followers. Jadi pengisi acara yang memiliki banyak pengikut tersebut juga bisa mendongkrak jumlah penonton yang menyaksikan acara kita
  6. Melakukan perbaikan yang lebih jauh untuk tahap ‘persiapan’ dan ‘pelaksanaan’ acara.
  7. Untuk laporan akhir, data dari tim pemantauan bisa kita hitung dan olah. Agar kita bisa menghitung tidak hanya bersifat kuantitas, namun juga secara kualitas
- Senin 20 Desember 2021 pukul 08.30-12.00 WIB Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengadakan kegiatan bertemakan “Pengawasan Penyiaran Pemilu/Pilkada Serentak Tahun 2024”. Dilaksanakan secara hybrid (online-offline) di JSI Resort Jl. Cikopo Sel. No.KM, RW.5, Sukagalih, Kec Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16770.

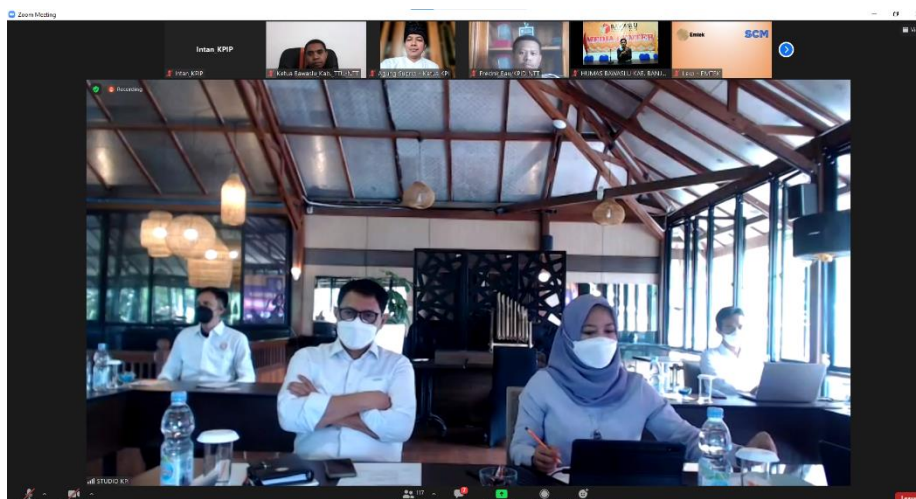


Gambar 41. Suasana Diskusi Melalui *zoom meeting*

Kegiatan tersebut memiliki latar belakang, bagaimana peranan lembaga penyiaran dalam memberikan kontribusi atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak pada Tahun 2024 agar berjalan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Ada 5 (lima) tujuan dalam kegiatan tersebut:

1. Memperkuat regulasi pengawasan penyiaran pada Pemilu Serentak 2024;
2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran Penyiaran Pemilu/Pilkada Serentak 2024;
3. Memperkuat koordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan pengawasan penyiaran Pemilu Serentak 2024;
4. Komitmen industri penyiaran dalam Pemberitaan, Sosialisasi dan Kampanye Pemilu Serentak 2024; dan
5. Mendapatkan masukan terhadap Pengawasan Penyiaran Pemilu Serentak 2024



Gambar 42. Ki-ka, tampak Mulyo Hadi Purnomo dan Mimah Susanti mengikuti jalannya diskusi melalui luring dan *Zoom Meeting*

Adapun narasumber yang hadir pada acara tersebut adalah Komisi I DPR Dave Laksono untuk dapat memperkuat regulasi dalam penyiaran Pemilu serentak 2024, Anggota KPU RI Dewa Raka Sandi, Sekjen ATVSI Gilang Iskandar dan Ketua Umum ATVLI Bambang Santoso.

Sedangkan untuk peserta pada kegiatan FGD kali ini adalah KPID, KPU provinsi dan kabupaten/kota, Bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota, lembaga penyiaran, kabag dan kasubbag isi siaran, asistensi dan sekretaris isi siaran.

Kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi yakni

1. Penguatan koordinasi jajaran KPU RI hingga ke kabupaten kota dengan jajaran KPI dalam hal sosialisasi, pemberitaan dan kampanye Pemilu serentak 2024;
  2. Mereview kembali SOP/Pedoman Pengawasan Pemilu yang sudah ada untuk digunakan dalam pengawasan penyiaran pemilu serentak 2024.
  3. Membuat buku saku pedoman pengawasan penyiaran pemilu serentak 2024
- Senin 20 Desember 2021 pukul 12.00-17.00 WIB Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengadakan kegiatan bertemakan “*Quo Vadis Sinetron: Kualitas rendah, Iklan Berlimpah, Siapa yang Resah*”. Dilaksanakan secara *hybrid (online-offline)* di JSI Resort Jl. Cikopo Sel. No.KM, RW.5, Sukagalih, Kec Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16770.



Gambar 43. Suasana diskusi yang dimoderatori oleh Wakil Ketua Mulyo Hadi Purnomo

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya kualitas Sinetron dilayar kaca televisi Indonesia berada dalam posisi yang belum berkualitas yakni 2,56. Tentunya gambaran kualitas sinetron tersebut sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari industri penyiaran.

Ada 3 (tiga) tujuan dalam kegiatan tersebut:

1. Mewujudkan penyiaran yang sehat dan bermartabat;
2. Mencari formulasi agar program sinetron sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan literasi media kepada lembaga penyiaran tentang kebijakan lembaga negara dalam pengawasan isi siaran

Adapun narasumber pada kegiatan tersebut adalah Helmy Faisal Zaini Anggota Komisi I DPR RI, Cristina Yulita Koordinator Partisipatif Komnas Perempuan, Gilang Iskandar ATVSI, dan Arief Mulky Hadi Direktur Remotivi.



Gambar 44. Foto bersama peserta luring usai kegiatan

Sedangkan untuk peserta pada kegiatan FGD ATVSI, ATVNI, ATVJI, ATVLI, ATSDI, Lembaga Penyiaran, komisioner KPI Pusat, dan sekretariat bidang isi siaran KPI Pusat.

Ada 2 (dua) kesimpulan pada diskusi kali ini yakni:

1. Membuat rambu-rambu terkait sinetron yang tidak mengedepankan kekerasan; adan
2. Membuat kesepakatan bersama terkait nilai-nilai untuk sinetron di Indonesia

## FGD TAHUN 2022

### Webinar tahun 2022

- Rabu 15 Juni 2022, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah mengadakan kegiatan webinar dengan tema “*Konten Siaran Perspektif Perlindungan Anak*” dilaksanakan di lantai 2 ruang rapat utama KPI Pusat, jalan Ir Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat. Latar belakang kegiatan ini adalah tim pengawasan dan pengaduan isi siaran masih menerima dan menemukan kekerasan pada anak. Oleh sebab itu, kita

harus menghentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan khususnya di layar televisi.



Gambar 45. Suasana diskusi di ruang rapat utama KPI pusat

Ada 3 (tiga) Tujuan dalam kegiatan ini:

1. Peserta mengetahui dan memahami regulasi penyiaran, khususnya mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam menyajikan tayangan siaran;
2. Meningkatkan kompetensi para pemantau bidang Pengawasan Isi Siaran tentang P3SPS;
3. Menyamakan persepsi terhadap regulasi P3 dan SPS

- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia memperpanjang masa jabat Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022 hingga terpilihnya Komisioner yang baru dengan Surat Keputusan



Presiden Nomor 46/P Tahun 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabat Keanggotaan KPI Pusat Periode 2019-2022. Dengan masa perpanjangan tersebut, Bidang Pengawasan Isi Siaran mengoptimalkan kinerja dengan membuat 2 (dua) kali kegiatan Partisipasi Masyarakat tema “*Meningkatkan Kualitas Siaran untuk Pemilu yang Demokratis*” yakni: Kegiatan *pertama* dilaksanakan secara *offline* pada tanggal 10 September 2022 di Gedung ASWAJA NU Centre Kab. Banjarnegara Jl. Gagak Kel. Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara.

Gambar 46. Taufiq Abdullah memberikan keterangannya soal kontribusi Komisi I DPR RI dalam penyiaran pemilu

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi karena kualitas penyiaran pemilu dipandang masih kurang dan membutuhkan partisipasi dari masyarakat luas agar pemilihan umum yang demokratis dalam dunia penyiaran dapat terealisasi sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ada 4 (empat) tujuan mengapa kegiatan tersebut diadakan:

1. Menyusun langkah-langkah pengawasan pencegahan sebagai upaya antisipasi bagi KPI/KPID atas penyiaran dan iklan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal siaran pemilu yang sesuai regulasi;
3. Membantu mensukseskan Pemilu tahun 2024 yang lebih demokratis; dan

4. Mendapatkan masukan dan saran dari narasumber/peserta dalam melakukan revisi P3SPS.

Ada pun peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah Kabag Isi Siaran, Kasubag Isi Siaran, tenaga ahli dari pengawasan isi siaran, pengaduan, dan penjatuhan sanksi, asistensi, dan sekretaris. Kemudian dari eksternal adalah Lembaga Penyiaran Lokal dan masyarakat di Kelurahan Parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa tengah.



Gambar 47. Para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya

Kemudian untuk narasumber pada kegiatan tersebut adalah Taufiq R. Abdullah (Komisi I DPR RI), Mimah Susanti (Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran), Ari Yusmindarsih, SS, M.I.Kom (Komisioner KPID Jateng Bidang Isi Siaran), Dosen FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Dr. Wisnu Widjanarko, dan Zahid Khasani, Ketua PCNU Banjarnegara.



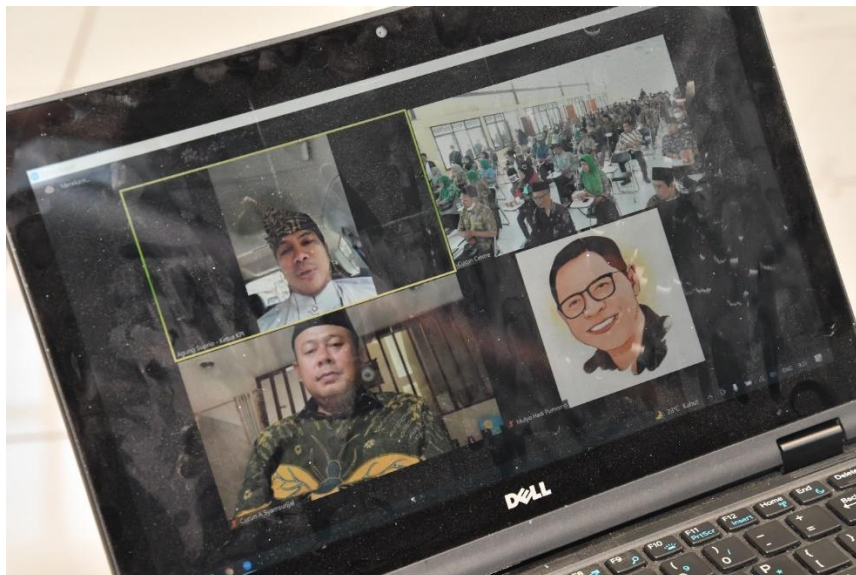
Gambar 48. Foto bersama narasumber dan para peserta kegiatan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

- KPI Pusat akan bekerjasama dengan KPU, Bawaslu, Organisasi dan Universitas dalam mensukseskan Pemilu 2024; dan
- KPI Pusat dan KPID akan mendata pertumbuhan lembaga penyiaran digital, dan akan mensosialisasikan regulasi penerapan iklan kampanye untuk persiapan Pemilu 2024.

Dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- Komisioner KPI Pusat mengharapkan kepada masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah untuk lebih aktif dalam menonton TV dan Radio serta melakukan pengawasan terhadap konten siaran. Jika ada hal yang dinilai bertentangan dengan nilai, moral dan hati nurani diharapkan masyarakat mengadu ke KPIP/KPID.
- Adapun kegiatan Partisipasi Masyarakat yang **kedua** diadakan pada tanggal 2 November 2022 bertempat di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bandung, Unnamed Road, 40375, Manggahang, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat kodepos 40375.



Gambar 49. H. Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan sambutan *via zoom meeting*

Pada kegiatan Partisipasi Masyarakat yang **kedua** ini dilaksanakan secara *online* dan *offline* yang diisi oleh para narasumber yakni H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P

(Anggota DPR Fraksi PKB), H. Tarya Witarso (Tokoh Masyarakat Bandung); dan Mulyo Hadi Purnomo (Wakil Ketua KPI Pusat).



Gambar 50. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Mimah Susanti menyampaikan pemantik diskusi

Ada pun peserta yang hadir pada kegiatan ini adalah Kabag Isi Siaran, Kasubag Isi Siaran, tenaga ahli dari pengawasan isi siaran, pengaduan, dan penjatuhan sanksi, asistensi, dan sekretaris. Kemudian dari eksternal adalah Lembaga Penyiaran Lokal dan masyarakat Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.



Gambar 51. Suasana Kegiatan Partisipasi Masyarakat

=== 000 ===

## BIDANG PENGELOLAAN STRUKTUR DAN SISTEM PENYIARAN (PS2P)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanahkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang berfungsi, bertugas, berwenang dalam penyelenggaraan penyiaran. Di dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Kedudukan KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Fungsi, wewenang, tugas KPI kemudian diturunkan dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI), salah satunya tertuang dalam Peraturan KPI No:01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan. Pada pasal pembidangan, KPI terdiri dari bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Bidang Kelembagaan. Pada masing-masing bidang kemudian menjalankan fungsi, wewenang dan tugas KPI sesuai dengan tujuan-tujuan penyiaran.

Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), dalam PKPI di atas mempunyai tugas salah satunya adalah berkaitan dengan infrastruktur penyiaran serta perizinan Lembaga Penyiaran. Dalam perjalanannya, tanggung jawab KPI dalam hal perizinan mengalami transisi. Hal ini setidaknya ditandai dengan hadirnya sistem perizinan ditandai dengan integrasi sistem perizinan, yakni *Online Single Submission* atau OSS.

Pada tahun 2018, proses sistem perizinan melalui OSS mulai dilakukan, karena proses aplikasi perizinan dan sistemnya belum sempurna, maka perizinan Lembaga Penyiaran masih dilakukan seperti sebelumnya, yakni dengan koordinasi tatap muka antara Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, KPI, dan Balai Monitor (Balmon). Sampai dengan tahun 2020, proses perizinan manual tetap dilakukan. Hal ini dikarenakan belum sempurnanya sistem aplikasi untuk mendukung proses perizinan secara *online* dan berlaku *same day*.

Pada tahun 2021 baru pemberlakuan OSS sudah merata di bidang penyiaran, selain dari sempurnanya sistem aplikasi yang akan digunakan, juga ditandai payung regulasi yakni Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengakhiri rezim perizinan lama di semua bidang, tidak hanya penyiaran. Semua proses perizinan dilakukan secara *online* dan terintegrasi.

Posisi KPI dalam proses perizinan yang baru mengalami perubahan. KPI tidak lagi seperti sebelumnya, misalnya melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) sampai EUCS. Apabila mengacu kepada Undang-undang Penyiaran Bagian Kesebelas tentang Perizinan, maka pada Pasal 33 disebutkan bahwa izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh:

- a. masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
- b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
- c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
- d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

Izin penyelenggaraan penyiaran masing-masing radio adalah selama 5 (lima) tahun dan televisi 10 (sepuluh) tahun. Sebelum Lembaga Penyiaran memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, Lembaga Penyiaran Radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk Lembaga Penyiaran Televisi paling lama 1 (satu) tahun.

KPI pada pelaksanaan OSS hanya melakukan paska perizinan di aspek isi siaran yang digunakan untuk mendukung. KPI sendiri sudah memiliki payung hukum yang tertuang dalam PKPI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Komitmen Persyaratan Program Siaran Evaluasi Dengar Pendapat dalam *Online Single Submission* Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

## **1. Data Lembaga Penyiaran (2019 - 2022)**

Sampai dengan Bulan Desember 2022 KPI Pusat mendata Lembaga Penyiaran yang mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap berjumlah 3.272, dengan rincian Lembaga Penyiaran Radio 1.901 dan Lembaga Penyiaran Televisi 1.371

Tahun 2022 ada 429 televisi yang migrasi ke digital dengan rincian:

- Ada 12 Lembaga Penyiaran Komunitas Televisi yang sudah migrasi ke digital
- Ada 9 Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang sudah migrasi ke digital
- Ada 408 Lembaga Penyiaran Swasta Televisi yang sudah migrasi ke digital

**REKAP IPP TETAP  
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022**

<b>NO</b>	<b>JENIS LEMBAGA PENYIARAN</b>	<b>RADIO</b>	<b>TELEVISI</b>
1	Lembaga Penyiaran Berlangganan	0	671
2	Lembaga Penyiaran Komunitas Analog	188	2
3	Lembaga Penyiaran Komunitas Migrasi Digital	0	12
4	Lembaga Penyiaran Komunitas Simulcast	0	0
5	Lembaga Penyiaran Publik (RRI, TVRI)	1	1
6	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Analog	149	5
7	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Migrasi Digital	0	9
8	Lembaga Penyiaran Swasta	1563	222
9	Lembaga Penyiaran Swasta Migrasi Digital	0	408
10	Lembaga Penyiaran Swasta Simuclast	0	41
<b>TOTAL</b>		<b>1.901</b>	<b>1.371</b>
		<b>3.272</b>	

Data di atas merupakan rekapitulasi data Lembaga Penyiaran baik yang analog, simulcast dan sudah migrasi. Perangkat analog merupakan lembaga penyiaran yang basis teknologinya menggunakan eksisting, atau analog. Sementara simulcast adalah lembaga penyiaran yang secara bersamaan melakukan siaran analog dan digital. Dan digital adalah lembaga penyiaran yang sudah digital artinya modulasi frekuensinya sudah menggunakan teknologi digital.

**1.1. Data Lembaga Penyiaran 2019**

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap yang diterima oleh KPI Pusat pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan Desember, adalah sebanyak 451 lembaga penyiaran yang mendapatkan IPP Tetap terdiri atas:

Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 365 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Publik : 24 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Swasta : 335 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Komunitas : 6 Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 18 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Swasta : 2 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Swasta Digital : 8 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Berlangganan : 8 Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang mendapatkan IPP Tetap sampai dengan Desember 2019 adalah sebanyak 3.078 lembaga penyiaran yang mendapatkan IPP Tetap terdiri atas:

**REKAP IPP TETAP  
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2019**

<b>NO</b>	<b>JENIS LEMBAGA PENYIARAN</b>	<b>RADIO</b>	<b>TELEVISI</b>
1	Lembaga Penyiaran Berlangganan	0	368
2	Lembaga Penyiaran Komunitas Analog	204	17
3	Lembaga Penyiaran Komunitas Migrasi Digital	0	0
4	Lembaga Penyiaran Komunitas Simulcast	0	0
5	Lembaga Penyiaran Publik (RRI, TVRI)	1	1
6	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Analog	86	18
7	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Migrasi Digital	0	0
8	Lembaga Penyiaran Swasta	1.687	688
9	Lembaga Penyiaran Swasta Migrasi Digital	0	8
10	Lembaga Penyiaran Swasta Simuclast	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.978</b>	<b>1.100</b>
		<b>3.078</b>	

**Rekomendasi Kelayakan 2019**

Rekomendasi Kelayakan yang dikeluarkan oleh KPI Pusat dan KPI Daerah dari bulan Januari – Desember 2019 adalah sebanyak 143 RK sebagai berikut:

Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 127 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Publik : 14 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Swasta : 94 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Komunitas : 19 Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 16 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Publik : 0 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Swasta : 8 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Komunitas : 0 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Berlangganan : 8 Lembaga Penyiaran

## Forum Rapat Bersama (FRB)

Data FRB yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 (sampai bulan Desember) sebanyak 11 (sebelas) kali..

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	PROVINSI YG DI FRB
1	Rapat FRB 1	28 - 30 Januari	Hotel Holiday lin Bandung	Kepri, Bali, Sumbar, Kalbar, Jatim
2	Rapat FRB 2	27 - 01 Maret	Hotel Alana Surabaya	Kalbar, Jatim, DIY, Banten, Kaltara, Kalsel, Riau Sulsei
3	Rapat FRB 3	27 - 29 Maret	Hotel Harper Mangkubumi, Yogyakarta	Babel, Jabar, NTB, Kalteng, Sulsei, Kalbar, Sumsel, DKI Jakarta, Sulbar Jatim, Riau
4	Rapat FRB 4	02 - 04 Mei	Arion Swiss Belhotel, Bandung	Jatim, Sumut, Kaltim, Babel, Banten, Aceh, Kepri, Malut, Papua Barat
5	Rapat FRB 5	28 Mei	Hotel Salak Heritage Bogor	Jambi, NTT, Bengkulu, Kepri, Bali, Sulsei, Babel, Jabar, Jatim, Jateng, Banten
6	Rapat FRB 6	25 Juni	Hotel Salak Heritage Bogor	DIY, Bali, Sumbar, Sumut, Jabar, Jatim
7	Rapat FRB 7	22 Juli	Hotel Salak Heritage Bogor	Bangka Belitung, Lampung, NTT, Jabar, Jatim, Sumsel, Sumut, Jateng, dan Sulut.
8	Rapat FRB 8	15 Agustus	Kominfo	Kalteng, Jateng, Kep. Riau, DKI Jakarta, Kalsel, Sulsei, Bengkulu, Bali, dan Banten
9	Rapat FRB 9	1 Oktober	Kominfo	Kalteng, Jateng, Kep. Riau, DKI Jakarta, Kalsel, Sulsei, Bengkulu, Bali, dan Banten
10	Rapat FRB 10	12-Nov	TIK Ciputat, Banten	Kalteng, Jateng, Jabar, Riau, Kaltim, Kep. Riau, Sulawesi Utara, Sumut, Kalsel
11	Rapat FRB 11	17 Desember	Kominfo	Aceh, Jambi, Jateng, Jatim, Riau, dan Sulsei

## REKAP FORUM RAPAT BERSAMA YANG DILAKUKAN KOMIFO DAN KPI PUSAT JANUARI - DESEMBER 2019

NO	BULAN	JASA PENYIARAN RADIO				JASA PENYIARAN TELEVISI					JUM LAH
		LPP	LPS	LPK	JMH	LPP	LPS	LPK	LPB	JMH	
1	Januari	0	9	1	10	0	0	0	1	1	11
2	Februari	1	9	4	14	0	0	0	3	3	17
3	Maret	4	15	3	22	0	0	0	5	5	27
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	2	36	3	41	0	0	0	4	4	45
6	Juni	3	4	2	9	0	0	0	0	0	9

7	Juli	1	14	6	21	0	0	0	1	1	22
8	Agustus	0	31	0	31	0	0	0	2	2	33
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	16	0	16	0	3	0	0	3	19
11	November	0	14	0	14	0	2	0	1	3	17
12	Desember	0	13	0	13	0	3	0	0	3	16
	<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>161</b>	<b>19</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>216</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>216</b>									

### Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)

Evaluasi Uji Siaran (EUCS) yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 sebanyak 9 (sembilan) kali, yang bertempat di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bogor, Kantor Kemkominfo dan Banten.

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	PROVINSI YG DI EUCS
1	Rapat Pleno EUCS 1	28 - 30 Januari	Hotel Holiday Inn Bandung	Aceh, Bali, Banteng, Bengkulu, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kep Bangka Belitung, Kepri, Maluku, Malut, NTB, Papua, Papua Barat, Riau, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sumbar, Sumut
2	Rapat Pleno EUCS 2	27 - 01 Maret	Hotel Alana Surabaya	Aceh, Bali, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Maluku, NTB, Papua, Riau, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sumbar, Sumut, Banten
3	Rapat Pleno EUCS 3	27 - 29 Maret	Hotel Harper Mangkubumi, Yogyakarta	Sulbar, NTT, Bali, Sumbar, Papua, Aceh, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Jatim, Jabar, Jateng, Riau, Kaltim
4	Rapat Pleno EUCS 4	02 - 04 Mei	Arion Swiss Belhotel, Bandung	Banten, Jambi, Kalbar, Kaltim, NTB, Papua, Sulut, Sulsel, Sumsel, Riau
5	Rapat Pleno EUCS 5	28 Mei	Hotel Salak Heritage Bogor	Banten, Jateng, Jatim, NTB, Kalteng, Riau
6	Rapat Pleno EUCS 6	25 Juni	Hotel Salak Heritage Bogor	Banten, Sulsel, Riau, Kepri
7	Rapat Pleno EUCS 7	22 Juli	Hotel Salak Heritage Bogor	DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah dan Riau
8	Rapat Pleno EUCS 8	27 Agustus	Kominfo	Kaltara, Riau, Kep. Riau, Kalbar dan Aceh
9	Rapat Pleno EUCS 9	15 Oktober	TIK Ciputat, Banten	Aceh, Sumut, Kep. Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Kaltara, Kaltim, Kalteng, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Papua Barat

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA PENYIARAN &amp; PANGGILAN UDARA</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>NO SURAT</b>	<b>TANGGAL SURAT</b>
1	PT Media Televisi Dupe	Riau	NOMOR 38 TAHUN 2019	21 Januari 2019
2	PT Semarang Podojoyo Media	Jawa Tengah	NOMOR 158 TAHUN 2019	21 Februari 2019
3	PT Citra Ilham Mandiri	Kalimantan Tengah	NOMOR 159 TAHUN 2019	21 Februari 2019
4	PT Megah Bangun Lestari	Sumatera Selatan	NOMOR 157 TAHUN 2019	21 Februari 2019
5	PT Matahari Mega Mandiri	Sulawesi Tengah	NOMOR 289 TAHUN 2019	18 April 2019
6	PT Mega Media Indonesia	DKI Jakarta	NOMOR 324 TAHUN 2019	30 April 2019
7	PT Akmanda Mandiri Jaya	Kalimantan Timur	NOMOR 293 TAHUN 2019	22 April 2019
8	PT Televisi Merauke Top Bersatu	Papua	NOMOR 292 TAHUN 2019	22 April 2019
9	PT Gelora Sehati Inti Visual	Kalimantan Selatan	NOMOR 328 TAHUN 2019	02 Mei 2019
10	PT Berlian Hitam Zhou	Kepulauan Riau	NOMOR 326 TAHUN 2019	02 Mei 2019
11	PT Matahari Indo Media	Banten	NOMOR 327 TAHUN 2019	02 Mei 2019
12	PT Dumai Media Televisi	Riau	NOMOR 564 TAHUN 2019	20 Mei 2019
13	PT Media Visual Banyuwangi	Jawa Timur	NOMOR 563 TAHUN 2019	20 Mei 2019
14	PT Radio Lilin Jaya FM	Sumatera Selatan	NOMOR 649 TAHUN 2019	29 Juni 2019
15	Perkumpulan Radio Komunitas Pekka Barona	Aceh	NOMOR 681 TAHUN 2019	11 Juli 2019

16	PT Radio Palito Swara Sahati	Sumatera Barat	NOMOR 679 TAHUN 2019	11 Juli 2019
17	PT Sibela Media Persada	Maluku Utara	NOMOR 690 TAHUN 2019	17 Juli 2019
18	PT Purworejo Media Televisi	Jawa Tengah	NOMOR 691 TAHUN 2019	17 Juli 2019
19	PT Top Vision Emival	Sulawesi Tengah	NOMOR 749 TAHUN 2019	13 Agustus 2019
20	Perkumpulan Nelayan Indramayu Disingkat Perni	Jawa Barat	NOMOR 786 TAHUN 2019	29 Agustus 2019
21	Perkumpulan Komunitas Petani Desa Tokcertop	Jawa Tengah	NOMOR 788 TAHUN 2019	30 Agustus 2019
22	PT Asia Panca Mandiri	Riau	NOMOR 788 TAHUN 2019	30 Agustus 2019

Data: Kominfo Tahun 2019

## 1.2. Izin Penyelenggaraan Penyiaran 2020

Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap yang diterima oleh KPI Pusat pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember, sebanyak 136 lembaga penyiaran yang mendapatkan IPP Tetap terdiri atas:

Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 116 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Publik : 4 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Swasta : 110 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Komunitas : 2 Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 20 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Swasta : 4 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Swasta Digital : 4 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Berlangganan : 12 Lembaga Penyiaran

Data Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang mendapatkan IPP Tetap sampai dengan Desember 2020 adalah sebanyak 3.078 lembaga penyiaran yang mendapatkan IPP Tetap terdiri atas:

**REKAP IPP TETAP  
SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2020**

<b>NO</b>	<b>JENIS LEMBAGA PENYIARAN</b>	<b>RADIO</b>	<b>TELEVISI</b>
1	Lembaga Penyiaran Berlangganan	0	366
2	Lembaga Penyiaran Komunitas Analog	204	17
3	Lembaga Penyiaran Komunitas Migrasi Digital	0	0
4	Lembaga Penyiaran Komunitas Simucast	0	0
5	Lembaga Penyiaran Publik (RRI, TVRI)	1	1
6	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Analog	86	17
7	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Migrasi Digital	0	0
8	Lembaga Penyiaran Swasta	1688	686
9	Lembaga Penyiaran Swasta Migrasi Digital	0	8
10	Lembaga Penyiaran Swasta Simuclast	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1.979</b>	<b>1.099</b>
		<b>3.078</b>	

**Rekomendasi Kelayakan**

Rekomendasi Kelayakan (RK) yang dikeluarkan oleh KPI Pusat dan KPI Daerah dari bulan Januari – Desember 2020 adalah sebanyak 303 RK sebagai berikut:

Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 232 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Publik : 2 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Swasta : 220 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Komunitas : 10 Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 71 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Publik : 0 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Swasta : 69 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Komunitas : 2 Lembaga Penyiaran
- Lembaga Penyiaran Berlangganan : 2 Lembaga Penyiaran

### Forum Rapat Bersama (FRB)

Data FRB yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 (sampai bulan Desember) sebanyak 9 (sembilan) kali, bertempat:

NO	TANGGAL	NAMA PROVINSI	TEMPAT
1	24 Januari	Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Barat, D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah	Bandung
2	27 Februari	Nusa Tenggara Barat, Banten, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Jambi dan DKI Jakarta	Jambi
3	21 April	Banten, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jambi, Bengkulu, Jawa Barat dan Jawa Timur	Melalui Zoom
4	16 Juni	Jambi, Aceh, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan	Melalui Zoom

		Utara, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan	
5	17 Juli	Riau, D.I Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Utara	Bekasi
6	26 Agustus	Aceh, Bali, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan	Bogor
7	22 Oktober	Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, Bengkulu, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Bangka Belitung, D.I Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Aceh dan Sulawesi Utara	Depok
8	27 November	DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Papua, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jawa Tengah dan Bengkulu	Bekasi

9	30 Desember	Banten, Bangka Belitung, Bali, D.I Yogyakarta, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan	Zoom
---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------

**REKAP FORUM RAPAT BERSAMA YANG DILAKUKAN KOMINFO DAN KPI  
JANUARI - DESEMBER 2020**

No	Bulan	JASA PENYIARAN RADIO				JASA PENYIARAN TELEVISI					Jumlah
		LPP	LPS	LPK	JMH	LPP	LPS	LPK	LPB	JMH	
1	Januari	0	14	0	14	0	8	0	0	8	22
2	Februari	0	16	1	17	0	0	0	1	1	18
3	April	0	47	2	49	0	0	0	0	0	49
4	Juni	0	45	1	46	0	5	0	1	6	52
5	Juli	0	23	0	23	0	4	0	0	4	27
6	Agustus	0	13	0	13	0	7	0	0	7	20
7	Oktober	0	21	2	23	0	37	0	0	37	60
8	November	0	18	1	19	0	14	0	0	14	33
9	Desember	0	39	3	42	0	10	0	0	10	52
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>10</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>87</b>	<b>333</b>

### Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS)

Data Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) yang telah dilaksanakan selama tahun 2020 :

NO	TANGGAL	NAMA PROVINSI	TEMPAT
1	24 Januari	Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur	Bandung
2	27 Februari	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Barat	Jambi
3	13 April	Jawa Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau	Surat dari Kominfo
4	14 April	Sulawesi Selatan	Surat dari Kominfo
5	20 April	Jawa Timur dan Sumatera Utara	Surat dari Kominfo
6	24 April	Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat	Surat dari Kominfo
7	29 April	Sulawesi Selatan	Surat dari Kominfo
8	13 Mei	Kalimantan Barat	Surat dari Kominfo
9	20 Mei	Sulawesi Selatan, Papua Barat dan Jambi	Surat dari Kominfo
10	19 Oktober	Kalimantan Utara	Zoom

### Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)

Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) pada tahun 2020 yang dilaksanakan langsung oleh KPI Pusat kepada Lembaga Penyiaran di Provinsi Kalimantan Utara dikarenakan Provinsi tersebut belum memiliki KPI Daerah, melaksanakan EDP

dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan secara virtual (*Zoom Meeting*) pada:

- 17 April 2020 : Radio Miracle Tarakan
- 6 Agustus 2020 : PT. Radio Duta Borneo Utara
- 19 September 2020 : PT. Banten Media Televisi
- 19 September 2020 : PT. Metropolitan Televisindo
- 19 Oktober 2020 : Kompas TV
- 18 Desember 2020 : PT. Radio Permata Alam Sempurna

**PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA LEMBAGA PENYIARAN &amp; PANGGILAN UDARA</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>NO SURAT</b>	<b>TANGGAL SURAT</b>
1	LPPL Radio Rimba Raya FM Bener Meriah	Aceh	No: 871 TAHUN 2019	17/10/2019
2	Suara Sanjaya FM	Jawa Timur	No: 1019 TAHUN 2019	19/12/2019
3	PT. Media Televisi Kabel Indonesia	DKI Jakarta	No: 1014 TAHUN 2019	18/12/2019
4	PT. Media Kutim Cemerlang	Kalimantan Timur	No: 1080 TAHUN 2019	19/12/2019
5	PT. Indonesia Media Televisi	DKI Jakarta	No: 200 TAHUN 2020	19/05/2020
6	PT. Pawan Surya Televisi	Kalimantan Barat	No: 305 TAHUN 2020	06/07/2020
7	PT. Digital Visi Media	Jawa Timur	No: 304 TAHUN 2020	06/07/2020
8	PT. Televisi Orang Papua Sorong	Papua	No: 302 TAHUN 2020	06/07/2020
9	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Belu	Nusa Tenggara Tmur	No: 303 TAHUN 2020	06/07/2020
10	PT. Cahaya Rahmat Jaya	Riau	No: 269 TAHUN 2020	22/06/2020
11	PT. Aidea Vision	Riau	No: 270 TAHUN 2020	22/06/2020
12	PT. Rellyzha Vision	Riau	No: 271 TAHUN 2020	22/06/2020

### 1.3. Izin Penyelenggaraan Penyiaran 2021

Data Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang mendapatkan IPP Tetap sampai dengan bulan Desember 2021 adalah sebanyak 3051 lembaga penyiaran yang mendapatkan IPP Tetap terdiri atas:

Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 1977 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Publik : 1 LP
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal : 85 LP
- Lembaga Penyiaran Swasta : 1.688 LP
- Lembaga Penyiaran Komunitas : 203 LP

Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 1074 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Publik : 1 LP
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal : 16 LP
- Lembaga Penyiaran Swasta : 661 LP
- Lembaga Penyiaran Swasta Simulcast : 101 LP
- Lembaga Penyiaran Swasta Migrasi Digital : 6 LP
- Lembaga Penyiaran Komunitas : 16 LP
- Lembaga Penyiaran Berlangganan : 359 LP

#### **REKAP IPP TETAP SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2021**

<b>NO</b>	<b>JENIS LEMBAGA PENYIARAN</b>	<b>RADIO</b>	<b>TELEVISI</b>
1	Lembaga Penyiaran Berlangganan	0	366
2	Lembaga Penyiaran Komunitas Analog	204	13
3	Lembaga Penyiaran Komunitas Migrasi Digital	0	1
4	Lembaga Penyiaran Komunitas Simulcast	0	1
5	Lembaga Penyiaran Publik (RRI, TVRI)	1	1
6	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Analog	86	17
7	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Migrasi Digital	0	0
8	Lembaga Penyiaran Swasta	1.688	661
9	Lembaga Penyiaran Swasta Migrasi Digital	0	6
10	Lembaga Penyiaran Swasta Simulcast	0	101
<b>TOTAL</b>		<b>1.979</b>	<b>1.167</b>
		<b>3.146</b>	

Pendataan televisi digital sangat penting mengingat akan segera dilakukan migrasi teknologi dari analog ke digital, paling lambat 2 November 2022. Pendataan ini ditujukan untuk menyiapkan sekaligus melakukan sosialisasi kepada publik terkait dengan data televisi yang sudah simulcast (analog dan digital dilakukan bersamaan) atau sudah pindah ke teknologi digital. Melalui hasil koordinasi KPI Pusat dengan Kominfo, datanya sebagai berikut:

NO	JASA PENYIARAN TV	ANALOG	SIMULCAST	MIGRASI DIGITAL
1	Lembaga Penyiaran Swasta	661	101	6
2	Lembaga Penyiaran Publik/Lokal	17	0	0
3	Lembaga Penyiaran Komunitas	13	1	1
TOTAL		691	102	7

### PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN

**Tahun 2021**

**(Dasar Surat Kominfo)**

NO	NAMA LEMBAGA PENYIARAN & PANGGILAN UDARA	PROVINSI	NO IPP	NO SURAT PENCABUTAN	
				NOMOR	TGL
1	PT Radio Mediasuara Trisakti	DKI Jakarta	No 475 Tahun 2017	232 Tahun 2021	28/06/2021
2	PT Radio SSQ Swaramitra	Riau	Nomor 18/RF.02.02/2019	233 Tahun 2021	28/06/2021
3	PT Radio Kampar Pratama Swara	Riau	No 517 Tahun 2015	271 Tahun 2021	28/06/2021

4	PT Radio Jalur Sakti	Riau	No 518 Tahun 2015	272 Tahun 2021	28/06/2021
5	PT Gelora Inti Sehati	Kalimantan Selatan	Nomor 2380/RF.02 .02/2018	234 Tahun 2021	28/06/2021
6	PT Revina Swara Bahar	Jambi	Nomor 2347/RF.02 .02/2018	235 Tahun 2021	28/06/2021
7	PT Tentram Begawi Jejama	Lampung	Nomor 2469/RF.02 .02/2018	236 Tahun 2021	28/06/2021
8	PT Suara Tentram Jaya	Lampung	Nomor 2475/RF.02 .02/2018	237 Tahun 2021	28/06/2021
9	PT Suaranada Alam Indah	Lampung	No 834 Tahun 2016	284 Tahun 2021	28/06/2021
10	PT Radio Mandala Arganada	Lampung	No 180 Tahun 2017	285 Tahun 2021	28/06/2021
11	PT Radio Emdi	Jawa Timur	No 957 Tahun 2017	238 Tahun 2021	28/06/2021
12	PT Radio Laskar Peduli Sesama	Jawa Timur	Nomor 57/RF.02.0 2/2019	241 Tahun 2021	28/06/2021
13	PT Radio Wisnu Wardhana	Jawa Timur	Nomor 69/RF.02.0 2/2019	242 Tahun 2021	28/06/2021

14	PT Radio Suara Madura	Jawa Timur	Nomor 54/RF.02.0 2/2019	243 Tahun 2021	28/06/2021
15	PT Radio Swara Pararaton	Jawa Timur	Nomor 63/RF.02.0 2/2019	244 Tahun 2021	28/06/2021
16	PT Radio Lamajang Tigang Juru	Jawa Timur	Nomor 66/RF.02.0 2/2019	245 Tahun 2021	28/06/2021
17	PT Genta Radio Annawawi	Jawa Timur	Nomor 62/RF.02.0 2/2019	246 Tahun 2021	28/06/2021
18	PT Radio Suara Musa	Jawa Timur	Nomor 65/RF.02.0 2/2019	247 Tahun 2021	28/06/2021
19	PT Radio Suara Arkananta	Jawa Timur	Nomor 55/RF.02.0 2/2019	248 Tahun 2021	28/06/2021
20	PT Radio Satriopiningit	Jawa Timur	Nomor 70/RF.02.0 2/2019	249 Tahun 2021	28/06/2021
21	PT Radio Muslim Nusantara Media	Jawa Timur	Nomor 64/RF.02.0 2/2019	250 Tahun 2021	28/06/2021
22	PT Radio Salam Tahes	Jawa Timur	Nomor 56/RF.02.0 2/2019	251 Tahun 2021	28/06/2021
23	PT Radio Nada FM Madura	Jawa Timur	Nomor 793/RF.02. 03/2018	252 Tahun 2021	28/06/2021

24	Perkumpulan Radio Komunitas Suara Paradis Sejahtera	Jawa Timur	No 278 Tahun 2016	259 Tahun 2021	28/06/2021
25	PT Radio Taurus Adhiswara	Jawa Timur	No 95 Tahun 2017	274 Tahun 2021	28/06/2021
26	PT Radio Roudlotul Athfal'45	Jawa Timur	No 1382 Tahun 2016	275 Tahun 2021	28/06/2021
27	PT Radio Ekalaras Vicaksanatorya	Jawa Timur	No 1180 Tahun 2016	276 Tahun 2021	28/06/2021
28	PT Maja Pari Indah Suara Mojokerto	Jawa Timur	No 1186 Tahun 2016	277 Tahun 2021	28/06/2021
29	PT Radio Citra Wanodya Angkasa	Jawa Timur	Nomor 222/RF.02.03/2018	286 Tahun 2021	28/06/2021
30	PT Radio Bimantara	Sumatera Barat	No 642 Tahun 2016	239 Tahun 2021	28/06/2021
31	PT Radio Citra Ayu Senada	Sumatera Utara	No 1080 Tahun 2017	240 Tahun 2021	28/06/2021
32	PT Radio Irfa Clarissa	Sumatera Utara	No 1037 Tahun 2016	270 Tahun 2021	28/06/2021
33	PT Radio Triswara Kosmopolitan Sakti	Sulawesi Utara	No 574 Tahun 2017	253 Tahun 2021	28/06/2021

34	PT Radio Geovanni Mart	Sulawesi Utara	No 912 Tahun 2016	254 Tahun 2021	28/06/2021
35	PT Radio Suara Teluk Amurang Ranoiapu	Sulawesi Utara	No 907 Tahun 2016	255 Tahun 2021	28/06/2021
36	PT Radio Bintang Menara Nusantara	Sulawesi Selatan	Nomor 183/RF.02.02/2019	258 Tahun 2021	28/06/2021
37	PT Radio Gema Nuansa Remaja	Sulawesi Selatan	Nomor 100/RF.02.02/2019	265 Tahun 2021	28/06/2021
38	PT Media Bintang Sembilan	Jawa Tengah	Nomor 4081/RF.02.02/2017	263 Tahun 2021	28/06/2021
39	Swarasalem FM	Jawa Tengah	Nomor 2383/RF.02.02/2018	268 Tahun 2021	28/06/2021
40	PT Radio Muria Kudus	Jawa Tengah	Nomor 1894 Tahun 2016	281 Tahun 2021	28/06/2021
41	PT Radio Indraswara Cakrawalanada	Jawa Barat	Nomor 99/RF.02.03/2017	280 Tahun 2021	28/06/2021
42	PT Radio Geunta Sewara Aceh	Aceh	Nomor 39/RF.02.02/2019	264 Tahun 2021	28/06/2021
43	PT Radio Pratama Natuna	Kepulauan Riau	Nomor 81/RF.02.02/2019	266 Tahun 2021	28/06/2021

44	PT Radio Suara Sadara	Bali	Nomor 43/RF.02.0 2/2019	267 Tahun 2021	28/06/2021
45	PT Radio Pesona Bali	Bali	No 1271 Tahun 2017	283 Tahun 2021	28/06/2021
46	PT Radio Artha Graha Insani Perdana	Kalimantan Tengah	Nomor 2383/RF.02 .02/2018	269 Tahun 2021	28/06/2021
47	PT Radio Gema Cipta Talawang	Kalimantan Tengah	No 509 Tahun 2015	273 Tahun 2021	28/06/2021
48	PT Radio Citra Budaya Banten	Banten	No 122 Tahun 2016	260 Tahun 2021	28/06/2021
49	Perkumpulan Penyiaran Radio Komunitas Ikatan Masyarakat Pondok Aren dan Sekitarnya	Banten	No 1651 Tahun 2017	262 Tahun 2021	28/06/2021
50	PT Radio Gema Karakatau	Banten	Nomor 25/RF.02.0 3/2018	278 Tahun 2021	28/06/2021
51	PT Radio Swara Shinta Wahana	Bengkulu	No 1755 Tahun 2017	279 Tahun 2021	28/06/2021
52	PT Radio Suara Kelana	Bengkulu	Nomor 101/RF.02. 03/2018	282 Tahun 2021	28/06/2021
53	PT Radio Cinta Nada Indonesia	Gorontalo	No 669 Tahun 2016	261 Tahun 2021	28/06/2021

54	PT Radio Rock FM Jayapura	Papua	No 438 Tahun 2016	256 Tahun 2021	28/06/2021
55	PT Radio Suara Damai Kehidupan	Papua	Nomor 179/RF.02. 02/2019	257 Tahun 2021	28/06/2021
56	PT Radio Madura Jaring Media	Jawa Timur	Nomor 78/RF.02.0 2/2017	302 Tahun 2021	10/07/2021
57	PT Radio Pas Navaka	Jawa Timur	Nomor 73/RF.02.0 2/2017	303 Tahun 2021	11/07/2021
58	PT Radio Visi Inti Swara Frekuensi Modulasi	Jawa Timur	No 421 Tahun 2017	304 Tahun 2021	12/07/2021
59	Kepri Cyber School Television	Kepulauan Riau	No 467 Tahun 2016	100 Tahun 2021	16/03/2021
60	PT Bama Media Wilis	Jawa Timur	Nomor 145/T.02.02 /2017	340 Tahun 2021	04/08/2021
61	PT Esa Televisi Multi Indonesia	Kepulauan Bangka Belitung	No 1169 Tahun 2016	338 Tahun 2021	04/08/2021
62	PT Media Bintang Cemerlang	Jawa Timur	Nomor 157/T.02.02 /2017	337 Tahun 2021	04/08/2021
63	PT Samudra Samarinda Televisi	Kalimantan Timur	No 1281 Tahun 2017	339 Tahun 2021	04/08/2021

64	PT Canel Televisi Belitung	Kepulauan Bangka Belitung	No 106 Tahun 2017	331 Tahun 2021	02/08/2021
65	PT Borneo Multimedia	Kalimantan Barat	No 1028 Tahun 2015	326 Tahun 2021	02/08/2021
66	PT Sintang Jaya Vision	Kalimantan Barat	No 885 Tahun 2018	332 Tahun 2021	02/08/2021
67	PT Cahaya Elektronusa Raya	DKI Jakarta	No 1433 Tahun 2017	329 Tahun 2021	02/08/2021
68	PT Canel Televisi Bali	Bali	No 1024 Tahun 2016	330 Tahun 2021	02/08/2021

#### 1.4. Izin Penyelenggaraan Penyiaran 2022

Data Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio yang mendapatkan IPP Tetap sampai dengan bulan Mei 2022 adalah sebanyak 3.036 lembaga penyiaran yang mendapatkan IPP Tetap terdiri atas:

Lembaga Penyiaran Radio berjumlah 1.977 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Publik : 1 LP
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal : 85 LP
- Lembaga Penyiaran Swasta : 1.688 LP
- Lembaga Penyiaran Komunitas : 203 LP

Lembaga Penyiaran Televisi berjumlah 1.059 lembaga penyiaran dengan rincian:

- Lembaga Penyiaran Publik : 1 LP
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Analog : 12 LP
- Lembaga Penyiaran Publik Lokal Migrasi Digital : 4 LP
- Lembaga Penyiaran Swasta Analog : 173 LP
- Lembaga Penyiaran Swasta Migrasi Digital : 343 LP
- Lembaga Penyiaran Swasta Simuclast : 132 LP

- Lembaga Penyiaran Komunitas Analog : 9 LP
- Lembaga Penyiaran Komunitas Migrasi Digital : 6 LP
- Lembaga Penyiaran Berlangganan : 379 LP

## 2. Evaluasi Tahunan LPS TV Berjaringan

Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Berjaringan dilakukan KPI Pusat berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2016. Evaluasi Tahunan ini mengevaluasi 14 Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Berjaringan di antaranya adalah PT. Metropolitan Televisindo (RTV), PT. Cakrawala Andalas Tevelisi (ANTV), PT. Lativi Media Karya (TVONE), PT. Televisi Transformasi Indonesia (TRANS TV), PT. NET. Mediatama Televisi (NET.), PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (TRANS7), PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT. Global Informasi Bermutu (GTV), PT. Visi Citra Mitra Mulia (INEWS TV), PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (MNC TV), PT. Surya Citra Televisi (SCTV), PT. Indosiar Visual Mandiri (INDOSIAR), PT. Cipta Megaswara Televisi (KOMPAS TV), PT. Media Televisi Indonesia (METRO TV).

Evaluasi tahunan antara tahun 2020 – 2022 menggunakan metode deskriptif. Dengan metode ini, diharapkan Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Berjaringan adalah

- 1). Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi (disingkat LPS TV) Induk Stasiun Jaringan tentang hasil Evaluasi Tahunan;
- 2). Menyelaraskan kualitas tayangan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS);
- 3). Meningkatkan mutu tayangan LPS TV berjaringan 14 Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Berjaringan ini setiap tahunnya dievaluasi dalam 3 aspek, yakni Sanksi KPI, Penghargaan KPI dan Sistem Stasiun Jaringan atau Konten Lokal.

Pada rentan evaluasi tahunan pada tahun 2020 – 2022, rekomendasi yang diberikan KPI terhadap Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Berjaringan adalah perbaikan kualitas penyiaran dengan lebih memperhatikan rambu-rambu regulasi yang ada di P3SPS, mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyiaran dalam aspek penghargaan KPI serta, peningkatan konten lokal.

Pada tahun tersebut KPI juga memberikan rekomendasi yang spesifik terhadap lembaga penyiaran terkait dengan isu-isu aktual dalam bidang penyiaran. Di tahun 2020, KPI meminta agar Lembaga Penyiaran untuk netral, hati-hati, adil dan proporsional

dalam menayangkan konten politik, karena pada tahun 2022 diselenggarakan Pilkada Serentak. Pada tahun 2021, KPI meminta agar Lembaga Penyiaran untuk aktif menayangkan Iklan Layanan Masyarakat sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Dan pada tahun 2022, KPI meminta komitmen Lembaga Penyiaran untuk mensukseskan digitalisasi penyiaran.

## **2.1. Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Berjaringan Tahun 2019**

Pada tahun 2020, KPI Pusat melakukan evaluasi terhadap Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Swasta Berjaringan.

Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan terhadap data-data 2019 Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Swasta Berjaringan dengan jadwal sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>LPS TV SWASTA BERJARINGAN</b>	<b>HARI, TANGGAL</b>
1.	RTV	Kamis, 20 Februari 2020
2.	ANTV	Rabu, 19 Februari 2020
3.	TVONE	Rabu, 19 Februari 2020
4.	TRANS TV	Jumat, 14 Februari 2020
5.	TRANS7	Jumat, 14 Februari 2020
6.	NET.	Senin, 10 Februari 2020
7.	RCTI	Kamis, 13 Februari 2020
8.	GTV	Kamis, 13 Februari 2020
9.	INEWS TV	Kamis, 13 Februari 2020
10	MNC TV	Kamis, 13 Februari 2020
11.	SCTV	Rabu, 12 Februari 2020
12.	INDOSIAR	Rabu, 12 Februari 2020
13.	KOMPAS TV	Kamis, 20 Februari 2020
14.	METRO TV	Senin, 10 Februari 2020



Evaluasi Tahunan antara KPI Pusat dan TVONE dan ANTV

Secara umum, dalam evaluasi tersebut, KPI memberikan evaluasi dan perbaikan dalam kepatuhan terhadap P3&SPS, mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas siaran sebagai upaya mendapatkan penghargaan KPI, serta memperbaiki dan mempertahankan konten lokal. KPI juga memberikan himbuan kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap netral, hati-hati, proporsional dan berimbang mengingat akan diselenggarakan Pilkada Serentak tahun 2022.

## 2.2. Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Berjaringan tahun 2021

Pada tahun 2021, KPI Pusat melakukan evaluasi terhadap LPS TV Swasta Berjaringan. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan terhadap data-data 2020 LPS TV Swasta Berjaringan dengan jadwal sebagai berikut:

NO	LPS TV SWASTA BERJARINGAN	HARI, TANGGAL
1.	RTV	Kamis, 4 Februari 2021
2.	ANTV	Rabu, 3 Februari 2021
3.	TVONE	Rabu, 3 Februari 2021
4.	TRANS TV	Jumat, 5 Februari 2021
5.	TRANS7	Senin, 1 Februari 2021
6.	NET.	Rabu, 27 Januari 2021
7.	RCTI	Senin, 8 Februari 2021

8.	GTV	Senin, 8 Februari 2021
9.	INEWS TV	Senin, 8 Februari 2021
10	MNC TV	Senin, 8 Februari 2021
11.	SCTV	Kamis, 28 Januari 2021
12.	INDOSIAR	Kamis, 28 Januari 2021
13.	KOMPAS TV	Kamis, 4 Februari 2021
14.	METRO TV	Jumat, 29 Januari 2021



Evaluasi Tahunan antara KPI Pusat dan RTV

Secara umum, dalam evaluasi tersebut, KPI memberikan evaluasi dan perbaikan dalam kepatuhan terhadap P3&SPS, mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas siaran sebagai upaya mendapatkan penghargaan KPI, serta memperbaiki dan mempertahankan konten lokal. KPI juga memberikan himbauan kepada seluruh lembaga penyiaran untuk meningkatkan Iklan Layanan Masyarakat berupa pencegahan Covid-19.

### **2.3. Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Berjaringan tahun 2022**

Pada tahun 2022, KPI Pusat melakukan evaluasi terhadap LPS TV Swasta Berjaringan. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan terhadap data-data 2021 LPS TV Swasta Berjaringan dengan jadwal sebagai berikut:

NO	LPS TV SWASTA BERJARINGAN	HARI, TANGGAL
1.	RTV	Rabu, 2 Februari 2022
2.	ANTV	Kamis, 27 Januari 2022
3.	TVONE	Kamis, 27 Januari 2022
4.	TRANS TV	Jum'at, 28 Januari 2022
5.	TRANS7	Jum'at, 28 Januari 2022
6.	NET.	Rabu, 2 Februari 2022
7.	RCTI	Senin, 31 Januari 2022
8.	GTV	Senin, 31 Januari 2022
9.	INEWS TV	Senin, 31 Januari 2022
10.	MNC TV	Senin, 31 Januari 2022
11.	SCTV	Kamis, 27 Januari 2022
12.	INDOSIAR	Kamis, 27 Januari 2022
13.	KOMPAS TV	Jum'at, 28 Januari 2022
14.	METRO TV	Rabu, 2 Februari 2022



Evaluasi Tahunan Indosiar



Evaluasi Tahunan SCTV

Secara umum, dalam evaluasi tersebut, KPI memberikan evaluasi dan perbaikan dalam kepatuhan terhadap P3&SPS, mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas siaran sebagai upaya mendapatkan penghargaan KPI, serta memperbaiki dan mempertahankan konten lokal. KPI juga meminta komitmen Lembaga Penyiaran Swasta Televisi Berjaringan dalam upaya penyelenggaraan Digitalisasi Penyiaran.

### 3. Aplikasi Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyairan

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bidang PS2P mempunyai dua aplikasi yang diperuntukkan untuk menopang kinerja pemerintahan berbasis elektronik. Dua aplikasi ini berfungsi mendorong efisiensi dalam kualitas konten lokal dan pendataan Lembaga Penyiaran, serta integrasi

data Wilayah Layanan Siaran dan kebutuhan masyarakat akan program siaran serta kepentingan industri, baik Lembaga Penyiaran atau Pengiklan.

### 3.1. Aplikasi SSJ

Periode kepemimpinan Komisioner 2019 - 2022 merupakan tahun yang memiliki dinamika tersendiri bagi Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), dimulai dari penyempurnaan aplikasi SSJ yang mulai digagas sejak tahun 2018. Sejak tahun 2018 terdapat perubahan dalam proses perizinan dimana ada proses penyederhanaan dan integrasi yang dimasukkan ke dalam Sistem *Online Single Submission (OSS)* yang juga meliputi pelaporan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ).

Selama periode 2019 – 2022, Komisiner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) yang terdiri dari Mohamad Reza sebagai Koordinator, Agung Suprio dan Aswar Hasan sebagai anggota melakukan pengawasan aplikasi SSJ. Hal itu dilakukan sebagai bentuk implementasi amanah UU 32 tentang Penyiaran tahun 2002 yang termaktub di dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pasal 68 ayat 1,2 dan 3 tentang pemenuhan konten lokal 10% perhari.

Penyempurnaan aplikasi SSJ dimulai tahun 2019, penerapan monitoring Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) terhadap 14 LPS TV Berjaringan melalui online. Hal ini dilakukan sebagai salah satu persyaratan pemenuhan penilaian kinerja operasional LPS TV. 14 LPS TV yang diawasi adalah ANTV, Indosiar, Kompas TV, NET., Metro TV, MNC TV, iNews, RCTI, GTV, RTV, SCTV, tvOne, Trans TV dan Trans 7.

Tujuan dibuat aplikasi ini adalah memudahkan KPI dan KPI daerah dalam melakukan pemantauan terhadap Televisi Swasta Berjaringan. Adapun lingkup pemantauan aplikasi ini meliputi: Nama Lembaga Penyiaran, Nama Daerah, Program Siaran, Kategori Siaran (*Genre*), Produksi, Bahasa, Tanggal Tayang, Jam Tayang dan Jam Selesai. Laporan aplikasi SSJ dilakukan selama satu bulan yang kemudian diakumulasi selama 12 bulan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan.

ID	Lembaga Penyiaran	Provinsi	Kota/Kab	Program Siaran	Kategori Siaran	Produksi	Bahasa	Tanggal	Jam tayang	Jam selesai
1	Kompas TV	Aceh	Banda Aceh	ADZAN ISYA BANDA ACEH	Religi	lokal	nasional	Wednesday, 1-06-2022	19:53:00	19:57:00
2	Indosiar	Bali	Denpasar	Bali Bernyanyi Puja Trisandya	Musik	lokal	daerah	Wednesday, 1-06-2022	19:00:00	19:06:00
3	GTV	Bali	Denpasar	PUJA TRI SANDYA SORE	Religi	lokal	daerah	Wednesday, 1-06-2022	19:00:00	19:30:00
4	Kompas TV	Bali	Denpasar	ILM Lokal	Informasi	lokal	daerah	Wednesday, 1-06-2022	19:00:00	19:04:00
5	GTV	Bali	Denpasar	PUJA TRI SANDYA SORE	Religi	lokal	daerah	Wednesday, 1-06-2022	19:00:00	19:30:00
6	Kompas TV	Maluku	Ambon	ADZAN MAGHRIB AMBON	Religi	lokal	nasional	Wednesday, 1-06-2022	18:45:00	18:48:00
7	Kompas TV	Aceh	Banda Aceh	ADZAN MAGHRIB BANDA ACEH	Religi	lokal	nasional	Wednesday, 1-06-2022	18:38:00	18:42:00
8	Kompas TV	Sumatera Utara	Medan	AZAN MAGRIB MEDAN	Religi	lokal	nasional	Wednesday, 1-06-2022	18:36:00	18:40:00
9	Kompas TV	Kalimantan Selatan	Banjarmasin	ADZAN MAGHRIB BANJARMASIN	Religi	lokal	nasional	Wednesday, 1-06-2022	18:21:00	18:24:00
10	Kompas TV	Papua Barat	Sorong	Adzan Maghrib Sorong	Religi	lokal	nasional	Wednesday, 1-06-2022	18:20:00	18:22:00

*Tabel Lingkup Pemantaun Aplikasi SSJ*

Laporan SSJ tersebut dihitung / direkap selama periode bulan Januari – Desember (12 bulan). Di dalam aplikasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) terlihat Lembaga Penyiaran Swasta mana saja yang sudah memenuhi alokasi konten lokal 10%, penayangan konten lokal di waktu produktif / primetime dan produksi lokal. Di bawah ini akan ditampilkan tabel SSJ Alokasi Konten Lokal 10% sepanjang 2019 – 2022.

Berikut table laporan SSJ selama Periode 2019 – 2022:

**TABEL SSJ 2019 (AGUSTUS – DESEMBER)**

No.	Lembaga Penyiaran	Jumlah Siaran Lokal (%)	Durasi (Menit)	Keterangan
1.	ANTV	13.57%	1.076.069	Terpenuhi
2.	GTV	13.29 %	1.113.005	Terpenuhi
3.	Indosiar	11.32 %	598.326	Terpenuhi
4.	INews	9.74 %	966.030	Belum Terpenuhi
5.	Kompas TV	12.36 %	844.100	Terpenuhi
6.	Metro TV	9.70 %	769.160	Belum Terpenuhi

7.	MNC TV	10.42 %	734.340	Terpenuhi
8.	NET.	10.01 %	606.420	Terpenuhi
9..	RCTI	10.57 %	768.450	Terpenuhi
10.	RTV	9.00 %	733.795	Belum Terpenuhi
11.	SCTV	9.11 %	641.930	Belum Terpenuhi
12.	Trans 7	11.19 %	764.070	Terpenuhi
13.	Trans TV	10.43 %	758.490	Terpenuhi
14.	TV One	13.46 %	919.257	Terpenuhi

**TABEL SSJ 2020 (JANUARI – DESEMBER)**

No.	Lembaga Penyiaran	Jumlah Siaran Lokal (%)	Durasi (Menit)	Keterangan
1.	ANTV	9.00 %	1.706.803	Belum Terpenuhi
2.	GTV	11.51 %	2.063.050	Terpenuhi
3.	Indosiar	9.90 %	1.252.145	Belum Terpenuhi
4.	iNews	9.78 %	2.319.990	Belum Terpenuhi
5.	Kompas TV	13.52 %	2.208.547	Terpenuhi
6.	Metro TV	10.96 %	2.021.670	Terpenuhi
7.	MNC TV	10.38 %	1.750.740	Terpenuhi
8.	NET.	9.14 %	1.390.200	Belum Terpenuhi
9..	RCTI	10.94 %	1.902.450	Terpenuhi
10.	RTV	9.12 %	1.729.975	Belum Terpenuhi
11.	SCTV	10.08 %	1.487.015	Terpenuhi
12.	Trans 7	13.98 %	2.283.885	Terpenuhi

13.	Trans TV	12.22 %	2.125.470	Terpenuhi
14.	TV One	7.91 %	1.292.521	Belum Terpenuhi

**TABEL SSJ 2021 (JANUARI – DESEMBER)**

No.	Lembaga Penyiaran	Jumlah Siaran Lokal (%)	Durasi (Menit)	Keterangan
1.	ANTV	14.29 %	2.627.921	Terpenuhi
2.	GTV	12.76 %	2.279.590	Terpenuhi
3.	Indosiar	9.90 %	1.248.529	Belum Terpenuhi
4.	iNews	10.45 %	2.470.985	Terpenuhi
5.	Kompas TV	12.23 %	1.993.286	Terpenuhi
6.	Metro TV	11.30 %	2.019.522	Terpenuhi
7.	MNC TV	12.14 %	2.042.377	Terpenuhi
8.	NET.	10.11 %	1.461.630	Terpenuhi
9.	RCTI	10.00 %	1.735.326	Terpenuhi
10.	RTV	9.84 %	1.913.131	Belum Terpenuhi
11.	SCTV	9.97 %	1.467.882	Belum Terpenuhi
12.	Trans 7	15.01 %	2.445.636	Terpenuhi
13.	Trans TV	10.79 %	1.871.220	Terpenuhi
14.	TV One	23.15 %	3.892.837	Terpenuhi

**TABEL SSJ 2022 (JANUARI – DESEMBER)**

No.	Lembaga Penyiaran	Jumlah Siaran Lokal (%)	Durasi (Menit)	Keterangan
1.	ANTV	7.20%	1.323.631	Belum Terpenuhi

2.	GTV	12.84 %	2.294.923	Terpenuhi
3.	Indosiar	9.54 %	1.203.260	Belum Terpenuhi
4.	iNews	11.49 %	2.777.770	Terpenuhi
5.	Kompas TV	11.70 %	1.906.152	Terpenuhi
6.	Metro TV	12.25 %	2.188.665	Terpenuhi
7.	MNC TV	10.41 %	1.751.580	Terpenuhi
8.	NET.	10.60 %	1.532.044	Terpenuhi
9..	RCTI	10.42 %	1.806.590	Terpenuhi
10.	RTV	10.41	2.024.160	Terpenuhi
11.	SCTV	10.41 %	1.531.817	Terpenuhi
12.	Trans 7	11.80 %	1.921.942	Terpenuhi
13.	Trans TV	9.48 %	1.643.610	Belum Terpenuhi
14.	TV One	10.78 %	1.812.793	Terpenuhi

Ada beberapa kendala yang dihadapi selama aplikasi SSJ ini berjalan. Pertama dari penghimpunan data SSJ, masih ada lembaga penyiaran yang tidak tepat waktu dalam melaporkan konten lokalnya sehingga saat membuat laporan SSJ data belum masuk, hal ini menghambat dalam merekap data maka yang KPI lakukan adalah menyampaikan kepada lembaga penyiaran melalui surat resmi agar lembaga penyiaran melaporkan siaran konten lokalnya tepat waktu setiap bulannya. Kedua, aplikasi ini juga sangat terbatas diketahui oleh KPI Daerah seluruh Indonesia serta minimnya mereka menggunakan aplikasi SSJ. Terbatasnya pengetahuan mereka terhadap aplikasi SSJ adalah kurangnya atau minimnya sosialisasi dari KPI Pusat, ditambah lagi dengan diskontinuitas antara kepengurusan tentang aplikasi.

Ketiga, kendala berikutnya adalah, mesin aplikasi ini masih tidak efisien dan membutuhkan perbaikan, salah satunya adalah perubahan otomatis salah satu program siaran apabila terdapat revisi. Aplikasi ini juga tidak secara otomatis bisa

didownload data atas hasil pertahun sebagaimana yang sudah ada diaplikasi, sehingga pengguna harus lebih mendetailkan kembali.

Dari penghimpunan data SSJ per bulan tentu ada yang sudah dan belum memenuhi konten lokal 10%, maka tindak lanjut dari KPI adalah meminta kepada lembaga penyiaran induk berjangkaran untuk memproduksi konten lokal 10% sesuai aturan yang sudah ditetapkan oleh P3SPS. Dan penyampaian tersebut disampaikan saat pelaksanaan Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran yang dilakukan setiap tahun.

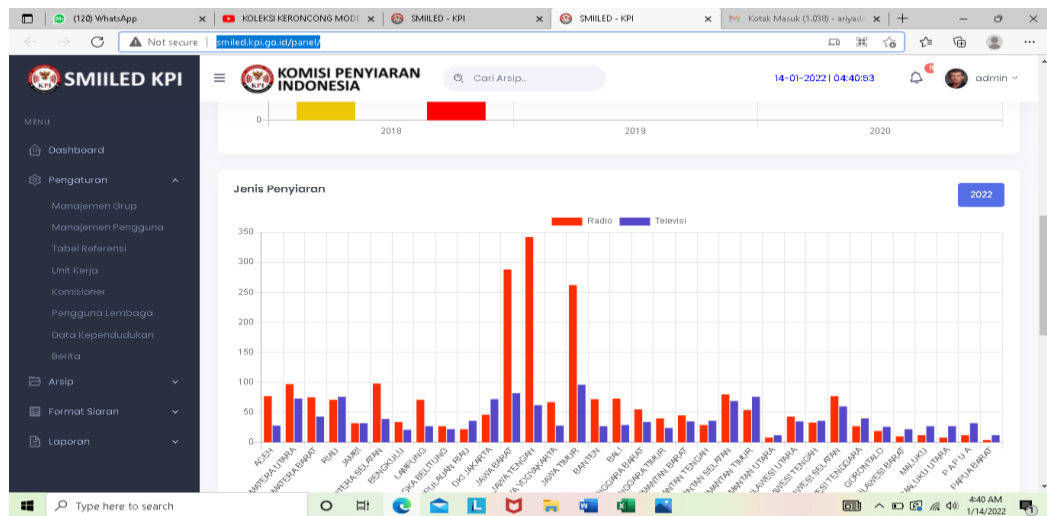
### **3.2. Aplikasi Sistem Manajemen Informasi, Izin Lembaga dan Direktori KPI (SMILED)**

Smiiled merupakan direktori KPI berbasis digital (SMILED-KPI). Aplikasi ini dibentuk untuk melakukan pendokumentasian data yang terdiri dari Kelembagaan KPI, Lembaga Penyiaran, dan Cakupan Wilayah Layanan Siaran. Tiga unsur data ini merupakan data besar yang tersedia di dalam Smiled dengan beragam turunannya. Data ini menghimpun dan mengintegrasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik dan KPI Daerah.

Pada tahun 2019, KPI menjajaki kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Palembang, Sumatera Selatan. Kerja sama ini kemudian dioperasionalkan dengan pertemuan-pertemuan rutin termasuk juga dalam Perjanjian Kerja Sama antara KPI Pusat dan BPS. Dalam PKS tersebut, KPI bisa memperoleh data atau bertukar data dengan BPS sesuai dengan kesepakatan masing-masing.

Profil kependudukan menjadi salah satu data yang dibutuhkan KPI Pusat. Pada awalnya data ini diharapkan bisa terintegrasi langsung melalui sistem, akan tetapi pada prakteknya data yang diberikan masih berbentuk manual. Kendati demikian, data ini sudah menjadi hal penting untuk memberikan informasi kepada publik tentang basis cakupan profil kependudukan untuk mengetahui tingkat pendidikan usia dan seterusnya. Sehingga, terutama bagi LP dan Pengiklan, bisa memetakan kebutuhan masyarakat akan program siaran, serta layanan niaga apa yang layak diinformasikan.

Smiiled ditujukan untuk pendokumentasian data dengan memperhatikan asas kemanfaatan bagi publik. Publik dapat mengetahui data Lembaga penyiaran serta data kelembagaan KPI Daerah.



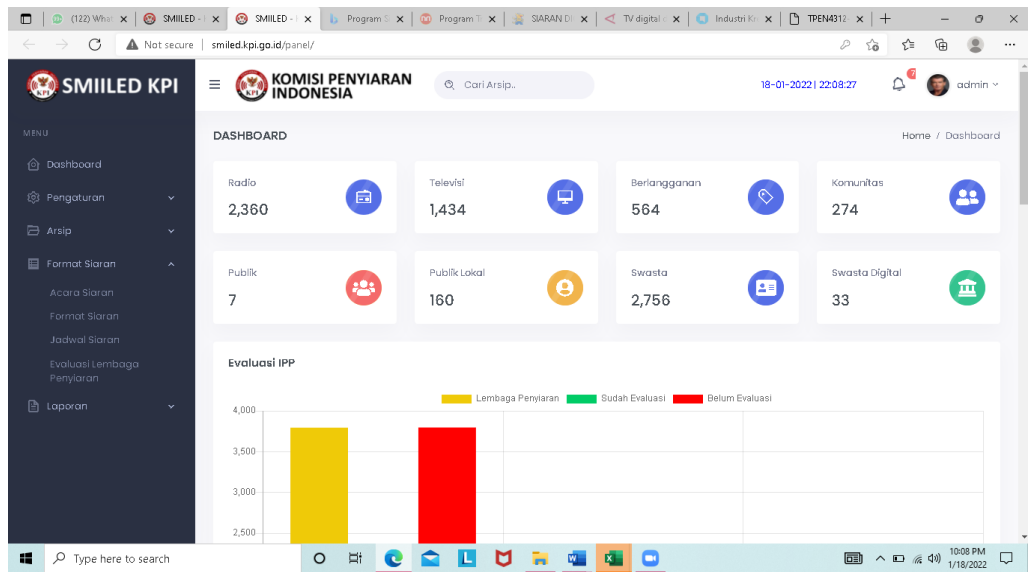
Jumlah Jenis Radio dan Televisi di Indonesia

Selain data tampilan di atas yang memperlihatkan data Lembaga Penyiaran di daerah seluruh Indonesia. Dalam aplikasi ini juga menyediakan data Lembaga KPI Daerah seluruh Indonesia.

No	Nama
1	KPI Daerah Aceh
2	KPI Daerah Sumatera Utara
3	KPI Daerah Sumatera Barat
4	KPI Daerah Riau
5	KPI Daerah Jambi
6	KPI Daerah Sumatera Selatan
7	KPI Daerah Bengkulu

Data KPID Se-Indonesia

Di halaman setelah Log in, terdapat beragam fitur di antaranya arsip berisi tentang proposal sampai dengan monitoring IPP.



Fiture SMILED KPI

Selain fitur Arsip juga tersedia fitur Format Siaran yang berisi tentang acara siaran, format siaran, jadwal siaran dan evaluasi Lembaga Penyiaran.

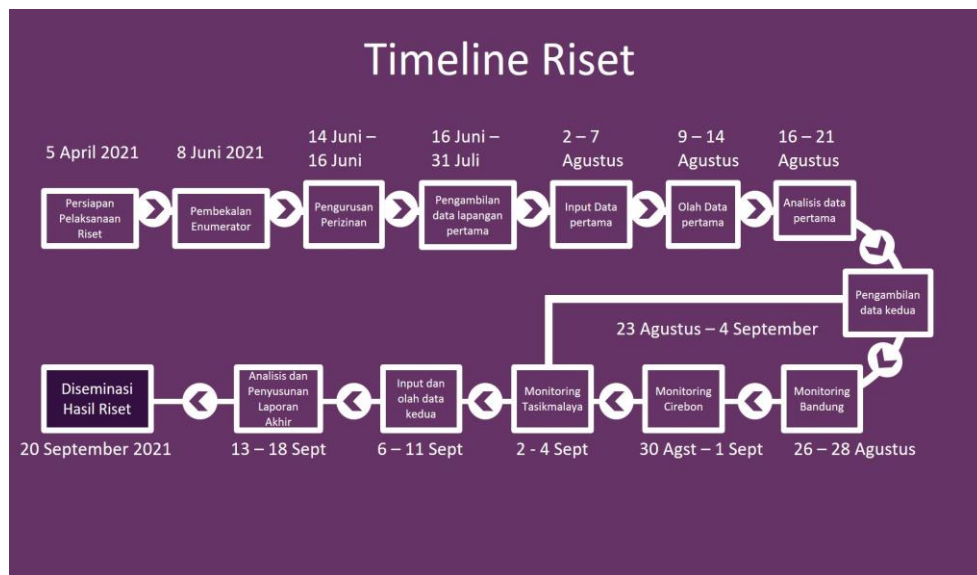
#### 4. Riset Kebutuhan Program Siaran LP Nasional/ Riset Minat Kepentingan dan Kenyamanan Publik

Riset kebutuhan program siaran lembaga penyiaran nasional yang sering disebut MKK (Publik) merupakan aspek yang menjadi element penting dalam penyelenggaraan penyiaran. Dalam proses perizinan sebelumnya, MKK (Publik) merupakan instrumen penting yang digunakan oleh KPI untuk dilakukan proses-proses selanjutnya seperti Evaluasi Dengar Pendapat (EDP). Akan tetapi pada proses selanjutnya, perizinan menjadi bagian dari OSS yang secara otomatis mengurangi peran KPI di dalamnya. Penggunaan MKK (Publik) ini dilakukan untuk memotret wajah kebutuhan penyiaran masyarakat, sehingga Lembaga Penyiaran dalam menetapkan program siaran menjadi tepat sasaran.

Pada periode ini, MKK (Publik) diselenggarakan KPI bekerja sama dengan Universitas yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dilaksanakan bersama dengan Universitas Padjajaran pada tahun 2021, dan pada tahun 2022 dilakukan bersama dengan Universitas Negeri Gorontalo, yang pada tahun ini dalam proses pelaksanaan kegiatan.

#### 4.1. Tahun 2021 – Wilayah Jawa Barat

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memetakan minat, kepentingan dan kenyamanan publik pada wilayah penelitian dalam upaya melahirkan lembaga penyiaran di setiap wilayah yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun rekomendasi hasil kajian berdasarkan peta minat, kepentingan dan kenyamanan publik dalam merumuskan dan menyusun keragaman isi siaran (*diversity in content*) lembaga penyiaran dan menggali nilai manfaat akademik dan praktik dari hasil kajian pemetaan minat, kepentingan dan kenyamanan publik untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar lembaga penyiaran di setiap wilayah.



Timeline Riset Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan Publik terhadap Program Siaran Televisi Wilayah Jawa Barat 2021

Kegiatan ini diserahkan dan dilaksanakan langsung oleh pihak FIKOM Universitas Padjadjaran dengan Ketua Tim Peneliti Riset Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si. Dengan memberikan hasil laporan kepada KPI Pusat. Pelaksanaan pertama kali dilaksanakan di Daerah Jawa Barat dengan memilih 3 (tiga) kota sebagai daerah riset Kota Tasikmalaya, Kota Bandung dan Kota Cirebon.

Kegiatan ini berbentuk kajian akademis mengenai minat, kepentingan dan kenyamanan (MKK) publik dengan melihat kondisi terkini adalah dalam rangka menjamin *diversity of content* dan *diversity of ownership* lembaga penyiaran di Indonesia. Selain itu, untuk memberikan gambaran yang lebih holistik, peneliti juga akan mengungkap mengenai kebiasaan bermedia/ *media habit* agar dapat

menjadi pembanding dari data yang diperoleh mengenai variabel minat, kepentingan, dan kenyamanan publik terhadap program siaran televisi.

Dapat diketahui bersama, bahwa minat, kepentingan, dan kenyamanan merupakan faktor internal yang ada di dalam diri individu yang tentu saja akan mempengaruhi sikap individu tersebut untuk bertindak, dalam hal ini memilih program siaran televisi. Sedangkan *media habit* merupakan perilaku yang memang tampak dan sudah dilakukan sehingga dapat teramati dengan kasat mata. Dengan adanya kedua data tersebut, hasil dari riset ini akan mampu memetakan jenis program siaran yang memang sesuai dengan minat, kepentingan, dan kenyamanan publik dengan program siaran yang memang secara nyata dipilih dan ditonton oleh pemirsa televisi.

Dasar pemilihan lokasi riset minat, kepentingan, dan kenyamanan publik ini didasarkan pada wilayah layanan di Jawa Barat yang memiliki jumlah lembaga siaran terbanyak. Berdasarkan data tersebut, maka tim riset memilih tiga lokasi pelaksanaan riset yaitu: Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, dan Kota Cirebon.

Hasil dari riset minat kepentingan dan kenyamanan publik pada program siaran televisi yang dilakukan di Jawa Barat ini menunjukkan bahwa indeks minat, kepentingan, dan kenyamanan publik di Jawa Barat berada pada posisi menengah tinggi. Indeks ini diperoleh dari mayoritas responden yang berada pada rentang usia 41 – 60 tahun, perempuan, beragama Islam, berpendidikan tinggi, tingkat pengeluaran rata-rata yang tinggi, dan dari kelompok PNS / TNI / POLRI. Kategori minat publik pada program siaran televisi memiliki nilai indeks yang tertinggi sedangkan indeks kenyamanan mendapatkan nilai terendah. Jika dilihat berdasarkan sebaran kota tempat dilaksanakannya riset ini, indeks tertinggi dari minat, kepentingan, dan kenyamanan publik diperoleh di Kota Tasikmalaya, sedangkan Kota Bandung mendapatkan nilai indeks terendah.

Apabila dilihat secara lebih rinci berdasarkan jenis program siarannya, maka diperoleh kesimpulan bahwa program siaran agama mendapatkan nilai indeks minat kepentingan dan kenyamanan (MKK) yang tertinggi dan program siaran hiburan mendapatkan indeks yang paling rendah. Hasil analisis dari setiap variabel menunjukkan bahwa minat dan kepentingan publik yang tertinggi adalah pada program siaran agama sedangkan yang terendah adalah minat pada program siaran olahraga. Sedangkan untuk variabel kenyamanan, indeks tertinggi masih

diperoleh program siaran agaman sedangkan indeks yang terendah adalah kenyamanan pada program siaran hiburan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan tim peneliti memberikan beberapa rekomendasi, baik untuk riset lanjutan atau pun untuk berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan penyiaran di Indonesia. Untuk memperoleh keragaman isi siaran (*diversity of content*) perlu adanya elaborasi lebih tajam mengenai kajian minat kepentingan dan kenyamanan public ini sehingga industri media dapat mengaplikasikan hasil yang diperoleh dengan mudah. Sebagai lembaga pengawas penyiaran, KPI dapat mensosialisasikan hasil riset ini kepada lembaga penyiaran agar dapat menayangkan program siaran yang sesuai dengan minat, kepentingan, dan kenyamanan publik.



Indeks MKK Pada Program Siaran Berdasarkan Wilayah

Diperlukan kajian lanjutan berkaitan dengan penggalian lebih dalam mengenai aspek-aspek minat, kepentingan, dan kenyamanan publik pada program siaran televisi sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih holistik dari setiap data yang sudah diperoleh dari riset kuantitatif ini. Diperlukan gambaran yang lebih luas tentang minat, kepentingan, dan kenyamanan publik di Indonesia sehingga perlu dilakukan kajian minat kepentingan dan kenyamanan publik pada program siaran televisi dengan populasi yang lebih besar.



Responden

### **Diseminasi Kegiatan Riset MKK (Publik)**

Kegiatan ini merupakan sebagai salah satu sarana evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kepada publik, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran akan menyelenggarakan kegiatan diseminasi merupakan hasil dari riset yang dilakukan Minat, Kepentingan dan Kenyamanan Publik tahun 2021.

Hasil dari riset MKK (Publik) adalah melaksanakan desiminasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2021 berlokasi di Hotel Mison Pine Bandung, yang merupakan hasil akhir dan pelaporan dari pelaksanaan kegiatan Riset Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan Publik terhadap Program Siaran Televisi 2021 di Provinsi Jawa Barat menghasilkan rekomendasi berdasarkan hasil riset yang dilakukan tim peneliti memberikan beberapa rekomendasi, baik untuk riset lanjutan atau pun untuk berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan penyiaran di Indonesia.



Foto Bersama Narasumber, KPI Pusat dan Tim Riset UNPAD

Kegiatan diseminasi hasil riset Minat, Kepentingan dan Kenyamanan Publik tahun 2021, untuk pemaparan Hasil riset Minat, Kepentingan dan Kenyamanan Publik dilakukan oleh Ibu Efi Fadilah dengan mengundang Komisi I DPR RI Bapak Junico BP Siahaan dan sambutan disampaikan oleh Ketua KPI Pusat Bapak Agung Suprio, dan Wakil Rektor UNPAD sekaligus membuka acara Prof. Drs. Yanyan Mochmad Yani, MAIR., PhD.

Untuk narasumber kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari Kominfo, Renny Silfianingrum dari ATVNI, Bapak Dedi Risnanto, pengantar riset MKK (Publik) dilakukan oleh Bapak Mohamad Reza, dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Dr.Ir. Slamet Soedarsono, MPP,QIA,CRMP,CGAP. Presentasi pemaparan hasil disampaikan oleh Ketua Tim Pelaksanaan Riset MKK Prof. Dr. Atwar Bajari, M.Si. Dengan peserta yang hadir dari Intansi Pemerintah, KPID, perwakilan Lembaga Penyiaran, tokoh masyarakat dan akademisi.

### **Rekomendasi:**

- Untuk memperoleh keragaman isi siaran (*diversity of content*) perlu adanya elaborasi lebih tajam mengenai kajian minat kepentingan dan kenyamanan publicini sehingga industri media dapat mengaplikasikan hasil yang diperoleh dengan mudah.
- Sebagai lembaga pengawas penyiaran, KPI dapat mensosialisasikan hasil riset ini kepada lembaga penyiaran agar dapat menayangkan program siaran yang sesuai dengan minat, kepentingan, dan kenyamanan publik.

- Diperlukan kajian lanjutan berkaitan dengan penggalian lebih dalam mengenai aspek-aspek minat, kepentingan, dan kenyamanan publik pada program siaran televisi sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih holistik dari setiap data yang sudah diperoleh dari riset kuantitatif ini.
- Diperlukan gambaran yang lebih luas tentang minat, kepentingan, dan kenyamanan publik di Indonesia sehingga perlu dilakukan kajian minat kepentingan dan kenyamanan publik pada program siaran televisi dengan populasi yang lebih besar.

#### 4.2. Tahun 2022 – Wilayah Gorontalo

Kegiatan MKK (Publik) di wilayah Gorontalo dilaksanakan dengan diawali melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bersama dengan Universitas Negeri Gorontalo tentang Peningkatan Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Penyiaran dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo tentang Survei Kebutuhan Program Siaran untuk Penyelenggaraan Siaran Digital melalui Minat, Kepentingan dan Kenyamaan Publik.



Penandatanganan Nota Kesepahaman

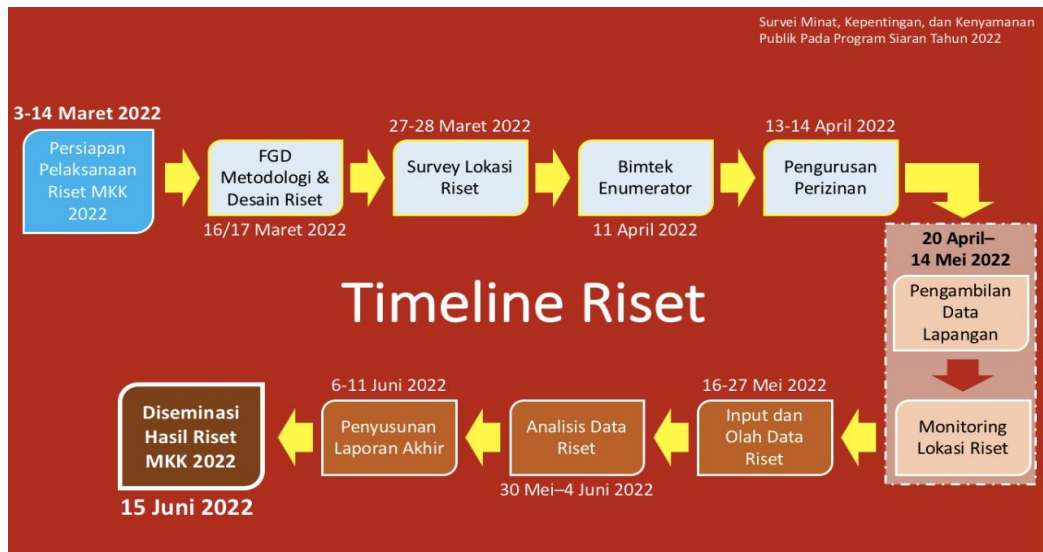


Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor KPI Pusat. Dihadiri dan ditandatangani langsung oleh Ketua KPI Pusat Bapak Agung Suprio dan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Dr. Ir. Eduart Wolok., ST., MT., IPM bersama Plt Wakil Rektor IV (Prof. Karmila Machmud, S.Pd., MA., Ph.D.), Direktur Pusat Inovasi (Funco Tanipu, ST., MA), Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FIS Universitas Negeri Gorontalo (Dr. Noval Sufriyanto Talani, S.Sn, M.Ds, M.Si) dan Direktur Utama Badan Pengelola Usaha UNG (Arbyn ME. Dunga., ST., M.Si). Sedangkan perwakilan dari KPI Pusat adalah Komisioner Bidang Kelembagaan (Irsal Ambia), Komisioner Bidang PS2P (Mohamad Reza) dan Sekretaris KPI Pusat (Umri).

Dari hasil Perjanjian Kerja Sama ini menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan Riset Minat Kepentingan dan Kenyamanan Publik (MKK Publik) di wilayah Gorontalo, yang memiliki tujuan agar dapat memetakan minat, kepentingan dan kenyamanan publik pada wilayah penelitian dalam upaya melahirkan lembaga penyiaran di setiap wilayah yang sesuai dengan kebutuhan, menyusun rekomendasi hasil kajian berdasarkan peta minat, kepentingan dan kenyamanan publik dalam merumuskan dan menyusun keragaman isi siaran (lembaga penyiaran dan menggali nilai manfaat akademik dan praktik dari hasil kajian pemetaan minat, kepentingan dan kenyamanan publik untuk mencegah

terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat antar lembaga penyiaran di setiap wilayah khususnya wilayah Gorontalo.



Timeline Riset Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan Publik terhadap Program Siaran Televisi Wilayah Gorontalo 2022

Wilayah riset difokuskan pada tiga lokasi yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan data terkait indeks minat, kepentingan, dan kenyamanan publik terhadap program siaran televisi. Peneliti tidak melakukan analisis secara rinci pada semua item data yang dipaparkan dalam laporan riset ini. Tujuan utama riset hanya berfokus pada analisis data dan menjadikan data lainnya (media habit) sebagai pembanding guna mempertajam analisis data yang berkaitan dengan tujuan utama riset terlihat bahwa seluruh responden di Gorontalo memilih program siaran informasi untuk mereka saksikan di layar televisinya.

Teknik sampling yang digunakan adalah *multistage cluster sampling*. Berikut gambaran dari tahapan yang dilakukan dalam *multistage cluster sampling*.



Responden sejumlah 300 orang (Penduduk Wajib KTP)  
diambil masing-masing Kelurahan/desa 100 orang

Penentuan Lokasi Riset(Sumber: Data BPS Diolah, 2022)

Selanjutnya, peneliti akan menyajikan data tambahan yang dapat digunakan untuk memperkuat analisis dari data utama riset minat kepentingan dan kenyamanan publik pada program siaran televisi. Peneliti akan menyajikan data mengenai tren pemilihan program televisi berdasarkan karakteristik demografis yang terdiri dari:

1. Tren pemilihan program siaran televisi berdasarkan usia responden.
2. Tren pemilihan program siaran televisi berdasarkan jenis kelamin responden.
3. Tren pemilihan program siaran televisi berdasarkan etnis responden.
4. Tren pemilihan program siaran televisi berdasarkan agama responden.
5. Tren pemilihan program siaran televisi berdasarkan pengeluaran rata-rata responden.
6. Tren pemilihan program siaran televisi berdasarkan tingkat Pendidikan responden

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, tim peneliti memberikan beberapa rekomendasi, baik untuk riset lanjutan atau pun untuk berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan penyiaran di Indonesia.

1. Untuk meningkatkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik, KPI dapat melakukan intervensi pada pihak industri selaku penyedia layanan siaran untuk bisa merancang strategi peningkatan kualitas program mulai dari perencanaan hingga evaluasi program, juga melakukan promosi program melalui survey konsumen untuk mengidentifikasi apa saja

kebutuhan publik terlebih para generasi milenial.

2. Diperlukan kajian berkelanjutan dan secara mendalam menggunakan teknis analisis korelasi dalam mengidentifikasi aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi indeks minat, kepentingan dan kenyamanan publik. Ini diperlukan guna memperoleh gambaran secara holistik mengenai faktor-faktor penyebab naik-turunnya minat kepentingan dan kenyamanan publik. Melalui hasil analisis yang mendalam, proses penyusunan strategi peningkatan kualitas program dapat lebih terarah dan tepat sasaran.
3. Riset dan kajian minat kepentingan dan kenyamanan publik dapat dilakukan dengan melibatkan *scope* wilayah yang lebih luas dengan jumlah sampel yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang signifikan dengan jangkauan generalisir yang lebih tinggi.

### **Diseminasi Kegiatan Riset MKK (Publik)**

Diseminasi hasil MKK Gorontalo dilaksanakan di Bali pada Rabu, 7 Desember 2022, kegiatan Diseminasi sudah diselenggarakan. Kegiatan ini dimulai dari registrasi peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari KPI Pusat, KPI Daerah, Civitas Akademika Universitas Udayana dan media. Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Anggota Komisi I DPR RI Dave Akhbarsah Fikarno secara Daring, Rektor Universitas Gorontalo Dr. Ir. Eduart Wolok, Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo, Anggota KPI Pusat Moh. Reza dan Aswar Hasan, Sekretaris KPI Pusat Umri, Anggota KPI Daerah Bali Nyoman Adi Sukerno, Dekan FISIP Udayana Dr. I Nengah Punia, Para Narasumber Dr. Noval Sufriyanto Talani, Prof. Dr. Atwar Bajari secara online, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Renny Sifianingrum, dan moderator Ni Nyoman Dewi Pascarani.

Dalam FMPP tersebut dijelaskan bahwa Di Gorontalo untuk televisi ada 17 televisi (14 LPS dan 3 TV Kabel) di 3 kab.kota. Untuk radio di Gorontalo hanya ada 11 radio (8 radio swasta, 2 radio komunitas dan 1 radio pemerintah daerah). Artinya dengan 11 radio di 6 kab/kota dengan penduduknya 1 juta lebih. Di Gorontalo untuk radio, 3 tahun belakangan 8 radio kembang kempis ketika masa pandemic. Di Gorontalo itu unik dan disebut sebagai ‘serambi Madinah’ kemudian penduduknya kebanyakan berprofesi pertanian dan nelayan tetapi informasi yang ditampilkan di televisi mungkin “agak Jakarta centris”. Lalu yang menjadi pertanyaan kenapa siaran Agama tidak menjadi nomer 1 di Gorontalo? Di Gorontalo siaran agama yang lebih

sering di tonton adalah Trans TV dimana dsitu ada Ustadz Maulana dan masyarakat disana lebih nyaman dan ketika melihat Ustadz Maulana dan masyarakat disana lebih senang kearifan lokal karena Ustadz Maulana berasal etnis yang sama, padahal siaran agama banyak contoh Mama Dedeh, tetapi mungkin karena candaan Mama Dedeh lebih ke Betawi jadi secara langsung tidak nyamana karena dianggap “keras”. Hal itulah kenapa siaran agama di Gorontalo cenderung rendah.



Foto: para Narasumber Diseminasi MKK Gorontalo di Bali



Foto: Kegiatan Diseminasi MKK di Bali

Dapat disampaikan dari kegiatan tersebut kesimpulan sebagai berikut:

- *Pertama*, MKK menjadi satu bagian dalam menciptakan diversity of content dan ownership.
- *Kedua*, MKK memotret kebutuhan masyarakat terhadap layanan program siaran berbasis wilayah.
- *Ketiga*, MKK dapat menjadi data pijakan dalam pengambilan kebijakan

## 5. FGD Peran Sistem dan Struktur Penyiaran

### 5.1. Tahun 2020

#### 5.1.1. FGD Media Baru dan Digitalisasi Penyiaran

FGD ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Februari 2020 yang bertempat di Ruang Rapat Kecil, Lt.2 Komisi Penyiaran Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 1012.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan terbangunnya pemahaman secara komprehensif tentang urgensi digitalisasi penyiaran, serta pemahaman secara komprehensif tentang urgensi regulasi bagi media baru dan pola pengawasan terhadap media baru beserta dampaknya secara ekonomi juga terbangunnya kesamaan perspektif tentang pentingnya Revisi Undang-undang Penyiaran.



Peserta FGD

Adapun hasil dari kegiatan ini adalah terbukanya pemahaman bersama tentang entitas penyiaran “baru” yang mempunyai fungsi dan nilai seperti lembaga penyiaran. Atas dasar itulah, maka penting entitas baru

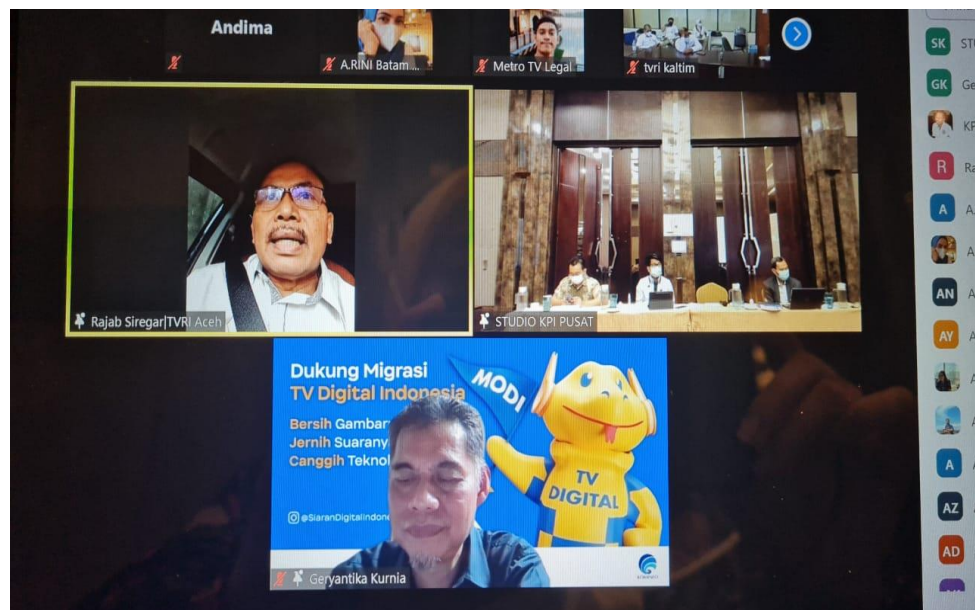
tersebut yang kemudian dikenal dengan sebutan media baru dijadikan usulan sebagai bagian besar payung jenis atas jasa penyiaran dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran.

## 5.2. Tahun 2021

### 5.2.1. FGD Penyiaran Digitalisasi Menyambut ASO Tahap I

Kegiatan FGD dilaksanakan di Hotel Aston - Bekasi, pada hari Rabu pada tanggal 16 Juni 2021. Penyelenggaraan televisi digital di wilayah Indonesia terutama wilayah tahap I dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan oleh Pemerintah.

Tujuan kegiatan ini agar kualitas siaran (Lembaga Penyiaran) dalam negeri akan berkembang dengan pesat di berbagai sektor, dengan beralihnya televisi analog menjadi digital. Sehingga, banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.



Peserta Online FGD

Hasil Kegiatan dalam bentuk rekomendasi KPI terkait penyelenggaraan Mux untuk Analog Switch Off pada tahap I untuk Kementerian Informasi dan Informatika serta Lembaga Penyiaran:

- Memberikan Pemahaman secara umum tentang Migrasi Penyiaran Televisi dari Analog ke Digital.
- Mensosialisasikan tahapan-tahapan ASO.

- Menyiapkan Masyarakat dan Penyelenggara untuk mempersiapkan migras dari analog ke digital.

### 5.2.2. FGD Prakasa PKPI Penyelenggaraan Penyiaran Terkait Isi Siaran

FGD dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 November 2021 di Sahira Butik Hotel Bogor secara offline dan Virtual. Kegiatan ini dilaksanakan merupakan hasil tindak lanjut dari hasil Rakornas Bidang PS2P, dan melakukan pembahasan tim pelaksana penyusunan rancangan PKPI tentang penyelenggaraan penyiaran yang diwakilkan dengan 6 (enam) KPID yang merupakan perwakilan dari 33 KPID se-Indonesia.



Peserta FGD

Hasil dari kegiatan ini adalah:

- Rancangan tugas Tim Pelaksana Penyusunan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) tentang Penyelenggaraan Penyiaran Terkait Isi Siaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI).
- Rencana tindak lanjut hak akses Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di *Online Single Submission (OSS)*.

### 5.3. Tahun 2022

#### 5.3.1.FGD Penyusunan Masukan Pelaksanaan ASO pada Lembaga Penyiaran Televisi

Kegiatan dilaksanakan hari Sabtu, 21 Mei 2022 bertempat di Interactive Center Fishum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DI. Yogyakarta. Kegiatan juga dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan peserta terbatas dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga dilaksanakan secara online untuk beberapa peserta.

Acara ini menghadirkan narasumber yaitu Komisioner KPI Pusat (Mohamad Reza), Direktur Penyiaran Kemkominfo (Ir. *Geryantika Kurnia*, M.Eng, MA), Dekan Fikom Universitas Padjadjaran Bandung (Dr. *Dadang Rahmat Hidayat*, S.Sos., SH., M.Si.), Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UNI Sunan Kalijaga Yogyakarta (Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.) dan peserta yang hadir KPI Daerah Se-Indonesia, Penyelenggara Mux di Daerah DI Yogyakarta, Lembaga Penyiaran Lokal DI. Yogyakarta. Acara di moderatori oleh Ketua KPI Daerah Yogyakarta. Dengan jumlah peserta yang hadir di lokasi sebanyak 50 offline dan 70 peserta secara online yang merupakan representasi dari Kominfo, KPI Pusat, Lembaga Penyiaran, pemenang Mux di Yogyakarta serta sivitas akademika.

Pembahasan mengenai *progress*-nya ASO Pertama yang telah selesai, dengan infrastruktur di daerah yang dibangun oleh TVRI kurang lebih dari 70 persen, masyarakat hampir 80 persen tertarik pindah ke siaran digital. Setelah siaran televisi analog dimatikan. Ada 6,7 juta keluarga miskin mendapatkan STB gratis dari 28 juta televisi analog dari televisi yang beredar 50 jutaan televisi di Indonesia. Jadi ada 20 juta lebih yang siap dibagikan oleh vendor. Isu pembagian STB menjadi isu utama, dengan kolaborasi di setiap Daerah dengan tidak membuat rantai distribusi di Daerah yang justru lama.



### Narasumber dan Moderator FGD

Hasil dari FGD ini mendapatkan poin penting yang harus disiapkan yaitu:

- Infrastruktur yang menjadi pertanyaan apakah sudah dibangun dengan kualitas sinyal yang merata,
- Diharapkan semua warga negara harus mendapatkan sinyal yang sama dengan kualitas yang sama dan merata di seluruh Indonesia,
- Diperlukannya evaluasi baik itu terkait pelaksanaan ASO maupun penyebaran STB.

### 5.3.2.FGD Penyusunan Laporan Evaluasi Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Swasta Berjaringan

Salah satu peran KPI adalah memastikan program siaran lokal di berbagai daerah di Indonesia. Pemenuhan program siaran lokal diatur dalam Undang-Undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi terdiri atas stasiun penyiaran jaringan dan/atau stasiun penyiaran lokal.

Peraturan lebih lanjut adalah terkait dengan alokasi pemenuhan konten siaran lokal 10%, bahasa dan produksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.2/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Untuk melaksanakan hal tersebut, maka KPI melakukan pengawasan terhadap program siaran lokal di masing-masing daerah.

Focus Group Discussion Evaluasi Laporan Tahunan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Berjaringan dimana kegiatan dilaksanakan secara tatap muka langsung pada hari pertama dan pada hari kedua selain tatap muka langsung dengan pembatasan peserta yang hadir dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, dilakukan juga dengan zoom meeting untuk peserta dari KPID se-Indonesia.



Benner

### **Sosialisasi Penginputan SSJ**

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada hari Rabu, 19 Oktober 2022 di Kantor KPI Pusat, pada kegiatan lanjutan ini mengundang Kembali Lembaga penyiaran (MyTV, JPM TV dan Moji TV), untuk tindak lanjut serta sosialisasi peng-inputan data dari setiap lembaga penyiaran tersebut pada aplikasi SISitem Stasiun Jaringan (SSJ).

Merupakan rangkaian FGD Penyusunan Evaluasi LPS Berjaringan dan hari ini ada 3 (tiga) LP baru yang akan melaksanakan input di aplikasi SSJ dimana laporan tahunan yang akan kita lakukan sesuai dengan tahun lalu adalah awal Januari. Dalam penyusunan evaluasi laporan tahunan lembaga penyiaran televisi swasta berjaringan ada tiga aspek selain dari Konten lokal yaitu ada dua aspek lagi yaitu penghargaan dan penjatuhan sanksi.

Bapak Umri selaku Sekretaris KPI Pusat, mengarahkan bahwa hasil dari penginputan nantinya akan menjadi dasar dari evaluasi televisi berjaringan. Dan untuk evaluasi LPS Berjaringan menghitung datanya adalah 1 periode Januari – Desember yang menjadi salah satu concern nya adalah Siaran konten lokal.

Tim Teknis SSJ – Penyampaian Data:

1. Secara umum ketika melihat aplikasi SSJ, 2 LP (Moji dan JPM) sudah melakukan input data.
2. Dan saya mendapat informasi bahwa JPM baru mengisi data untuk wilayah layanan Jakarta saja karena nama – nama udara di daerah berbeda, lalu untuk Moji baru 4 daerah.
3. Untuk JPM saya lihat bahwa setiap daerah berbeda nama, maka perlu dikonfirmasi karena berkenaan dengan data yang masuk di aplikasi SSJ.
4. Berkenaan LPS Berjaringan bahwa kami membutuhkan surat Keputusan Menteri yang menyatakan bahwa JPM dan Moji sudah berjaringan hal ini untuk memudahkan tim teknis memasukkan JPM dan Moji ke dalam aplikasi SSJ.
5. Jika melihat JPM konten lokalnya 100%, dalam prakteknya tidak mungkin dalam 24 jam adalah konten lokal, biasanya ada program yang diambil dari Jakarta. Sebenarnya kami senang jika JPM 100% artinya pemenuhan konten lokal sudah memenuhi tetapi perlu dijelaskan bagaimana pengklasifian / pengkategorian.
6. Ada LPS lain untuk penginputan data yang dari Jakarta mereka menganggapnya adalah siaran jaringan (Pusat).
7. Berkenaan dengan format siaran misal RTV (Tv anak) tetap harus ada siaran konten lokal 10%.



Peserta dari Lembaga Penyiaran

### **JPM TV**

1. Dari JMP TV sangat apresiasi dan setuju dengan adanya aplikasi SSJ karena ini bagian dari transparansi publik mengenai pemenuhan konten lokal 10%.
2. Sebenarnya dari daerah rutin mengirimkan data lokal, kami memiliki aplikasi JPM Stream untuk melihat tayangan-tayangan lokal.
3. Klasifikasi diaplikasi yaitu produksi pusat dan lokal, dilakukan cross program dari daerah lain. Tetapi yang belum difahami adalah tayangan dari Jakarta ini kategori produksi pusat atau seperti apa dan untuk *crossing program* kami menyebutnya produksi lokal.
4. Secara teknis JPM di Daerah untuk durasi konten lokal sangat banyak sehingga di *dashboard* aplikasi SSJ tertulis 100%.

### **Moji TV**

1. Untuk Moji dari periode November sudah memenuhi 10% dan sudah masuk ke *Primetime*.
2. Mengenai tayangan *sport*, kami ambil contoh SCTV ada siaran liga *champion* sedangkan di jam biasanya konten lokal tayang, misal pukul 4 dini hari tetapi karena ada perpanjangan waktu mereka tetap menayangkan siaran bola. Dan untuk mengklarifikasi ketika tidak memenuhi 10% pihak SCTV menyampaikan bahwa ada hari tidak terpenuhi 10% karena pada saat itu ada tayangan liga champion.
3. Untuk perubahan program contohnya terpotong karena ada siaran nasional bisa disampaikan ke kami dalam bentuk *excel*, nanti akan kami sampaikan ke KPID mengenai perubahan. Idealnya mengirim data setiap bulan.
4. Untuk tayangan bola tidak masuk ke dalam kategori konten lokal.



**Masukan:**

1. Perlu dimasukkan *feature* aplikasi SSJ yaitu terintegrasi dengan aplikasi pengaduan.
2. Untuk penyempurnaan aplikasi SSJ maka perlu ada pengujian kemanfaatan lebih lanjut jadi sementara aplikasi SSJ yang saat ini kita jalankan sambil melihat apa saja yang menjadi kekurangan dan apa saja yang dibutuhkan.
3. Mengenai penyempurnaan aplikasi SSJ perlu ada koordinasi dengan APTIKA untuk terintegrasi dengan aplikasi lainnya.

**FGD Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)**

Kegiatan Evaluasi Tahunan terkait dengan SSJ/ Konten Lokal merupakan amanah dari DPR RI dan KPI I pada tahun 2016. Pada saat itu Izin penyiaran televisi berakhir, tepat 10 tahun berakhir. Sebelum izin diberikan oleh Kominfo, DPR meminta pendapat KPI dari aspek program siaran lokal, sampai 6 kali. Dari rekomendasi kemudian muncul satu butir yang menyatakan evaluasi tahun dilakukan setiap tahun sekali, untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap lembaga penyiaran.



Peserta Offline

Pada saat itu, konten televisi berjaringan nyaris Jakarta Sentris, kontennya diproduksi di Jakarta bukan daerah. Ini menjadi salah satu point penting yang melatari evaluasi tahunan. Pada tahun 2017, KPI meminta copy tayang kepada Lembaga Penyiaran untuk dilakukan evaluasi. KPI Daerah juga dimintai untuk melakukan verifikasi, kendati dalam beberapa hal juga ada kekurangan. Dari daerah menyatakan bahwa konten lokal tampil di jam hantu, bukan primetime.

Pada tahun 2018, KPI membuat aplikasi untuk menayangkan pola siaran lokal, sehingga memudahkan kepada KPI Daerah untuk melakukan verifikasi di televisi masing-masing daerah. KPI pusat, mengharapkan dari aplikasi ini bisa memberikan evaluasi kepada lembaga penyiaran. Aplikasi ini bisa difungsikan untuk memudahkan pengawasan.



Narasumber

Setiap tahun dari periode Januari-Desember, dilakukan evaluasi terhadap lembaga Penyiaran, yang kemudian diberikan kepada LP dan DPR. Harapan besarnya adalah, format TV seperti hiburan bisa dimanifestasikan di daerah masing-masing.

Arahan dari Sekretaris KPI Pusat, Bapak Umri menyampaikan bahwa upaya KPI untuk mempunyai satu data penyiaran, dalam hal ini database penyiaran lokal. Aplikasi ini merupakan salah satu materi atau bahan evaluasi tahunan LPS TV Berjaring. Diharapkan bisa memberikan manfaat kepada Stakeholder Penyiaran.

Paparan pertama diberikan kepada Bapak Aswar Hasan, Komisioner KPI Pusat, yang menjelaskan terkait UU Penyiaran dibahas di DPR, saya terlibat di sana. Salah satu yang paling ramai dalam pembahasan tersebut adalah eksistensi konten lokal. Tadinya, mengemuka isu KPID dan konten lokal tidak menjadi isu utama dalam pembahasan UUD.



Bapak Aswar Hasan Memaparkan Materi

Konten lokal sebagai sukma demokratisasi, tidak dapat dibenarkan apabila berbicara tentang demokratisasi Indonesia tapi tidak melibatkan konten lokal dan eksistensi. Konten lokal menjadi mahkota dalam kebhinekaan. Kebhinekaan menjadi factor penting. Dalam konteks penyiaran, sangatlah penting. Daya dorong, harus diakui masih lemah dilakukan oleh KPID untuk menagih komitmen lembaga penyiaran televisi berjaringan di daerah masing-masing.

Dalam rentan setahun ke depan, penggodokan Undang-undang penyiaran akan dilakukan. Untuk itu, diharap KPI Daerah bisa menyuarakan konten lokal agar tetap eksis. Perlu juga dilakukan

identifikasi konten lokal. Ini juga kadang menjadi alasan bagi LP untuk tidak melakukan siaran di daerah, hanya sebab kepentingan ekonomi. Ini masih bisa disangsikan, sebab yang terjadi faktanya adalah adanya ketidakseriusan dari LP.

Pemaparan kedua diberikan kepada Bapak Bambang Pamungkas , Komisioner KPI DKI Jakarta yang menjelaskan bahwa sepuluh tahun yang lalu, diskusi konten lokal dilakukan dengan LPS. Waktu itu dikatakan konten Lokal itu budaya. Rumusan persoalan, masih menjadi perdebatan. Kemudian arah ke depan, itu sudah diterakpan oleh KPI DKI dalam EDP sebelum UU CIPTAKER. Konten lokal itu budaya. Juga belum memenuhi kapasitas.



Ketua KPI DKI Jakarta Memberikan Paparan

Dalam ASO, Konten lokal harus diperkuat. Pengajuan ijin yang menyampaikan konten lokal, tidak mungkin dihalangi. TV digital musti menampilkan konten lokal. Indonesia sangat kecil ketimbang negara lain. Malaysia 80 persen dan Australia 55 persen. Konten lokal bisa menjadi avant garde untuk pembangunan daerah.

KPI Daerah kesulitan akses untuk meminta evaluasi tahunan. Apakah laporan LP sesuai dengan di daerah. Mendorong secara aktif peran masyarakat dalam ekosistem penyiaran. Di satu sisi LP merasa kesulitan, tapi di sisi yang lain juga sangat kesulitas akses masyarakat dalam ekosistem penyiaran. Penggunaan talent daerah melalui industry kreatif. Akses KPI Daerah, Industri, ruang terbuka, produksi dan control pengawasan.

Pemaparan terakhir diberikan kepada Bapak Deddy Risnanto, *Corporate Secretary* Kompas TV menjelaskan terkait Laporan Tahunan Kompas TV terdapat 34 Kantor Biro, laporan Live ada di Sumut, Makassar, Surabaya. KPID bisa mengecek langsung apakah Kompas TV ada di daerah masing-masing. Di biro, terdapat kekuasaan keleluasaan untuk melakukan konten lokal.

Di Jakarta, juga ada 14 orang. Konten lokal sebagai sabuk kesatuan NKRI. Selain adalah jurnalistik, juga menghadirkan Indonesia ke layar kaca. Indonesia bukan hanya Jakarta dan Jawa. Di beberapa daerah akan terlihat, di Palembang muternya adalah Jawa Barat semisal. Mohon bantuan juga hal ini.



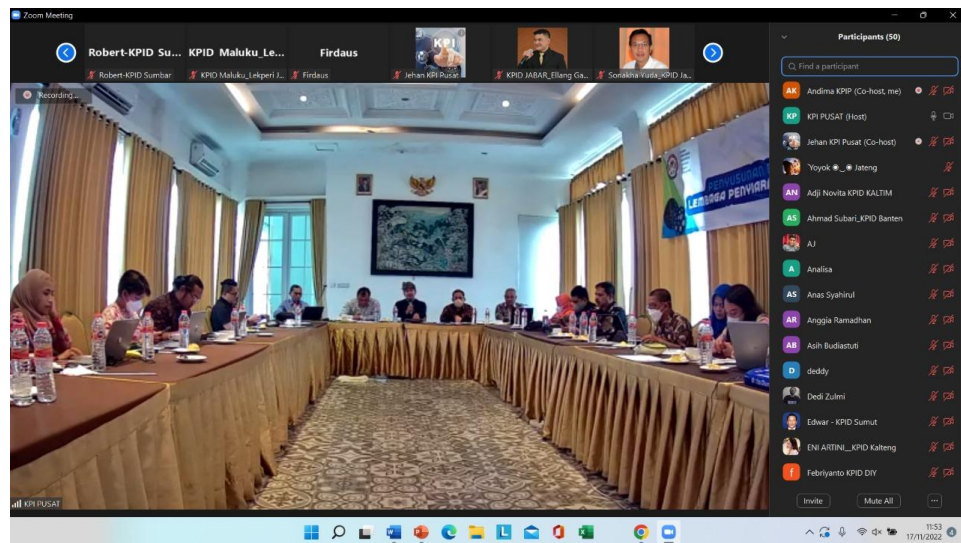
Komitmen menambah konten lokal, tapi kalau ditayangkan pada jam 7 pagi, siaran Kompas TV jam 7 berbeda-beda. Tidak akan dimakan oleh masyarakat dan Nielsen. Berita daerah ditampilkan jam 15.00 tentang Covid yang berkembang di daerah. Dimana persoalan terlambat ASO dikarenakan Nielsen, Survei Kepemirsaaan Indonesia dilakukan kolaborasi. People Meter + STB dan kementerian serata lembaga lain.

Program Lokal tidak lagi membutuhkan *cost* yang mahal dengan pemanfaatan teknologi (HP), dan perlu keseriusan apresiasi KPI terhadap konten lokal (sesuai UU) melalui Anugerah KPI. Keberpihakan kepada LPS Lokal (Regulasi, Pemasangan Iklan).

Kesimpulan:

- Seluruh Biro, siap untuk talkshow 30 menit untuk bicara tentang penyiaran. Terutama berbicara terkait ASO.

- Masukan dari KPID menjadi catatan dalam penyusunan laporan evaluasi tahunan. 10 persen bisa dimanfaatkan dengan pemerintah lokal.
- Konten lokal berdimensi budaya tentang informasi setempat. Kompas TV memenuhi syarat akan hal tersebut. Ini yang perlu diperhatikan ke depan. Sesuai dengan prinsip-prinsip konten lokal. Konten SSJ membutuhkan otonomi anggaran, tidak dari pusat. Kaitannya dengan demokratisasi dan otonomi daerah.
- *Cross Culture* bisa didiskusikan dan apakah bisa diakomodasi, *rating, currently Nielsen*. Seringkali tv yang menayangkan konten lokal tidak mendapatkan rating. Ini dianggap tidak menguntungkan secara komersial. Tidak mendapatkan lebih dari konten lokal. Kalau bisa KPI bisa membuat *Rating, people* meter bisa dipasar di *remote* dan *record* ke Nielsen. Di Era Digital menggunakan STB, STB ditaruh *chip* buat ngatur rating. Ini bisa menjadi tugas KPI.



Peserta di Link Zoom

## Peran KPI Menyukseskan Program ASO

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan digitalisasi siaran televisi paling lambat dilaksanakan 2 tahun sejak UU tersebut ditetapkan. Masa 2 tahun sejak UU itu disahkan adalah 2 November 2022. Proses pelaksanaan ASO dalam perjalanannya terjadi perubahan, semula dilaksanakan selama 5 tahap, kemudian dirampingkan menjadi 3 tahap, yaitu April, Agustus dan November.

Konsekuensi dari digitalisasi selain menghemat frekuensi, adalah hadirnya banyaknya televisi. Yang awalnya satu frekuensi hanya berlaku untuk satu saluran (televisi) melalui digital safu frekuensi digunakan menjadi 8 – 12 saluran (televisi). Sisi lain, adalah hadirnya lembaga penyiaran yang lebih banyak dengan harapan agar semakin banyak konten program yang beragam.

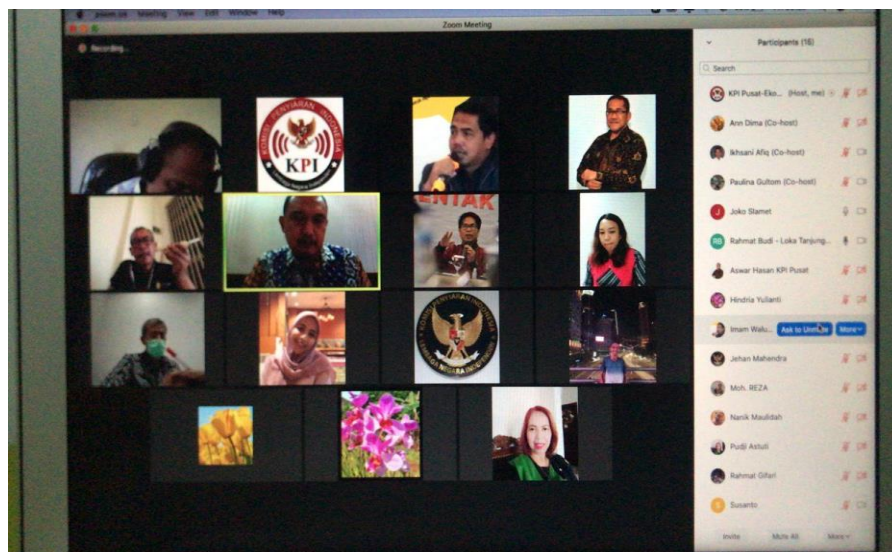
Konsekuensi ini berkelanjutan dengan tanggung jawab KPI. Dalam hal ini, KPI mempunyai peran sosialisasi sekaligus pengawasan. Sosialisasi dilakukan KPI bersama dengan stakeholder terkait, seperti Kominfo dan Lembaga Penyiaran.

KPI juga mempersiapkan pola pengawasan yang pas dan efektif. Pertama berkenaan dengan jumlah, juga dengan kapasitas perangkat pengawasan, yang kedua adalah peningkatan pengetahuan analis dengan pengetahuan yang lebih modern dan adaptif. Bentuk dari persiapan KPI dalam pelaksanaan ASO, KPI melakukan beberapa kegiatan sebagaimana tertuang di bawah ini.

## Tahun 2021

### A. Rapat Koordinasi Pembentukan Gugus Tugas ASO Tahap I

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin, 28 Juni 2021 melalui virtual (zoom meeting), dan dihadiri oleh Ketua KPI Pusat Bapak Agung Suprio, Komisioner Bidang PS2P Bapak Mohamad Reza dan Bapak Aswar Hasan, Bagian Hukum Beatrik Dwi Septiana, Sekretariat KPI Pusat Bidang PS2P yang terkait dan KPID (Aceh, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur) serta Diskominfo Kalimantan Utara.



Peserta Online

Hasilnya adalah mengenai fungsi dan tugas dari gugus tugas :

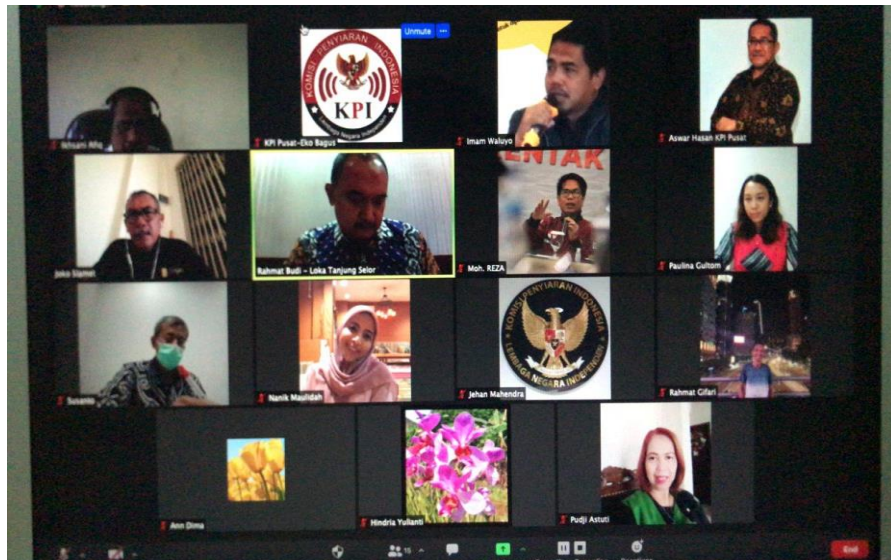
- KPI Pusat: Berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penyiaran Digital terkait informasi pelaksanaan ASO dan membuat regulasi, edaran kepada lembaga penyiaran terkait pelaksanaan ASO.
- KPI Daerah: Koordinasi dengan stakeholder terkait daerah, Balmon, Pemda dan LP. Lalu sosialisasi pelaksanaan ASO melalui LP/langsung ke masyarakat dan menerima masukan terkait ASO di daerah.
- Balmon: Sosialisasi jangkauan wilayah siaran pelaksanaan ASO dan koordinasi SDPPI dan KPID terkait pelaksanaan ASO di daerah.
- Pemerintah Daerah: Sosialisasi bersama pelaksanaan ASO dan menerima/ memberi masukan terkait pelaksanaan ASO di daerah. Dua instansi yang terlibat yaitu Diskominfo dan Dinas Sosial. Dinas Sosial berfungsi untuk melihat data masyarakat miskin karena ada distribusi STB kepada masyarakat miskin agar tepat sasaran.
- Jika diperlukan KPID dapat berkomunikasi dengan Kominfo untuk bersurat dengan Gubernur mengenai rencana ASO dalam bentuk surat edaran yang diharapkan segera ada pembentukan struktur gugus tugas di Daerah yang dilanjutkan berkomunikasi dengan Kemendagri dengan tafsir di Daerah yang berbeda untuk memperkuat rencana pembentukan gugus tugas di Daerah.
- Karena Kaltara tidak ada KPID, maka diharapkan Diskominfo segera membentuk gugus tugasnya koordinasi dengan *stakeholder* di Daerah. Mengenai distribusi STB informasi bahwa gugus tugas berfungsi untuk berkoordinasi dengan Pusat dan vendor tentang kebutuhan STB di daerah.

## **B. Rapat Koordinasi Dengan Kominfo Terkait Kewenangan Proses Perizinan di KPI**

Rapat ini dilakukan pada tanggal 6 September 2021 pada pukul 13.00 – 15.00 WIB melalui virtual (zoom meeting) yang menghadirkan Komisioner KPI Pusat dan pihak dari Kominfo yaitu Bapak Geriyantika Kurnia (Direktur Penyiaran Kominfo), Bapak Ketut Prihadi Tim legal Kominfo, Cahyarini, Charles, Husni, Titis Septizar yang merupakan Tim Legal Kominfo.

Pertemuan dilakukan untuk membahas proses perizinan yang dilakukan oleh KPI akan dicabut dan akan dimulai pada bulan Oktober. KPI perlu untuk mensosialisasikan Permen Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 serta juga terkait laporan juga tindak lanjut koordinasi mekanisme agar tidak ada tumpang tindih dalam implementasinya.

Sudah tidak ada lagi izin prinsip yang ada izin layak operasi. Prosesnya adalah sameday, untuk e-Penyiaran juga akan diproses Direktorat Pengendalian. KPI akan kolaborasi dengan Direktorat mengenai Pengendalian salah satunya konten lokal 10% dan program siaran pasca perizinan. Sanksi untuk penghentian siaran tidak berubah, isunya hanya fokus kepada prosentasi konten 10%. Perpanjangan untuk prosesnya juga sameday agar lebih memudahkan dan alur perizinan.



Peserta Online

Kewenangan KPI dalam aturannya tidak ada perubahan cukup dijelaskan tugas kewenangan. Dan perlu siapkan aturan lama (PKPI) untuk disinkronkan dengan aturan yang sekarang agar lebih mudah untuk dipahami oleh KPI Daerah.

### **C. Hak Akses KPI berkenaan dengan Persyaratan dan Kewajiban Perizinan Berusaha terkait Isi Siaran di Sistem OSS**

Persyaratan dan kewajiban perizinan di *Sistem Online Single Submisi* (OSS) tidak mengakomodir peran KPI di dalamnya. Padahal, peran KPI sangat penting dan fundamental di dalam proses perizinan mengingat pengawasan Lembaga Penyiaran dilakukan oleh KPI. Dalam proses perizinan, peran KPI di sini dimaksudkan untuk memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi atas program siaran Lembaga Penyiaran, sehingga proses perizinan menjadi lebih komprehensif.



Sub. Koordinator Produksi Program & Penyiaran LPP TVRI, Ibu Dra. Sri Widati  
Memberikan Paparan Secara Offline

Dengan peran fundamental sebagaimana digambarkan di atas, KPI melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, yakni Kementerian Investasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebanyak 4 (empat) kali, yakni KPI dengan Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha BKPM, Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha BKPM, dan Tim Perancangan Peraturan Perundang-undangan Muda BKPM, baik dalam bentuk FGD atau rapat koordinasi untuk mengutarakan dan meminta hal sebagai berikut:

- Perencanaan dan pengembangan yang terdiri dari a) teknis di sistem OSS perihal persyaratan dan kewajiban terkait isi siaran dalam subsistem perizinan berusaha penyiaran, termasuk notifikasi serta verifikasi pemenuhannya, dan b) teknis subsistem pengawasan terkait isi siaran.
- Merumuskan peran KPI dan KPI Daerah berkenaan pengelolaan struktur dan sistem penyiaran pasca disahkannya Undang-undang Cipta Kerja, PP Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, PP Postelasiar, dan Permenkominfo Penyelenggaraan Penyiaran.
- Perolehan status sebagai Pengelola Hak Akses, termasuk Hak Akses bagi KPI Pusat serta Hak Akses Turunan bagi KPI Daerah.

## Tahun 2022

### D. Rapat Koordinasi dengan KPID Terkait Set Top Box (STB)

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2022 melalui virtual (zoom meeting), peserta rapat dari seluruh KPID se-Indonesia dan pimpinan rapat dilakukan oleh Bapak Mohamad Reza (Koordinator Bidang PS2P).



Peserta Rapat Online

Hasil dari pertemuan ini menghasilkan beberapa masukan bahwa KPI Pusat maupun KPID tidak menjadi distributor STB tetapi dalam pendistribusian STB sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan KPID setempat, dan perlu ada izin dengan stakeholder daerah dalam proses distribusi STB dan lembaga penyiaran yang ingin mendistribusikan STB diharapkan berkordinasi dengan Gugus Tugas Wilayah yang telah dibentuk karena fungsinya lebih kepada alur informasi pusat ke Daerah agar sama, jadi tidak bicara terkait teknis.

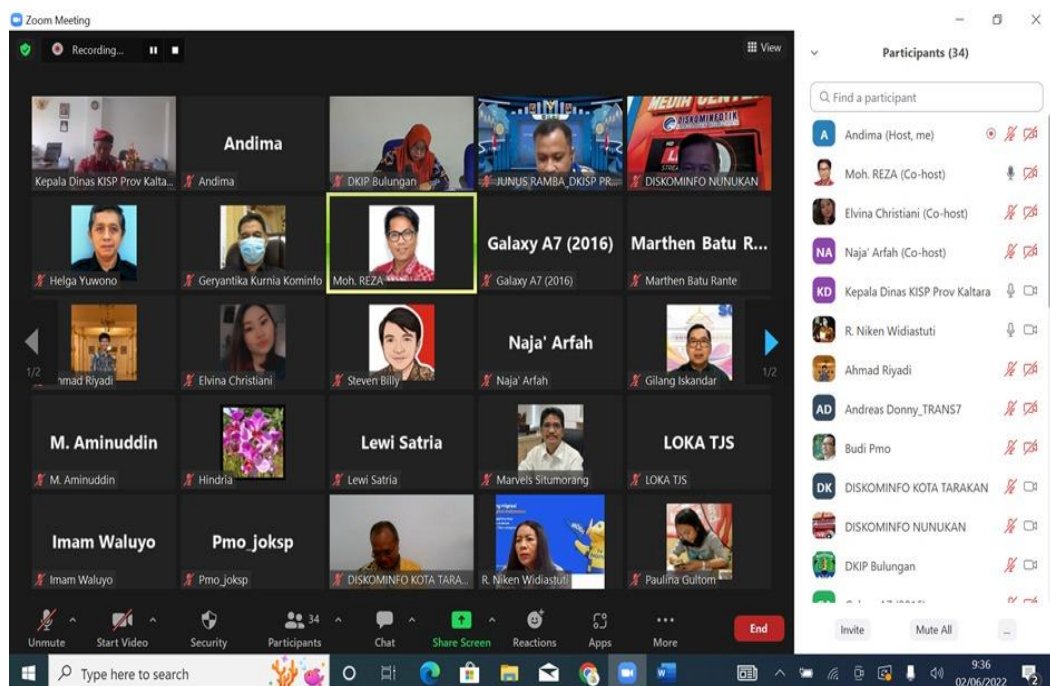
Untuk Daerah Kalimantan Utara masih dihandle oleh KPI Pusat terkait dengan ASO. Dan didapatkan informasi mengenai data hak penerimaan STB masyarakat kurang mampu belum tepat sasaran diharapkan KPID memastikan wilayah *terrestrial free to air* dan wilayah jauh yang memang terkena siaran analog yang mendapat STB.

Mengenai ASO, KPI fokus kepada sosialisasi migrasi jadi tidak kepada distribusi STB termasuk koordinasi dengan Balai Monitoring (Balmon) karena mereka yang memahami wilayah layanan siaran.

## E. Rapat Koordinasi ASO dan Penyaluran STB di Provinsi Kalimantan Utara

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 2 Juni 2022 pada pukul 09.00 s.d 12.00 dan rapat koordinasi dilakukan secara virtual. Peserta rapat koordinasi selain dari KPI Pusat mengundang Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Rosarita Niken Widiastuti), Direktur Penyiaran (Geryantika Kurnia), Direktur Pengembangan Pitalebar (Marvel P. Situmorang), Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara, Diskominfo Kota Tarakan, Diskominfo Kabupaten Nunukan, Diskominfo Kabupaten Bulungan, Balai Monitoring Provinsi Kalimantan Utara dan Lembaga Penyiaran Penanggung Jawab STB Wilayah Layanan di Provinsi Kalimantan Utara.

Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk sejauh mana kesiapan dari pelaksanaan ASO dan pembagian STB di wilayah layanan Kalimantan Utara, yang sampai saat ini belum memiliki KPID karena itu KPI Pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan dan mengetahui perkembangan pelaksanaan ASO di wilayah Kalimantan Utara.



Peserta Rapat

Dari hasil rakor ini terdapat beberapa hal yang harus diketahui dan ditindaklanjuti yaitu:

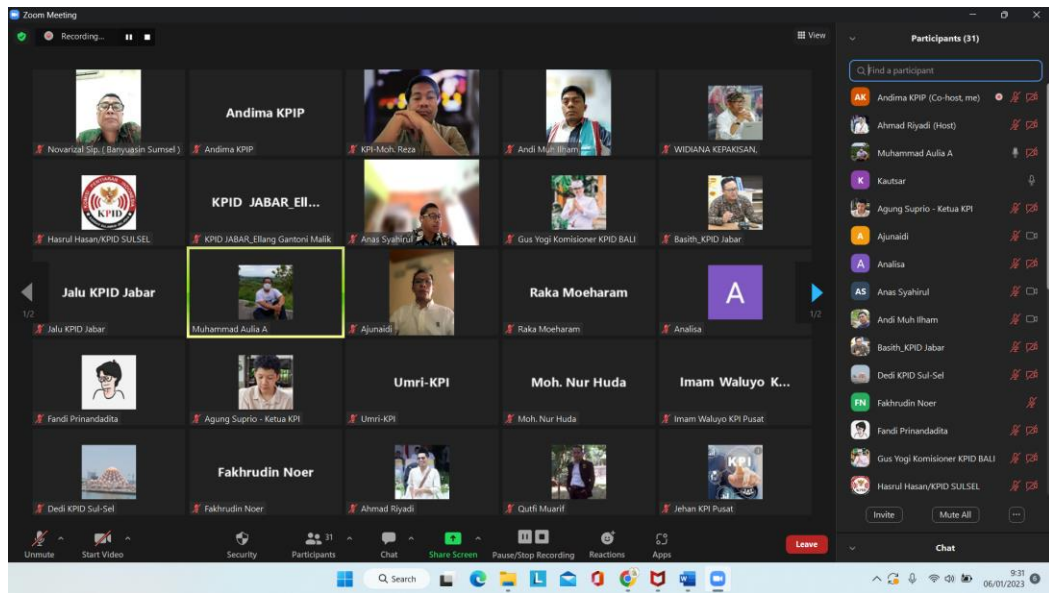
- Pembagian STB bukan tugas KPI, Kominfo dan KPID. Namun tentu kerjasama dan kordinasi dan saling membantu agar segera terlaksana dengan baik.

- Distribusi STB masih dibawah 50 persen termasuk di Kaltara karena kesulitan dan susah dijangkau. Namun di daerah lain sudah ada yang menghampiri 100 persen.
- Kaltara perlu melakukan kolaborasi antar dinas terkait, kominfo dan KPID serta dinas sosial serta stakeholder.
- Kami juga sepakat dengan swasta agar bekerjasama dengan Pemda untuk kelancaran penyaluran STB.
- Pertengahan Juni akan ada ASO di 12 Layanan salah satunya di Kaltara, di beberapa lokasi pemerintah akan membantu memfasilitasi LPS dalam penyaluran STB yang saat ini masih terus mencari cara mendistribusikan STB akan efektif sebelum pertengahan Juni.
- Untuk Kaltara ada dua kota, Bulungan dan Tarakan yang akan diambil oleh Bumper, untuk Kaltara ada 1493 unit STB, sementara untuk Tarakan ada 1823 unit STB. Saat ini masih konsolidasi, angka ini kami peroleh dari beberapa LPS.

## **Tahun 2023**

### **F. Rapat Koordinasi Sosialisasi ASO**

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, 6 Januari 2023, melalui aplikasi zoom meeting dimulai pada pukul 09.00 s.d 11.00 WIB dengan dihadiri oleh Ketua KPI Pusat Bapak Agung Suprio, Mulyo Hadi Purnomo (Wakil Ketua KPI Pusat), Mohamad Reza (Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran), Umri S.Sos., M.Si (Sekretaris KPI Pusat), Imam Waluyo (Analisis Kebijakan Madya), Peri Umar Farouk (Konsultan Pengembangan dan Kebijakan KPI Pusat) serta 8 KPID yang akan melaksanakan ASO tanggal 10 Januari 2023 (KPID Sumatera Utara, KPID Sumatera Selatan, KPID Jawa Tengah, KPID Jawa Barat, KPID Jawa Timur, KPID Bali, KPID Kalimantan Selatan, KPID Sulawesi Selatan).



### Peserta Rapat

Disimpulkan pada rapat koordinasi KPI dengan KPID adalah sebagai berikut:

1. Membentuk posko di daerah, biar jadi ruang koordinasi di daerah bila ada pertanyaan dari masyarakat mengenai ASO dan STB.
2. KPI dan KPID berkomitmen dan membantu mensosialisasikan mendistribusikan STB.
3. akan bersurat secara paralel dengan memperhatikan beberapa hal dan secara komperhensif yaitu:
  - Mengenai keluhan masyarakat mengenai kesiapan ASO di daerah dimana masyarakat sudah dibuat kecewa mengenai penundaan pelaksanaan ASO disaat mereka siap dengan membeli STB.
  - Perlu ada kepastian pelaksanaan ASO agar tidak penundaan lagi Harus koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini pemerintah daerah harus dilibatkan karena selama ini pemerintah daerah tidak dilibatkan sosialisasi ASO dan STB.
  - Perlu memastikan kesiapan ketersediaan STB di daerah (*market place*).
  - Perlu ada informasi kepastian pembagian STB jangan sampai dianggap semua masyarakat berhak menerima STB.

No	GRUP PENYELENGGARA MULTIPLEKSING (1)	KOMITMEN DISTRIBUSI STB (2)	REALISASI PENERIMA STB (3)	GAGAL SERAH (4)	REALISASI DISTRIBUSI STB (5)	% (6)	SISA DISTRIBUSI STB (7)
1	SCM	1.213.750	87.277	4	87.281	7,2%	1.126.469
2	MNC	1.143.121	26.437	1.415	27.852	2,4%	1.115.269
3	Trans Media	616.511	40.229	1.544	41.773	6,8%	574.738
4	Media	704.378	21.628	1.420	23.048	3,3%	681.330
5	RTV	500.000	18.616	666	19.282	3,9%	480.718
6	VIVA	150.000	34.848	10.106	44.954	30,0%	105.046
7	Nusantara	3.000	2.940	0	2.940	98,0%	60
SUB TOTAL LPS		4.330.780	231.975	15.155	247.130	5,7%	4.083.630
8	Banper	1.209.464	1.136.539	72.925	1.209.464	100,0%	0
TOTAL		5.540.224	1.368.514	88.080	1.456.594	26,3%	4.083.630

Catatan :  
1. Realisasi Distribusi STB (5) adalah penjumlahan Realisasi Penerima STB (3) dan Gagal Serah (4) (5 = 3 + 4)  
2. Presentase Realisasi (6) adalah perhitungan dari Realisasi Distribusi STB (5) dengan Komitmen Distribusi STB (2) (6 = 5/2)  
3. Sisa Distribusi STB (7) adalah hasil pengurangan Komitmen Distribusi STB (2) dengan Realisasi Distribusi STB (5) (7 = 2 - 5)

## Paparan Bapak Mohamad Reza Terkait ASO

### Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) Tahun 2022

Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penciptaan penyiaran yang sehat, serta memperbanyak kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap penyiaran serta menguatkan sinergi dengan elemen masyarakat dalam mengembangkan dunia penyiaran, dan akhirnya akan menciptakan kelompok-kelompok masyarakat sebagai mitra kerja KPI Pusat dan KPI Daerah.

Bentuk kegiatan ini adalah SEMINAR FORUM MASYARAKAT PEDULI PENYIARAN dengan tema “Sinergi KPI dengan Elemen Masyarakat Menyongsong Masa Depan Penyiaran Indonesia”. Dengan tujuan relevansi dengan fungsi KPI mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran, relevansi dengan wewenang KPI melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan masyarakat dan relevansi dengan tugas dan kewajiban KPI:

- Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak & benar sesuai dengan HAM;
- Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata & seimbang; dan
- Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti masukan kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

Kegiatan FMPP yang telah dilaksanakan di beberapa Daerah, dan yang telah dilaksanakan yaitu; Provinsi Sumatera Utara (Medan), Provinsi NTB (Mataram), dan Provinsi Jawa Timur (Banyuwangi). Peserta yang diikutsertakan dari Pemerintah Daerah,

Organisasi Massa dan keagamaan, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa dan LSM Media/ Pemerhati Media dengan jumlah kehadiran secara tatap muka 100 orang dan untuk online tidak dibatasi. Narasumber dari kegiatan ini terdiri dari Komisi I DPR RI, Komisioner KPI, Akademisi dari Daerah, Diskominfo, Praktisi Penyiaran di Daerah.

Hasil akhir dari kegiatan FMPP adalah terbentuknya kelompok masyarakat peduli penyiaran dari berbagai segmen yang aktif bersinergi dengan KPI, berupaya menciptakan penyiaran era digital yang sehat di Indonesia, dengan perwakilan 10 orang di setiap Daerah. Kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi perwakilan dari setiap Daerah adalah fasilitator setiap perwakilan daerah, aktif dan paham terkait penyiaran yang berkembang saat ini terutama di Daerah masing-masing.

### 1. FMPP Provinsi Sumatera Utara (Kualanamu, Medan)

Dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Februari 2022 pada pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Wing Kualanamu, Medan. Yang dilaksanakan dalam bentuk seminar tatap muka dan online, dengan peserta secara offline 100 peserta, dan offline 150 peserta.



Narasumber dan Moderator FMPP Sumatera Utara

Berdasarkan keputusan peserta seminar dan disepakati ada 11 anggota FMPP di wilayah Sumatera Utara, Dengan fungsi pembentuk forum adalah menyampaikan ke KPI Pusat dari FMPP jika ada informasi terkait penyiaran yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan kedepannya forum akan dilibatkan dalam me-literasi penyiaran kepada masyarakat setempat.

## 2. FMPP Provinsi NTB (Mataram)

Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Maret 2022, dilaksanakan pada pukul 10.00 Wita bertempat di Universitas Negeri Islam, Mataram dalam bentuk seminar dan tatap muka langsung. 100 Peserta yang hadir di lokasi dengan narasumber H. Bambang Kristiono (Wakil Ketua Komisi I DPR RI), Prof. H. Masnun Tahir (Rektor UIN Mataram Dr. Muhammad Saleh (Dekan Fak. Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram), Dr. Kadri (Dosen UIN Mataram) dan Deddy Risnanto (Corporate Secretary Kompas TV) yang dimoderatori oleh Komisioner KPID NTB Husna Fatayati.

Pelantikan Anggota FMPP Wilayah Nusa Tenggara Barat, berdasarkan keputusan peserta seminar dan disepakati ada 11 anggota FMPP di wilayah Nusa Tenggara Barat. Forum ini dibentuk untuk memberi masukan terhadap revisi UU Penyiaran dan adalah menyampaikan kepada KPI Pusat jika ada informasi terkait penyiaran yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Narasumber dan Komisioner FMPP NTB

## 3. FMPP Provinsi Jawa Timur (Banyuwangi)

Kegiatan FMPP di Banyuwangi diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi tentang Peningkatan kerjasama di bidang penyelenggaraan penyiaran, yang di tanda tangani langsung oleh Ketua KPI Pusat Bapak Agung Suprio dan Rektor Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi Bapak Ahmad Munib Syafa'at.

Nota Kesepahaman ini sebagai dasar kegiatan yang akan dilaksanakan antara KPI Pusat dengan Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, salah satu kegiatan adalah Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 13 Juni 2022 di Banyuwangi.



Penandatanganan Nota Kesepahaman



Undangan Nota Kesepahaman

Kegiatan FMPP di Banyuwangi merupakan kerjasama KPI Pusat dengan Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi, kegiatan bertempat di Institut Agama Islam Banyuwangi, Jawa Timur dengan 100 peserta dalam bentuk seminar dan dilaksanakan secara tatap muka.



Penyerahan Plakat Kegiatan FMPP Jawa Timur



Forum Peserta dan Narasumber FMPP Jawa Timur

Tujuan dari FMPP di Banyuwangi untuk mensinergikan agenda dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita penyiaran serta mendorong hadirnya konten siaran yang sesuai dengan kepentingan publik dan mengumpulkan masukan, melakukan diskusi terhadap isu-isu terbaru dalam dunia penyiaran. Hasil dari kegiatan untuk mensinergikan kepentingan KPI dan masyarakat, khususnya dunia pendidikan seperti IAI, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan penyiaran. Dan juga terbentuknya perwakilan fasilitator sebanyak 10 orang untuk anggota FMPP di wilayah Jawa Timur khususnya Daerah Banyuwangi.

#### **4. FMPP di Kudus Provinsi Jawa Barat**

Peserta yang dihadirkan sebanyak 100 yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Pancasona, Bandung. Kegiatan FMPP di Jawa Barat dilaksanakan dari tanggal 17 – 19 Juli 2022, dengan pemateri utama Ibu Rachel Mariam Sayidina (Anggota Komisi I

DPR RI) dimana sebagai anggota Komisi I DPR-RI yang juga membidangi masalah penyiaran tentunya menyambut baik dengan adanya forum-forum diskusi seperti ini, yang diharapkan dapat membuat kesadaran dan literasi digital yang baik bagi masyarakat terhadap dunia penyiaran dimasa kini. Dengan adanya forum seperti ini besar harapan kita bersama-sama bisa saling membantu KPI dalam mengawasi konten siaran untuk menciptakan dunia penyiaran yang sehat dan berkualitas. Seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang penyiaran pasal 52 bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki Hak, Kewajiban, dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional dan masyarakat berhak mengajukan keberatan terhadap program atau isi siaran yang merugikan.



Foto: Ibu Rachel Mariam Sayidina (Anggota Komisi I DPR RI)

Narasumber dari kegiatan kali ini adalah Mohamad Reza (Korbid PS2P KPI Pusat) membahas pengembangan kelompok peduli media berbasis masyarakat, Bapak Adiyana Slamet (Ketua KPID Jawa Barat) memaparkan terkait bagaimana mMemperkuat penyiaran sebagai media informasi yang ramah kepentingan masyarakat, dan dari DPRD Prov. Jawa Barat, Bapak Tobiasa Ginanjar Sayidina, menjelaskan bagaimana mendorong penyiaran lokal untuk mengokohkan NKRI, berikutnya narasumber dari Akademisi Dr. Arlan Sidha, Dosen Universitas Jenderal Achmad Yani, menjelaskan bagaimana strategi dalam mempertahankan budaya bangsa, mengembangkan kritik dan apresiasi masyarakat akan penyiaran yang efektif.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan terbentuknya kelompok masyarakat peduli penyiaran dari berbagai segmen yang aktif bersinergi dengan KPI berupaya menciptakan penyiaran era digital yang sehat di Indonesia.



Narasumber dan Moderator FMPP Jawa Barat



Peserta Offline FMPP Jawa Barat

## 5. FMPP di Kudus Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan FMPP di Kudus Jawa Tengah diawali dengan penandatanganan kerja sama antara KPI dan Universitas Muria Kudus (UMK). Bertempat di ruang Seminar Lantai 4, Gedung Utama UMK Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Mohamad Reza dan Rektor UMK. Keduanya sepakat, sebagaimana dituangkan dalam MoU, untuk mengembangkan penelitian, pengembangan dan literasi utamanya di bidang penyiaran.



Foto: prosesi seremonial penandatanganan MoU KPI – UMK

Pada hari berikutnya kegiatan Forum Masyarakat Peduli Penyiaran (FMPP) untuk wilayah Jawa Tengah baru digelar yang dilaksanakan di Universitas Muria Kudus (UMK). Sedikitnya ada hampir 100 peserta memadati lokasi kegiatan. FMPP di UMK dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Ibu Lestari Moerdijat, Rektor UMK Prof. Dr. Ir. Darsono, Ketua KPI Pusat Agung Suprio dan Koordinator Bidang PS2P Mohamad Reza. Kehadiran para undangan tersebut, dilengkapi dengan hadirnya para narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti Praktisi Media, Akademisi, dan juga Pelaku Media.



Foto: Para tamu undangan dan narasumber FFMP Kudus

FMPP di Kudus Jawa Tengah, lebih menekankan evolusi penyiaran yang berdampak pada perubahan akses dan pola informasi, utamanya di bidang penyiaran. Dalam forum ini, misalnya, dijelaskan bagaimana media mengalami kemunduran, jumud hingga mungkin tutup. Hal ini ditandai dengan kian meningkatnya penggunaan media baru akibat arus internet yang begitu cepat dan luas penetrasinya.

Untuk itu, disampaikan bahwa memang perlu adanya penyesuaian regulasi penyiaran sehingga kontekstual dengan realitas penyiaran saat ini. Hal ini memungkinkan apabila, induk regulasi penyiaran mengakomodir perkembangan media sebagai bagian dari pertimbangan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2022 tentang Penyiaran

## **6. FMPP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

FMPP di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta digelar pada 29 September 2022, bertempat di Interaktif Centre Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (FISHUM) Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota DPR RI H Idham Samawi, Ketua dan Komisioner KPI Pusat Agung Suprio, Mohamad Reza dan Aswar Hasan serta Dekan FISHUM Dr. Mochamad Sodik, M.Si.

Dalam forum ini, sebenarnya terjadi konsensus pemikiran mengenai pesatnya informasi tidak serta merta berdampak positif, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan disitegrasi. Hal ini ditandai dengan maraknya ujaran kebencian, ketegangan antara norma dan informasi, serta hoaks dan lainnya.

Apabila demikian, dalam konteks ini nilai-nilai budaya Indonesia mengalami penurunan. Padahal, Indonesia mempunyai nilai yang sangat kuat dan mengakar sebagai kebijaksanaan komunitas bangsa. Atas dasar itulah, FMPP dinilai sebagai ruang untuk mensinergikan agenda dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita penyiaran serta mendorong hadirnya konten siaran yang sesuai dengan kepentingan publik.



Foto: Pelaksanaan kegiatan FMPP di DIY

**BIDANG KELEMBAGAAN****1. RAKORNAS**

Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah merupakan forum tingkat nasional yang berfungsi untuk menetapkan Peraturan dan Keputusan berkenaan dengan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI. Hal ini sesuai dengan amanat UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dan peraturan KPI tentang Kelembagaan Tahun 2014. Rakornas diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan dan Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah.

**1.1. Rakornas Tahun 2020**

Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2020 menjadi sangat istimewa mengingat penyelenggaraannya dilakukan secara virtual, tidak tatap muka langsung seperti biasa. Kebijakan ini diambil menyusul kondisi pandemi wabah Covid 19 yang belum usai di Indonesia, sementara berbagai isu aktual terkait penyiaran harus dibahas bersama antara KPI Pusat dan KPI Daerah dalam forum tertinggi, RAKORNAS KPI yang diselenggarakan pada tanggal 2 – 3 November 2020 yang diselenggarakan secara hybrid.

RAKORNAS Tahun 2020 dengan tema “Penyiaran Dalam Penanggulangan Bencana Nasional Non Alam (Covid-19 dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. Selain itu hadir pula secara virtual sebagai pembicara kunci, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjend TN Doni Monardo, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prof Widodo Muktiyo, serta Perwakilan dari para Asosiasi baik Televisi maupun Radio. Adapun moderator seminar ini adalah Reza Herlambang, selaku presenter berita dari TVRI.



Para Narasumber Rakornas KPI Tahun 2020, diantaranya Menkopolhukam RI Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz, Kepala BNPB Letjend TN Doni Monardo dan Dirjen IKP Kominfo Prof Widodo Muktiyo.

Usai pemaparan dari semua narasumber, moderator memberikan kesempatan dari perwakilan asosiasi lembaga penyiaran untuk menyampaikan masukan dan tanggapan. Kesempatan pertama diberikan kepada Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution. Dilanjutkan dengan dari Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI) yang diwakili oleh M Riyanto. Setelah itu, Tanggapan selanjutnya dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) yang disampaikan oleh Sutrisno. Kemudian tanggapan disampaikan dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) oleh Ketua Umumnya Sinam Sunarto. Selanjutnya tanggapan dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) disampaikan oleh Eris Munandar. Sementara itu dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) tanggapan disampaikan langsung oleh Bambang Santoso, dan yang terakhir dari Asosiasi Radio Swasta Lokal Indonesia (ARSLI), yang diwakili oleh Nur Hadi.



Pimpinan Sidang Rakornas KPI Tahun 2020

Rakornas KPI pada hari kedua dilanjutkan dengan Rapat Internal KPI yang dibagi menjadi 3 bidang yakni pengawasan isi siaran, kelembagaan, dan pengelolaan struktur & sistem penyiaran. Pada Sidang Bidang Pengawasan Isi Siaran dipimpin oleh Komisioner KPI Pusat Ibu Mimah Susanti dan Mulyo Hadi Poernomo dan diikuti oleh Komisioner KPID Daerah Bidang Pengawasan Isi Siaran. Adapun agenda pembahasan bidang Isi Siaran dalam Rakornas 2020 antara lain pengawasan penyiaran Pilkada 2020, gugus tugas Pilkada 2020, revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012, pembuatan pedoman pengawasan konten lokal penyiaran digital, membuat data daerah yang belum mendapatkan siaran digital hingga mengutamakan lembaga penyiaran dalam siaran iklan dan sosialisasi Pilkada 2020. Pada bidang pengawasan isi siaran Rekomendasi yang dihasilkan adalah :

1. Dalam rangka menyukseskan pilkada dan memperhatikan wilayah yang belum terlayani siaran televisi dan radio baik SSJ maupun lokal, maka KPI merekomendasikan:
  - a. Penggunaan lembaga penyiaran di sekitar wilayah yang siarannya dapat diakses di daerah setempat yang melaksanakan pilkada serentak 2020;

- b. Dalam hal Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) tidak dapat menjangkau wilayah yang bersangkutan maka wilayah yang menyelenggarakan pilkada dapat menggunakan LPB yang memiliki IPP.
2. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan konten lokal televisi berjaringan dilakukan oleh KPI Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Dibuat dengan memperhatikan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan industri kreatif lokal;
    - b. Dibuat dengan melibatkan SDM lokal (stasiun anggota jaringan, production house, atau pihak-pihak lain yang berdomisili di wilayah provinsi anggota jaringan tersebut);
    - c. Berisi hal-hal yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, wilayah provinsi siaran setempat yang dapat berformat; news, feature, entertainment, dan pendidikan;
    - d. Disiarkan secara relay dari ibu kota provinsi ke wilayah-wilayah layanan dalam provinsi tersebut;
    - e. Disiarkan sekurang-kurangnya 1 (satu) jam pada pukul 05.00-22.00 waktu setempat dengan memperhatikan kesesuaian klasifikasi program;
    - f. Penayangan materi siaran yang sama (re-run) dapat disiarkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam sebulan, dan 6 (enam) kali dalam setahun;
    - g. Bahasa pengantar konten lokal dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah.
  3. Meminta pemerintah menjamin pemerataan siaran digital di seluruh wilayah Indonesia dan kualitas program siaran serta keberagaman konten siaran.
  4. Meminta pemerintah menjamin kewenangan KPI dalam peraturan pemerintah dan peraturan turunan lainnya sebagai konsekuensi atas penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi pelanggaran konten siaran.
  5. Masukan untuk revisi P3SPS sebagai berikut:
    - a. Pengaturan konten lokal;
    - b. Mekanisme penanganan pelanggaran konten siaran berjaringan oleh induk jaringan atas:
      - 1) Temuan
      - 2) Pengaduan
      - 3) Rekomendasi KPI Daerah

- c. Pengaturan program siaran yang berhubungan dengan kebencanaan dan kedaruratan;
- d. Hukum acara penjatuhan sanksi terkait dengan kepastian hukum, waktu penanganan pelanggaran serta masa kadaluarsa temuan dan pengaduan dugaan pelanggaran;
- e. Meninjau ulang pengaturan peliputan program siaran jurnalistik selaras dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ);
- f. Memperhatikan keberpihakan terhadap kelompok disabilitas pada program siaran.



Rapat Bidang Pengawasan isi Siaran

Selanjutnya, Sidang Bidang Kelembagaan dipimpin oleh Komisioner KPI Pusat Irsal Ambia, Yuliandre Darwis, Nuning Rodiyah dan Hadly Stefano FP dan diikuti oleh Komisioner KPID Daerah Bidang Kelembagaan. Beberapa hal yang disampaikan sebagai bahan pembahasan atau pokok masalah di antaranya tentang kehadiran Undang-undang Omnibus Law yang mengubah banyak pasal khususnya di kluster penyiaran. Salah satunya di Pasal 16 terkait dengan eksklusivitas di lembaga penyiaran. Hanya di UU Penyiaran yang mensyaratkan pendirian lembaga penyiaran, penyelenggaraan syarat jasa pendiriannya hanya satu bidang saja. Terkait program literasi, GLSP diharapkan dapat menjadi gerakan nasional yang dilakukan secara massif oleh KPID se-Indonesia. Upaya ini untuk mengintervensi selera tayangan masyarakat agar dapat memilih tontonan yang

berkualitas. Ada 3 bentuk gerakan literasi di 2021 yaitu secara online, offline & on-air di LP untuk semakin banyak menjangkau masyarakat untuk diliterasi. Gerakan literasi ini banyak mendapat dukungan dari KPID dan meminta agar terus dilakukan. Rapat juga membahas perkembangan media baru. Menyikapi hal ini, KPI dinilai yang paling siap untuk mengawasi media baru.

Adapun hasil-hasil Rekomendasi Rakornas KPI Tahun 2020 pada Bidang Kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Mengawal percepatan revisi atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Mendorong keterlibatan aktif KPI Pusat dan KPI Daerah dalam perumusan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan turunan UU Cipta Kerja;
3. Segera melakukan revisi Peraturan KPI tentang Kelembagaan pasca UU Cipta Kerja;
4. Menjadikan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa sebagai gerakan nasional untuk penguatan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas program siaran;
5. Mendorong kepedulian publik tentang dinamika perkembangan media baru dan urgensi pengaturannya demi keadilan.



Pimpinan Rapat Bidang Kelembagaan

Adapun Sidang Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) dipimpin oleh Mohammad Reza, Aswar Hasan dan Agung Suprio diikuti oleh Komisioner KPID Daerah Bidang Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P. beberapa hal yang dibahas adalah terkait dengan rencana

digitalisasi, permohonan izin dan posisi KPI setelah diundangkannya UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan lainnya.

Sementara hasil-hasil Rekomendasi Rakornas KPI Tahun 2020 pada Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) adalah :

1. Mendukung Analog Switch Off pada tahun 2022 dengan membentuk Tim Digital Nasional, dimana Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) termasuk anggotanya untuk menjamin diversifikasi konten dan meratanya penyiaran di seluruh wilayah Indonesia;
2. Menegaskan keterlibatan KPI dalam Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan penyiaran sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Sosialisasi penyiaran digital ke seluruh provinsi di Indonesia dengan melibatkan KPI.



Pimpinan Rapat Bidang Kelembagaan

## 1.2. Rakornas Tahun 2021

Dinamika penyiaran yang terus berkembang, penguatan KPI secara kelembagaan dinilai juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Penguatan KPI secara kelembagaan salah satunya bisa dilakukan dengan perubahan atau melakukan revisi terhadap UU Penyiaran yang sudah eksis. Revisi UU Penyiaran dinilai sangat mendesak mengingat tugas dan fungsi KPI semakin besar, terutama dengan dibukanya kran digitalisasi di bidang penyiaran. Selain itu, sebagaimana yang saat ini akan dilakukan, adalah revisi P3SPS untuk memasukkan beberapa saran dan catatan dari stakeholder penyiaran sebagai Langkah penyempurnaan aturan ‘lalu lintas’ program siaran.

Di luar KPI, tentu peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI sangat penting. Pengaturan tentang penyelenggara dan penyewa mux diharapkan bisa dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dalam konteks persaingan usaha. Dengan demikian, kepemilikan terhadap badan usaha penyiaran dapat terdistribusi sesuai amanah undang-undang.

Dalam forum pengambilan keputusan tertinggi ini juga, yakni Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), pembahasan tentang isu-isu kontemporer dunia penyiaran akan dilaksanakan melalui proses keadaban dan musyawarah yang diharapkan adanya mufakat sebagai solusi konsep dan praktis untuk masa depan penyiaran di Indonesia.



(Wakil Ketua Komisi I DPR Dr. H. Abdul Haris Al-Masyhari saat menyampaikan Sambutan dan membuka secara resmi Rakornas KPI Tahun 2022)

Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada hari Rabu – Sabtu, 10 – 13 November 2021 dan dilakukan secara *hybrid* yakni melalui Online dan Offline dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat yang bertempat di Harris Hotel & Conventions Jalan Bulevar Ahmad Yani Kota Bekasi, Jawa Barat.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia adalah terdiri dari Komisioner KPI Pusat, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Se-Indonesia baik secara Online maupun Offline serta didukung oleh Tim Sekretariat KPI Pusat.



(Para Narasumber saat menyampaikan paparan)

Kegiatan yang bertema “*Keadilan Persaingan dan Keberagaman di Era Penyiaran Digital*” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bapak Dr. H. Abdul Haris Al-Masyhari dan dalam sesi Seminar Utama dihadiri oleh para narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing, yaitu : 1. Marsda TNI Arif Mustofa (Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam RI), 2. Usman Kansong (Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI), 3. Ariful Yaqin Hidayat (Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi Kadin Indonesia), 4. Dr. Eriyanto, S.IP., M.Si (Akademisi Universitas Indonesia), 5. Imam Sudjarwo (Ketua Umum ATVSI), 6. Rikard Bangun (Ketua Umum ATVNI), 7. Bambang Santoso (Ketua Umum ATVLI), 8. Eris Munandar (Ketua Umum ATSDI), 9. K Candi P Sinaga

(Ketua Bidang Government Relations & Regulatory Affairs PRSSNI), kegiatan seminar dipandu oleh moderator Ahmad Topan dari RTV.



(Komisioner KPI Pusat sebagai Pimpinan Rakornas KPI 2021)

Sidang Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyerahan (PS2P) dipimpin oleh Mohammad Reza, Aswar Hasan dan Agung Suprio diikuti oleh Komisioner KPID Daerah Bidang Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyerahan (PS2P). Adapun isu-isu yang dibahas dalam bidang ini meliputi (1) Juklak/Juknis Hak Akses KPI (dan Hak Akses Turunan KPID) Terkait: Persyaratan terkait Isi Siaran di OSS Perizinan Penyerahan Sub sistem Pengawasan OSS (2) Pedoman Pengaturan & Evaluasi Laporan Tahunan LP terkait Pengembangan Program Siaran, termasuk Perpanjangan IPP (3) Pengaturan tentang Rekomendasi Pencabutan IPP: Tanggung jawab PS2P dan Pengaturannya dalam PKPI.

Adapun Hasil Rekomendasi Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyerahan (PS2P) dalam Rakornas KPI Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sepakat menyesuaikan ketentuan penyelenggaraan penyiaran terkait isi siaran, terutama berkenaan teknis/pelaksanaan:
  - Hak akses KPI Pusat dan Daerah di OSS-Perizinan Penyelenggaraan Penyerahan;
  - Rekomendasi pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyerahan karena tidak bersiaran 3 bulan akumulatif;
  - Evaluasi tahunan Lembaga Penyerahan dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyerahan.

2. Membentuk tim pelaksana penyusunan Rancangan PKPI tentang Penyelenggaraan Penyiaran Terkait Isi Siaran yang melibatkan perwakilan KPID, sebagai berikut;

Sumatera	: Kepulauan Riau
Jawa	: Jawa Barat
Kalimantan	: Kalimantan Timur
Sulawesi – Maluku – Maluku Utara:	Sulawesi Selatan
Bali – NTB – NTT	: NTT
Papua - Papua Barat	: Papua

3. Menetapkan rancangan akhir PKPI tentang Penyelenggaraan Penyiaran Terkait Isi Siaran menjadi PKPI dalam forum bersama KPI Pusat dan Daerah paling lambat ditetapkan Triwulan I 2022.



(Suasana Sidang Bidang PS2P)

Pada Sidang Bidang Pengawasan Isi Siaran dipimpin oleh Komisioner KPI Pusat Ibu Mimah Susanti dan Mulyo Hadi Poernomo dan diikuti oleh Komisioner KPID Daerah Bidang Pengawasan Isi Siaran. Adapun isu-isu yang dibahas dalam bidang ini meliputi (1) Revisi P3SPS. Masukan pasal-pasal dan pembahasan sudah dilakukan di dalam tim Revisi P3SPS yang sedang berjalan, melibatkan lebih dari 70 unsur Pemerintah (K/L), Lembaga Penyiaran, LSM/kelompok masyarakat (2) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pelaksanaan dan Sosialisasi ASO di seluruh daerah (3) Instrumen dan Pengawasan Siaran Digital, dan (4) Peningkatan Kapasitas

Pengawasan Isi Siaran. Sidang Bidang Pengawasan Isi siaran ini diakhiri dengan pembuatan Rekomendasi yang disampaikan dalam Rapat Pleno Rakornas KPI.

Adapun Rekomendasi Bidang Pengawasan Isi Siaran dalam Rakornas KPI Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

1. KPI Pusat membuat sistem pengawasan penyiaran digital yang terintegrasi dengan KPI Daerah;
2. Meningkatkan kapasitas SDM Bidang Pengawasan Isi Siaran yang merata, terpadu dan berkesinambungan.
3. Membuat peraturan KPI tentang tata cara penanganan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan.
4. Melanjutkan proses pembahasan revisi P3SPS secara komperensif dan prosedural, untuk kemudian ditetapkan pada Rakornas 2022;
5. Meningkatkan sinergi KPI dengan lembaga penyelenggara Pemilu dalam proses pemilihan umum yang demokratis.



(Suasana Sidang Bidang Pengawasan Isi Siaran)

Adapun Sidang Bidang Kelembagaan yang dipimpin oleh Komisioner KPI Pusat Irsal Ambia, Yuliandre Darwis, Nuning Rodiyah dan Hadly Stefano FP dan diikuti oleh Komisioner KPID Daerah Bidang Kelembagaan. isu-isu yang dibahas dalam bidang ini meliputi (1) Progres Revisi UU Penyiaran; (2) Revisi PKPI Kelembagaan, (3) Kode Etik KPI, dan (4) Revisi P3SPS KPI. Sidang Bidang Kelembagaan ini diakhiri dengan pembuatan Rekomendasi yang disampaikan dalam

Rapat Pleno Rakornas KPI. Khusus untuk rekomendasi terkait Revisi P3SPS KPI disampaikan secara langsung dalam Sidang Pleno Rakornas KPI.

Pada Bidang Kelembagaan rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakornas ini adalah :

1. Membentuk tim pengawal, perumus, dan penyusunan revisi UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan menyertakan evaluasi dan timeline selambat-lambatnya 3 bulan setelah rakornas tahun 2021.
2. Membentuk tim penyempurnaan Revisi PKPI Kelembagaan atas draf PKPI Tahun 2019 dan disahkan paling lambat pada Rakornas Tahun 2022.
3. Membentuk tim penyusunan kode etik KPI.



(Suasana Sidang Bidang Kelembagaan)



(Peserta Rakornas KPI Tahun 2021 saat sesi foto bersama)

### 1.3. Rakornas Tahun 2022

Dalam konteks menjaga optimisme bangsa, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengawasi lembaga penyiaran mengatur televisi dan radio untuk menciptakan siaran yang dapat menjaga optimisme bangsa sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Penetrasi televisi di masyarakat Indonesia masih yang paling besar dan dominan sehingga siaran televisi akan efektif untuk menciptakan optimisme maupun agenda pembangunan nasional yang lain. Harapannya sikap positif dan kreatif masyarakat akan tercipta untuk terlibat dalam perekonomian Indonesia sehingga tercipta kesejahteraan di tengah pesimisme global.

Untuk mewujudkan optimisme bangsa dan menyelaraskan program nasional, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Minggu – Rabu, 6 – 9 November 2022 bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Jl. BSD Grand Boulevard No.1, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten dengan mengambil tema **“Mengukuhkan Optimisme Bangsa melalui Penyiaran”**. Rakornas ini merupakan kegiatan yang diatur dalam undang-undang penyiaran yang ditujukan untuk membuat kebijakan penyiaran yang akan diimplementasikan melalui siaran di televisi dan radio.

Kegiatan Rakornas ini dihadiri secara langsung oleh Bapak Jhonny G. Plate (Menteri Komunikasi dan Informatika RI), Bapak Khumari (Asisten Pj Gubernur Banten), Bapak Marsda Arif Mustofa (Deputi VII Kemenko Polhukam RI), Bapak Usman Kansong (Dirjen IKP Kominfo), Bapak Noerman Effendi (Kepala Biro Kerjasama dan Humas BPOM RI), Ibu Rosarita Niken Widiastuti (Staf Khusus Menkominfo), Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah serta beberapa perwakilan dari asosiasi-asosiasi lembaga penyiaran di Indonesia, seperti: ATVSI, ATVNI, ATSDI, ATVLI, PRSSNI, JRKI.



(Suasana pembukaan secara simbolis oleh Ketua KPI Pusat didampingi perwakilan dari Kominfo, Kemenko Polhukam, DPD RI dan BPOM RI)

Sebagai bagian dari rangkaian acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI diselenggarakan juga Sarasehan Penyiaran yang dipandu oleh Maman Suherman, penulis yang juga penggiat literasi mengenai semangat optimisme melalui dunia penyiaran. Sarasehan tersebut menjadi ruang dialog yang mempertemukan antara beberapa pihak *stakeholder* penyiaran seperti asosiasi-asosiasi televisi dan radio tanah air dan juga dari unsur Pemerintahan. Pembahasan dimulai dengan bagaimana kebutuhan media penyiaran bagi kehidupan masyarakat dalam artian memberikan dampak yang cukup signifikan untuk merubah suatu peradaban bangsa. Lalu, permasalahan-permasalahan dari industri konten juga sangat diharapkan bisa memberikan tayangan yang lebih edukatif dan informatif. Khususnya, untuk menjawab beberapa peluang dan tantangan memasuki digitalisasi penyiaran setelah *Analog Switch Off (ASO)* yang baru saja dilakukan untuk tahap pertama.



(suasana sarasehan yang dipandu oleh Maman Suherman)

Sidang Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) dipimpin oleh Mohammad Reza, Aswar Hasan dan Agung Suprio diikuti oleh Komisioner KPID Daerah Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P). Pembahasan dalam Sidang Bidang PS2P ini menitik beratkan pada pembahasan yaitu Hak Akses KPI berkenaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha “terkait isi siaran” di system OSS, rancangan peraturan KPI tentang rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran karena tidak melakukan siaran dan juga perpindahan televisi analog ke digital

Adapun Hasil Rekomendasi Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) dalam Rakornas KPI Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Rancangan Peraturan KPI tentang Rekomendasi Pencabutan IPP Karena Tidak Melakukan Siaran menjadi Peraturan KPI tentang Rekomendasi Pencabutan IPP Karena Tidak Melakukan Siaran;
2. Melanjutkan upaya perolehan Hak Akses KPI serta penetapan dan pengawasan persyaratan terkait isi siaran di *Online Single Submission* (OSS) Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Penyiaran;

3. Rekomendasi kepada Kemenkominfo terkait pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO):
  - a. Menindaklanjuti penyesuaian ketentuan-ketentuan digitalisasi penyiaran pasca Putusan MA 40P/HUM/2022;
  - b. Melaksanakan percepatan distribusi *Set Top Box* (STB) sesuai komitmen yang disepakati Pemerintah dan penyelenggara Multiplekser;
  - c. Menyegerakan pelaksanaan ASO di luar Jabodetabek;
  - d. Menjamin ketersediaan STB dengan harga yang terjangkau.
4. Perlu keberpihakan khusus Pemerintah terkait penyelenggaraan penyiaran digital di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan area *blank spot*.



(Pimpinan Sidang Bidang PS2P)

Pada Sidang Bidang Pengawasan Isi Siaran dipimpin oleh Komisioner KPI Pusat Ibu Mimah Susanti dan Mulyo Hadi Poernomo serta Benico dari KPID Maluku dan diikuti oleh Komisioner KPID Daerah Bidang Pengawasan Isi Siaran yang dilaksanakan pada hari Selasa, 8 November 2022.

Adapun Rekomendasi Bidang Pengawasan Isi Siaran dalam Rakornas KPI Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. KPI akan melanjutkan pembahasan revisi P3SPS setelah Undang-Undang Penyiaran yang baru disahkan;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam P3SPS Tahun 2012 dibuat dalam Surat Edaran yang bersumber dari pasal-pasal draf P3SPS Tahun 2021;

3. KPI meminta komitmen Lembaga Penyiaran TV Digital terkait program siaran lokal sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
4. Membentuk tim penyusunan instrumen pengawasan sebagai tindak lanjut Peraturan KPI tentang Rekomendasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Karena Tidak Melakukan Siaran, selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kerja setelah Rakornas KPI Tahun 2022.



(Peserta Sidang Komisi Bidang Pengawasan Isi Siaran)

Pada hari Selasa, 8 November 2022 dimulai pada pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Garuda 5a Nusantara I ICE BSD City Tangerang Banten, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI dilaksanakan Sidang Bidang Kelembagaan yang dipimpin oleh Komisioner KPI Pusat Irsal Ambia, Nuning Rodiyah dan Hadly Stefano FP serta didampingi oleh perwakilan Komisioner KPI Daerah yang terdiri dari KPID Lampung, KPID Kalimantan Tengah dan KPID Gorontalo. Sidang Bidang Kelembagaan ini diikuti oleh Komisioner KPID Daerah Bidang Kelembagaan. Adapun isu-isu yang dibahas dalam bidang ini meliputi Pengesahan Produk Legislasi KPI (PKPI tentang Kelembagaan dan PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif KPI). Hal ini sesuai dengan Kesepakatan dalam Rapat Pra Rakornas KPI Bidang Kelembagaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022.

Diawal persidangan, Irsal Ambia selaku pimpinan sidang dan Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat menyampaikan pengantar sidang, bahwa dalam

Rakornas KPI Tahun 2022 ini khusus bidang Kelembagaan akan mengesahkan dua (2) Rancangan Peraturan Baru KPI yaitu Rancangan PKPI tentang Kelembagaan dan Rancangan PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif KPI. Rancangan PKPI tentang Kelembagaan telah disusun oleh Tim Revisi PKPI tentang Kelembagaan sebagaimana amanat Rakornas KPI Tahun 2021 yang lalu, dimana materi dalam Draft juga diambil dari Draft PKPI Kelembagaan Tahun 2019.

Pada Bidang Kelembagaan rekomendasi yang dihasilkan dalam Rakornas ini adalah:

1. Mengesahkan Rancangan Peraturan KPI tentang Kelembagaan menjadi Peraturan KPI tentang Kelembagaan KPI;
2. Mengesahkan Rancangan Peraturan KPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Komisi Penyiaran Indonesia menjadi Peraturan KPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Komisi Penyiaran Indonesia.



(Suasana Sidang Komisi Bidang Kelembagaan)



(Peserta Rakornas KPI Tahun 2022 saat sesi foto bersama)

## II. RAPAT PIMPINAN (RAPIM) KPI 2019

Sejak dibentuk melalui Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, sesungguhnya begitu besar dan mulia amanah yang dimandatkan konstitusi terhadap Komisi Penyiaran Indonesia. Jika kita melihat desain UU Penyiaran, lembaga negara independen yang lahir pasca reformasi ini diharapkan menjadi institusi yang kuat dan berwibawa dalam melakukan pengawasan lembaga penyiaran, televisi dan radio di Indonesia. Desain struktur lembaga negara yang independen di pusat dan daerah, kewenangan membuat regulasi, kewenangan menjatuhkan sanksi yang cukup maksimal, posisi anggaran yang harusnya juga mandiri dan sebagainya.

Akan tetapi dalam perjalanannya, desain ideal terhadap lembaga KPI menemui berbagai tantangan serta dinamika yang mengarah pada belum terwujudnya lembaga KPI yang kuat dan bermartabat seperti yang diinginkan publik. Dalam konteks kekinian, KPI menghadapi berbagai rintangan jika tidak ingin dikatakan problematika yang cukup serius seperti eksistensi dan struktur kelembagaannya, kredibilitas, kewenangan, sumber daya manusia, hingga persoalan anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Dalam pada itu, lembaga ini membutuhkan berbagai sumbangsih pemikiran-pemikiran yang jernih dan bernas serta solusi yang tepat untuk menyelesaikan ragam

dinamika yang dihadapi KPI. Pada titik inilah rapat pimpinan KPI se-Indonesia diharapkan mampu mengurai berbagai hal yang menjadi isu-isu krusial KPI agar lembaga ini benar-benar menjadi kuat dan berwibawa untuk penyiaran yang bermartabat.



(Para Komisioner KPI Pusat, saat memimpin Persidangan dalam Rapim KPI Pusat)

Kegiatan Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia dilaksanakan pada hari Rabu – Jum’at, 9 – 11 Oktober 2019 bertempat di The Alana Hotel & Conference Center Jl. Ir. H Juanda No.76, Sentul, Kec. Babakan Madang, Kota Bogor, Jawa Barat dan Peresmian Pembukaan secara resmi oleh Wakil Presiden Bapak Drs. H. M. Jusuf Kalla yang dilaksanakan di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu :

- 1) Menyamakan visi dan arah kebijakan menyikapi dinamika penyiaran yang semakin beragam dan kompleks.
- 2) Meningkatkan koordinasi kelembagaan KPI Pusat dan KPI Daerah untuk penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien.
- 3) Merumuskan kebijakan strategis penyiaran, membahas sekaligus memberikan alternatif solusi.



(Acara Pembukaan Rapim KPI 2019 oleh Wakil Presiden RI, yang didampingi oleh Menkominfo Rudiantara dan Ketua KPI Agung Suprio)

Kegiatan yang bertema “Penguatan Eksistensi dan Kredibilitas KPI untuk Penyiaran yang Bermartabat” ini dihadiri oleh para narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing, yaitu : 1. Bapak Drs. Dr. Bahtiar, M. Si sebagai Kapuspen dan Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. 2. Bapak Agung Suprio sebagai Ketua KPI Pusat. 3. Bapak Nurjaman Mochtar sebagai Pemerhati Media. 4. Bapak Iwan Kesumajaya, SH,,MH sebagai Ketua KPID Sumsel 2010-2018, dan 5. Ibu Senandung Nacita dari SCTV.

Adapun Rekomendasi Rapim KPI 2019 sebagai berikut:

Bidang Kelembagaan :

1. Revisi PKPI Kelembagaan dengan pokok bahasan:
  - a. Kelembagaan KPI yang hierarkis-desentralisasi;
  - b. Pembentukan Etika Kolegial Anggota KPIPelaksanaan revisi PKPI Kelembagaan akan dibentuk tim kerja
2. Menyusun regulasi prosedural atau hukum formil sanksi administratif, cfm. pasal 55 (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yakni Tata Cara dan Pemberian Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran.
3. Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dengan membentuk tim kerja. Pelaksanaan akan dilaksanakan awal bulan November 2019.
4. Mendesain gerakan literasi media yang kreatif.
5. KPI membuat kajian tentang klaster anggaran KPI Daerah.

Bidang Pengawasan Isi Siaran :

1. Konten lokal wajib disiarkan oleh masing-masing lembaga penyiaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dibuat dengan memperhatikan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan industri kreatif lokal;
  - b. Dibuat melibatkan SDM lokal (stasiun anggota jaringan, *Production House*, atau pihak-pihak lain yang berdomisili di wilayah provinsi anggota jaringan tersebut);
  - c. Berisi hal-hal yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dapat berformat: *news, feature, entertainment*, pendidikan;
  - d. Disiarkan secara *relay* dari ibu kota provinsi ke wilayah-wilayah layanan dalam provinsi tersebut;
  - e. Disiarkan sekurang-kurangnya 1 (satu) jam pada pukul 05.00 -22.00 waktu setempat;
  - f. Penayangan materi siaran yang sama (*re-run*) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam sebulan, dan 6 (enam) kali dalam setahun;
  - g. Bahasa pengantar konten lokal dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa daerah.
2. Dalam rangka mengatasi permasalahan *blankspot* di beberapa daerah dan memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan informasi, maka KPI Pusat dengan melibatkan bidang PS2P dan Kelembagaan, serta KPID yang berkepentingan, harus memediasi kesepahaman hak informasi dan bisnis antara LPS, LPP, LPB dan pemerintah serta pihak terkait lainnya; (PS2P)
3. Penegakan penjatuhan sanksi pelanggaran penyiaran oleh Lembaga Penyiaran Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), KPI Pusat wajib mempertimbangkan aduan/laporan/rekomendasi KPI Daerah. Dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, KPI Pusat harus menyampaikan hasil tindak lanjut atas aduan/laporan/rekomendasi KPI Daerah tersebut secara tertulis.
4. KPI Pusat membuat juknis pengawasan dan pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pelanggaran penyiaran sebagai acuan untuk KPI Daerah.
5. Dalam rangka ikut serta menyukseskan dan mengantisipasi pelanggaran penyiaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), KPI harus segera membuat juknis yang diinisiasi oleh KPI Pusat. Hasil juknis harus segera disosialisasikan, terutama wilayah KPI Daerah yang melaksanakan Pilkada.

Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran :

Komponen Penilaian Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) Permohonan/ Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) melalui *Online Single Submission* (OSS) adalah sebagai berikut:

- a. Kesesuaian persentase program siaran dengan format siaran yang dipilih;
- b. Persentase minimal Iklan Layanan Masyarakat berbanding dengan jam siaran;
- c. Pemenuhan pernyataan komitmen persyaratan program siaran (Komponen EDP di OSS)
- d. Tidak adanya pelanggaran program siaran anti Pancasila dan/atau NKRI
- e. Tidak ada putusan pidana in Kracht
- f. Tidak ada putusan pelanggaran P3SPS dengan maksimal tertentu
- g. Tidak ada putusan pelanggaran dari lembaga profesi yang bersangkutan
- h. Persentase minimal program siaran lokal di lembaga penyiaran swasta (LPS) anggota jaringan



(Suasana Peserta Rapim KPI 2019)

### **III. HARSIARNAS**

Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) yang diperingati setiap tanggal 1 April, merupakan momentum untuk mengingat kembali tentang kontribusi dunia penyiaran dalam perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kiprah dunia penyiaran sudah dirasakan sejak masa sebelum kemerdekaan dengan hadirnya Solosche Radio Vereeniging (SRV) sebagai radio ketimuran pertama milik Bumiputera yang diprakasai oleh KGPAA Mangkunegoro VII. Selanjutnya dunia penyiaran pun selalu hadir sebagai penghubung dan pemersatu antar sesama anak bangsa di setiap fase penting negeri ini, baik itu masa kemerdekaan dan reformasi, termasuk di saat yang sulit sekalipun. Penetapan tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Hari Penyiaran Nasional yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 29 Maret 2019.

#### **III.1. Harsiarnas Tahun 2020**

Pada momen Hari Penyiaran Nasional ke-87 di tahun 2020 ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak menyelenggarakan kegiatan Peringatan Harsiarnas sebagaimana biasanya dikarena masih dalam situasi Pandemi. Akan tetapi, dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional ke-87 ini, Komisi Penyiaran Indonesia tetap menyampaikan pesan – pesan penyiaran dengan tema “Serukan Kepedulian dan Solidaritas Sosial Melalui Penyiaran Dalam Melawan Pandemi”. Pesan penyiaran tersebut disampaikan melalui Siaran Pers Nomor 03/KPI/HM.02.02/03/2020. Pada momen Hari Penyiaran Nasional ke-87 di tahun 2020 ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap lembaga penyiaran, baik televisi dan radio, ikut memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjaga bangsa ini menghadapi pandemi wabah Covid-19. Sebagai medium informasi yang paling mudah dijangkau publik, kehadiran televisi dan radio di masa tanggap darurat Corona ini diharapkan memberi informasi valid tentang Covid-19 sehingga mampu meningkatkan kepedulian publik dalam mencegah dan menanggulangnya. Kepedulian dan solidaritas sosial sangat dibutuhkan publik untuk bersama-sama menghadapi wabah Covid-19. Lembaga Penyiaran, yang selalu menjadi tumpuan masyarakat atas pemenuhan informasi dan hiburan yang sehat, diharapkan menggugah masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah menanggulangi Covid-19.

Setidaknya ada tiga peran penting lembaga penyiaran dalam upaya menanggulangi pandemi ini. Yang pertama sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Physical Distancing melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Kedua, memberikan informasi aktual dan terpercaya tentang perkembangan Covid-19 di Indonesia dan kebijakan strategis yang diambil pemerintah. Ketiga, menghadirkan program siaran berkualitas guna mendukung publik untuk beraktivitas di rumah saja, termasuk dengan menampilkan program bermuatan pendidikan untuk dikonsumsi anak-anak yang saat ini sedang belajar di rumah. Pada prinsipnya, peringatan Hari Penyiaran Nasional tidak pernah lepas dari sebuah rasa cinta kepada tanah air lewat sajian konten informasi yang berkualitas melalui televisi dan radio. Di tahun ini, KPI berharap Hari Penyiaran Nasional dimaknai dengan semangat kepedulian dan solidaritas sosial pada sesama anak bangsa. “Negeri ini tengah menghadapi kondisi yang tidak mudah, selayaknya lembaga penyiaran pun hadir sebagai medium yang juga merekatkan solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian lewat konten siaran. Karena ini adalah sebuah kerja bersama menyelamatkan bangsa dari pandemi wabah Covid-19.

### **III.2. Harsiarnas Tahun 2021**

Pada tahun ini Peringatan Harsiarnas ke-88 dilaksanakan di Kota Solo Jawa Tengah. Peringatan Harsiarnas Tahun 2021 ini tema yang diangkat adalah “Penyiaran Sebagai Pendorong Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi”. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIARNAS) 2021 dimulai dari kegiatan Napak Tilas Sejarah Penyiaran Indonesia, Konferensi Pers Peringatan HARSIARNAS, Seminar Nasional dan Hari Puncak Peringatan HARSIARNAS ke-88.

Napak Tilas Sejarah Penyiaran Indonesia dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2021 pukul 05.00 – 10.00 WIB bertempat di sekitaran Kota Solo Jawa Tengah (dengan rute bersepeda Balaikota Surakarta – Keraton Solo Hadiningrat – Puro Mangkunegaran – Kepatihan Mangkunegaran – Monumen Pers Nasional – RRI Surakarta – Makam Mangkunegaran VII di Astana Girilayu Karang Anyar). Dengan narasumber yaitu Bapak Hari Wiryawan dan kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bapak Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Walikota Surakarta Bapak Teguh Prakosa, Seluruh Komisioner KPI Pusat, Seluruh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Induk Berjaringan.



Foto Napak Tilas dengan bersepeda santai  
(dari kiri ke kanan: Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis dan diikuti dibelakangnya jajaran Komisioner KPI Pusat serta tamu undangan sepeda santai)

Melalui Napak Tilas Sejarah Penyiaran Indonesia ini didapat semangat menghadirkan penyiaran yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana *Solosche Radio Vereeniging* (SRV) hadir di tengah masyarakat Solo saat itu, untuk menginspirasi perjuangan merebut kemerdekaan. Dengan Napak Tilas Penyiaran Indonesia, mengenalkan pada generasi muda tentang sejarah lahirnya penyiaran di Indonesia yang merupakan alat dari perjuangan merebut kemerdekaan serta menyosialisasikan kepada masyarakat tentang kepeloporan Mangkunegara VII dalam melakukan adaptasi terhadap teknologi modern penyiaran sejak zaman penjajahan Belanda. Kegiatan ini diliput oleh seluruh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi Induk Berjaringan, televisi lokal dan radio di Solo, serta media cetak dan media online.



Diakhir kegiatan Napak Tilas Penyiaran Indonesia, peserta berfoto bersama. Dalam foto terdiri dari Anggota Komisi I DPR RI Adul Kharis, Kepala Stasiun RRI Surakarta Arlin, Para Anggota KPI Pusat, beberapa Direktur Lembaga Penyiaran serta beberapa staf KPI Pusat

Konferensi Pers Peringatan Hari Penyiaran Nasional 1 April 2021 dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 13.00 WIB bertempat di Monumen Pers Nasional Solo Jawa Tengah dengan narasumber yaitu Ketua KPI Pusat Bapak Agung Suprio, Ketua Pelaksana HARSIARNAS 2021 Bapak Hardly S.F Pariela dan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Ibu Niken Widiastuti. Kegiatan ini diliput oleh seluruh Lembaga Penyiaran Induk Berjaringan, Lembaga Penyiaran TV dan Radio lokal Solo, media cetak dan media online.



Foto Narasumber Konferensi Pers HARSIARNAS ke-88  
(kiri ke kanan: Ketua KPI Pusat Agung Suprio, PIC HARSIARNAS ke-88 Hardly Stefano, Staf Khusus Menteri KOMINFO RI Rosarita Niken Widyastuti)

Seminar Nasional dengan tema “Penyiaran Sebagai Pendorong Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi” dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021 pukul 08.00 WIB bertempat di Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta Jawa Tengah. Dengan narasumber Ketua DPR RI Ibu Dr. (H.C) Puan Maharani, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Komisi I DPR RI Ibu Meutya Viada Hafidz, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Ibu Niken Widiastuti, Ketua KPI Pusat Bapak Agung Suprio, Direktur Utama LPP TVRI Bapak Iman Brotoseno, Direktur Program dan Produksi Bapak Soleman Yusuf, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Bapak Syafril Nasution.



Foto Seminar Nasional HARSIARNAS

(kiri ke kanan: Moderator Maya Karim, Staf Khusus Menteri KOMINFO RI Rosita Niken Widyastuti, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz, Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Direktur Utama LPP TVRI Imam Brotoseno, Direktur Program LPP TVRI Suleman Yusuf, Ketua ATVSI Syafril Nasution)

Adapun Puncak Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88 dilaksanakan pada tanggal 1 April 2021 bertempat di Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta Jawa Tengah dengan Host Lembaga Penyiaran TRANS 7 yang disiarkan live mulai pukul 13.00 – 14.00 WIB diseluruh televisi nasional dan dapat diakses melalui Youtube *channel* Media Center KPI Pusat dan *Zoom Meeting*. KPI Pusat mengundang sebanyak 80 tamu undangan. Turut memberikan Sambutan melalui video tapping adalah Bapak Presiden Joko Widodo.



Foto Presiden RI Joko Widodo dalam memberikan sambutan HARSARNAS ke-88



Foto bersama Puncak HARSARNAS yang dikemas dalam Opera Van Java oleh TRANS7 (kiri ke kanan: Mahalini sebagai Dewi Kunthi, Aziz Gagap sebagai Bagong, Perwakilan Polresta Surakarta, Komisioner KPI Pusat Irsal Ambia, Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi, Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa, Komisioner KPI Pusat Mimah Susanti, Komisioner KPI Pusat Nuning Rodyah, Ketua KPI Pusat Agung Suprio sebagai Arjuna, Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano, Menteri KOMINFO RI Johnny G Plate sebagai Semar, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Petruk, Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Dirut TRANS7 Atiek Nur Wahyuni, Desy Genoveva sebagai Srikandi, Parto Patrio sebagai Dalang, Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis, Denny Cagur sebagai Gareng)

### **III.3. Harsiarnas Tahun 2022**

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat (KPID Jabar), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, serta lembaga penyiaran nasional dan lokal melaksanakan Hari Penyiaran Nasional ke-89 di Kota Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini mengambil tema: “Transformasi Penyiaran Era Digital”. KPI mengusung tema ini dikarenakan Pemerintah menetapkan Analog Switch Off (ASO) di Indonesia akan berakhir pada 2 November 2022. ASO merupakan keniscayaan bagi Lembaga Penyiaran (televisi) di tanah air. Penerapan ASO pasca pengesahan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya cluster penyiaran yang tertera di Pasal 60A. Adapun tahapannya berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 11 tahun 2021; tahap 1 yaitu 30 April 2022, tahap 2 yaitu 25 Agustus 2022, dan tahap 3 yaitu 2 Nopember 2022.

Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke 89 dirangkai dengan berbagai kegiatan, diantaranya: Bakti Sosial, Webinar, Konferensi Pers, Seminar Nasional, Safari Kebangsaan dan Puncak Peringatan Harsiarnas.

Bakti Sosial berupa vaksinasi dan talkshow. Kegiatan bakti sosial ini diselenggarakan dalam wujud vaksinasi massal yang ditargetkan untuk media dan masyarakat Provinsi Jawa Barat, khususnya kota Bandung sebagai tuan rumah Peringatan Harsiarnasi ke 89. Pelaksanaan vaksinasi massal ini merupakan kolaborasi KPI Pusat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Kegiatan digelar selama 2 hari mulai tanggal 26 hingga 27 Maret 2022.



Pembukaan Kegiatan Vaksinasi.Harsiarnas ke 89 dengan penekanan tombol sirine

Rangkaian Kegiatan Harsiarnas berikutnya adalah Webinar yang dilaksanakan oleh Kominfo RI dan KPI Pusat, tentang migrasi TV Digital dengan bertema: “Harsiarnas sebagai Momentum untuk mendorong Masyarakat Beralih ke Siaran TV Digital”. Acara ini dilaksanakan pada hari Senin, 28 Maret 2022, bertempat di Hotel Pullman Bandung. Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Agung Suprio (Ketua KPIP), Gilang Iskandar/Sekjen ATVSI, Hellen Katherina selaku Executive Director PT. Nielsen Audience Measurement, Dr. Sinta Dewi selaku Kepala Departemen Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual FH UNPAD dan Geryantika Kurnia sebagai Direktur Penyiaran, Dirjen PPI Kemenkominfo.



Suasana saat pemaparan materi oleh narasumber

Konferensi Pers dilakukan pada pukul 14.00 – 15.00 WIB di Kantor KPID Jawa Barat. Narasumber konferensi pers tersebut adalah: Agung Suprio (Ketua KPI Pusat), Mulyo Hadi Purnomo (Wakil Ketua KPI Pusat), Adiyana Slamet (Ketua KPID Jabar), Faiz Rahmat (Kabid IKP Diskominfo Provinsi Jawa Barat), dan Harsiwi Achmad (Direktur Programming SCM).



Narasumber Konferensi Pers secara bergantian memberikan penjelasan terkait pelaksanaan kegiatan Harsiarnas ke 89

Kegiatan Seminar Nasional Penyiaran dengan mengangkat tema “Bersiap Menyongsong ASO Menuju Digitalisasi Penyiaran Nasional” dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022 dan berlokasi di Auditorium Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran. Acara seminar dihadiri oleh para panelis yang meliputi Mulyo Hadi Purnomo selaku Wakil Ketua KPI Pusat, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, M.Si selaku Dekan FIKOM UNPAD, Supriyono, S.Kom, MM selaku Direktur Teknik TVRI, serta Ari Agung Prastowo, S.Sos yang bertugas sebagai moderator. Acara seminar dihadiri oleh 45 peserta secara offline.



Narasumber dipanel dalam diskusi (ki-ka : Supriyono, Dr. Dadang Rahmat Hidayat dan Mulyo Hadi Purnomo dan Moderator)

Seminar Nasional Penyiaran selanjutnya dilaksanakan di Universitas Pasundan dengan tema “Penyiaran Nasional dan Soft Power” dilaksanakan tanggal 30 Maret 2022 dan berlokasi di Aula FISIP UNPAS. Acara seminar dihadiri oleh para panelis yang terdiri dari Mimah Susanti (KPI Pusat), Dr. Budi Budiman (Komisi I DPRD Jawa Barat) serta moderator Almadina Rakhmaniar dari Unpas.



Foto bersama narasumber dan para tokoh yang menghadiri Webinar di Universitas Pasundan, Jawa Barat

Pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 08.00 – 12.00 WIB juga dilaksanakan Seminar di Auditorium Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Bandung dengan tema: “Digitalisasi Penyiaran untuk Menumbuhkan Industri Kreatif Nasional”. Adapun narasumbernya adalah: Irsal Ambia (Komisioner KPI Pusat), Eris Munandar (Ketua Umum ATSDI) dan Dian Gemiano (Chief Officer Marketing Kompas Group). Adapun seminar ini dimoderatori oleh Euis Evi Puspitasari.



. Foto bersama narasumber diskusi dan para tokoh yang hadir dalam seminar di UM Bandung

Salah satu rangkaian kegiatan Harsiarnas yaitu Safari Kebangsaan yang dilakukan pada hari Kamis, 31 Maret 2022. Safari Kebangsaan dilakukan sambil berkeliling dengan mengendarai kendaraan khas Bandung yang disebut Bandros “Bandung Tour On The Bus”. Gambaran kegiatan Safari Kebangsaan adalah menginformasikan tempat- tempat bersejarah yang ada di Bandung yang tentu berkaitan erat dengan sejarah penyiaran di Indonesia, khususnya penyiaran di Bandung baik radio maupun televisi. Kegiatan Safari Kebangsaan diikuti oleh KPI Pusat dan KPID Seluruh Indonesia.



Para peserta yang terdiri dari KPI/D berfoto bersama di Gedung Merdeka

Pada hari Kamis 31 Maret 2022, pukul 19.00 - 22.00 WIB dilaksanakan Gala Dinner yang berlokasi di Aula Barat Gedung Sate Bandung. Selain dijamu makan malam, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil ini melalui penyelenggara mempersembahkan tari-tarian selamat datang khas Jawa Barat. Malam Ramah tamah ini diikuti oleh Para Komisioner KPI Pusat dan KPI Daerah serta para tamu undangan lainnya.



Ketua KPI Agung Suprio saat menyampaikan sambutan dalam Malam Ramah Tamah di Gedung Sate Bandung



Presiden Joko Widodo saat menyampaikan sambutan dalam puncak peringatan Harsarnas Tahun 2022



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat menyampaikan sambutan pada Harsirnas Tahun 2022

Adapun Puncak Peringatan Harsiarnas ke -89 dilaksanakan di The House Convention Hall Paskal Kota Bandung pada tanggal 1 April 2022 yang disiarkan secara langsung Indosiar dan Mentari TV. Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan melalui Video dan hadir langsung pada Puncak peringatan Harsiarnas ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latif, dan Staf Khusus Menteri Rosarita Niken Widiastuti, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Agung Suprio, Ketua KPID Jawa Barat Adiyana Slamet, KPID Se-Indonesia, serta pimpinan dan perwakilan LPP, LPS, lembaga penyiaran lokal dan lembaga penyiaran komunitas se-Indonesia.



(Salah satu momen dalam kegiatan puncak peringatan Harsiarnas Tahun 2022)

#### **IV. GERAKAN LITERASI SEJUTA PEMIRSA Tahun 2019 – 2022**

Media literasi adalah aktivitas yang menekankan aspek edukasi di kalangan masyarakat agar mereka dapat mengetahui bagaimana mengakses, memilih program yang bermanfaat dan sesuai kebutuhan yang ada. Permasalahan yang ada adalah seiring dengan derasnya arus informasi media, masyarakat pun dibuat kebingungan dan tidak mampu memilah, menyeleksi, serta memanfaatkan informasi yang sudah mereka peroleh. Masyarakat kita juga bersifat heterogen, yang meliputi etnis, agama, infrastruktur, pendidikan, pengetahuan, latar belakang profesi, geografis dan berbagai faktor lainnya. Varian kesenjangan dan perbedaan berbagai faktor tersebut berdampak pada kemampuan konsumen media penyiaran dalam mengakses informasi.

Keanekaragaman indikator tersebut dapat mengakibatkan perbedaan cara pandang masyarakat dalam memahami setiap konten media penyiaran. Gerakan literasi Sejuta pemirsa, merupakan salah satu konsep untuk membangun pengetahuan pemirsa terhadap program siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran dan tekanan isu-isu media. Disadari atau tidak, literasi media sudah seharusnya menjadi hal yang sangat dipentingkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Di tengah derasnya arus informasi dan tayangan-tayangan program siaran yang semakin beragam, masyarakat dituntut untuk dapat memfilter atau menyaring tayangan yang layak ditonton dan yang tidak layak ditonton. Tidak hanya itu, banyak tayangan

dikhawatirkan memberikan implikasi yang negatif terhadap anggota masyarakat, khususnya anak-anak.

Apa itu Gerakan Literasi sejuta Pemirsa ( GLSP ) merupakan salah satu program yang di buat di tahun 2020 yang pertama kali di launching di surabaya dengan di Buka oleh Ketua Komisi I DPRI Ibu Meutya Fiada Hafid. Tujuan dari adanya gerakan literasi sejuta pemirsa ini mengajak pemirsa untuk lebih kritis menanggapi pesan media melalui televisi dan radio. Apa yang disampaikan oleh media itu tidaklah bebas nilai, karenanya masyarakat harus punya keterampilan dalam mengonsumsi media, sehingga tidak mudah terpengaruhi jika muatan media yang hadir tidak sesuai dengan norma yang ada di tengah masyarakat, Gerakan GLSP ini digagas KPI sebagai pelaksanaan undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengamanatkan KPI bersama masyarakat untuk melakukan literasi media. Literasi media akan dilaksanakan dalam berbagai format acara, seperti seminar, talkshow di televisi dan radio ataupun sosialisasi literasi media pada berbagai even publik. Sebelumnya literasi memang sudah menjadi kegiatan rutin KPI melalui seminar di berbagai daerah yang mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat, baik dari kalangan perguruan tinggi, organisasi kepemudaan ataupun organisasi masyarakat lainnya. Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa ini ditujukan bagi masyarakat yang akan menjadi simpul gerakan edukasi kepada masyarakat lainnya. Untuk bersikap kritis terhadap program siaran televisi dan radio secara masif dan berkelanjutan. Maka penting bagi KPI Pusat untuk menyelenggarakan kegiatan Gerakan literasi sejuta pemirsa ini. Selain itu juga Gerakan literasi Sejuta Pemirsa ( GLSP ) diharapkan memberi intervensi pada masyarakat tentang bagaimana parameter memilih tayangan yang berkualitas dari segi muatan edukatif, informatif, dan sarat nilai moral agama. Jangan sampai masyarakat tersesat dalam belantara konten yang punya banyak ragam tersebut.

Sasaran kepesertaan pada kegiatan GLSP ini terdiri dari berbagai unsur diantaranya Pemerhati media, Organisasi masyarakat atau LSM , Organisasi kepemudaan, akademisi, tenaga pendidik/guru, mahasiswa dan lainnya. Dari unsur-unsur kepesertaan tersebut diharapkan mereka mampu menjadi kelompok yang kritis terhadap media penyiaran, dan bisa terbentuk agen - agen literasi terkusus di bidang penyiaran.

#### IV. 1. Kegiatan Literasi Media Tahun 2019

No.	Tempat, Tanggal dan Tema Diskusi	Narasumber Diskusi	Peserta Diskusi	Jumlah
1	Ternate, 5 September 2019 “Cerdas Bermedia, Menuju Penyiaran Berkualitas”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irsal Ambia (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>2. Hardly Stefano F.P (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>3. Nuraela Syarif, S.Sos.MM (Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku)</li> </ol>	Peserta terdiri dari berbagai unsur diantaranya akademisi/pengajar, tokoh masyarakat, LSM, Kelompok Masyarakat Peduli Penyiaran di daerah, Lembaga Penyiaran Lokal dan Jaringan di daerah serta penggiat Literasi Media	200 peserta
2	Palangkaraya, 11 September 2019 “Cerdas Bermedia, Menuju Penyiaran Berkualitas”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasution Hamka (Anggota DPR RI)</li> <li>2. Hardly Stefano F.P (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>3. Andrie Elia (Rektor Universitas palangkaraya)</li> </ol>	Peserta yang hadir dalam kegiatan Literasi Media adalah terdiri dari berbagai unsur diantaranya akademisi/pengajar, tokoh masyarakat, LSM, Kelompok Masyarakat Peduli Penyiaran di daerah, Lembaga Penyiaran Lokal dan Jaringan di daerah serta penggiat Literasi Media	200 peserta
3	Kendari, 19 September 2019 “Cerdas Bermedia, Menuju Penyiaran Berkualitas”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jerry Sambuaga (Komisi I DPR RI)</li> <li>2. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>3. Prof.Dr. Nasruddin Suyut (Rektor Universitas NU Sultra)</li> </ol>	Peserta yang hadir dalam kegiatan Literasi Media adalah terdiri dari berbagai unsur diantaranya akademisi/pengajar, tokoh masyarakat, LSM, Kelompok Masyarakat Peduli Penyiaran di daerah, Lembaga Penyiaran Lokal dan Jaringan di daerah serta penggiat Literasi Media	200 peserta
4	Labuan Bajo, 14 November 2019 “Cerdas Bermedia, Menuju Penyiaran Berkualitas”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>2. Andreas Pareira (Komisi I DPR RI)</li> </ol>	Peserta dari berbagai unsur diantaranya akademisi/pengajar, Pelajar SMA, Dharma Wanita dan PKK	100 Peserta

		3. Maria Geong ( Wakil Bupati Manggarai Barat)		
5	Bandar Lampung, 28 November 2019 “Cerdas Bermedia, Menuju Penyiaran Berkualitas”	1. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat) 2. Dr. Achmad Farich,dr., MM ( Rektor Universitas Malahayati) 3. Hestin Oktiani S.Sos.,M.Si (Akademisi UNILA)	peserta yang hadir dalam kegiatan Literasi Media adalah terdiri dari berbagai unsur diantaranya akademisi/pengajar, tokoh masyarakat, LSM, Kelompok Masyarakat Peduli Penyiaran di daerah, Lembaga Penyiaran Lokal dan Jaringan di daerah serta penggiat Literasi Media	200 Peserta



Foto kegiatan GLSP di Ternate, 5 September 2019, nampak dalam Foto Komisioner KPI Nuning Rodiyah, Hardly Stefano, Irsal Ambia, Sekretaris KPI Pusat Umri dan Para Narasumber serta Peserta GLSP

## IV.2. Kegiatan Literasi Media Tahun 2020

No.	Tempat, Tanggal dan Tema Diskusi	Narasumber Diskusi	Peserta Diskusi	Jumlah
1	Surabaya, 6 Februari 2020 “Cerdas Bermedia, Menuju Penyiaran Berkualitas”	Keynote Speaker Meutya V.Hafid ( Ketua Komisi I DPR RI)  1. Deddy Mizwar ( Talent atau pemain Para Pencari Tuhan) 2. Gilang Iskandar (Sekjend ATVSI) 3. Hardly Stefano F.P (Komisioner KPI Pusat)	Mahasiswa UNESA, LSM Bapak Ibu Guru Di Jawa Timur	380 Peserta
2	Yogyakarta, 5 maret 2020 “Cerdas Bermedia, Menuju Penyiaran Berkualitas”	1. Staf ahli Gubernur Yogyakarta (Sumadi) 2. Irsal Ambia (Komisioner KPI Pusat) 3. Syafril Nasution ( Ketua ATVSI)	Mahasiswa UIN Sunan kalijaga Yogyakarta	400 peserta
3	Solo, 18 Juni 2020 “ Dinamika Penyiaran di Era Kenormalan Baru”	1. Dr. Abdul Kharis Almasyhari ( Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI) 2. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat) 3. Irfan Hakim ( Talent Program TV)	Mahasiswa, masyarakat Solo dan Sekitarnya.	300 peserta
4	Papua, 8 Juli 2020 “ Menjaga Integrasi Nasional Melalui Penyiaran”	1. Yan Permenas Mandes, M.SI (anggota Komisi I DPR RI) 2. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat) 3. Yuli Fonataba ( Presenter Liputan 6 SCTV)	Peserta terbagi menjadi dua mahasiswa khusus dari Papua dan masyarakat Papua. Beserta Guru/Dosen, PNS, Dan masyarakat secara umum	344 Peserta
5	Umum, 10 Juli 2020 “Urgensi RUU Penyiaran”	1. Agung Suprio ( Ketua KPI Pusat) 2. Irsal Ambia ( Komisioner KPI Pusat) 3. Taufik Imansyah (talent Trans 7) 4. Yusron Sauadi (KPID NTB)	Mahasiswa, Guru/Dosen, PNS, Dan masyarakat secara umum	200 Peserta

6	Jakarta, 15 Juli 2020 “Penyiaran Jurnalistik di Era Penyiaran”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Charles Honoris (Anggota Komisi I DPR RI)</li> <li>2. Hardly Stefano F.P (Komisioner Kpi Pusat)</li> <li>3. Brighita Manohara (Produser dan Presenter TVONE)</li> </ol>	Mahasiswa, Guru/Dosen, PNS, Dan masyarakat secara umum di daerah Jakarta	451 Peserta
7	Lampung, 22 Juli 2020 “Industri Pertelevision VS Media Online”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mukhlis Bahri (Anggota Komisi I DPR RI)</li> <li>2. Mulyo Hadi Purnomo (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>3. Yuliandre Darwis (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>4. Riko Anggara (Jurnalis Kompas TV)</li> </ol>	Mahasiswa, Guru/Dosen, PNS, Dan masyarakat secara umum di daerah Lampung	435 Peserta
8	Aceh, 29 Juli 2020 “Dakwah Milenial di Televisi”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. H. M. Chalil Nafis, MA sebagai Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat.</li> <li>2. Irsal Ambia (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>3. Muzammil Hasballah (Qori’ Muda Inspiratif/Penerima ASR 2020 Kategori Qori’ Muda Inspiratif)</li> <li>4. Syakir Daulay (Pemain PPT-13 SCTV/Aktor Muda Inspiratif/Penerima ASR 2020)</li> </ol>	Mahasiswa, Guru/Dosen, PNS, Dan masyarakat secara umum di daerah Aceh	431 Peserta
9	Malang, 5 Agustus 2020 “Menangkal Radikalisme Dan Terorisme Melalui Dunia Penyiaran”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kresna Dewanata P (Anggota Komisi I DPR RI)</li> <li>2. Aswar Hasan (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>3. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat)</li> </ol>	Masyarakat khusus Malang, Guru/Dosen, PNS, Dan masyarakat secara umum	489 Peserta
10	Semarang, 12 Agustus 2020 “Menumbuhkan Konten Kreatif Dalam Penyiaran Indonesia”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taufik.R. Abdullah (Anggota Komisi I DPR RI)</li> <li>2. Yuliandre Darwis (Komisioner KPI Pusat)</li> </ol>	Pemerhati media, perwakilan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan,	461 Peserta

		3. Marcella Zalianty ( Talenr TV)	akademisi, tenaga pendidik/guru, mahasiswa dan lainnya.	
11	Banjarmasin, 30 September 2020 “Penyiaran Ramah Anak”	1. Hj. Syaifullah Tamliha (Anggota Komisi I DPR RI) 2. Irsal Ambia (Komisioner KPI Pusat) 3. Mimah Susanti (Komisioner KPI Pusat) 4. W.Gustav Wisnu Brata	Pemerhati media, perwakilan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan, akademisi, tenaga pendidik/guru, mahasiswa dan lainnya.	400 Peserta
12	NTB, 7 Oktober 2020 “Masih Adakah Sensor Penyiaran”	1. Muhammad Reza (Komisioner KPI Pusat) 2. Fetrimen (ketua Sub Komisi Pemantauan Lembaga sensor Film) 3. Anita Wulandari (VP PR Trans7) 4. Hardly Stefano F.P.(Komisioner KPI Pusat)	Pemerhati media, perwakilan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan, akademisi, tenaga pendidik/guru, mahasiswa dan lainnya.	403 Peserta
13	Jawa Barat, 14 Oktober 2020 “Perempuan Dan Media”	Keynote Speaker I Gusti Ayu Bintang Darmawati ( Menteri KPPPA RI)  Narasumber 1. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat) 2. Lena Maryana ( Koordinator Maju Perempuan Indonesia) 3. Harsiwi Achmad ( Direktur Program dan Produksi SCTV Indosiar)	Pemerhati media, perwakilan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan, akademisi, tenaga pendidik/guru, mahasiswa dan lainnya.	358 Peserta
14	Sumatera Utara, 21 Oktober 2020 “Berkreasi Melalui Media Penyiaran Di Era Digital”	1. Meutya V. Hafid (Katua Komisi I DPR RI) 2. Hardly Stefano P (Komisioner KPI Pusat) 3. Dini Putri ( Direktur Program dan Akuisisi RCTI) 4. Lyodra Margaretha Ginting (First Indonesian Idol Season	Pemerhati media, perwakilan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan, akademisi, tenaga pendidik/guru, mahasiswa dan lainnya.	480 Peserta

Pada tahun 2021 Gerakan literasi sejuta pemirsa pertama kali di adakan di kabupaten Belitung. Dalam kesempatan ini juga diluncurkan Maskot Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa berupa Burung Elang yang mengacungkan Salam Literasi. Burung Elang menggambarkan keberanian dan semangat kemandirian untuk menyatakan yang benar. Dengan maskot ini, KPI mengajak masyarakat untuk berani dan mandiri memilah dan memilih program siaran yang berkualitas dan berani melaporkan yang buruk, serta menyebarkan yang baik.



*Maskot Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa*



Foto kegiatan GLSP di Batam, 15 Maret 2021, nampak dalam Foto Komisioner KPI Nuning Rodiyah, Hardly Stefano, Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan, S.H dan Rektor STIKOM Muhammadiyah Batam Moh. Iqbal, ST.,M.Kom

### IV.3. Kegiatan Literasi Media Tahun 2021

No.	Tempat, Tanggal dan Tema Diskusi	Narasumber Diskusi	Peserta Diskusi	Jumlah
1	Belitung, 18 Februari 2021 “Cerdas Bermedia Menuju Siaran Berkualitas”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulyo Hadi Purnomo ( Sambuat Wakil Ketua KPI Pusat)</li> <li>2. Nikolaus Lumanau</li> <li>3. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>4. Tellie Gozalie ( owner Leebong Island Resort)</li> </ol>	Forum Anak Belitung atau anak SMA	46 Peserta Offline 45.306 online
2	Batam, 15 Maret 2021 “Cerdas Bermedia di Era Penyiaran Digital”	<p>Keynotes Speaker Mayjen TNI.Mar. (purn) Sturman Panjaitan. M.H ( Anggota Komisi I DPR RI)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hardly S.F Pariela (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>2. Moh. Iqbal S.T , M.Kom ( Sambutan Rektor STIKOM Muhammadiyah Batam)</li> <li>3. Henky Mohari ( KPID Kepri)</li> </ol>	Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Batam	75 Peserta Offline 488 peserta online
3	Solo, 29 Maret 2021 “Cerdas Bermedia di Era Penyiaran Digital”	<p>Keynote Speaker H. Ganjar Pranowo ( Gubernur Jawa Tengah) Sambutan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agung Suprio (ketua KPI Pusat)</li> <li>2. Gibran Rakabuming Raka ( Walikota Solo)</li> </ol> <p>Narasumber</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abdul Kharis Almansyahari ( Wakil Ketua Komisi I DPR RI )</li> <li>2. Yuliandre Darwis (Komisioner KPI Pusat)</li> <li>3. Uut Endah Hari</li> </ol>	Peserta dari masyarakat umum dan lembaga penyiaran lokal	51 Peserta offline 2.594 Peserta Online

		Utami ( Direktur Program MNC TV) 4. Baiq Gita Febiliasni (pemenag KDI 2020)		
4	Batu, 7 September 2021 “Peran Media Penyiaran dalam Perlindungan Perempuan dan Anak”	Sambutan ; Dewanti Rumpoko ( Walikota Batu di wakili) Narasumber ; 1. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat) 2. Eko Novi Ariyanti ( Asisten Deputi Kemen PPPA) 3. Dini Latifatun Nafiati ( Psikolog Klinis RSUD Dr. Saiful Anwar Malang)	Peserta yang terlibat adalah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan dan juga ibu-ibu PKK Kota, Kabupaten Malang dan kota Batu	43 Peserta Offline 510 peserta online
5	Makassar, 20 September 2021 “Televisi Ramah Anak”	Keynote Speaker I Gusti Ayu Bintang Darmawati Menteri PPPA)  Narasumber ; 1. Hardly Stefano F.Pariela ( Komisioner KPI Pusat) 2. Prof.Dr Dwia Aries tina (Rektor Universitas Hasanudin makasar) 3. Andi Chairill ( Direktur Program Trans7) 4. Dr.Mulladi (Penggita Literasi Makasar)	Mahasiswa Universitas Hasanudin Makasar	64 Peserta offline 549 peserta online
6	Sorong, 17 November 2021 “Cerdas Bermedia Menuju Siaran Berkualitas”	Sambutan ; 1. Irjen Pol. Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si ( Kapolda Papua Barat ) 2. Agung Suprio (Ketua KPI Pusat)	Peserta Ibu-ibu Bhayangkari	100 Peserta Offline

		Narasumber; 1. Hardly Stefano F.P (Komisioner KPI Pusat) 2. Martha Sihombing (Ketua Bhayangkari daerah Papua Barat)	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



Foto kegiatan GLSP di Sorong Papua Barat, 14 September 2021, nampak dalam Foto Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Komisioner KPI Nuning Rodiyah, Hardly Stefano, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Dr. Tornagogo Sihombing dan Para Narasumber serta Peserta GLSP Bhayangkari daerah Papua Barat

Semenjak pandemi Covid-19 kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa ini dilaksanakan secara Hybrid ( Luring dan Daring) karena masih adanya pembatasan tatap muka secara langsung. Sehingga kegiatan GLSP pada tahun 2021 yang dilakukan secara luring berkisar hanya 50 hingga 100 peserta. Dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Total kepesertaan pada tahun 2021 di masa pandemi secara Hybrid untuk peserta offline totalnya 379 peserta sedangkan untuk peserta online yang dilihat dari media zoom dan sosial media KPI Pusat totalnya 48.937 peserta. Kegiatan selama GLSP berlangsung disiarkan pada sosial media KPI Pusat. Seperti Youtube dan Instagram KPI Pusat.



Foto kegiatan GLSP di Tarakan, 3 Februari 2022, nampak dalam Foto para Narasumber yang terdiri dari Komisioner KPI Nuning Rodiyah, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara Fenry Alpius dan Wakil Dekan Fakultas Hukum UBT Nurasikin.

#### IV.4. Kegiatan Literasi Media Tahun 2022

No.	Tempat, Tanggal dan Tema Diskusi	Narasumber Diskusi	Peserta Diskusi	Jumlah
1	Tarakan, 3 Februari 2022 “Cerdas Bermedia di Era Penyiaran Digital”	Keynote Speaker ; Zaenal Arifin Gubernur Kalimantan Utara Sambutan; Adri Patton ( Rektor Universitas Borneo Tarakan) Narasumber ; 1. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat) 2. Fenry Alpius (Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara) 3. Nurasikin (Wakil Dekan Fakultas Hukum UBT)	Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan	100 Peserta
2	Sumba, 22 Februari 2022 “Cerdas Bermedia di Era Penyiaran Digital”	Sambutan ; Drs. Khristofel Praing, M.Si ( Bupati Sumba Timur) Narasumber; 1. Nuning Rodiyah	SMA Muhammadiyah Waingapu	100 Peserta

		<p>(Komisioner KPNI Pusat)</p> <p>2. David Melo Wadu S.T ( Wakil Bupati Sumba Timur)</p> <p>3. Rara LIDA Indosiar</p>		
3	NTB, 28 Maret 2022 “Cerdas Bermedia di Era Penyiaran Digital”	<p>Keynote Speaker H. Bambang Kristiono, S.E ( Wakil Ketua Komisi I DPR RI) Narasumber</p> <p>1. Usman Kamsong ( Dirjen IKP Kominfo)</p> <p>2. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat)</p> <p>3. Lathifa M. Anshori ( Tenaga Ahli Kominfo)</p> <p>4. Ajeng Roslinda Motimori ( Ketua KPID NTB)</p> <p>5. Bambang ( Juara 5 pentas dangdut TV 9 NTB)</p>	Mahasiswa Mahasiswi se-Mataram	100 Peserta
4	Grobogan, 20 Mei 2022 “Cerdas Bermedia di Era Penyiaran Digital”	<p>1. Hardly S.F. Pariela (Komisioner KPI Pusat)</p> <p>2. Casytha Arriwi Kathmandu (Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah)</p> <p>3. David Tjendriawan ( Operasional Direktur TAMG)</p>	Siswa Siswi dan Guru SMA N I Purwodadi	100 Peserta
5	Manado, 20 Juni 2022 “Cerdas Bermedia di Era Penyiaran Digital”	<p>1. Hardly Stefano F Pariela (Komisioner KPI Pusat)</p> <p>2. Susan Margaret Palilingan ( Kepala Biro Kompas TV Manado)</p> <p>3. Dr Preysi Siby (Kepala Pokja I PKK Prov Sulut)</p>	Siswa Siswi SMA dan Organisasi Kepemudaan	100 Peserta
6	Bukittinggi Sumatera Barat, 04 Agustus 2022 “Cerdas Bermedia di Era Penyiaran Digital”	<p>1. Mimah Susanti (Komisioner KPI Pusat)</p> <p>2. Dr.Emerald Chatra,</p>	Masyarakat Umum Bukit Tinggi	100 Peserta

		M.I.Kom ( Dosen Komunikasi Universitas Andalas) 3. Dr. Iqbal ( Juara I LIDA Indosiar 2021)		
7	Bogor, 2 November 2022 “Sosialisasi dan Literasi Pengawasan Isi Siaran”	1. Nuning Rodiyah ( Komisioner KPI Pusat ) 2. Dewi Anggrayni, P.hD ( Ketua Prigram Studi KPI UIKA Bogor) 3. Maulana Isnarto, S.Si ( Jurnalistik Produser RRI Bogor )	Siswa Siswi SMA se-Kabupaten Bogor	100 Peserta
8	Jakarta, 10 November 2022 “Sosialisasi dan Literasi Pengawasan Isi Siaran”	Keynote Speaker ; Dave Akbarshah Fikarno (Anggota Komisi I DPR RI) Narasumber : 1.Rizky Wahyuni ( Komisioner KPID DKI Jakarta) 2.Hamdani Masil ( Akademisi)	Mahasiswa –Mahasiswa DKI Jakarta	100 Peserta
9	Ciputat, Tangerang Selatan, 16 November 2022 “Sosialisasi dan Literasi Pengawasan Isi Siaran”	1.Hardly Stefano F. Pariela ( Komisioner KPI Pusat ) 2.Dr. Gun Gun Heryanto, M.Si (Akademisi Komunikasi/ Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 3.Karyono Wibowo (Pengamat Politik/ Dir. Eksekutif Indonesia Public Institute)	Mahasiswa – Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	100 Peserta
10	Bandung, 19 November 2022 “Sosialisasi dan Literasi Pengawasan Isi Siaran”	1.Junico BP Siahaan (Anggota Komisi I DPR RI) 2.Mimah Susanti ( Komisioner KPI Pusat ) 3.Dr. Adiyana Slamet, S.IP., M.Si (Ketua	Siswa – Siswi SMA Kristen Yahya Bandung	100 Peserta

		KPID Jawa Barat 4. Alif Rivelino (Stand-up Komedi Kompas TV)		
11	Sulawesi Tengah, 23 November 2022 “Silaturahmi dan sosialisasi Pengawasan isi Siaran”	1. Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat) 2. Drs. Indra A. Yosvidar, M.AP (Ketua KPID Sulteng)	Lembaga Penyiaran se-Sulawesi Tengah	50 Peserta



Foto kegiatan Sosialisasi dan Literasi di Jakarta, 10 November 2022, nampak dalam Foto para Narasumber yang terdiri dari Komisioner KPI Nuning Rodiyah, Dave Akbarshah Fikarno (Anggota Komisi I DPR RI), Rizky Wahyuni (Komisioner KPID DKI Jakarta), Hamdani Masil (Akademisi)

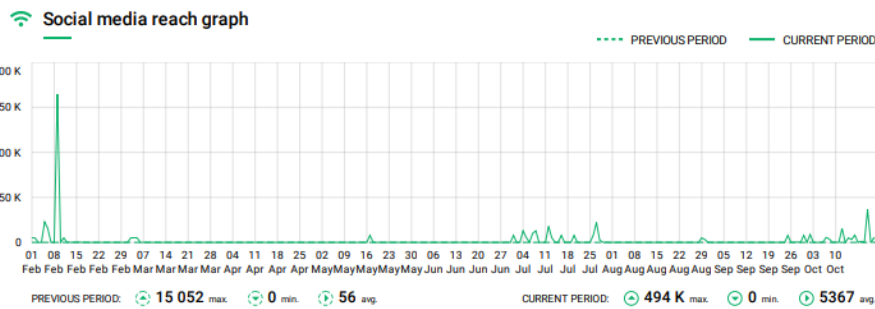
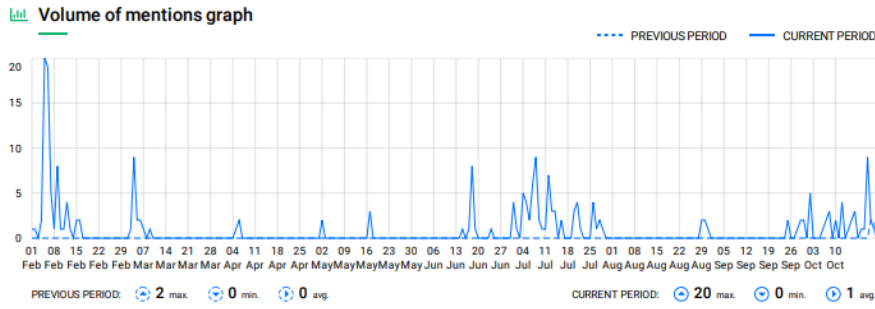
Literasi media ini sejatinya memang sudah menjadi agenda rutin KPI Pusat sehingga setiap pergantian periode tinggal melanjutkan aja, namun ada pengembangan- pengembangan kegiatan disetiap tahun atau periodenya. Seperti Literasi media pada tahun 2019 melanjutkan program kegiatan dari periode sebelumnya dan dilanjutkan pada bulan september tersisa 6 kota untuk di kunjungi. Dari total peserta pada 2019 di periode kedua sejumlah 900 peserta dengan pelaksanaan kegiatan secara offline.

Untuk kepesertaan GLSP di tahun 2020 mencapai 4.769 orang yang merupakan gabungan dari peserta tatap muka pada GLSP di Surabaya dan Yogyakarta, serta GLSP yang berlangsung secara virtual. Dari 14 kegiatan GLSP di tahun 2020, jangkauan media sosial yang didapat mencapai 1.429.123 orang. Sedangkan jangkauan non sosial media mencapai 1.395.763. Di sosial media, GLSP mendapat mention sebanyak 219 dengan sentimen positif mencapai 96,6% dan sentimen negatif hanya 3,4%. Dari data KPI menunjukkan jangkauan paling tinggi dicapai oleh GLSP yang digelar secara offline di Surabaya yang merupakan

peresmian gerakan untuk pertama kali. Jangkauan tinggi selanjutnya adalah GLSP di Yogyakarta yang juga diselenggarakan secara tatap muka dengan menghadirkan Host Geopark dari Inews.

Adapun jangkauan tertinggi untuk GLSP yang berlangsung secara virtual adalah GLSP yang ditujukan bagi masyarakat Sumatera Utara. Ada Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz dan juga Lyodra Margaretha Ginting yang ikut menjadi narasumber literasi. Jangkauan tinggi selanjutnya GLSP untuk Papua yang menghadirkan Yuliana Fonataba dan anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas. Diikuti oleh GLSP untuk masyarakat Solo yang menghadirkan pembawa acara Irfan Hakim dan narasumber Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Secara rinci kegiatan GLSP ini menghiiasi percakapan di media sosial dengan influencer utama dari akun resmi media sosial KPI. Selain itu, beberapa lembaga yang ikut bekerja sama dengan KPI dalam kegiatan GLSP ini ikut serta berkontribusi hingga GLSP dapat memapar lebih dari satu juta orang baik melalui media sosial ataupun pemberitaan online.

Diantaranya akun resmi Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan akun dari indoict. Daya jangkau GLSP di tahun 2020 juga diperkuat dengan akun Kompas TV dan Kumparan yang ikut menyebarluaskan kegiatan ini. Dari data daya jangkau kegiatan GLSP baik secara offline dan online, menunjukkan pentingnya kerja sama KPI dengan berbagai lembaga terkait, termasuk media. Sebagai sebuah lembaga negara, KPI juga memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk menyasar seluruh populasi masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas berliterasi media. Kolaborasi dengan mediaakhirnya menjadi sebuah keharusan. Salah satunya dengan memberikan informasi kegiatan GLSP dengan tepat waktu. Media memiliki kemampuan menduplikasi dan mengamplifikasi daya jangkau kegiatan GLSP ini ke lebih banyak masyarakat. Kerja sama dengan lembaga penyiaran juga harus dikelola dengan baik. Terutama dalam menghadirkan tokoh-tokoh yang sudah dikenal di layar kaca dan memiliki keteladanan yang baik untuk publik. Harapannya, isu literasi media dapat memengaruhi lebih banyak orang dan menginsiprasi publik secara mandiri meningkatkan kapasitas literasi.



# Grafik Persebaran GLSP

219 MENTIONS	147 SOCIAL MEDIA MENTIONS	72 NON-SOCIAL MENTIONS
1 429 123 ESTIMATED SOCIAL MEDIA REACH	1 395 763 NON SOCIAL REACH	7 069 SOCIAL MEDIA INTERACTIONS
101 SOCIAL MEDIA SHARES	5 814 SOCIAL MEDIA LIKES	11 NUMBER OF VIDEOS
115 (96.6%) POSITIVE MENTIONS	4 (3.4%) NEGATIVE MENTIONS	0 MENTIONS FROM BLOGS

# Persebaran Pemberitaan GLSP

Adapun jangkauan untuk non media sosial, yakni dari pemberitaan online yang kemudian menyebar lebih jauh, paparannya mencapai 1.731.736 orang. Hal ini menunjukkan target KPI melakukan literasi hingga sejuta orang, sudah tercapai. Data rinci terkait pemberitaan media online dan percakapan media sosial menunjukkan beberapa akun media sosial yang memiliki pengaruh besar atas jumlah jangkauan GLSP secara online.

## V. Riset Indeks Kualitas Program Siaran TV

Dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat mengenai kualitas program siaran televisi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah bekerjasama dengan 12 Perguruan Tinggi melaksanakan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan apa saja program siaran televisi yang dianggap berkualitas.

Sejak tahun 2015 sampai tahun 2022, KPI terus menerus melakukan evaluasi dan koordinasi bersama para ahli serta perwakilan elemen masyarakat pemerhati dunia penyiaran melalui kegiatan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi supaya penilaian terhadap kualitas program siaran televisi semakin membaik. Kegiatan ini menggunakan jenis penelitian *evaluation research* (penelitian evaluasi) yakni mengolah data yang dihasilkan dari analisa informan ahli dari perwakilan berbagai perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

Data riset KPI ini juga digunakan sebagai bahan dalam mengevaluasi seluruh program siaran televisi yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran berjangkauan tanah air. Besar harapan, hasil riset ini dapat dijadikan sebagai acuan dari setiap pemangku kepentingan penyiaran tanah air, baik itu oleh lembaga penyiaran, pembuat program siaran, pengiklan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai sebuah penelitian yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan penyiaran, maka hasil riset ini patut juga untuk disosialisasikan melalui kegiatan diseminasi. Adapun diseminasi itu sendiri merupakan suatu kegiatan dalam riset indeks yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya dapat memanfaatkan informasi tersebut.

Sebagaimana faktor utama dari kegiatan penelitian adalah kebermanfaatan dari hasil – hasil penelitian yang mendukung tumbuh berkembangnya suatu keilmuan tertentu atau dalam hal ini tentunya yang dimaksud ialah penyiaran berkualitas. Dengan demikian, ada beberapa tahapan dari pelaksanaan kegiatan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi, yaitu: Workshop Area, FGD (*Focus Group Discussion*), Ekspose Riset, Diseminasi Hasil Indeks serta pelaksanaan Konferensi Penyiaran sebagai bentuk komitmen dan apresiasi terhadap dinamika penyiaran yang sedang berkembang di Indonesia.

## V.1. Workshop Area Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Pelaksanaan kegiatan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi diawali dengan kegiatan Workshop Area yang dilaksanakan di 12 area riset kecuali pada tahun 2022, sebagai berikut:

No.	AREA RISET	2019	2020	2021	2022
1	Ambon	12 April 2019	10 Juni 2020	21 April 2021	18 Maret 2022
2	Bandung	15 April 2019	11 Juni 2020	13 April 2021	18 Maret 2022
3	Banjarmasin	18 April 2019	09 Juni 2020	17 April 2021	18 Maret 2022
4	Denpasar	13 April 2019	08 Juni 2020	21 April 2021	18 Maret 2022
5	Jakarta	15 April 2019	10 Juni 2020	13 April 2021	18 Maret 2022
6	Makassar	13 April 2019	05 Juni 2020	21 April 2021	18 Maret 2022
7	Medan	12 April 2019	05 Juni 2020	13 April 2021	18 Maret 2022
8	Padang	12 April 2019	04 Juni 2020	17 April 2021	18 Maret 2022
9	Pontianak	12 April 2019	08 Juni 2020	16 April 2021	18 Maret 2022
10	Semarang	15 April 2019	11 Juni 2020	17 April 2021	18 Maret 2022
11	Surabaya	13 April 2019	04 Juni 2020	21 April 2021	18 Maret 2022
12	Yogyakarta	09 April 2019	09 Juni 2020	13 April 2021	18 Maret 2022

Adapun kegiatan Workshop Area ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada tim pelaksana daerah dalam persiapan pelaksanaan kegiatan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi serta mengetahui lebih dalam mengenai metodologi penelitian yang digunakan dan melakukan penyamaan persepsi terkait indikator pernyataan sesuai dengan P3 dan SPS.

Untuk pelaksanaan tahun 2022 memang ada perubahan teknis. Kegiatan Workshop Area tidak dilakukan ke lokasi area riset melainkan dilaksanakan secara hybrid dengan mengundang sebanyak 96 informan ahli sebagai peserta mengikuti kegiatan secara daring (*online*). Hal ini dilaksanakan untuk memudahkan sosialisasi pelaksanaan FGD yang juga akan dilaksanakan secara serentak dari beberapa kategori program namun lebih spesifik antar informan ahli.

## V.2. FGD (*Focus Group Discussion*) Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi menggunakan metode *peer review* yang menggunakan informan ahli (*expert*) sebagai responden. Dengan kata lain, data dikumpulkan dari pendapat ahli yang mengetahui suatu isu atau persoalan. Riset ini dirancang secara periodik (*longitudinal*) dan menyertakan responden yang sama dari satu waktu ke waktu lain atau dikenal sebagai informan.

Tujuan dari riset panel ini adalah membandingkan dari satu waktu ke waktu lain. Penelitian ini bersifat evaluasi terhadap kualitas isi program siaran televisi yang dilakukan

oleh informan ahli. Penelitian menggunakan kuesioner yang berisikan butir-butir dari indikator penilaian kualitas program siaran televisi, yang memiliki poin sebagai alat pengumpulan data yang valid dan sah pada program siaran yang ditayangkan oleh setiap lembaga penyiaran.

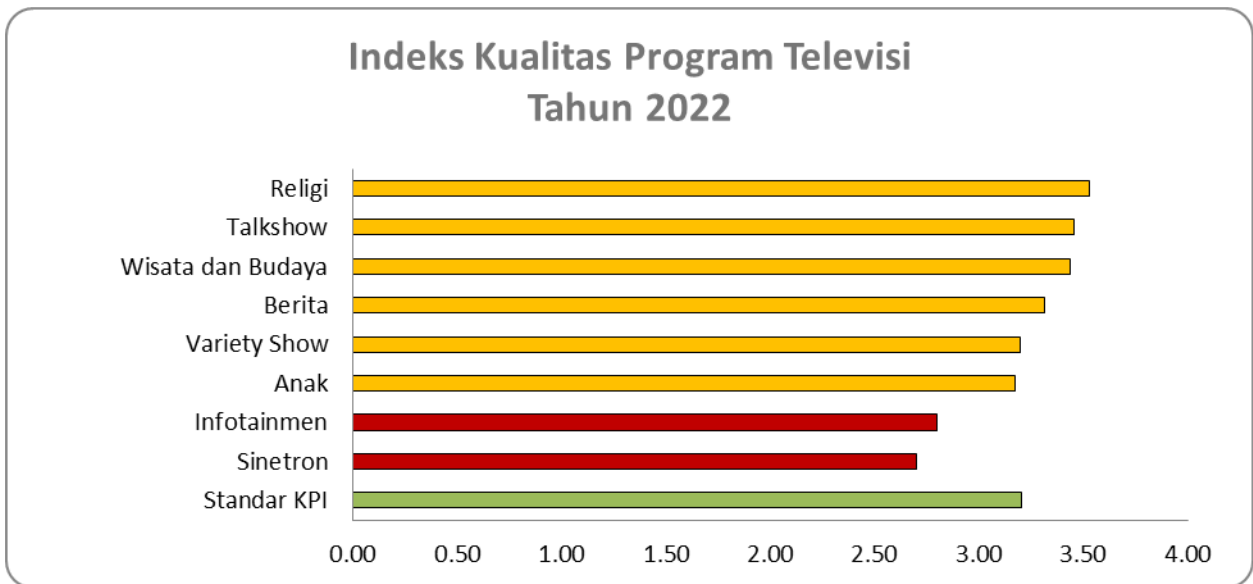
Pelaksanaan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Indeks Kualitas Program Siaran yang dilaksanakan bekerjasama 12 Perguruan Tinggi untuk tahun 2019 dan 2020 dilaksanakan sebanyak 2 kali. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) Indeks Kualitas Program Siaran yang dilaksanakan bekerjasama 12 Perguruan Tinggi untuk tahun 2021 masih dilaksanakan sebanyak 2 kali, namun untuk tahun 2022 hanya dilaksanakan sekali dengan teknis yang berbeda sebagai berikut:

No.	AREA RISET	2019		2020		2021	
		Periode I	Periode II	Periode I	Periode II	Periode I	Periode II
1	Ambon	24 Mei	01 Nov	18 Juli	12 Nov	31 Mei	04 Nov
2	Bandung	15 Mei	22 Okt	12 Juli	11 Nov	27 Mei	26 Okt
3	Banjarmasin	20 Mei	25 Okt	16 Juli	16 Nov	03 Juni	26 Okt
4	Denpasar	16 Mei	29 Okt	17 Juli	13 Nov	04 Juni	26 Okt
5	Jakarta	17 Mei	25 Okt	13 Juli	13 Nov	27 Mei	17 Okt
6	Makassar	25 Mei	01 Nov	18 Juli	14 Nov	07 Juni	21 Okt
7	Medan	23 Mei	01 Nov	13 Juli	14 Nov	27 Mei	21 Okt
8	Padang	14 Mei	22 Okt	12 Juli	10 Nov	31 Mei	21 Okt
9	Pontianak	20 Mei	22 Okt	17 Juli	17 Nov	05 Juni	08 Nov
10	Semarang	17 Mei	29 Okt	20 Juli	15 Nov	31 Mei	21 Okt
11	Surabaya	23 Mei	29 Okt	20 Juli	11 Nov	31 Mei	01 Nov
12	Yogyakarta	20 Mei	29 Okt	16 Juli	16 Nov	27 Mei	01 Nov

Pelaksanaan FGD Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dilaksanakan di 1 (satu) lokasi yaitu Hotel The Westin, Nusa Dua, Bali pada tanggal 12 Mei 2022 dengan teknis mengelompokkan para informan ahli sesuai dengan kapasitas keahlian yang terbagi menjadi 8 (delapan) kategori, antara lain: Kategori Program Berita, Talkshow, Variety Show, Infotainment, Sinetron, Anak, Religi, dan Wisata Budaya.

Mekanisme penilaian dari masing-masing informan yang berasal dari 12 Perguruan Tinggi menghadiri ke lokasi kegiatan FGD sesuai dengan ruangan per kategori program yang telah disediakan. Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2022 melibatkan para Informan Ahli sebanyak 51% laki-laki dan 49% perempuan yang berasal dari 12 wilayah area riset berdasarkan keahlian di bidang masing-masing. Sementara untuk latar belakang pendidikan dapat terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok dengan persentase sebagai berikut: 6% lulusan S1, 58% lulusan S2 dan 36% lulusan S3.

Adapun dari 8 (delapan) kategori program menghasilkan sebanyak 6 (enam) kategori program yang berkualitas sesuai standar KPI (3.00) dengan indeks tertinggi diperoleh kategori program Religi (3.53). Sementara untuk kelima kategori berkualitas berikutnya antara lain: kategori program Talkshow (3.46), Wisata dan Budaya (3.44), Berita (3.31), Variety Show (3.20) dan Anak (3.18). Sedangkan, kategori program dengan indeks rendah yaitu: kategori program Infotaimen (2.80) dan Sinetron (2.70).

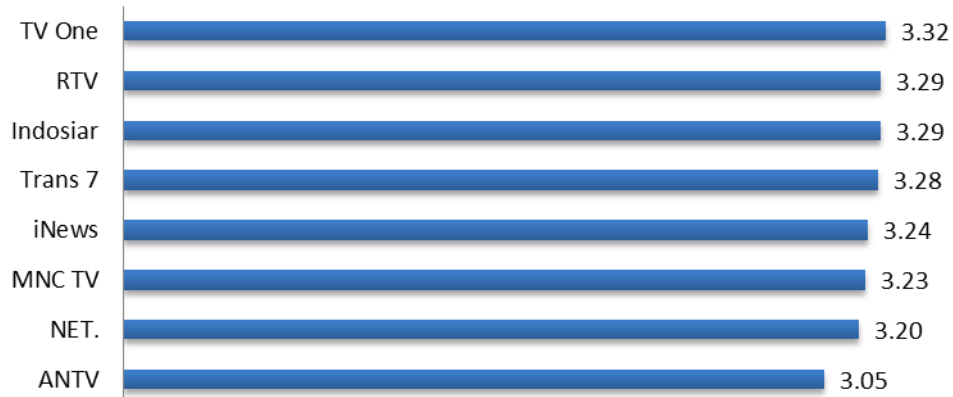


Grafik 2. Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Tahun 2022  
(Sumber: Data Litbang KPI Pusat)



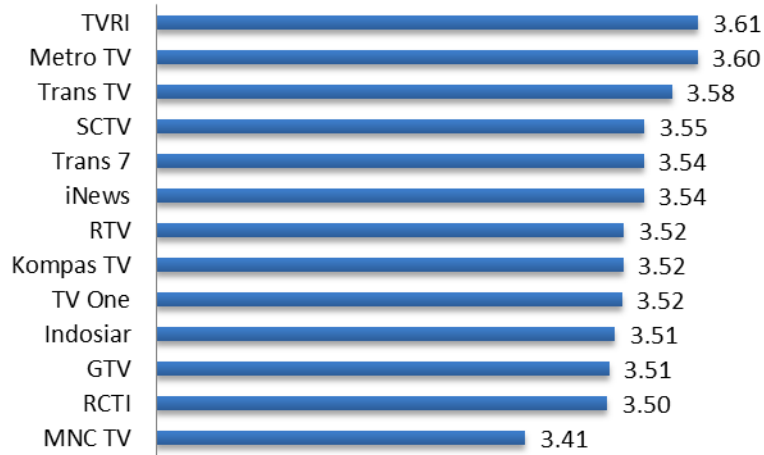
Gambar 1. Suasana FGD kategori program Berita bersama 12 informan ahli

## Indeks Program Berita Berdasarkan Stasiun TV



Gambar 2. Suasana FGD kategori program Religi bersama 12 informan ahli

## Indeks Program Religi Berdasarkan Stasiun TV

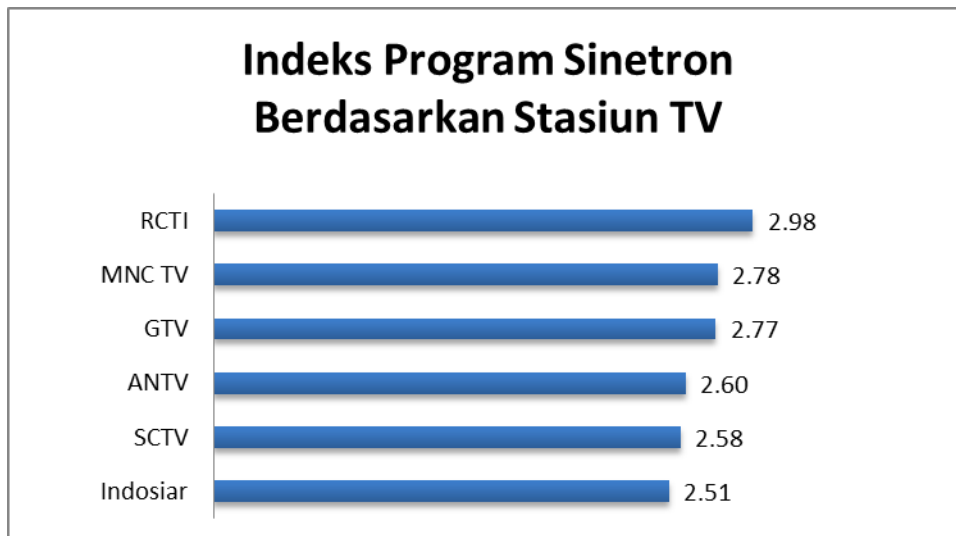


Gambar 3. Suasana FGD kategori program Wisata dan Budaya bersama 12 informan ahli

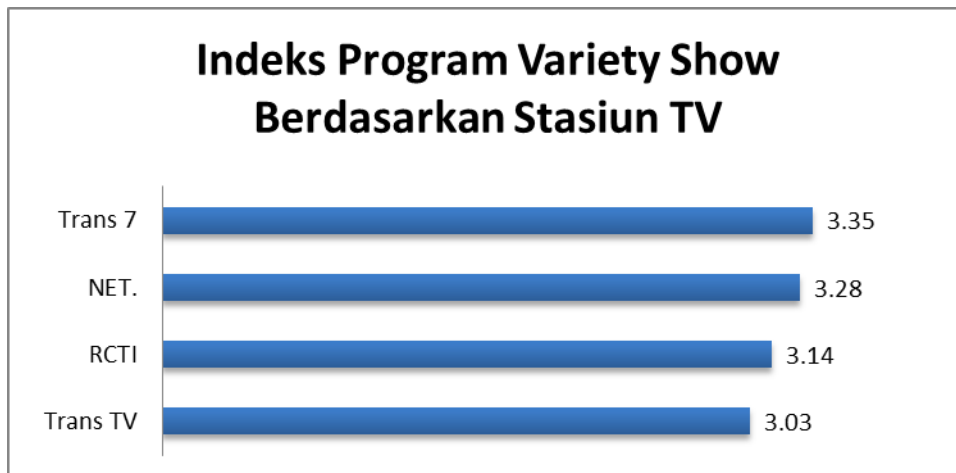
## Indeks Program Wisata dan Budaya Berdasarkan Stasiun TV



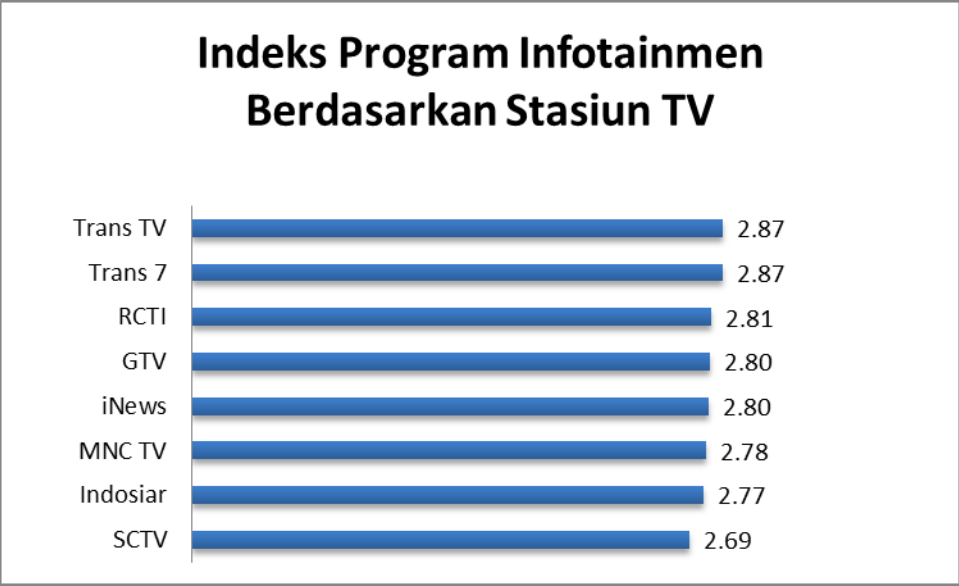
Gambar 4. Suasana FGD kategori program Sinetron bersama 12 informan ahli



Gambar 5. Suasana FGD kategori program Variety Show bersama 12 informan ahli

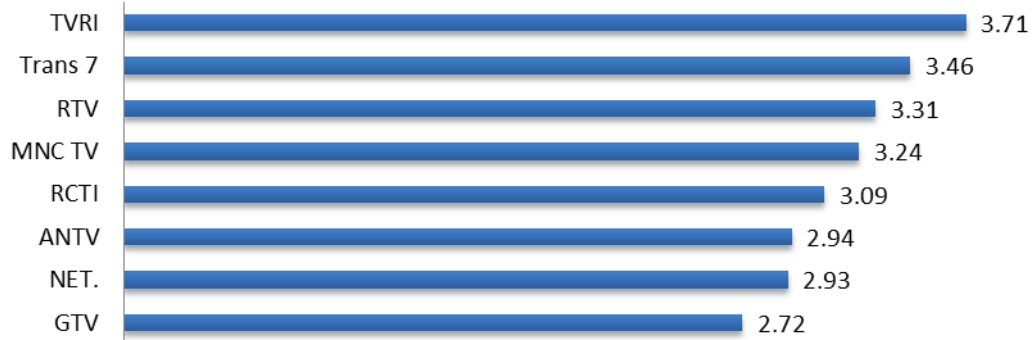


Gambar 6. Suasana FGD kategori program Infotainmen bersama 12 informan ahli

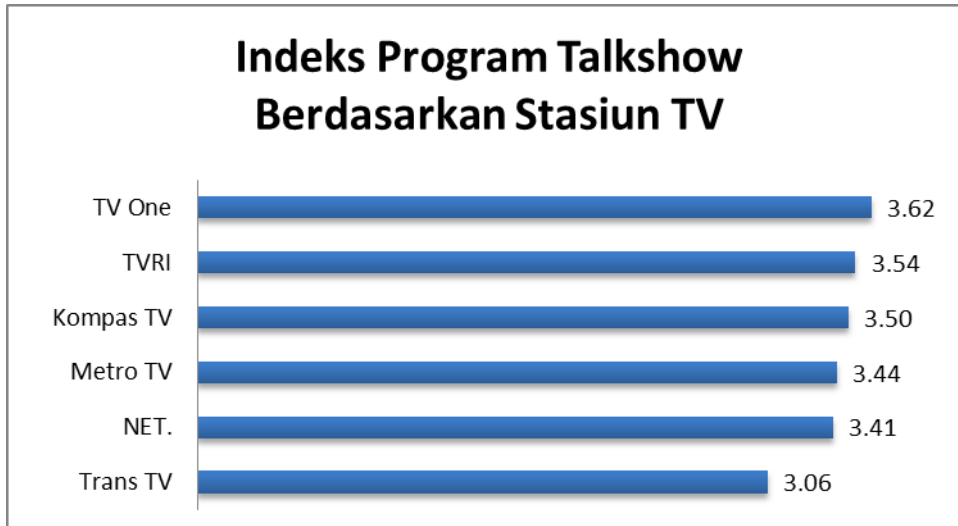


Gambar 7. Suasana FGD kategori program Anak bersama 12 informan ahli

## Indeks Program Anak Berdasarkan Stasiun TV



Gambar 8. Suasana FGD kategori program Talkshow bersama 12 informan ahli



Untuk kegiatan indeks periode tahun 2022 ini, salah satu hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut selain pengukuran indeks kualitas program siaran televisi tahun 2022 adalah penerbitan buku yang akan diberi judul Potret Program Siaran di Layar Kaca Indonesia berdasarkan dinamika pelaksanaan indeks kualitas program siaran televisi yang terdiri dari 8 (delapan) kategori program.



Gambar 9. Suasana rapat koordinasi pembahasan bersama tim penyusun buku KPI

### V.3. Ekspose Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi

Pada tahun 2022, kegiatan Ekspose Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2022 ini dikemas dengan kegiatan Talkshow dan Presentasi dalam bentuk diskusi panel yang bertemakan “Sadar Hak Kekayaan Intelektual: Proteksi Hak Cipta Konten Kreatif antara Televisi dan Media Sosial” yang diselenggarakan pada hari Jumat, 14 Oktober 2022 mulai Jam 14.00 WIB bertempat di The Papandayan Hotel, Bandung. Jl. Gatot Subroto No.83, Malabar, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Hal ini didasari dengan semakin banyak lembaga penyiaran konvensional menampilkan potongan konten yang ada di platform multimedia untuk sebuah acara program siaran tertentu. Realitas ini semakin menunjukkan adanya pergeseran budaya konten juga berimbas kepada para pelaku kreator konten digital terkait dengan hak cipta antara televisi dan media sosial.

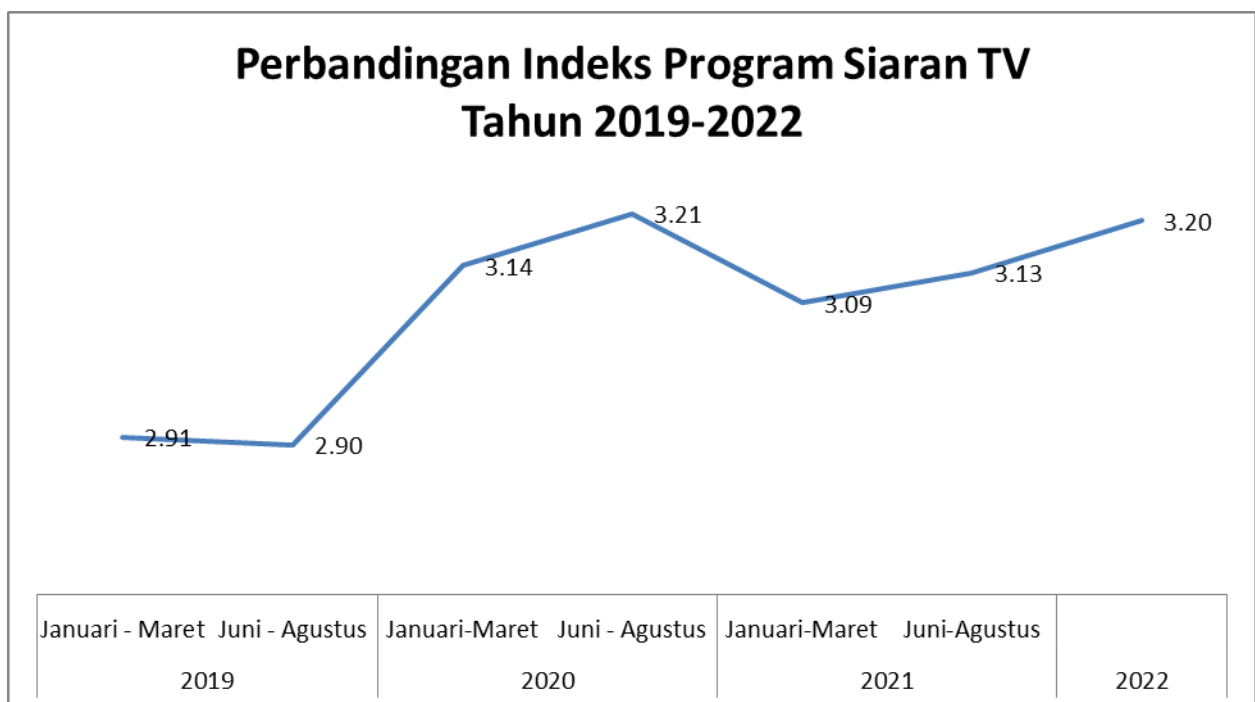
Kasus pelanggaran hak cipta pada umumnya terjadi dengan mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi untuk kemudian diumumkan, dan memperbanyak ciptaan tersebut dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial.



Gambar 10. Jajaran Komisioner KPI Pusat bersama tim konsultan dan narasumber

Selain bertujuan untuk menyusun indeks kualitas program siaran televisi berdasarkan kategori program siaran secara periodik, Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi juga dimaksudkan dapat dijadikan bahan KPI untuk mengevaluasi kualitas program siaran di televisi secara periodik.

Salah satu urgensinya yaitu hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh banyak *stakeholder* penyiaran yang memiliki perhatian lebih terhadap program siaran televisi sehingga lembaga penyiaran juga dapat melakukan pembenahan agar program siaran televisi semakin baik.



Sumber: Litbang KPI Pusat

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuatif hasil indeks kualitas program siaran televisi dari tahun 2019 – 2021 yang telah diekspose oleh KPI kepada publik. Untuk periode I dan II pada tahun 2019 indeks rata-rata masih dibawah standar KPI (3.00) yakni: 2.91 dan 2.90. lalu mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 periode I (3.14) dan meningkat lagi pada periode II (3.21). Namun, pada tahun 2021 indeks rata-rata mengalami penurunan periode I (3.09) dan periode II (3.13) tetapi masih berkualitas karena telah memenuhi standar KPI (3.00). Dan terjadi peningkatan pada periode tahun 2022 sebesar 3.20.

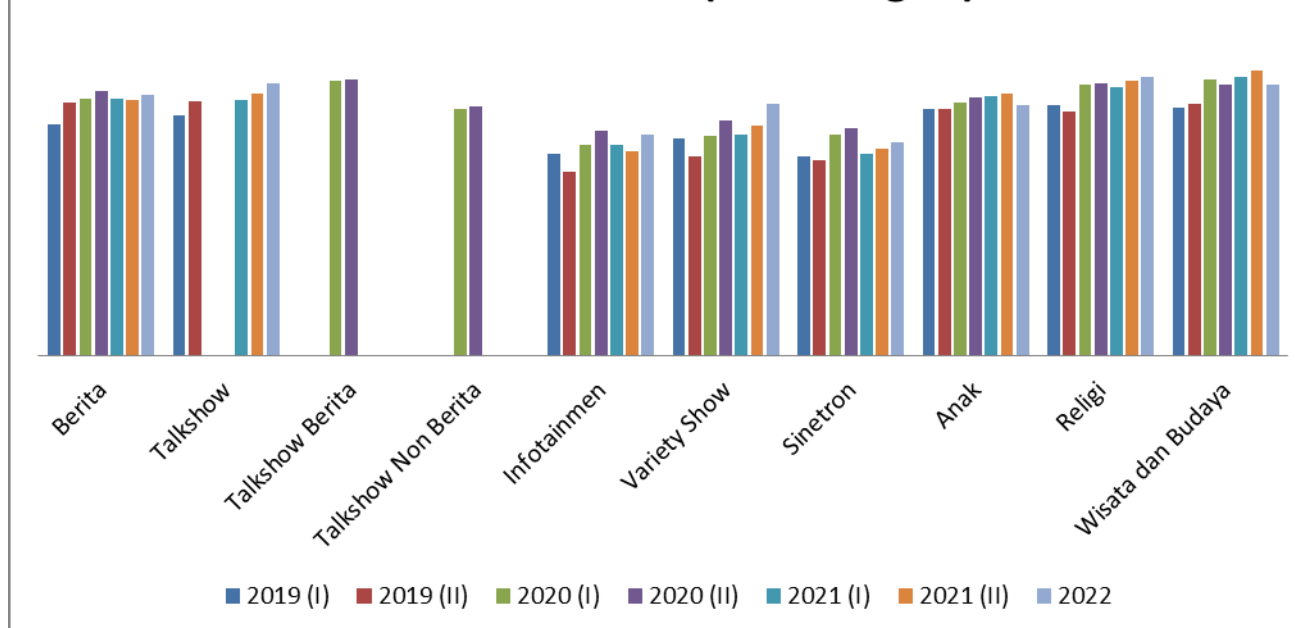
Berikut ini merupakan hasil indeks per kategori program mulai tahun 2019 sampai 2021 dengan urutan kategori program yang belum berkualitas masih sama untuk 3 (tiga)

kategori, yaitu: Kategori Program Variety Show, Sinetron dan Infotainmen. Sementara, untuk 5 (lima) kategori program yang sudah berkualitas antara lain: Kategori Program Wisata dan Budaya, Talkshow, Religi, Anak dan Berita. Pada Tahun 2022, masih terdapat 2 (dua) kategori program yang belum berkualitas, yaitu: Infotainmen dan Sinetron.

No.	2019		2020		2021		2022	
	Kategori Program	Indeks	Kategori Program	Indeks	Kategori Program	Indeks	Kategori Program	Indeks
1	Wisata dan Budaya	3.17	Wisata dan Budaya	3.47	Wisata dan Budaya	3.58	Religi	3.53
2	Talkshow	3.14	Religi	3.44	Religi	3.45	Talkshow	3.46
3	Religi	3.13	Talkshow	3.32	Anak	3.30	Wisata dan Budaya	3.44
4	Anak	3.12	Berita	3.30	Talkshow	3.28	Berita	3.31
5	Berita	3.07	Anak	3.24	Berita	3.24	Variety Show	3.20
6	Variety Show	2.63	Variety Show	2.88	Variety Show	2.86	Anak	3.18
7	Sinetron	2.50	Sinetron	2.84	Infotainmen	2.63	Infotainmen	2.80
8	Infotainmen	2.45	Infotainmen	2.77	Sinetron	2.58	Sinetron	2.70

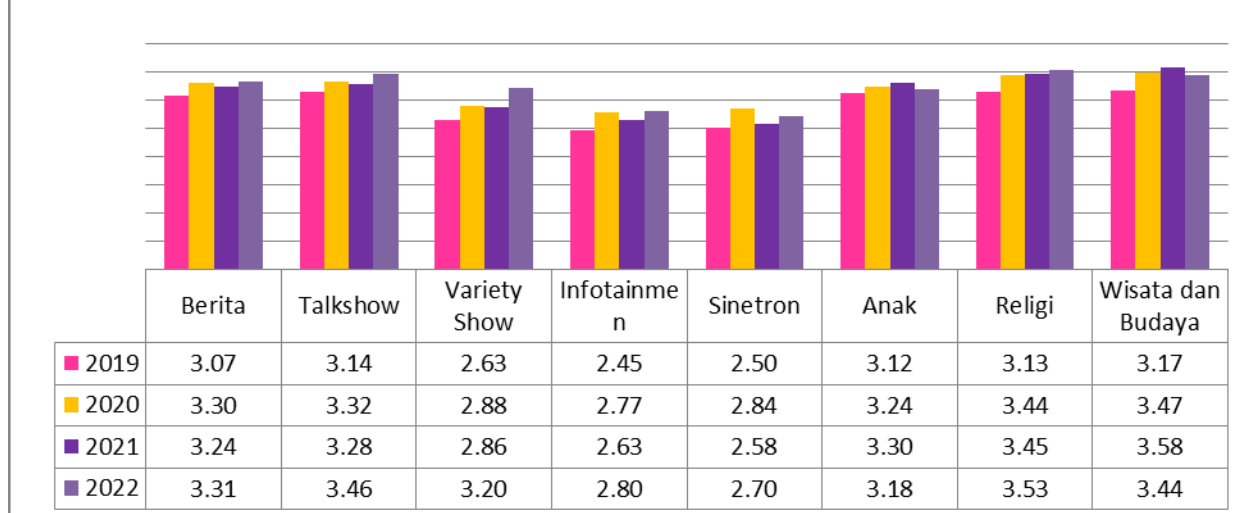
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada peningkatan kualitas program siaran televisi dalam kurun waktu tahun 2019 – 2022, yakni pada tahun 2019 sampai 2021 terdapat 3 (tiga) kategori yang masih belum memenuhi standar KPI (3.00) yaitu: Variety Show, Sinetron dan Infotainmen. Namun, pada tahun 2022, kategori program yang belum berkualitas hanya Sinetron dan Infotainmen.

## Perbandingan Indeks Kualitas Progam Siaran TV Tahun 2019-2022 (Per Kategori)



Sumber: Litbang KPI Pusat

## Indeks Kualitas Program Siaran TV Tahun 2019 - 2022



Sumber: Litbang KPI Pusat

#### **V. 4. Diseminasi Hasil Indeks Kualitas Program Siaran Televisi**

Sejak tahun 2021, KPI bersama beberapa Perguruan Tinggi yang terlibat dalam kegiatan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi melaksanakan Diseminasi Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi guna mensosialisasikan hasil riset kepada pemerhati dunia penyiaran. Salah satunya pada tahun 2021 terselenggara Diseminasi di Universitas Andalas Padang, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Udayana Denpasar.

Sementara, untuk tahun 2022 dilaksanakan setelah kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) bertepatan dengan rangkaian kegiatan Konferensi Penyiaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, telah dilaksanakan Diseminasi untuk 12 (sebelas) Perguruan Tinggi yang telah bekerjasama dengan KPI dalam kegiatan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi.

#### **V.5. Kamera (Komunikasi dan Media Penyiaran)**

Seminar Nasional KAMERA (Komunikasi dan Media Penyiaran) merupakan wadah pertemuan ilmiah para ahli komunikasi untuk membahas dinamika penyiaran di tanah air serta berbagai signifikasinya. Untuk kali pertama pelaksanaan Seminar Nasional ini diselenggarakan oleh KPI bekerjasama dengan Universitas Andalas Padang pada tanggal 24-25 Juni 2019.

Seminar tersebut dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yakni: pertama, melalui forum *stadium general* dengan menghadirkan *keynote speaker* yang memaparkan berbagai isu terkini mengenai komunikasi dan media penyiaran. Kedua, *class discussion* dengan melibatkan para peneliti dan praktisi yang memaparkan hasil temuan serta mendiskusikan berbagai hal berdasarkan dengan keahlian dan disiplin ilmunya. Salah satu hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah penerbitan buku yang berjudul Kamera Indonesia (Komunikasi Media dan Penyiaran) cetakan Kompas Gramedia.



Gambar: Cover Buku Kamera Indonesia

#### **V.6. Konferensi Penyiaran Indonesia**

Setelah sukses melaksanakan Seminar Nasional KAMERA (Komunikasi dan Media Penyiaran), KPI bermaksud menyelenggarakan kegiatan serupa ditahun berikutnya namun sempat tertunda selama 1 (satu) tahun oleh karena kondisi yang belum memungkinkan yaitu pandemi covid-19. Sebagai tuan rumah berikutnya, Universitas Hasanuddin Makassar telah mampu melakukan adaptasi dengan melaksanakan Konferensi Penyiaran pada 15-16 September 2021 secara *hybrid* di Hotel The Rinra, Makassar.

Salah satu hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah penerbitan buku yang berjudul Prosiding Konferensi Penyiaran Indonesia 2021 cetakan UNHAS Press dan juga dimuat dalam beberapa jurnal ilmiah.



Gambar: Cover Buku Prosiding Konferensi Penyiaran Indonesia 2021

Konferensi Penyiaran ini mengambil tema “Mewujudkan Media Komunikasi dan Industri Penyiaran yang Sehat, tangguh dan Berbasis Kemanusiaan” KPI bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar menggelar Konferensi Penyiaran dengan konsep *online* dan *offline*. Selanjutnya, untuk tahun 2022 telah terselenggara Konferensi Penyiaran di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta.

Pada tanggal 24-25 Mei 2022, KPI bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan Konferensi Penyiaran Indonesia bertemakan “Mewujudkan Media Komunikasi dan Penyiaran yang Berbasis Etika, Moral dan Kemanusiaan Menuju Peradaban Baru”.



Gambar 9. Konferensi Penyiaran Indonesia tahun 2022 dibuka oleh Wakil Menteri Agama RI, Bapak Dr. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si

Hal tersebut menjadikan landasan bagi pemerhati dunia penyiaran dan media komunikasi menanggapi dinamika yang sedang berkembang terlebih bagaimana pemanfaatan media komunikasi berbasis teknologi informasi dapat memberikan manfaat namun juga memiliki prinsip etika dan moral serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di ruang publik ditengah kondisi dunia sedang memasuki era peradaban baru seperti transparansi dan keterbukaan informasi.

#### **V.7. Evaluasi Indeks Kualitas Program Siaran Televisi**

Tahun 2020 Evaluasi Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, Tanggal 8 - 9 Desember 2020 di Bandung. Kegiatan yang dilakukan oleh KPI Pusat setiap tahunnya bersama 12 Perguruan Tinggi di 12 Provinsi secara *hybrid* dengan mengundang narasumber yang hadir secara langsung di Lokasi kegiatan. Sedangkan Tahun 2021, Evaluasi Indeks Kualitas Program Siaran Televisi ini dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis, tanggal 8 - 9 September 2021 di Kota Batu Jawa Timur.

Pada Tahun 2022 Evaluasi Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dilaksanakan pada hari Sabtu – Minggu Tanggal 15 – 16 Oktober 2022 di Bandung. Kegiatan yang dilakukan oleh KPI Pusat setiap tahunnya bersama 12 Perguruan Tinggi di 12 Provinsi. Kegiatan Evaluasi Indeks Kualitas Program Siaran Televisi bertujuan untuk mendapatkan formulasi yang kuat untuk Indeks KPI di Tahun berikutnya.

Kegiatan Evaluasi Indeks Kualitas Program Siaran Televisi ini dihadiri oleh Tim KPI Pusat, Pengendali lapangan dari 12 Perguruan Tinggi Negeri yang terlibat dalam Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2022. Adapun Narasumber yang memberikan paparan antara lain Dr. Endah Murwani, Dr. Pinkey triputra, Dr.Fal Harmonis, Dr.Mulharnetty Syas, Isma Dwi Fiani, M.Si dan juga dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas Bagian Perencanaan Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas RI.

## **VI. FGD Tentang Penyiaran**

*Focus Group Discussion (FGD)* atau Diskusi kelompok terarah yang dilakukan oleh KPI Pusat adalah untuk memperoleh masukan maupun informasi mengenai suatu permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik. Masukan yang diperoleh melalui FGD ini menjadi bahan pertimbangan Komisioner untuk penyelesaian masalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban KPI yakni menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

### **VI.1. FGD Penyiaran Tahun 2019**

#### **VI.1.1. FGD “Pembentukan PPID dan Optimalisasi Sistem Data Base”**

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menyelenggarakan FGD “Pembentukan PPID dan Optimalisasi Sistem Data Base” pada hari Rabu, 20 November 2019 bertempat di Harris Vertu Hotel Harmoni Jl. Hayam Wuruk No.6 Jakarta Pusat. kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu; Peningkatan pelayanan publikasi kegiatan serta hasil pengawasan KPI untuk masyarakat dan public, mensosialisasikan kerja dan kinerja KPI dalam melakukan pengawasan di bidang penyiaran, penyamaan persepsi dan pemahaman Sistem manajemen pengolahan dan pengelolaan data di KPI serta mewujudkan terciptanya Pelayanan Informasi Publik di KPI dalam satu pintu. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD “Pembentukan PPID dan Optimalisasi Sistem Data Base” Komisi Penyiaran Indonesia adalah terdiri dari Komisioner KPI, Tim PPID KPI Pusat, Para Kabag dan Kasubag KPI Pusat, Asisten dan Litbang KPI Pusat. Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan ini Bapak Agus Dwi Darmawan dari Research and Analyst Division Katadata. Pada FGD ini kali ini telah disepakati agar Komisi Penyiaran Indonesia segera merealisasikan pembentukan PPID agar data yang dimiliki oleh KPI dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya.



Foto bersama setelah FGD Pembentukan PPID dan Optimalisasi Sistem Database

#### VI.1.2. FGD “Penyusunan Legislasi Komisi Penyiaran Indonesia”

Kegiatan FGD “Penyusunan Legislasi Komisi Penyiaran Indonesia” tersebut dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Kamis, 21 November 2019 bertempat di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Jln. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat. kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu untuk penyamaan persepsi dan pemahaman terkait Penyusunan Regulasi yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD “Penyusunan Legislasi Komisi Penyiaran Indonesia” Komisi Penyiaran Indonesia adalah terdiri dari Komisioner KPI Pusat, Perwakilan Komisioner KPI Daerah, Para Kabag dan Kasubag KPI Pusat, Asisten dan Litbang KPI Pusat. Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan ini Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, SH.,MH sebagai Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar / Ketua KPI Pusat 2013 – 2016. Dalam FGD ini dapat dihasilkan hal-hal sebagai berikut; Tersusunnya timeline pembahasan penyusunan regulasi yang akan dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2020; Terbentuknya Tim Penyusunan Regulasi di Tahun 2020; dan Adanya pemahaman terkait prosedur legislasi di Komisi Penyiaran Indonesia.



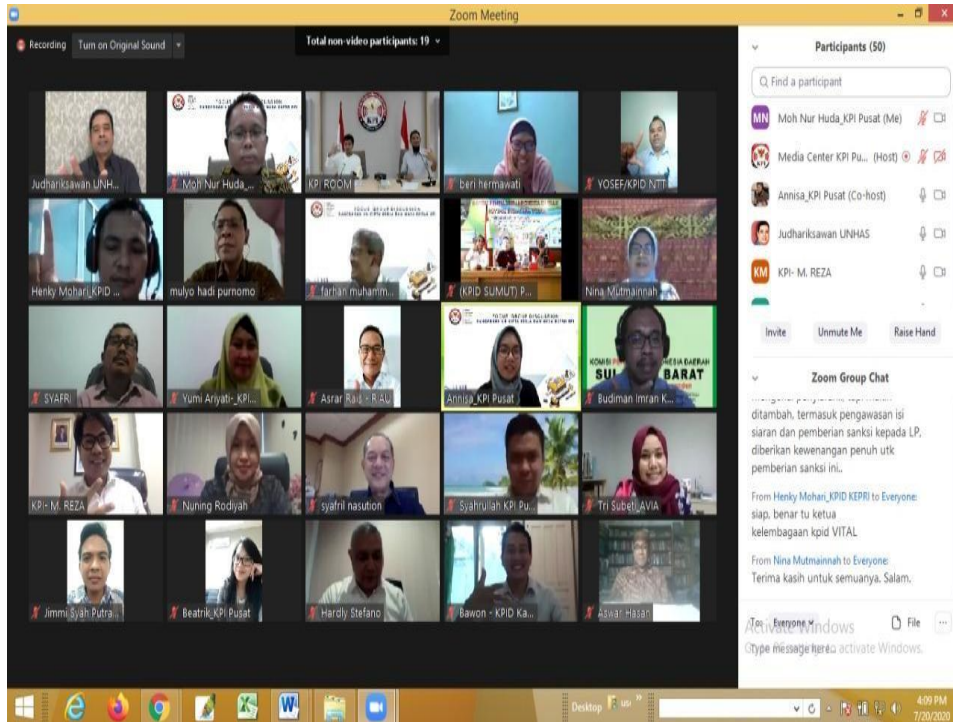
Foto Bersama Usai FGD Penyusunan Legislasi Komisi Penyiaran Indonesia

## VI.2. FGD Penyiaran Tahun 2020

### VI.2.1. FGD Rancangan UU Cipta Kerja dan Masa Depan KPI

Komisi Penyiaran Indonesia menyelenggarakan FGD “Rancangan UU Cipta Kerja dan Masa Depan KPI” pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 secara Virtual dipandu oleh Bapak Irsal Ambia Komisioner KPI Pusat. Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan lembaga negara bersifat independent merasa perlu untuk melakukan pembahasan secara spesifik tentang regulasi dan posisinya ke depan. Sebagai regulator penyiaran, KPI merupakan representasi publik dalam dunia penyiaran yang berkepentingan untuk menjaga demokratisasi penyiaran dan melaksanakan tujuan-tujuan penyiaran.

Adapun Narasumber yang menyampaikan paparannya adalah Bapak Agung Suprio Ketua KPI KPI Pusat; Bapak Mohammad Farhan Anggota Komisi I DPR RI; Dr. Nina Mutmainnah, M. Si dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran dan Prof. Judhariksawan sebagai Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar. Beberapa hal yang disimpulkan dan menjadi bagian dari hasil FGD pada kali ini adalah diantaranya mendorong KPI Pusat untuk mengkoordinir KPID se-Indonesia untuk memperjelas posisi KPI dalam RUU Cipta Kerja. Soal Omnibus Law, KPI tidak hilang keberadaannya, hanya ada beberapa pasal yang berubah soal sanksi, ijin, dan lainnya. Disamping itu kita juga akan melihat kewenangan dan posisi hukum KPI dan mengkaji lebih dalam terkaitnya dengan adanya RUU Cipta Kerja.



Narasumber dan peserta FGD berfoto bersama secara virtual

### VI.3. FGD Penyiaran Tahun 2021

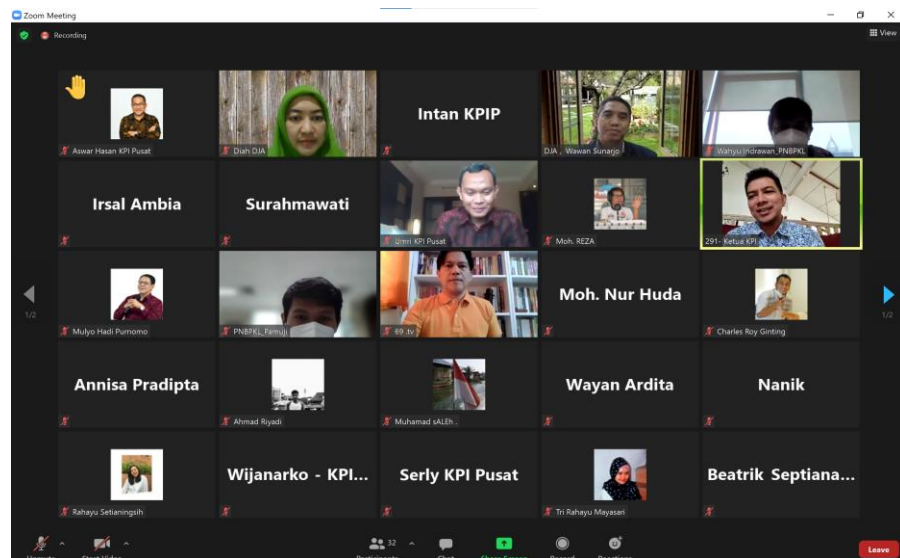
#### VI.3.1. FGD Penyusunan PKPI Tentang Pengenaan Sanksi Denda

Dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran pada pasal 55 Ayat 2 bahwa Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a) teguran tertulis; b) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c) pembatasan durasi dan waktu siaran; d) denda administratif; e) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Hal ini juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, pada pasal 86 Ayat 2 menjelaskan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dan/atau pelanggaran terkait dengan isi siaran, Komisi Penyiaran Indonesia mengenakan sanksi administratif kepada lembaga Penyiaran berupa: a. teguran tertulis; b. pengenaan denda administratif; c. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu; d. pembatasan durasi dan waktu siaran; dan/atau e. penghentian kegiatan siaran untuk waktu tertentu.

Sejak disahkan pada tanggal 28 Desember 2002, Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan dampak yang positif terhadap dunia penyiaran Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum dan kemanfaatan dunia penyiaran melalui regulasi yang ada membuat situasi penyiaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi lebih baik dengan spirit demokratisasi penyiaran yang tetap dijalankan.

Oleh karenanya, Komisi Penyiaran Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion “Penyusunan PKPI Tentang Pengenaan Sanksi Denda” yang dilaksanakan pada hari Kamis, 22 April 2021 melalui Zoom Meeting. Hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan ini adalah Bapak Wawan Sunarjo (Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan RI) dan dipandu Bapak Irsal Ambia (Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat). Kegiatan ini ikuti oleh Para Komisioner KPI Pusat dan Tenaga Ahli di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia.



Narasumber dan peserta FGD berfoto bersama secara virtual

### VI.3.2. FGD Tindak Lanjut Produk Legislasi Komisi Penyiaran Indonesia

Menyangkut soal legislasi KPI sebagaimana dimandatkan dalam Rapat Pimpinan KPI tahun 2019 dan Rakornas KPI Tahun 2021, ada beberapa regulasi organisasi KPI yang penting untuk segera ditinjau kembali atau direvisi agar sesuai dengan dinamika penyiaran yang berkembang saat ini seperti revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang sejak tahun 2012 belum pernah direvisi. Perkembangan teknologi komunikasi dan penyiaran harus disikapi dengan berbagai kebijakan termasuk penyesuaian P3SPS yang jauh lebih aplikatif.

Kegiatan FGD Tindak Lanjut Produk Legislasi Komisi Penyiaran Indonesia ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Rabu – Jum’at, 24

– 26 November 2021 yang bertempat di Avenzel Hotel & Convention Jln. Raya Kranggan No. 69 Cibubur Jatisampurna Kota Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk penyamaan persepsi dan pemahaman terkait Penyusunan Regulasi yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia. Adapun output dari kegiatan ini adalah; (1) Tersusunnya timeline pembahasan penyusunan regulasi yang akan dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia pada tahun 2022. (2) Terbentuknya Tim Penyusunan Regulasi di Tahun 2022. Dan (3) Adanya pemahaman terkait prosedur legislasi di Komisi Penyiaran Indonesia. Peserta yang hadir dalam kegiatan FGD Tindaklanjut Produk Legislasi Komisi Penyiaran Indonesia adalah terdiri dari Komisioner KPI, Sekretaris KPI, Tenaga Ahli, dan Staf pendukung lainnya.

FGD Tindak Lanjut Produk Legislasi Komisi Penyiaran Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPI Pusat Bapak Agung Suprio dan dihadiri oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing, yaitu : 1. Prof. Dr. Judhariksawan, SH,.MH (Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar / Ketua KPI Pusat 2013 – 2016), 2. Christiana Chelsia Chan, SH, LLM (Tenaga Pengajar Hukum Media FH Unika Atmajaya Jakarta). Kegiatan ini secara umum dipandu oleh Bapak Irsal Ambia Komisioner KPI Pusat.



Narasumber dan Komisioner KPI saat FGD. Nampak Irsal Ambia, Mulyo Hadi Poernomo, Ketua KPI Agung Suprio dan Prof.Judhariksawan

### VI.3.3. Revisi P3SPS KPI

Sesuai dengan amanat Rakornas KPI Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta Rapim KPI Tahun 2019, pada Tahun 2021 ini KPI melakukan Revisi P3SPS dengan berbagai tahapan, diantaranya:

- Membentuk Tim Kecil Perumus Draf Revisi P3SPS yang terdiri dari KPI Pusat dan Perwakilan KPI Daerah.
- Menginventarisir permasalahan yang ditemui dalam melaksanakan pemantauan isi siaran dan menerima pengaduan masyarakat.
- Menginventarisir pointer-pointer yang ada dalam Draft P3SPS Sebelumnya (Draft P3SPS KPI Tahun 2015).
- Membahas dan menyusun pointer-pointer yang akan dimasukkan dalam revisi P3SPS yang diselenggarakan secara berkala.
- Menyelenggarakan berbagai FGD-FGD sesuai dengan tema dan permasalahan yang ada dengan mengundang Narasumber sesuai ahlinya.
- Pada hari Selasa, 3 Maret 2021 Jam 09.00 – 13.00, menyelenggarakan FGD Penyusunan Revisi Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran. FGD ini dilaksanakan di Hotel Harris Vertu Jln. Hayam Wuruk No. 6 Jakarta Pusat, hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan ini adalah Bapak Imam Wahyudi, sebagai Anggota Dewan Pers 2016 – 2019 / Ketua Dewan Pertimbangan IJTI serta diikuti oleh Komisioner KPI Pusat dan Tim Revisi P3SPS KPI.



(Narasumber dan Peserta FGD revisi P3 & SPS saat sesi foto bersama)

- Pada hari Senin, 9 Maret 2021 Jam 09.00 – 16.00, menyelenggarakan FGD Penyusunan Revisi Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran. Dilaksanakan di Pullman Hotel Bandung Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Komisioner KPI Pusat dan Tim Revisi P3SPS KPI.
- Pada hari Rabu – Jum’at, 7 – 9 April 2021 Jam 13.00 – Selesai, menyelenggarakan FGD Penyusunan Revisi Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran, di The Alana Hotel Sentul, Jl Ir H Juanda No 76 Sentul Bogor. Hadir sebagai Narasumber adalah Bapak Maman Suherman dan serta diikuti oleh Komisioner KPI Pusat dan Tim Revisi P3SPS KPI.



(Suasana FGD Penyusunan P3 & SPS)

- Membahas dan menampung usulan KPID se-Indonesia, yang dibagi pelaksanaannya dalam 3 (tiga) zona, yakni Zona I (Sumatera) pada hari Rabu, 4 Agustus 2021 Jam 09.00 – 12.00, Zona II (Jawa, Bali, NTB, NTT) pada hari Kamis, 5 Agustus 2021 Jam 09.00 – 12.00, dan Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua) pada hari Senin, 9 Agustus 2021 Jam 09.00 – 12.00.
- *Hiring Public* dan harmonisasi draft Revisi P3SPS dengan stakeholder yang berkaitan dengan pengaturan revisi P3SPS 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus – 2 September 2021 bertempat di Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf Bogor Jawa Barat. Asosiasi dan Kementerian/Lembaga yang hadir secara virtual dan memberikan masukan dan tanggapan adalah diantaranya dari; Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kemenkumham RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia (APPINA), Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Komnas Perempuan, Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA), Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ) dan Indonesian Sign Language Interpreters (Inasli), ; Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Divisi Humas Mabes Polri, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), Komite Pemilih Indonesia (TePI), Network for Indonesia Democratic Society (Netfid), Literasi Demokrasi Indonesia (LDI), Indonesia Voter Initiative for Democracy (IVID), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Agama RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas RI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), PB. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP.Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Pusat, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM), Masyarakat Cipta Media, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2 Media), Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP), Remotivi, Lembaga Sensor Film (LSF), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Nasional Indonesia (ATVNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI), Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia (ARTVISI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) dan dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI).

- Pada Tanggal 2 September 2021, KPI Menerima Surat dari Asosiasi (ATVSI) perihal sikap ATVSI terhadap Draft Revisi P3SPS (Dalam suratnya di Poin 2,2;

Meminta KPI untuk tidak melanjutkan pembahasan Draft Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran).

- Pembahasan draft akhir revisi P3SPS pada Rakornas KPI Tahun 2021 pada tanggal 10 – 13 November 2021 di Harris Hotel & Conventions Jalan Bulevar Ahmad Yani Kota Bekasi, Jawa Barat.
- Dan sesuai dengan Hasil Rakornas KPI 2021, Draft revisi P3SPS yang ada diputuskan untuk dilakukan proses pembahasan lagi secara komperensif dan prosedural, untuk kemudian ditetapkan pada Rakornas 2022.



(Foto suasana kegiatan Legislasi KPI tentang Revisi P3SPS)

#### **VI. 4. FGD Penyiaran Tahun 2022**

VI.4.1. FGD “Pengaturan Konten Media di Era Digital menuju Revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran”

Tahapan suntik mati siaran televisi analog mengalami penyesuaian. Kendati demikian, penyesuaian ini tidak menggeser 2 November tahun 2022 sebagai kalender bersejarah penyiaran Indonesia. Hal ini dikarenakan amanah legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar televisi melakukan migrasi ke teknologi digital. Adaptasi televisi ke teknologi digital adalah harapan masyarakat penyiaran, meskipun dinilai sangat terlambat. Celah mewujudkan mimpi tersebut sangat tebal catatan. Distribusi *converter technology*, persepsi dan kesiapan masyarakat untuk migrasi, serta yang paling substantif adalah jaminan kualitas konten di tengah banyaknya saluran. Satu tahun ke depan, jika tidak buru-buru mengejar,

tampaknya penyiaran akan mengalami stagnasi bahkan kemunduran sekaligus tertinggal.

Ilustrasi di atas menjadi soal sendiri dalam penataan dunia penyiaran ke depan. Belum lagi berbicara pandemi yang sudah dengan nyata memperlihatkan industri penyiaran harus lebih responsif dan adaptif. Fenomena lain yang tidak bisa disangkal hari-hari ini dan masa depan adalah penetrasi media baru yang semakin luas. Ia merangkak menjadi platform informasi yang pelan-pelan, bahkan menyingkirkan media konvensional secara perlahan tapi penuh kepastian. Hubungan media konvensional seperti televisi dan radio dengan media baru tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai kompetitor yang melulu berhadap-hadapan. Radio dan televisi kerap melakukan promosi program di media baru, atau bahkan konten-kontennya didistribusi di laman media baru. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan media konvensional terhadap media baru. Begitu juga sebaliknya, sadar atau tidak sadar konten-konten media baru juga kerap kita lihat di laman media konvensional.

Oleh karena itu, kegiatan FGD / Diskusi Kelompok Terarah dengan tema “Pengaturan Konten Media di Era Digital menuju Revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran” ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 dimulai Jam 13.20 – 17.00 WIB dan dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat yang bertempat di Gedung Monumen Pers Nasional Jl. Gajah Mada No. 59 Timur, Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk terciptanya ruang diskursus tentang pengaturan konten media di era digital; Terhimpunnya saran serta masukan tentang urgensi pengaturan konten media di era digital dan Adanya dokumentasi dan analisa bahan masukan sebagai data acuan KPI dalam rangka urun rembuk revisi UU Penyiaran. Adapun output dari kegiatan ini adalah untuk memetakan poin-poin penting pengaturan konten media sebagai data KPI dalam memberikan masukan untuk revisi Undang-Undang Penyiaran.

FGD / Diskusi Kelompok Terarah Komisi Penyiaran Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPI Pusat Bapak Agung Suprio dan dihadiri oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing, yaitu : 1 Bapak Dr. H. Abdul Kharis Al-Masyhari (Wakil Ketua Komisi I DPR RI) dan 2. Bapak Niel Tobing (Ketua Bidang Penyiaran Masyarakat Telematika Indonesia / MASTEL Indonesia) serta Moderator Bapak Hardly Stefano (Komisioner KPI Pusat). Hadir juga sebagai Peserta dalam kegiatan FGD ini adalah terdiri dari Komisioner KPI Pusat Bapak Mulyo Hadi

Purnomo, Nuning Rodiyah, Mimah Susanti, Irsal Ambia, Mohamad Reza, Sekretaris KPI Bapak Umri, Asosiasi Lembaga Penyiaran dan Perwakilan KPID Jawa Tengah, Tenaga Ahli KPI, dan Staf pendukung lainnya.



Suasana Diskusi Kelompok Terarah

#### VI.4.2. FGD “Revisi Peraturan KPI tentang Kelembagaan”

Sejak dibentuk melalui Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, sesungguhnya begitu besar dan mulia amanah yang dimandatkan konstitusi terhadap Komisi Penyiaran Indonesia. Jika kita melihat desain UU Penyiaran, lembaga negara independen yang lahir pasca reformasi ini diharapkan menjadi institusi yang kuat dan berwibawa dalam melakukan pengawasan lembaga penyiaran, televisi dan radio di Indonesia. Desain struktur lembaga negara yang independen di pusat dan daerah, kewenangan membuat regulasi, kewenangan menjatuhkan sanksi yang cukup maksimal dan sebagainya. Kondisi itu sebetulnya yang juga diinginkan publik terhadap KPI hingga usianya yang hampir 20 tahun.

Akan tetapi dalam perjalanannya, desain ideal terhadap lembaga KPI menemui berbagai tantangan serta dinamika yang mengarah pada belum terwujudnya lembaga KPI yang kuat dan bermartabat seperti yang diinginkan publik. Dalam konteks kekinian, KPI menghadapi berbagai rintangan yang cukup serius seperti eksistensi dan struktur kelembagaannya serta regulasi-regulasi KPI yang harus sesuai dengan dinamika penyiaran kontemporer maupun penyusunan aturan lain yang dibutuhkan organisasi KPI. Hal lain juga dihadapi KPI menyangkut soal kredibilitas,

kewenangan, sumber daya manusia, hingga persoalan anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Menyangkut soal legislasi KPI sebagaimana dimandatkan juga dalam Rakornas KPI Tahun 2021, ada beberapa regulasi organisasi KPI yang penting untuk segera ditinjau kembali atau direvisi agar sesuai dengan dinamika penyiaran yang berkembang saat ini seperti Peraturan Kelembagaan yang sejak tahun 2014 belum pernah direvisi. KPI diharapkan dapat melakukan revisi Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI//07/2014 tentang Kelembagaan yang juga membutuhkan perbaikan-perbaikan terutama soal rekrutmen anggota KPI sehingga dibutuhkan produk hukum yang lebih implementatif terhadap kebutuhan organisasi KPI, termasuk juga dalam Revisi Peraturan Kelembagaan ini adalah tentang kode etik KPI. Melalui pembuatan kode etik KPI, lembaga ini diharapkan bisa lebih profesional, berwibawa, kuat, dan semakin berintegritas.

Kegiatan FGD “Revisi Peraturan KPI tentang Kelembagaan” dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Kamis – Jum’at, 17 – 18 Maret 2022 bertempat di Hotel Mercure Jln. Laksda Adi Sucipto No. 80 Yogyakarta. kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu Menerima masukan dan tanggapan dari KPID terkait Bahan revisi PKPI Kelembagaan yang telah disusun oleh Tim KPI Tahun 2019. Mengevaluasi pasal-pasal dalam Peraturan KPI No. 01/P/KPI//07/2014 tentang Kelembagaan tahun 2014 yang belum aplikatif dalam penerapannya. Menyusun dan merumuskan Peraturan KPI tentang Kelembagaan yang lebih rinci dan lebih implementatif dalam penerapannya dan terakhir Memberikan rekomendasi draft Revisi PKPI tentang Kelembagaan yang nantinya akan dibahas dan ditetapkan dalam forum Rakornas KPI Tahun 2022.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD “Revisi Peraturan KPI tentang Kelembagaan” Komisi Penyiaran Indonesia adalah terdiri dari Komisioner KPI Pusat, Komisioner KPI Daerah, Para Tenaga Ahli, Tim Penyusun Revisi PKPI Kelembagaan dan Staf Pendukung serta Komisioner KPI Daerah sesuai dengan undangan yang dikirim.



Suasana Diskusi Kelompok Terarah Revisi PKPI Kelembagaan  
Yogyakarta, 17 – 18 Maret 2022

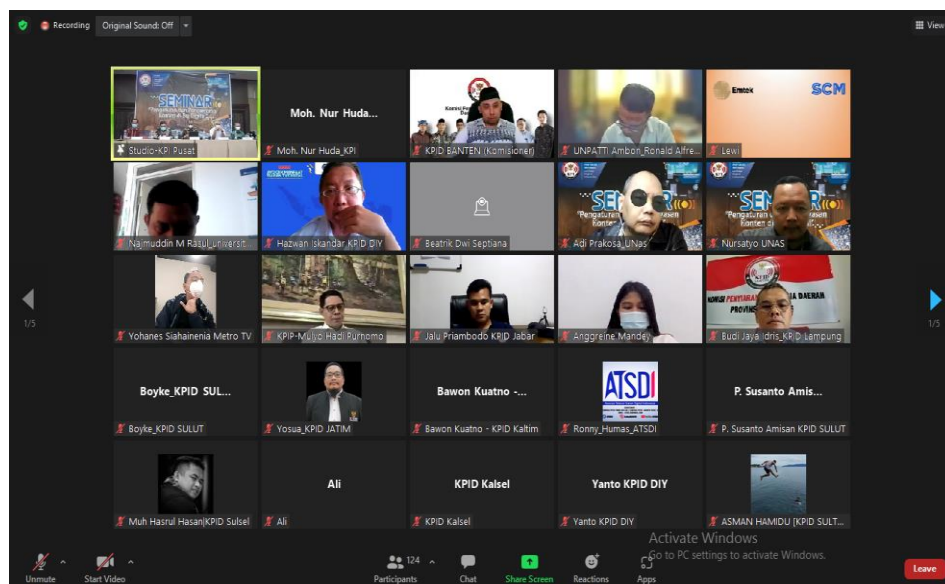
#### VI.4.3. Seminar “Pengaturan dan Pengawasan Konten Di Era Digital”

Relasi yang intensif antara masyarakat dengan media dan komunikasi. Teknologi yang berkembang membuat masyarakat sangat mudah mengakses informasi, memberikan pendapat atau berinteraksi di dalamnya. Kemudahan akses informasi melalui penyiaran pun mendorong konsep demokratisasi penyiaran yang bermakna menjamin partisipasi publik dan menjaga kepentingan publik terhadap ruang penyiaran di Indonesia. Perkembangan teknologi penyiaran multipleksing dan penyiaran new media turut memberi dampak pada penerapan demokratisasi penyiaran, baik dalam hal diversity of ownership, diversity of content, maupun konten lokal melalui sistem stasiun jaringan.

Kegiatan Seminar “Pengaturan dan Pengawasan Konten Di Era Digital” dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Senin – Selasa, 21 – 22 Maret 2022 bertempat di Hotel Santika Harapan Indah – Bekasi Jawa Barat. Narasumber yang hadir dalam Seminar ini adalah Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (Wakil Ketua Komisi I DPR-RI), Ahmad Budiman (Tim Asistensi RUU Penyiaran DPR-RI), Neil Tobing (Mastel/ATVSI) dan Agus Sudibyo (ATVI), Prof. Dr. Judhariksawan (Guru Besar Universitas Hasanuddin) dan Hermansyah (Praktisi IT). Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan Seminar “Pengaturan dan Pengawasan Konten Di Era Digital” Komisi Penyiaran Indonesia adalah terdiri dari Komisioner KPI Pusat, Perwakilan Komisioner KPI Daerah, Perwakilan Lembaga Penyiaran, Para Tenaga Ahli, dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim. Kegiatan FGD “Penyusunan Draft Peraturan KPI tentang Kelembagaan” ini dipandu langsung

oleh Bapak Irsal Ambia (Komisioner KPI Pusat) dan Bapak Hardly Stefano (Komisioner KPI Pusat).

Adapun beberapa hal yang menjadi rumusan masukan dalam kegiatan ini adalah Pada dasarnya bahwa OTT perlu di regulasi. Zona regulasinya sangat beragam, dari sisi liability terhadap kone, dari sisi perpajakannya, dari sisi model hukum terhadap pelaku lain, dari sisi model bisnisnya, dari sisi regulasi yang mengatur praktek monopolinya. Pengaturannya terdapat 3 opsi: pada tahap jangka pendek dan menengah dapat diintegrasikan dalam uu existing atau yang sudah ada (contoh: penyiaran), dibentuk uu baru yang khusus menangani hal tersebut, yang ketiga ada semacam omnibus jadi uu pokok yang mengatur semua dimensi tadi terkait dengan OTT dan digitalisasi.



Narasumber dan peserta FGD berfoto bersama secara virtual

#### VI.4.4. FGD “Penyusunan Draft Peraturan KPI tentang Kelembagaan”

Kegiatan FGD “Penyusunan Draft Peraturan KPI tentang Kelembagaan” tersebut dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Selasa – Jum’at, 17 – 20 Mei 2022 bertempat di The Alana Hotel & Conference Center - Sentul City Bogor Jawa Barat. kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu Membahas masukan dan tanggapan dari KPID terkait Bahan revisi PKPI Kelembagaan yang telah disusun oleh Tim KPI Tahun 2019. Mengevaluasi pasal-pasal dalam Peraturan KPI No. 01/P/KPI//07/2014 tentang Kelembagaan tahun 2014 yang belum aplikatif dalam penerapannya. Menyusun dan merumuskan Peraturan KPI tentang

Kelembagaan yang lebih rinci dan lebih implementatif dalam penerapannya dan terakhir Memberikan rekomendasi draft Revisi PKPI tentang Kelembagaan yang nantinya akan dibahas dan ditetapkan dalam forum Rakornas KPI Tahun 2022.

Peserta yang hadir dalam kegiatan FGD “Penyusunan Draft Peraturan KPI tentang Kelembagaan” Komisi Penyiaran Indonesia adalah terdiri dari Komisioner KPI Pusat, Para Tenaga Ahli, Perwakilan KPID dari Empat Zona sebagai Tim Penyusun Revisi PKPI Kelembagaan dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan yang dikirim. Kegiatan FGD “Penyusunan Draft Peraturan KPI tentang Kelembagaan” ini dipandu langsung oleh Bapak Irsal Ambia sebagai Koordinator Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan juga PIC Kegiatan serta hadir sebagai narasumber utama Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, SH,.MH sebagai Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar.

Adapun hasil dalam FGD kali adalah tersusunnya Rancangan Draft PKPI Kelembagaan 2022 sebagai revisi dari PKPI Kelembagaan Tahun 2014.



Suasana FGD, nampak para Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, Irsal Ambia, Ketua KPI Agung Suprio dan M. Reza

#### VI.4.5. FGD “Penyusunan Draft PKPI Tata Cara Pengenaan Sanksi”

Kegiatan FGD penyusunan “PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi” ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Kamis, 15 September 2022 Jam 09.00 – 17.30 bertempat di Hotel Merlynn Park Jakarta Pusat. kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu Menghimpun pendapat dari berbagai Stakeholder tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi; Merumuskan konsep tentang PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi; Menyusun Draft PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi;

Sebagai upaya untuk menyampaikan pikiran untuk mencari solusi dalam menyikapi permasalahan dan perkembangan yang ada di dunia penyiaran di Indonesia.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD Penyusunan “PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi” Komisi Penyiaran Indonesia adalah terdiri dari Komisioner KPI Pusat, Para Tenaga Ahli, Perwakilan KPID dan Staf Pendukung sesuai dengan undangan dengan narasumber Prof. Dr. Judhariksawan, SH,.MH sebagai Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar.



Suasana FGD Pembahasan dan Penyusunan Draft

#### VI.4.6. FGD “Pembahasan Finalisasi Draft PKPI Tata Cara Pengenaan Sanksi”

Kegiatan FGD Pembahasan “PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi” ini dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat pada hari Jum’at - Sabtu, 23 - 24 September 2022 bertempat di The Pade Hotel & Resort Jln. Balik Gunung, Gampong Iboih Suka Karya Sabang Aceh. Kegiatan ini mempunyai tujuan yaitu Menghimpun pendapat dari berbagai Stakeholder tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi; Merumuskan konsep tentang PKPI Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi; Menyusun Draft PKPI Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi; Sebagai upaya untuk menyampaikan pikiran untuk mencari solusi dalam menyikapi permasalahan dan perkembangan yang ada di dunia penyiaran di Indonesia.

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan FGD Pembahasan “PKPI Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi” Komisi Penyiaran Indonesia adalah terdiri dari Komisioner KPI Pusat, Para Tenaga Ahli, Perwakilan KPID dan Staf Pendukung

sesuai dengan undangan yang dikirim dengan narasumber Prof. Dr. Judhariksawan, SH,.MH sebagai Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar.

Penyusunan PKPI tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Komisi Penyiaran Indonesia ini merupakan bagian dari tugas KPI yang perlu mendapatkan dukungan, namun demikian Draft yang ada ini perlu dilakukan pembahasan yang lebih detail lagi dalam forum Rakornas KPI yang diselenggarakan oleh KPI serta juga melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan PKPI ini nantinya.



Suasana kegiatan FGD PKPI Tata Cara Pengenaan Sanksi

## **VI. KERJASAMA LEMBAGA**

### **1. TAHUN 2019 (PERIODE AGUSTUS-DESEMBER)**

Pada tahun 2019 ini terjadi pergantian periode Anggota KPI sehingga produk kerja sama yang diterbitkan pada laporan ini adalah periode Agustus-Desember 2019.

#### **1.1. NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada tahun 2019 tercatat berlangsung pada bulan Maret hingga Mei sehingga bukan merupakan objek pada laporan ini.

#### **1.2. PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama sebagai wujud dari pelaksanaan MoU dilakukan dalam kurun waktu Maret-Mei 2019 sehingga bukan merupakan objek pada laporan ini.

## 2. TAHUN 2020 (PERIODE JANUARI-DESEMBER)

### 2.1. NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL	MASA BERLAKU
350/K/LSF/2020 03/K/KPI/HK.03.02/08/2020	KPI-Lembaga Sensor Film	Pengawasan Tayangan Televisi dan Kerja Sama Program	8 Oktober 2020	n/a
04/K/KPI/HK.03.02/11/2020 11/NK.11-20	KPI-Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia	Sosialisasi Penyiaran Digital	12 November 2020	5 tahun

### 2.2. PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL	MASA BERLAKU
02/K/KPI/PKS/03/2020 1953/UN7.5.7.2/KS/2020	KPI-Universitas Diponegoro	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	11 Maret 2020	31 Desember 2020
03/K/KPI/PKS/03/2020 194/UN6.K/PKS/2020	KPI-Universitas Padjadjaran	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	11 Maret 2020	31 Desember 2020
05/K/KPI/PKS/03/2020 154/UN22.5/HK.07.00/2020	KPI-Universitas Tanjungpura	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	11 Maret 2020	31 Desember 2020
06/K/KPI/PKS/03/2020 701/UN8.1.13/SP/2020	KPI-Universitas Lambung Mangkurat	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	11 Maret 2020	31 Desember 2020
07/K/KPI/PKS/03/2020 437/UN.13.1.1.2/PKS/2020	KPI-Universitas Pattimura	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	11 Maret 2020	31 Desember 2020
08/K/KPI/PKS/03/2020 B/530/UN14.2.11/HK.07.00/2020	KPI-Universitas Udayana	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	11 Maret 2020	31 Desember 2020
09/K/KPI/PKS/03/2020 PKS/001/UN61/FISIP/2020	KPI-FISIP UPN Veteran Jakarta	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	11 Maret 2020	31 Desember 2020
10/K/KPI/PKS/03/2020	KPI-FISHUM UIN Sunan Kalijaga	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	11 Maret 2020	31 Desember 2020

B-276/Un.02/DSH/PP.00.9/03/2020				
11/K/KPI/PKS/03/2020 1733/UN5.2.1.9/KPM/2020	KPI-FISIP Universitas Sumatera Utara	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	11 Maret 2020	31 Desember 2020
12/K/KPI/PKS/03/2020 B/14085/UN38.4/KS.01/2020	KPI-Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	11 Maret 2020	31 Desember 2020
2361/UN4.8/HK.07.00/2020 13/K/KPI/PKS/03/2020	KPI-Universitas Hasanuddin	Penyelenggaraan Kegiatan Konferensi Penyiaran Indonesia Seminar Nasional Komunikasi dan Media Penyiaran (KAMERA) 2020	11 Maret 2020	31 Desember 2020

### 3. TAHUN 2021 (PERIODE JANUARI-DESEMBER)

#### 3.1. NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL
01/K/KPI/HK.03.02/01/2021 017.1/REK/UG/I/2021	KPI-Universitas Gunadarma	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	18 Jan 2021
02/KPI/HK.04.02/MoU/02/2021 111/UN6.RKT/MoU/2021	KPI- Universitas Padjajaran	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Feb 2021
03/KPI/HK.04.02/MoU/03/2021 077/SPK/II.3 SMB/D/2021	KPI- Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Muhammadiyah Batam	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	15 Maret 2021
04/KPI/HK.04.02/MoU/03/2021 057/MoU/ASKOPIS/A/III/2021	KPI- Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (ASKOPIS)	Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pemagangan, Pengawasan Isi Siaran, Sosialisasi, dan Literasi Media	29 Maret 2021
05/KPI/HK/04.02/MoU/04/2021 2177/UN7.P/KS/2021	KPI-Universitas Diponegoro	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	1 April 2021
06/KPI/HK/04.02/MoU/04/2021 15/UN13/DN/2021	KPI- Universitas Pattimura	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	1 April 2021
07/KPI/HK/04.02/MoU/04/2021	KPI-	Peningkatan Kerjasama dalam	1 April

1 32/UN61.0/HK.07.00/2021	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta	Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	2021
08/KPI/HK/04.02/MoU/04/2021 1 B- 1118.11/Un.02/HK.07/04/2021	KPI- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	1 April 2021
09/KPI/HK/04.02/MoU/04/2021 1 3924/UN5.1.R/KPM/2021	KPI- Universitas Sumatera Utara	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	7 April 2021
10/KPI/HK/04.02/MoU/04/2021 1 021/UN8/KS/2021	KPI- Universitas Lambung Mangkurat	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	9 April 2021
11/KPI/HK.04.02/MoU/04/2021 1 049/UN38/KS/2021	KPI- Universitas Negeri Surabaya	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	9 April 2021
12/KPI/HK.04.02/MoU/04/2021 1 9791/UN4.1/HK.07.00/2021	KPI- Universitas Hasanuddin	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	9 April 2021
13/KPI/HK.04.02/MoU/04/2021 1 B/37/UN14/HK.07.00/2021	KPI- Universitas Udayana	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	19 April 2021
13A/KPI/HK.04.02/MoU/05/2021 21 47/MoU/R/UEU/V/2021	KPI- Universitas Esa Unggul	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi	1 Mei 2021
14/KPI/HK.04.02/MoU/04/2021 1	KPI- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Perlindungan Perempuan dan Anak di Lembaga Penyiaran	28 Juli 2021
15/KPI/HK.04.02/MoU/09/2021 1	Aspikom Makassar	Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pemagangan, Pengawasan Isi Siaran, Sosialisasi, dan Literasi Media	14 Sept 2021
16/KPI/HK.04.02/MoU/09/2021 1	Universitas Ibn Khalidun Bogor	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	16 Sept 2021
17/KPI/HK.04.02/MoU/12/2021 1	Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) NTB	Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pemagangan, Pengawasan Isi	2 Desember 2021

		Siaran, Sosialisasi, dan Literasi Media	
--	--	-----------------------------------------	--

### 3.2. PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL
01/KPI/HK.04.02/PKS/03/2021 236/UN6.K/PKS/2021	KPI- Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran	Survei Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan Publik	1 Maret 2021
02/KPI/HK.04.02/PKS/03/2021 2481/UN7.5.7.2/KS/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	1 April 2021
03/KPI/HK.04.02/PKS/04/2021 394/UN6.K/PKS/2021	KPI- Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	9 April 2021
04/KPI/HK.04.02/PKS/04/2021 B-186/Un.02/DSH/PP.00.9/4/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	9 April 2021
05/KPI/HK.04.02/PKS/04/2021 631/UN8.1.13/KS/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	9 April 2021
06/KPI/HK.04.02/PKS/04/2021 B/17291/UN38.4/KS.01/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	9 April 2021
07/KPI/HK.04.02/PKS/04/2021 PKS/001/UN61/FISIP/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	9 April 2021
08/KPI/HK.04.02/PKS/04/2021 3099/UN4.8/HK.07.00/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	9 April 2021
09/KPI/HK.04.02/PKS/04/2021 3568/UN5.2.1.9/KPM/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	12 April 2021
10/KPI/HK.04.02/PKS/04/2021 4517/UN.22.5/HK07/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	13 April 2021
11/KPI/HK.04.02/PKS/04/2021 1104/UN13.1.2/LL/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	13 April 2021
12/KPI/HK.04.02/PKS/04/2021 212/UN16.08.D/HK.07.00/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	13 April 2021

13/KPI/HK.04.02/PKS/04/2021 B/1156/UN14.2.11/HK.07.00/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana	Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	19 April 2021
14/KPI/HK.04.02/PKS/07/2021	KPI- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin	Penyelenggaraan Konferensi Penyiaran Indonesia dan Seminar Nasional Komunikasi dan Media Penyiaran	30 July 2021

#### 4. TAHUN 2022 (PERIODE JANUARI-DESEMBER)

##### 4.1. NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL
01/KPI/HK.04.02/MoU/2022 KH-41/UN.16.R/HK.07.00/2022	KPI-Universitas Andalas	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	24 Feb 2022
02/KPI/HK.04.02/MoU/2022 3685/UN22/HK.07.00/2022	KPI-Universitas Tanjungpura	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran yang Sehat di Indonesia	25 Feb 2022
03/KPI/HK.04.02/MoU/2022 35 Tahun 2022	KPI-Universitas Gorontalo	Peningkatan Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Penyiaran	2 Maret 2022
04/KPI/HK.04.02/MoU/2022	KPI-IAIDA Blokagung Banyuwangi	Peningkatan Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Penyiaran	18 Maret 2022
05/KPI/HK.04.02/MoU/2022 000/R.UMK/Sek/C.06.01/VI/2022	KPI-Universitas Muria Kudus	Peningkatan Kerja Sama di Bidang Penyelenggaraan Penyiaran	21 Juli 2022
06/KPI/HK.04.02/MoU/2022 xx/UN.63.4/KS/2022	KPI-UPN Veteran Jawa Timur	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Penyiaran di Indonesia	31 Agustus 2022
07/KPI/HK.04.02/MoU/2022 1979/K.8/FAI-UIKA/2022	KPI-UIKA Bogor	Kerjasama Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi	2 September 2022
08/KPI/HK.04.02/MoU/2022 KS.01.02.1.2.11.22.40	KPI-BPOM	Pengawasan Isi Siaran Di Bidang Obat Dan Makanan	7 November 2022
09/KPI/HK.04.02/MoU/2022 0395/UM.170.01.01./III/XII/2022	KPI - Institut KH Abdul Chalim	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Penyiaran di Indonesia	23 Desember 2022
10/KPI/HK.04.02/MoU/2022	KPI-Universitas	Tri Dharma Perguruan	6 Desember

4163/A-UIR/5-2022	Islam Riau	Tinggi	2022
11/KPI/HK.04.02/MoU/2022 080/UN51.6/KS/2022	KPI-Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Peningkatan Kerjasama dalam Mewujudkan Penyiaran Yang Sehat di Indonesia	3 Februari 2022

#### 4.2. PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL
01/KPI/HK.04.02/PKS/2022 2127/UN4.8.7/HK.07.00/2022	KPI-Universitas Hasanuddin	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	24 Feb 2022
02/KPI/HK.04.02/PKS/2022 B-142/Un.02/DSH/PP.00.9/02/2022	KPI-UIN Sunan Kalijaga	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	24 Feb 2022
03/KPI/HK.04.02/PKS/2022 PKS/001.1/UN61/FISIP/2022	KPI-UPN Veteran Jakarta	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	24 Feb 2022
04/KPI/HK.04.02/PKS/2022 2361/UN5.2.1.9/KPM/2022	KPI-Universitas Sumatera Utara	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	24 Feb 2022
05/KPI/HK.04.02/PKS/2022 346/UN13.1.2/PKS/2022	KPI-Universitas Pattimura	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	24 Feb 2022
06/KPI/HK.04.02/PKS/2022 860/UN8.1.13/KS/2022	KPI-Universitas Lambung Mangkurat	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	24 Feb 2022
07/KPI/HK.04.02/PKS/2022 155/UN6.K/PKS/2022	KPI-Universitas Padjadjaran	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	24 Feb 2022
08/KPI/HK.04.02/PKS/2022 B/21083/UN38.4/KS.01/2022	KPI-Universitas Negeri Surabaya	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	24 Feb 2022
09/KPI/HK.04.02/PKS/2022 B/4/UN14.2.11/HK.07.00/2022	KPI-Universitas Udayana	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	24 Feb 2022
10/KPI/HK.04.02/PKS/2022 2008/UN7.5.7.2/KS/2022	KPI-Universitas Diponegoro	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	24 Feb 2022

11/KPI/HK.04.02/PKS/2022	KPI-Universitas Andalas	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	1 Mar 2022
12/KPI/HK.04.02/PKS/2022 2996/UN.22.05/PK.02.01/2022	KPI-Universitas Tanjungpura	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	25 Feb 2022
13/KPI/HK.04.02/PKS/2022 494/UN47.B2/HK.04/2022	KPI-Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo	Survei Kebutuhan Program Siaran untuk Penyelenggaraan Siaran Digital melalui Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan Publik	2 Maret 2022
14/KPI/HK.04.02/PKS/2022 015/Pan.01/IV/2022	KPI-UIN Sunan Kalijaga	Konferensi Penyiaran	24 Maret 2022
15/KPI/HK.04.02/PKS/2022	KPI-IAIDA Blokagung Banyuwangi	Survei Kebutuhan Program Siaran untuk Penyelenggaraan Siaran Digital melalui Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan Publik	18 Maret 2022

**REKAPITULASI PRODUK KERJA SAMA LEMBAGA  
PERIODE AGUSTUS 2019 - DESEMBER 2022**

JENIS PRODUK	JUMLAH
Nota Kesepahaman	31 (tiga puluh satu)
Perjanjian Kerja Sama	40 (empat puluh)

## **VII. PRODUK LEGISLASI KPI**

### **PRODUK HUKUM LAINNYA**

#### **1. TAHUN 2019 (PERIODE AGUSTUS-DESEMBER)**

##### **1.1. KEPUTUSAN KPI**

NOMOR	PENANDATANGAN	TENTANG	TANGGAL
01 Tahun 2019	Ketua KPI	Penjatuhan Sanksi (kewenangan penjatuhan sanksi oleh KPI dan KPID)	6 Mei 2019

02 Tahun 2019	Ketua KPI	Penetapan Komposisi PPNPN di Lingkungan KPI Pusat	19 Des 2019
590/K/KPI/31.2/12/2019	Ketua KPI	Batasan Pengertian Program Siaran dengan Format Sejenis dalam Ketentuan Penghentian Sementara	17 Des 2019

## 1.2. PEDOMAN

NOMOR	PENANDATANGAN	TENTANG	TANGGAL
01 Tahun 2019	Ketua KPI	Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Lembaga Penyiaran	6 Mei 2019

## 1.3. SURAT EDARAN

Surat Edaran Ketua KPI Pusat Nomor 591/K/KPI/31.2/12/2019 tentang Program Siaran Infotainment di Lembaga Penyiaran Televisi (Ditandatangani oleh Ketua KPI Agung Suprio tanggal 17 Desember 2019)

Substansi: Batasan bagi lembaga penyiaran televisi dalam menayangkan program siaran infotainment serta klasifikasi program siaran yang dapat menyiarkan muatan tersebut.

## II. TAHUN 2020 (PERIODE JANUARI-DESEMBER)

### II.1. KEPUTUSAN

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL
0283/K.Bawaslu/HM.02.00/VIII/2020 21/PR.07- NK/01/KPU/VIII/2020 02/K/KPI/HK.03.02/08/2020 02/DP/MoU/VIII/2020	KEPUTUSAN BERSAMA Bawaslu-KPU-KPI-Dewan Pers	Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber.	12 Agustus 2020
05 Tahun 2020	Ketua KPI	Perhitungan masa jabatan anggota KPI Pengganti antar waktu dalam pemilihan calon anggota KPI masa jabatan berikutnya	26 Mei 2020
07 Tahun 2020	Ketua KPI	Pedoman Evaluasi Tahunan Persyaratan Program Siaran Lembaga Penyiaran Swasta	19 Agustus 2020
12 tahun 2020	Ketua KPI	Dukungan Lembaga Penyiaran dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Persebaran COVID-19	25 November 2020

### II.2. SURAT EDARAN

- 1) Surat Edaran KPI Pusat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dalam Tatanan Kebiasaan Baru di Lingkungan KPI Pusat dan Daerah Seluruh Indonesia (10 Agustus 2020)
- 2) Surat Edaran KPI Pusat Nomor 146/K/KPI/31.2/03/2020 tentang Klasifikasi Program dan Surat Tanda Lulus Sensor di Lembaga Penyiaran Televisi  
Substansi:  
Agar seluruh LP memperhatikan Batasan dalam menayangkan program siaran :
  - Klasifikasi Program: wajib mencantumkan klasifikasi berdasarkan kelompok usia dan tidak berubah selama program masih ditayangkan.

- STLS: wajib memperhatikan peraturan KPI tentang sensor, termasuk dalam promo film
- 3) Surat Edaran KPI Pusat Nomor 123/K/KPI/31.2/03/2020 tentang Penyiaran Wabah Corona. (Ditandatangani oleh Ketua KPI Agung Suprio tanggal 4 Maret 2020)  
Substansi:
    - a. Ketentuan mengenai penyiaran dan pemberitaan mengenai penyebaran wabah virus Corona
    - b. Penyampaian sumber resmi perihal informasi virus Corona
  - 4) Surat Edaran KPI Pusat Nomor 164/K/KPI/31.2/03/2020 tentang Imbauan Tidak Bersiaran pada Hari Raya Nyepi Tahun 2020 di Provinsi Bali
  - 5) Surat Edaran KPI Pusat Nomor 166/K/KPI/31.2/03/2020 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadhan (Ditandatangani oleh Ketua KPI Agung Suprio tanggal 18 Maret 2020).  
Substansi: ketentuan mengenai pelaksanaan dan pengawasan siaran bagi lembaga penyiaran di bulan Ramadhan.
  - 6) Surat Edaran KPI Pusat Nomor 183/K/KPI/31.2/03/2020 tentang Imbauan dan Evaluasi Muatan Siaran di Masa Pandemi COVID19
  - 7) Surat Edaran KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dalam Tatanan Kebiasaan Baru di Lingkungan KPI Pusat dan Daerah Seluruh Indonesia (ditandatangani oleh Ketua KPI Pusat Agung Suprio tanggal 10 Agustus 2020)  
Substansi: mekanisme pelaksanaan kegiatan pelayanan public di kantor dan di luar kantor KPI Pusat dan KPI Daerah seluruh Indonesia.
  - 8) Surat Edaran KPI Pusat Nomor 447/K/KPI/31.2/09/2020 tentang Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Lembaga Penyiaran. (Ditandatangani oleh Ketua KPI Agung Suprio tanggal 30 September 2020)  
Substansi:
    - a. Definisi nomenklatur terkait pemilu
    - b. Ketentuan Materi Kampanye, Durasi, dan Spot Iklan Kampanye serta Iklan Layanan Masyarakat pada Pemilukada Serentak Tahun 2020
    - c. Ketentuan program siaran pasca penetapan pasangan calon pemilukada 2020
    - d. Ketentuan program siaran di masa kampanye, masa tenang, serta pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

### III. TAHUN 2021 (PERIODE JANUARI-DESEMBER)

#### III.1. KEPUTUSAN KPI

NOMOR	TENTANG	TANGGAL	LAMPIRAN
1 Tahun 2021	Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun Anggaran 2021	1 Maret 2021	1. Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPI Pusat 2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi 3. Struktur Organisasi PPID KPI Pusat 4. Organisasi PPID (nama ybs)
3 Tahun 2021	Pembentukan Tim Penanganan dan Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Seksual di KPI	16 Nov 2021	Komposisi nama dan masa kerja tim penanganan

#### III.2. SURAT EDARAN

1. Surat Edaran KPI Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Imbauan Tidak Bersiaran pada Hari Raya Nyepi Tahun 2021 di Provinsi Bali (Ditandatangani oleh Ketua KPI Agung Suprio tanggal 12 Maret 2021)  
Substansi: durasi pelaksanaan larangan siaran, sasaran pelaksana imbauan, dan pengawasan siaran bagi lembaga penyiaran selama Hari Raya Nyepi.
2. Surat Edaran KPI Pusat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadhan (Ditandatangani oleh Ketua KPI Agung Suprio tanggal 17 Maret 2021)  
Substansi: ketentuan mengenai pelaksanaan dan pengawasan siaran bagi lembaga penyiaran di bulan Ramadhan.

#### IV. TAHUN 2022 (PERIODE JANUARI-DESEMBER)

##### IV. I. KEPUTUSAN KPI

NOMOR	PARA PIHAK	TENTANG	TANGGAL
Nomor 1 Tahun 2022	KPIP	Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	16 Sep 2022
Nomor 2 Tahun 2022	KPIP	Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	16 Sep 2022

##### IV.2. SURAT EDARAN

NOMOR	PENANDATANGAN	TENTANG	TANGGAL
01 Tahun 2022	Ketua KPI	Imbauan Tidak Bersiaran pada Hari Raya Nyepi Tahun 2022 di Provinsi Bali	24 Feb 2022

##### IV. 3. PERATURAN KPI

NOMOR	PENANDATANGAN	TENTANG	TANGGAL
01 TAHUN 2022	Ketua KPI	Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia	November 2022
02 TAHUN 2022	Ketua KPI	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Komisi Penyiaran Indonesia	November 2022
03 TAHUN 2022	Ketua KPI	Rekomendasi Pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Karena Tidak Melakukan Siaran	November 2022

REKAPITULASI PRODUK HUKUM LAINNYA  
PERIODE AGUSTUS 2019 - DESEMBER 2022

JENIS PRODUK	JUMLAH
Keputusan	11 (sebelas)
Pedoman	1 (satu)
Edaran	12 (dua belas)
Peraturan	3 (tiga)

## VIII. HUBUNGAN INTERNASIONAL

Kunjungan Kerja Keluar Negeri ini dimaksudkan untuk secara langsung mendapatkan penjelasan, masukan, dan informasi mengenai regulasi penyiaran di Negara yang di kunjungi serta pengalamannya dalam mengelola kegiatan penyiaran di negara tersebut serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas Komisi Penyiarain Indonesia.

Tujuan dilakukannya kunjungan kerja ke luar negeri adalah untuk; (1) Meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara. (2) Mendapatkan gambaran secara umum mengenai konsep dan sistem penyiaran yang diselenggarakan oleh negara yang dikunjungi. (3) Mempelajari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyiaran di negara tujuan.

### VIII. 1. Kunjungan Kerja Luar Negeri Tahun 2021

#### VIII. 1. 1. Kunjungan Kerja ke Turki

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat melakukan Kunjungan Kerja ke Turki pada tanggal 26 Juni – 4 Juli 2021 dalam rangka menghadiri undangan dari Republic Of Turkey Radio And Television Supreme Council dan GLOBAL AGENCY. Adapun Delegasi yang berangkat dalam kunjungan tersebut adalah Hardly Stefano Fenelon Pariela (Komisioner KPI Pusat), Nuning Rodiyah (Komisioner KPI Pusat) dan Sinar Ria Belawati (Sekretariat KPI Pusat).

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Delegasi KPI selama di Turki adalah sebagai berikut: Melakukan Kunjungan ke Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTUK) didampingi oleh Dionnisius E.Swasono dan Raditya Aji Wisnumurtidari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Turki. Dari pihak RTUK sendiri sebagai regulator penyiaran Turki hadir President Ehubekir Şahin dan beberapa anggota Dewan Tertinggi maupun staf RTUK diantaranya

Ibrahim Uslu, Orhan Zdemir dan Taha Yucel. Selain itu, juga berkunjung secara resmi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Turki yang terletak di Prof. Dr. Aziz Sancar Cd. No. 10 PO Box 42 Çankaya 06680 Ankara, dan diterima oleh Erika Yulia dan Raditya Aji Wisnumurtidari. Dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan dengan Global Agency di kota Istanbul, delegasi KPI diterima oleh *Chief Executive Officer (CEO)*, Izzet Pinto dan *Head of Marketing Communications*, Duygu Safak . Delegasi KPI sendiri didampingi oleh Raditya Aji Wisnumurtidari dari KBRI dan Khotijahtus Sadiyah dari KJRI. Dalam pertemuan disampaikan bahwa Global Agency adalah salah satu distributor konten TV terkemuka di dunia, yang menawarkan portofolio konten siaran yang inovatif untuk memenuhi imajinasi dan selera penonton di seluruh dunia, khususnya Turki. Delegasi KPI juga berkunjung secara resmi ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang terletak Esentepe, Keskin Kalem Sokağı No:13, 34394 Şişli/İstanbul, dan diterima oleh Budi Suparno dan Khotijahtus Sadiyah. Atas rekomendasi RTUK dan difasilitasi oleh Global Agency, delegasi KPI didampingi oleh Raditya Aji Wisnumurtidari (KBRI) dan Khotijahtus Sadiyah (KJRI) mengunjungi Menara Çamlıca yang terletak di bukit Çamlıca, distrik sküdar di kota Istanbul. Menara dibangun pada bukit yang terletak pada ketinggian 218 meter dari permukaan laut, di atas lahan seluas 30 ribu 150 meter persegi. Memiliki total 49 lantai, 4 lantai di bawah tanah dan 45 lantai di atas permukaan.

Secara umum Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTUK) memiliki kesamaan tugas pokok dan fungsi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), namun ada beberapa hal yang membedakan, yaitu: Masa jabatan anggota dewan RTUK adalah selama 6 tahun, dan dapat dipilih kembali tanpa ada batasan maksimal jabatan. Selain memiliki kewenangan perijinan dan pengawasan siaran, RTUK juga memiliki kewenangan melaksanakan pengukuran kepemirsaaan / *audience measurument*. RTUK memiliki kewenangan mengawasi siaran melalui layanan internet atau *Over The Top (OTT)*.



Delegasi KPI Pusat sesaat setelah melakukan pertemuan dengan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu/RTUK

### VIII. 1. 2. Kunjungan Kerja ke Swiss

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melakukan kunjungan kerja ke Swiss. Kunjungan kerja ini berdasarkan undangan dari *Direct Antenna Control System (DAC SYSTEM SA)*, pada tanggal 1-10 Oktober 2021 di Manno-Switzerland. Dalam kunjungan kerja tersebut, Delegasi KPI Pusat terdiri dari Mulyo Hadi Purnomo (Komisioner, Wakil Ketua KPI Pusat), Irsal Ambia (Komisioner, Koordinator Kelembagaan KPI Pusat) dan Mimah Susanti (Komisioner, Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat). Adapun tujuan dari Kunjungan tersebut adalah salah satunya diskusi tentang sistem pengawasan penyiaran digital Televisi menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)*.

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Delegasi selama di Swiss adalah melakukan pertemuan dengan *DAC System SA*. *DAC* adalah perusahaan startup yang bergerak pada jasa pelayanan infrastruktur dan pengembangan *software* penyiaran yang berbasis di Lugano, Swiss. Selama ini *DAC* telah melakukan peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur penyiaran di berbagai negara termasuk di Indonesia. Delegasi juga melakukan pertemuan dengan *AGIRE Foundation*. *Agire Foundation* adalah sebuah badan atau agensi pemerintah dalam hal peningkatan inovasi dan teknologi di Swiss. Pemerintah Swiss mendukung secara serius peningkatan teknologi melalui *Regional Innovation System (RIS)* yang mana *Agire Foundation* sebagai agensi khusus pemerintah bertanggung jawab dalam mendorong, membina dan mengakomodasi perusahaan *start up* bidang teknologi untuk berkembang dan membangun jaringan. Selama di Swiss juga melakukan Pertemuan dengan

*Swisscom*. *Swisscom* adalah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi milik pemerintah yang paling besar di Swiss. Disamping itu, juga melakukan Pertemuan dengan *SYES* Italia di Swiss. *SYES* Italia adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur penyiaran di seluruh dunia. Perusahaan ini berbasis di Italia dan telah melebarkan sayapnya hingga di Indonesia. Beberapa lembaga penyiaran di Indonesia merupakan klien dari mereka. Delegasi juga melakukan Kunjungan ke KBRI Swiss di Bern.

Majunya infrastruktur sistem penyiaran digital negara Switzerland, salah satunya adalah karena kebijakan yang diterapkan Pemerintah Switzerland, yakni adanya pengaturan *tower*, pengaturan sistem penyiaran digital dan tata kelola bisnis yang sehat. Oleh karena itu, KPI diharapkan agar membangun jejaring global dan internasional dengan lebih baik melalui forum penyiaran internasional dan berperan aktif pada jaringan penyiaran global sehingga dapat membangun kerjasama yang lebih erat dengan banyak pihak internasional untuk mendukung peningkatan kapasitas KPI menjadi lebih modern dan berwibawa. Hal ini menjadi sangat penting mengingat teknologi di negara maju saat ini sangat mempengaruhi model penyelenggaraan penyiaran secara global. KPI harus menjawab berbagai tantangan kemajuan teknologi diantaranya dengan memperkuat kemitraan global dengan berbagai pihak di level internasional.



(Kunjungan KPI Pusat ke DAC)

### VIII. 1. 3. Kunjungan Kerja ke Amerika Serikat

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat melakukan Benchmarking ke Amerika Serikat dalam rangka pengumpulan bahan data dan informasi persiapan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam penyusunan regulasi tentang penyiaran menghadapi kebijakan/keputusan *Analog Switch Of (ASO)* peralihan TV Analog ke TV Digital Tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 22 Oktober 2021 di Amerika Serikat. Adapun pimpinan delegasi dan rombongan KPI yang melakukan benchmarking ke Amerika Serikat yaitu Bapak Yuliandre Darwis sebagai Pimpinan Delegasi/Komisioner, dengan anggota tim Bapak Hardly Stefano Pariela/Komisioner, Ibu Nuning Rodiyah/Komisioner dan Bapak Umri/Kepala Sekretariat KPI Pusat.

Selama di Amerika Serikat, Delegasi Komisi Penyiaran Indonesia melakukan audiensi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles pada tanggal 7 Oktober 2021. Delegasi KPI diterima langsung oleh Konjen RI Los Angeles Bapak Saud Purwanto Krisnawan didampingi oleh Ardian Budhi Nugroho Konsul Protokol dan Konsuler serta Fadly Ahmad Konsul Penerangan dan Sosial Budaya II. Selanjutnya Delegasi KPI yang didampingi oleh Bapak David Konsul Bidang Perekonomian KJRI LA melakukan pertemuan dengan Produser Mr. Demian berlokasi di kantor KJRI Los Angeles pada tanggal 8 Oktober 2021. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2021 melakukan pertemuan dengan produser Ms. Livi Zheng warga Indonesia yang tinggal di Los Angeles dan mendirikan Sun and Moon Films, salah satu perusahaan film dan production house yang telah mampu berkiprah di Amerika Serikat. Adapun isu yang dibicarakan perihal kerjasama produser dengan Lembaga penyiaran di Amerika Serikat. Bagaimana pola kerja samanya. Bagaimana system pengawasan. Dilanjutkan Delegasi KPI pada tanggal 11 Oktober 2021 melakukan pertemuan dengan NAB, yaitu asosiasi untuk penyiar televisi maupun radio di Amerika Serikat yang bertujuan mewakili dan memajukan kepentingan anggota dalam relasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di pemerintahan, industri dan urusan publik.

Delegasi KPI melakukan Focus group Discussion dengan Profesor Haryadi Gumawi di *The University Of Chicago* pada tanggal 13 Oktober 2021 Dalam pertemuan tersebut KPI ingin menggali konsep, design dan strategi apa yang diperlukan ketika KPI ingin menggunakan *system artificial Intelligence (AI)* dalam hal konteks pengawasan TV Digital. Pada tanggal 15 Oktober 2021 Delegasi KPI juga melakukan FGD dengan VOA New York perihal apa yang harus disiapkan oleh Lembaga penyiaran dalam proses pembuatan konten, bagaimana proses distribusi konten pada era tv digital di Amerika.

Pertemuan sekaligus diskusi dengan VOA New York diterima oleh Naratama Rukmananda Program Director, East Asia Pasific Division/Indonesia Service VOA New York yang juga duduk sebagai salah satu penasehat Asosiasi Radio Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Oktober 2021, Delegasi KPI melakukan diskusi dengan Pengurus HIPMI New York Bpk. Maulana dan Ibu Suci. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor KJRI New York. Dalam pertemuan tersebut delegasi KPI ingin berdiskusi tentang pembuatan konten di Amerika Serikat, potensi industri konten di Amerika Serikat serta peluang dan tantangannya untuk konten kreator Indonesia. Delegasi KPI dengan didampingi Bapak Bhayu Konsul Pensosbud KJRI New York pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di kantor Nielsen di New York melakukan focus group discussion dengan pimpinan Nielsen. Pada tanggal 20 Oktober 2021, Delegasi KPI didampingi Ibu Febria dan Bapak Dedy Konsul KBRI DC bertempat di kantor VOA Washington DC yang beralamat 330 Independence Ave SW. Wasingthon DC 20237 Amerika Serikat melakukan pertemuan dengan pimpinan VOA. Adapun pokok pembicaraan dalam diskusi tersebut adalah membahas dinamika industri penyiaran di era digital di Amerika dan dinamika VOA bersiaran dimasa pandemi Covid 19.

Dalam rangka mengembangkan industri penyiaran di Indonesia KPI mendorong lembaga penyiaran dan asosiasi lembaga penyiaran untuk membuka peluang bekerjasama atau sharing diskusi dengan lembaga penyiaran atau asosisasi lembaga penyiaran di Amerika Serikat dengan melibatkan pihak KJRI LA.



(Kunjungan KPI Pusat ke Produser Mr. Demian)

#### VIII. 1. 4. Kunjungan Kerja ke Swiss

Delegasi KPI melakukan Kunjungan ke Swiss pada tanggal 15 – 25 Oktober 2021 sebagai tindaklanjut dari pembahasan kunjungan sebelumnya terkait gambaran secara teknologi tentang sistem pengawasan penyiaran televisi digital. Delegasi KPI dalam kunjungan ini dipimpin oleh Ketua KPI Pusat, Agung Suprio dan Koordinator Bidang PS2P, Mohamad Reza.

Delegasi KPI selama di Swiss melakukan pertemuan dengan Mr. Antonio Carzaniaga dari Universitas of Lugano, Svizzera. Pertemuan dan diskusi terbatas KPI dengan Mr. Antonio Carzaniaga dilaksanakan untuk membahas kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi terkait kebutuhan konten siaran. Selain itu juga menghadiri undangan diskusi dengan *DAC System SA* yang merupakan perusahaan *startup* yang bergerak pada jasa pelayanan infrastruktur dan pengembangan *software* penyiaran yang berbasis di Lugano, Swiss. Delegasi KPI juga melakukan pertemuan dengan *Swisscom* yang merupakan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi milik pemerintah yang paling besar di Swiss. Tugas dan fungsi dari *Swisscom* melayani jaringan telekomunikasi dan berperan dalam penyediaan layanan jasa penyiaran. Selanjutnya, Delegasi KPI melakukan Kunjungan ke KBRI di Bern Swiss sekaligus untuk melaporkan pertemuan dengan beberapa Lembaga di Swiss dan bersilaturahmi dengan KBRI di Bern, Switzerland. Pada kunjungan ini, Delegasi KPI diterima langsung oleh duta besar Republik Indonesia di Swiss, Prof. Dr. Muliaman D. Hadad.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari kunjungan ini adalah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas program yang terkait dengan peningkatan kemampuan pengawasan konten siaran serta peningkatan kemampuan pengawasan konten siaran dan pemahaman tentang penyiaran digital yang dapat meningkatkan kualitas industri penyiaran dan konten siaran yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran. Terjalinnnya hubungan Kerjasama yang lebih baik antara KPI Pusat dengan Lembaga di Swiss (*DAC System SA*, *Swisscom* dan Universitas della Svizzera Italiana).



(Kunjungan KPI Pusat ke Swisscom)

## VIII. 2. Kunjungan Kerja Luar Negeri Tahun 2022

### VIII.2.1. Los Angeles dan Las Vegas Amerika Serikat

Pada tanggal 16 – 27 April 2022 Komisioner KPI Pusat yaitu Hardly Stefano F. Pariela, Yuliandre Darwis dan Nuning Rodiyah melaksanakan perjalanan dinas luar negeri dalam rangka “Pengumpulan Informasi Terkait Dinamika Produksi Konten Media Konvensional Di Era Digital” di Los Angeles dan Las Vegas Amerika Serikat. Yang menjadi dasar dari kegiatan benchmarking tersebut adalah Surat Kementerian Sekretariat Negara RI No. B-00000254/Kemensetneg/Ses/Simpel/04/2022. Tujuan pelaksanaan kegiatan benchmarking adalah menggali informasi dan memberikan pandangan kepada Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Los Angeles mengenai keinginan dan inisiasi menjadi konten kreator bidang perfilman, menggali informasi perihal *copyright* konten penyiaran dan menyaksikan hasil kerjasama konten penyiaran Indonesia – Amerika, menggali informasi perihal strategi menghasilkan konten yang baik serta berkualitas, menggali informasi perihal bagaimana perkembangan media dan dinamika audiens produksi konten, menggali informasi perihal perkembangan teknologi produksi konten di era digital, menggali informasi perihal proses produksi konten, menggali informasi perihal usaha dan bidang kerja bidang perfilman yang dilaksanakan Diaspora Indonesia di Amerika, menggali informasi mengenai teknologi AI sebagai alat monitoring untuk kepatuhan siaran di media.

Komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan; Yuliandre Darwis Ph.D, Hardly Stefano F P, dan Nuning Rodiyah menghadiri pertemuan dengan Konsulat Jenderal RI di Los Angeles, Bapak Saud Purwanto Krisnawan. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Konjen, Gedung KJRI Los Angeles 3457 Wilshire blvd, Los Angeles, California. Komisioner KPI Pusat menyebutkan bahwa California menjadi kota industri animasi terbaik di dunia. Buktinya, industri animasi dunia seperti 20th Century Fox, DreamWorks, Metro-Goldwyn-Mayer, Pixar Animation, Walt Disney, dan banyak lagi.



Delegasi KPI Pusat berfoto bersama dengan Konjen RI untuk Los Angeles (kiri ke kanan: Pensosbud KJRI Fadhly Ahmad, Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah, Konjen RI untuk Los Angeles Saud Purwanto Krisnawan, Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis dan Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano)

Selanjutnya Komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan; Yuliandre Darwis Ph.D, Hardly Stefano F P, dan Nuning Rodiyah juga menghadiri undangan diskusi penyiaran dengan Permias. Permias adalah singkatan dari Persatuan / Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Permias sendiri merupakan salah satu bentuk PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) yang khusus menaungi mahasiswa-mahasiswi Indonesia yang bermukim di AS. Perhimpunan ini didirikan pertama kali di ibu kota AS, yaitu Washington D.C. pada tanggal 24 Desember 1961. Kini Permias telah bercabang di berbagai kota besar di Amerika dan masing-masing Permias memiliki agenda kegiatannya sendiri-sendiri. Negara Amerika Serikat Dikenal sebagai negara yang memiliki banyak Perguruan

Tinggi yang diantaranya terdapat Perguruan Tinggi terbaik di dunia. Oleh karena itu, selain Hollywood-nya daya tarik Amerika untuk dikunjungi adalah untuk menuntut ilmu. Banyak universitas yang menjadi universitas terbaik di dunia, diantaranya Perguruan Tinggi yang terdapat di Amerika Serikat seperti Harvard University, Yale, Columbia University, University of Chichago, hingga Massachutes.



Delegasi KPI Pusat disambut hangat oleh Livi Zheng & Crew  
(kiri ke kanan: Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano, Yulandre Darwis, Nuning Rodiyah, Pendiri Sun and Moon Films Livi Zheng dan crew)

Dengan difasilitasi oleh pihak KJRI dan didampingi langsung oleh Konsul Jenderal Los Angeles, Delegasi KPI juga melakukan pertemuan dengan Mouly Surya yang telah memproduksi dan menjadi sutradara beberapa film diantaranya “*What They Don’t Talk About When They Talk About Love*” dan “*Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak*”. Mouly menceritakan tentang dinamika bekerja sama dengan sineas Amerika Serikat, khususnya dalam produksi film berjudul “*Trigger Warning*”, yang sedang dalam proses penggarapan.



Delegasi KPI Pusat berfoto dengan Mouly Surya dan KJRI untuk Los Angeles (kiri ke kanan: Pensosbud KJRI Fadhly Ahmad, Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis, Mouly Surya, Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah, Konjen RI Saud Purwanto Krisnawan, Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano)

Rangkaian perjalanan dinas luar negeri kali ini juga berfokus kepada bagaimana konten kreator Indonesia khususnya yang sedang berkuliah di luar negeri dapat berkarya di negeri sendiri serta membuka lapangan pekerjaan baru melalui karya karya yang dibuat. Salah satu mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di US tepatnya di University of Southern California atau USC. University of Southern California atau USC adalah universitas top lainnya di California yang meraih gelar di bidang animasi. USC dimulai pada tahun 1880 dan telah menawarkan berbagai program gelar dalam beberapa disiplin ilmu kepada lebih dari 45,000 siswa. Namun, Divisi Animasi & Seni Digital John C. Hench menawarkan program animasinya. Program animasi USC berada di divisi sarjana dan pascasarjana. Pertemuan ini dihadiri oleh beberapa mahasiswa yang menjelaskan keterarikannya dalam mengubah serta merevolusi industri penyiaran di Indonesia, karena menurut pandangannya, Indonesia sebagai pasar adalah primadona di Asia dan juga Dunia, maka dari itu jika ada sineas maupun Creative Creator yang mampu dan memiliki gagasan maju bisa merevolusi industri penyiaran secara konten di Indonesia.



Delegasi KPI Pusat dan Pensosbud KJRI Fadhly Ahmad berfoto dengan beberapa mahasiswa Indonesia didepan Mc Carthy Honors College

Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah dan Hardly Stefano melakukan pertemuan dengan Bapak Bayu dari Konsul Perdagangan KJRI di Los Angeles untuk mengetahui tugas serta fungsi lembaga tersebut. Konsul Perdagangan adalah pegawai negeri sipil Kementerian Perdagangan yang ditempatkan di perwakilan tertentu untuk melaksanakan urusan perdagangan antara Indonesia dan Negara penerima dan Negara lain yang menjadi wilayah akreditasi perwakilan tersebut. Konsul Perdagangan memperoleh status diplomatik dari Menteri Luar Negeri, ia bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan dan Menteri Perdagangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan Yulianre Darwis juga menghadiri diskusi dengan Komisariss Telkom Indonesia yang sekaligus menjabat sebagai Staf Khusus Kepala BIN, Marcelino Pandin didampingi oleh Konsulat Jenderal RI di Los Angeles, Saud Krisnawan, Konsulat Pensosbud RI di Los Angeles Fadhly Ahmad, dan Konsulat Ekonomi Feddy Fachrurrozi Djafar. Dalam pertemuan kali ini, Komisioner KPI Pusat berdiskusi mengenai kemungkinan kolaborasi pengawasan televisi digital bersama Telkom Indonesia. Migrasi televisi analog menuju digital merupakan sebuah keniscayaan. Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Masyarakat Indonesia diminta mendukung transformasi siaran televisi digital di Tanah Air, termasuk kolaborasi KPI dengan semua pihak. Migrasi televisi Indonesia dari analog ke digital tentu membawa sejumlah manfaat, salah satunya adalah adanya diversifikasi konten siaran atau semakin beragamnya konten-konten siaran di Indonesia. Konten edukatif dan kreatif tentu akan semakin banyak bermunculan. Hal ini membuat KPI Pusat menjadi penting

menjalankan peranannya sebagai regulator yang juga mengawasi konten siaran di Indonesia. P3SPS yang merupakan akronim Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran memuat acuan bagi KPI dalam menjalankan pengawasan terhadap setiap program penyiaran selama 24 jam setiap harinya.

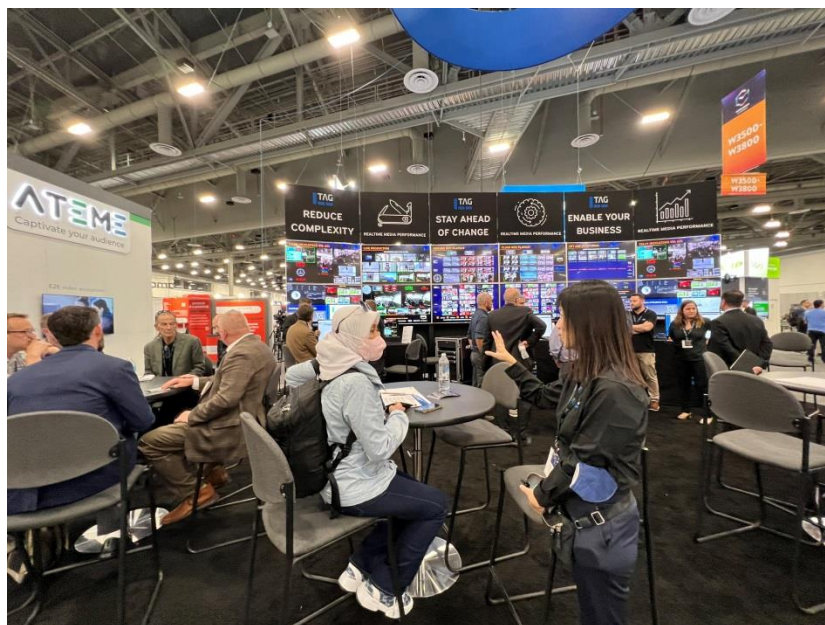


Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis berfoto dengan Komisaris Telkom Indonesia yang sekaligus menjabat sebagai Staf Khusus Kepala BIN, Marcelino Pandin didampingi oleh Konsulat Jenderal RI di Los Angeles, Saud Krisnawan, Konsulat Pensosbud RI di Los Angeles Fadhly Ahmad, dan Konsulat Ekonomi Feddy Fachrurrozi Djafar

Agenda selanjutnya Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano dan Nuning Rodiyah menghadiri *event NAB Show*, pertemuan ini membahas mengenai *vision of NAB* Bersama Presiden dan CEO NAB serta *Afternoon comedy* Jim Graffigan. NAB Show adalah konvensi media tahunan Amerika dimana perusahaan penyiaran dan elektronik memamerkan inovasi terbaru mereka yang diselenggarakan oleh National Association of Broadcasters (NAB). Pameran ini dirancang untuk mendorong pendengar dan melibatkan pemirsa dalam jumlah yang lebih besar serta jangkauan yang lebih luas.



Komisioner Hardly Stefano mengunjungi booth – booth di National Association of Broadcasters (NAB) Las Vegas untuk menggali informasi tentang Real Time Media Performance



Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah berdiskusi dengan Media Executive di National Association of Broadcaster (NAB)

Adapun Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan benchmarking di Amerika Serikat ini adalah :

- Regulasi: Perlu upaya mendorong perubahan UU Penyiaran agar sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan dinamika media.
- Konten: Perlu peningkatan kualitas konten siaran Indonesia agar dapat bersaing di market place global melalui berbagai aplikasi dan platform Video streaming di Internet.
- Teknologi: KPI harus melakukan peningkatan infrastruktur pengawasan konten siaran sesuai dengan perkembangan teknologi, khususnya dengan menggunakan *Artificial Intelligence (AI)*, *Machine Learning (ML)*, *Big Data*, *Cloud Management*, dan *Multiscreen Television*.
- Kolaborasi: Perlu kolaborasi berkelanjutan dengan diaspora Indonesia di Los Angeles, terutama ditujukan untuk berbagi pengalaman kepada para konten kreator Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas konten siaran Indonesia.

#### VIII.2.2. Los Angeles dan Las Vegas Amerika Serikat

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Kunjungan kerja ini berdasarkan undangan dari *Voice of America (VOA)*, *Nielsen*, *Youtube Headquarters* serta *Nab Show*, di Amerika pada tanggal 16 – 29 April 2022. Dalam kunjungan kerja tersebut KPI Pusat mendelegasikan Ketua, Agung Suprio, Wakil Ketua, Mulyo Hadi Purnomo, Koordinator Bidang Kelembagaan, Irsal Ambia, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mimah Susanti dan Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P), Mohamad Reza untuk hadir di dalam diskusi terkait penyiaran, dan perkembangan teknologi penyiaran digital.

Adapun maksud dan tujuan komisioner menghadiri diskusi untuk mendapatkan gambaran tentang perkembangan konten dan teknologi serta sistem pengawasan penyiaran digital dari para mitra KPI. Hal ini dilakukan mengingat pertumbuhan teknologi sangat mempengaruhi perkembangan dan dinamika penyiaran di Indonesia. Teknologi digital penyiaran berbasis internet mempengaruhi lanskap penyelenggaraan dan model bisnis penyiaran di Indonesia. Disrupsi digital merubah penyelenggaraan sistem penyiaran sekaligus juga budaya masyarakat dalam akses informasi melalui sistem digital internet.

Selama di Amerika Serikat, delegasi KPI melakukan kegiatan dan pertemuan dengan berbagai pihak. Diantaranya Melakukan Pertemuan dengan *Voice Of America*. Sebagai lembaga penyiaran milik publik Amerika Serikat Voice Of America (VOA) telah menunjukkan eksistensinya sebagai pengawal demokrasi di Amerika. VOA sebagai lembaga penyiaran milik publik telah menunjukkan eksistensinya dalam memperkuat demokrasi berjalan kuat. Salah satu pilar penting VOA adalah independensi sebagai sebuah lembaga penyiaran milik publik. Meski didanai secara penuh oleh pemerintah namun VOA tidak mampu dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah. VOA sangat kuat mempertahankan prinsip *free press* dalam sudut pandang redaksional atas berbagai isu yang ada di Amerika. Dalam pertemuan tersebut KPI mendalami bagaimana strategi VOA dalam mengembangkan dirinya sebagai lembaga penyiaran publik yang diminati masyarakat. Perjalanan panjang VOA mencatat sejarah sebagai lembaga penyiaran yang menjadi bagian catatan sejarah Amerika modern. Memberitakan kebenaran dari setiap peristiwa politik, perang dan kemanusiaan. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Direktur Pemberitaan VOA yang menjelaskan secara gamblang sikap dan cara pandang VOA dalam menjaga prinsip jurnalisme dan pelaksanaan pemberitaan. Termasuk beberapa pengalaman penting VOA dalam meliput peristiwa politik dan perang di berbagai negara konflik. KPI menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas pertemuan tersebut. KPI juga mendorong agar VOA lebih berperan dalam peningkatan kapasitas jurnalis di Indonesia melalui training, workshop dan seminar berkelanjutan, khususnya bagi jurnalis daerah yang berasal dari lembaga penyiaran lokal. Pertemuan tersebut juga menyepakati program bersama yaitu "Sekolah P3 SPS" yang melibatkan tim dari VOA dalam memberikan pengayaan bagi pelaksana lembaga penyiaran di daerah.



Gambar : Komisioner KPI Pusat berfoto bersama para jurnalis VOA

Selanjutnya, Delegasi KPI melakukan Pertemuan dengan KBRI Washington DC. Pertemuan bersama KBRI Indonesia di Washington DC diadakan di Gedung Kedutaan Indonesia di Washington DC dan diterima oleh Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut KPI menyampaikan rencana kegiatan dan kunjungan selama di Amerika. Pertemuan tersebut juga membahas beberapa isu penting penyiaran yang dapat menjadi informasi berharga baik bagi pihak kedutaan dan KPI sendiri. KPI berharap agar Kedutaan Indonesia di Washington DC dapat membangun hubungan dan relasi bersama lembaga penyiaran dan otoritas penyiaran di Amerika agar dapat terjalin kerjasama dengan penyelenggara siaran di Amerika. Hal ini akan menjadi penting sebagai strategi promosi kebudayaan antar negara. Indonesia sebagai negara dengan ragam kebudayaan yang menarik mempunyai potensi besar jika kita mampu mengangkat melalui strategi promosi yang baik diantaranya adalah melalui kerjasama program penyiaran.



Gambar : Komisioner KPI Pusat sedang berdiskusi dengan pihak KBRI di Washington DC

Delegasi KPI juga melakukan Pertemuan dengan AC Nielsen. Salah satu kunci penting dalam pelaksanaan penyiaran di Indonesia adalah peran penyelenggara rating kepemirsaaan. Rating kepemirsaaan menjadi acuan utama industri penyiaran dalam penyelenggaraan program siaran. Lembaga penyiaran selaku entitas bisnis menggantungkan eksistensi bisnisnya pada pendapatan iklan dan pendapatan dari iklan sangat bergantung dari jumlah pemirsa yang menonton sebuah program acara. Rating kepemirsaaan diadakan untuk menghitung berapa banyak jumlah penonton sebuah program siaran televisi dan radio pada program siaran tertentu. Hasil survey rating kepemirsaaan inilah yang akan menjadi acuan bagi pengiklan untuk mensponsori sebuah program siaran. Program siaran yang paling banyak ditonton maka akan menjadi pilihan utama pengiklan dalam menempatkan iklannya.



Gambar : Komisioner KPI Pusat pasca diskusi dengan tim dari *Nielsen Company* di New York

KPI sejak lama telah mendorong agar penyelenggara rating kepemirsaaan ini tidak mengabaikan kualitas program siaran yang ditonton masyarakat. Dari data sanksi program siaran menunjukkan bahwa program siaran yang banyak menerima sanksi adalah program acara yang penontonnya banyak. Ini menunjukkan sesungguhnya masyarakat kita paling banyak menonton program siaran dengan kualitas rendah. Untuk itu KPI telah melakukan riset indeks kualitas program siaran yang berupaya untuk menilai sisi kualitas

sebuah program siaran. Riset ini telah berlangsung selama tujuh tahun sebagai cara KPI dalam menilai kualitas tayangan program acara di Indonesia

KPI merasa bahwa penyelenggara penyiaran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hasil rating kepemirsaaan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Berbagai kritik telah sering disampaikan publik terkait dengan proses penyelenggaraan riset kepemirsaaan baik dari sisi metodologi dan model penyelenggaraan rating. Di Indonesia satu satunya penyelenggara riset indeks kepemirsaaan adalah AC Nielsen. Perusahaan ini telah dipercaya puluhan tahun melakukan rating indeks jumlah penonton di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut AC Nielsen sangat menghargai kunjungan atas concern KPI terhadap penyelenggaraan rating AC Nielsen di Indonesia. Nielsen telah sepakat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan rating mereka melalui peningkatan jumlah sampel dan cakupan wilayah rating dari yang selama ini hanya delapan kota menjadi lebih banyak. Nielsen juga sangat menghargai kepentingan KPI dalam menjaga kualitas konten siaran dan berkomitmen untuk mendukung konten siaran berkualitas di Indonesia. Dalam pertemuan itu juga Nielsen akan segera memulai sistem IT mereka untuk mendukung program digitalisasi penyiaran di Indonesia. Mereka menyampaikan bahwa sistem IT yang digunakan telah siap untuk segera menyambut pelaksanaan televisi digital di Indonesia.

Selanjutnya, Delegasi KPI melakukan Pertemuan dengan Google Inc. Dinamika penyiaran berlangsung sangat cepat, bisnis penyiaran terdisrupsi sangat kuat dengan kehadiran penyelenggaraan penyiaran berbasis internet. Di Indonesia sendiri jumlah pengakses penyiaran berbasis meningkat sangat tajam. berbagai aplikasi berbasis internet dengan sangat mudah diakses dan menawarkan konten siaran yang beragam. Posisi Indonesia sebagai salah satu negara Asia dengan jumlah pengakses internet terbesar ketiga di Asia adalah pasar yang sangat strategis bagi bisnis Over The Top (OTT). Tuntutan masyarakat pun semakin besar untuk dapat mengatur konten siaran yang hadir lewat platform internet. Selain tanpa pengawasan, konten lewat internet ini sangat beragam dan menjangkau tanpa batas pengguna. Tayangan kekerasan, aksi bunuh diri, pornografi dan berbagai konten sensitif lain tampil dengan mudah oleh siapapun tanpa pertanggung jawaban hukum yang memadai dari yang memproduksi. Kondisi ini sangat berbeda dengan penyiaran konvensional yang diregulasi secara sangat ketat dan diawasi sepenuhnya oleh KPI.

Persaingan bisnis yang sehat dan setara juga menjadi isu penting dalam penyelenggaraan penyiaran konvensional dan berbasis internet. Penyiaran konvensional selama ini dikenakan *heavy regulation* sementara penyiaran berbasis internet *less regulation*. kondisi ini menjadi tidak seimbang dalam menciptakan *playing field* pemain penyiaran di Indonesia.



Gambar : Komisioner KPI Pusat saat berada di kantor Google di San Bruno, CA

Sejumlah isu tersebut menjadi diskusi yang kuat antara KPI dan salah seorang pimpinan Google Mr. Neil Mohan, yang juga turut didampingi oleh Kepala Perwakilan Google Indonesia. Pertemuan dilakukan di Headquarters Google di Silicon Valley. Pertemuan tersebut membahas secara mendalam peran Google dalam penyiaran berbasis internet melalui berbagai aplikasi seperti Youtube dan lainnya. KPI menyampaikan konsen KPI tentang regulasi penyiaran dan bagaimana kemungkinan pengaturan yang berkeadilan bagi semua pelaku industri penyiaran di Indonesia, termasuk mengenai keamanan data pengguna aplikasi.

Pihak Google memahami secara mendalam kondisi disrupsi digital di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Transformasi digital ini membuat terjadinya *shifting* di berbagai industri termasuk penyiaran. Pengalaman di Uni Eropa sangat menarik untuk dijadikan *lesson learn* bagi Indonesia dalam rencana meregulasi penyiaran yang bersifat konvergensi. Google berkomitmen untuk dapat menyesuaikan diri dengan kondisi hukum dan rencana aturan penyiaran yang saat ini dibahas di DPR.

Google menyampaikan perlu pertemuan lanjutan yang intens dan berkesinambungan untuk dapat merumuskan konsep pengaturan yang dapat diterima dan dijalankan oleh pelaku industri digital secara global. Untuk itu Google siap bekerjasama dengan KPI untuk dapat memperkuat kemitraan strategis yang berkelanjutan. KPI menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas komitmen Google dalam upaya menciptakan konten siaran yang lebih berkualitas di Indonesia.

Delegasi KPI juga Menghadiri Eksebitasi dan Seminar *National American Broadcasting (NAB)*. NAB Show adalah salah satu eksebitasi paling bergengsi di Amerika dan dunia. NAB adalah sebuah asosiasi penyelenggara penyiaran di Amerika. Kegiatan ini berlangsung selama seminggu dengan berbagai kegiatan diantaranya eksebitasi, seminar dan berbagai kegiatan lain. NAB Show ini sangat strategis dalam menjalin kemitraan dengan berbagai stakeholder penyiaran dari seluruh dunia. Seluruh perusahaan penyiaran berkumpul untuk mengikuti NAB ini dimana berbagai teknologi penyiaran dipamerkan. KPI berkepentingan untuk mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari upaya KPI membangun relasi internasional dengan berbagai stakeholder penyiaran dari berbagai negara. Disini juga Komisioner KPI mengikuti seminar internasional tentang penyiaran dan perkembangan digital yang menghadirkan pembicara terkemuka dari seluruh dunia.

Hal penting lain dari kehadiran KPI adalah untuk mencari informasi mengenai teknologi pengawasan yang dibutuhkan KPI saat ini untuk melakukan pengawasan terhadap program siaran digital yang akan dimulai pada November 2022 mendatang. Hal ini sangat krusial bagi KPI mengingat kebutuhan KPI dalam meningkatkan kapasitas pengawasan sangat dibutuhkan untuk melakukan pengawasan televisi digital.

Dalam kegiatan ini KPI bertemu dengan banyak sekali pihak dari otoritas penyiaran negara lain dan pelaku industri penyiaran dari berbagai negara terutama yang memahami teknologi IT dalam memenuhi kebutuhan KPI untuk meningkatkan kemampuan pengawasannya.



Gambar : Komisioner KPI Pusat berkunjung ke pameran broadcasting NAB Show di Las Vegas

Dari beberapa pertemuan dengan berbagai pihak yang telah kami lakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan di Indonesia terutama menyangkut pengaturan penyiaran yang lebih modern dan dapat dijadikan bahan masukan bagi penyusunan RUU Penyiaran :

- KPI harus membangun komunikasi dengan semua pihak untuk mendukung agenda perubahan UU Penyiaran yang baru, terutama mengenai pengaturan media baru dan penyiaran berbasis digital.
- KPI menyiapkan konsep pengaturan yang bersifat lebih futuristik dengan pendekatan digital yang lebih sesuai dengan perkembangan dinamika penyiaran.
- KPI harus menjalin kerjasama yang kuat dengan berbagai penyelenggara platform digital dan OTT untuk dapat mendorong keberadaan mereka dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penyiaran Indonesia.
- KPI perlu terlibat aktif untuk terlibat dalam proses pembahasan UU Penyiaran dengan memberikan masukan strategis terkait perkembangan penyiaran khususnya penyiaran berbasis internet yang saat ini belum memiliki aturan hukum yang jelas.

- KPI perlu untuk memulai konsep survei riset kepemirsaaan yang lebih terbuka dan partisipatif melalui kerjasama dengan stakeholder penyiaran, sehingga rating kepemirsaaan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas siaran lembaga penyiaran.

## IX. KUNJUNGAN, AUDIENSI, MAGANG DAN PENELITIAN

KPI menerima kunjungan, praktek kerja lapangan, audiensi dari Universitas, lembaga pemerintahan, Organisasi Kemasyarakatan dan lainnya. Berikut daftar kegiatan kunjungan, Magang dan Penelitian selama Agustus 2019 s.d Desember 2022.

### IX.1. Data Kunjungan Selama Agustus – Desember 2019

NO	TANGGAL	INSTANSI	JUMLAH	KETERANGAN
01	16 Agustus 2019	KAMI	40	Audiensi
02	26 Agustus 2019	SMK Negeri 1 Ciomas	40	Studi
03	28 Agustus 2019	DPRD Bangka Belitung	13	Konsultasi Rancangan Perda tentang penyiaran berlangganan televisi melalui kabel
04	29 Agustus 2019	DPRD Bengkulu	20	Konsultasi dan koordinasi perpanjangan masa jabatan Anggota KPID Bengkulu
05	06 September 2019	KPID Kalimantan Barat	5	Koordinasi dan konsultasi tentang Kalbar Award 2019
06	11 September 2019	Institut Seni Budaya Indonesia Kalimantan Timur	40	Studi
07	13 September 2019	Universitas Brawijaya	50	Studi
08	4 Oktober 2019	DPRD Jawa Tengah	25	Rekrutmen Calon Anggota KPID Jawa Tengah
09	14 Oktober 2019	Komisi I DPRD Papua	20	Rekrutmen Calon Anggota KPID Papua
10	21 Oktober 2019	Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung	70	Studi
11	25 Oktober 2019	DKT Indonesia	5	Hal penyiaran terutama dalam edukasi terkait program kesehatan reproduksi dan KB di Indonesia
12	28 Oktober	Institut Agam Islam Bunga	60	Studi

	2019	Bangsa Cirebon		
13	30 Oktober 2019	DPRD Provinsi Banten	15	Rekrutmen Calon Anggota KPID Banten
14	31 Oktober 2019	DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara	10	Rekrutmen Calon Anggota KPID Sulawesi Tenggara
15	31 Oktober 2019	Institut Ilmu Al-Quran	15	Studi
16	01 November 2019	Universitas Diponegoro	50	Studi
17	12 November 2019	Universitas Kristen Satya Wacana	90	Studi
18	28 November 2019	DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara	5	Rekrutmen Calon Anggota KPID Sulawesi Tenggara
19	29 November 2019	DPRD Provinsi Jawa Barat	20	Pemilihan Calon komisioner KPID Provinsi Jawa Barat
20	3 Desember 2019	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya	40	Studi
21	5 Desember 2019	kerja Tim Seleksi Calon Anggota KPID Provinsi Sulawesi Tenggara	5	Rekrutmen Calon Anggota KPID Sulawesi Tenggara
22	5 Desember 2019	Institut Agama Islam Negeri Kediri	50	Studi
23	6 Desember 2019	KPID Bali	5	Tindak lanjut rekomendasi temuan indikasi pelanggaran siaran nasional pada stasiun televisi SSJ
24	9 Desember 2019	DPRD Bali	15	Perkembangan revisi UU Penyiaran
25	9 Desember 2019	Institut Agama Islam Sahid Bogor	30	Studi
26	11 Desember 2019	Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan	15	Pelaksanaan tata kelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
27	12 Desember 2019	Institut Bisnis Nusantara	60	Studi
28	16 Desember 2019	Lembaga Nielsen	1	Audiensi
29	16 Desember 2019	Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)	10	Audiensi
30	26 Desember 2019	Universitas Ibnu Chaldun Jakarta	80	Studi
31	26 Desember 2019	Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	10	Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Masa Jabatan 2020-

**IX.2. Data Kunjungan Selama Tahun 2020**

NO	TANGGAL	INSTANSI	JUMLAH	KETERANGAN
01	8 Januari 2020	Universitas Negeri Padang	50	Studi
02	10 Januari 2020	DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	15	Seleksi Calon Anggota KPID Kal-Sel
03	13 Januari 2020	KPID DKI Jakarta	5	Seleksi Calon Anggota KPID DKI Jakarta
04	15 Januari 2020	Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	18	Konsultasi terkait kelembagaan dan dana hibah
05	22 Januari 2020	Komisi I DPRD Provinsi Lampung	10	Audiensi
06	24 Januari 2020	Diskominfo Kal-Sel	3	Seleksi Calon Anggota KPID Kal-Sel
07	4 Februari 2020	Universitas Muhammadiyah Malang	35	Studi
08	13 Februari 2020	Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dan KPID Provinsi Sumatera Utara	24	Perpanjangan masa jabatan Komisioner KPI Daerah
09	13 Februari 2020	Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur	10	Perizinin lembaga penyiaran
10	21 Februari 2020	KPID Sulawesi Tengah	2	Gerakan Literasi Media
11	25 Februari 2020	Universitas Teknologi Yogyakarta	104	Studi
12	26 Februari 2020	Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta	30	Studi
13	17 Juli 2020	BBC Media Action	3	Audiensi
14	7 Agustus 2020	DPRD Provinsi Sulawesi Utara	8	Konsultasi Tahapan Perekrutan KPID Sulut
15	05 November 2020	Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara	15	Konsultasi Tahapan Perekrutan KPID Sulawesi Utara
16	09 November 2020	Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah	15	Konsultasi Tahapan Perekrutan KPID Jawa Tengah
17	13 November 2020	DPRD & KPID Sumatera Selatan	10	Konsultasi Tahapan Perekrutan KPID Sumatera Selatan
18	14 Desember 2020	Komisi A DPRD DIY	20	Konsultasi Tahapan Perekrutan KPID Sulut
19	14 Desember 2020	Anggota DPR RI Christina Aryani, S.E., S.H.,	3	Program KPI Pusat dan isu-isu terkini mengenai penyiarann
20	15 Desember	Komisi I DPRD Provinsi	15	Konsultasi Tahapan Perekrutan

	2020	Bengkulu		KPID Bengkulu
21	21 Desember 2020	Komisi I DPRD Provinsi Bali	15	Percepatan Digitalisasi Penyiaran Sesuai Arah Kebijakan Nasional

### IX.3. Data Kunjungan Selama Tahun 2021

NO	TANGGAL	INSTANSI	JUMLAH	KETERANGAN
01	19 Januari 2021	Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur	15	Konsultasi Tahapan Perekrutan Anggota KPID Jawa Timur
02	5 Februari 2021	DPRD Kota Pangkalpinang	3	Mekanisme Pengawasan Siaran Penyiaran Konten Lokal Dan Media Online
03	5 Maret 2021	DPRD Kota Tegal	17	1. Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Sebayu Pro FM Periode Tahun 2021-2026 2. Digitalisasi Gelombang Radio 3. Pengaturan iklan/konten siaran iklan komersil sesuai dengan PP 11 Tahun 2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
04	19 Maret 2021	DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung	15	Mekanisme Rekrutmen Anggota KPID Bangka Belitung
05	19 Maret 2021	DISKOMINFO Prov. Jawa Tengah	10	Koordinasi Persiapan HARSARNAS Ke-88
06	06 April 2021	KPID Prov. Kalimantan Selatan	15	Koordinasi Kegiatan Literasi di 4 Kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan
07	12 April 2021	LSM Yayasan Insan Teman Langit	7	Audiensi mencegah stigma negatif ODGJ di TV dan Radio
08	15 April 2021	DPRD Prov. Sulawesi Tengah	20	Rekrutmen Calon Anggota KPID Sulteng
09	15 April 2021	KPID Provinsi Jawa Tengah	10	Koordinasi terkait penyiaran dengan Anggota KPID Jawa Tengah Periode 2021-2024
10	20 April 2021	DPRD D.I. Yogyakarta	15	Konsultasi Pansus Pengawasan Perda Penyiaran KPI Pusat
11	29 April 2021	DPRD Prov. Sumatera Selatan	17	Pendalaman informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi pemilihan Komisioner KPID Sumsel
12	3 Mei 2021	Korps HMI Wati (KOHATI)	15	Audiensi membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia

				menjadi agen-agen literasi di tengah masyarakat Indonesia
13	2 Juni 2021	LSM Raya Indonesia Rumah Kajian dan Advokasi Kerakyatan	7	Upaya-upaya perlindungan dan peran pentingnya KPI Pusat dalam pencegahan terhadap siaran yang tidak layak di tonton oleh masyarakat sesuai aturan undang-undang yang ada khususnya terhadap anak-anak
14	3 Juni 2021	Panitia Tim Seleksi Calon Anggota KPID Banten	14	Seleksi Komisioner KPID Banten
15	9 Juni 2021	Universitas Hasanuddin Makassar	20	Kunjungan Studi
16	9 Juni 2021	KPID Provinsi Jawa Barat	15	Koordinasi dan konsultasi terkait penyusunan anggaran 2022
17	21 September 2021	KPID Provinsi Kalimantan Tengah	15	Audiensi proses digitalisasi penyiaran menuju Analog Switch Off (ASO) di tahun 2022
18	21 September 2021	KPID Provinsi Lampung	15	Koordinasi program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPID
19	22 September 2021	KPID Provinsi Gorontalo	10	Kunjungan kerja dari Tim Seleksi Pemilihan KPI Daerah Gorontalo dalam rangka menambah referensi dan masukan dalam tahapan – tahapan seleksi
20	25 September 2021	KPID Provinsi Sumatera Barat	3	Konsultasi terkait pelaksanaan dan pengembangan system pemantauan siaran televisi dan radio
21	28 September 2021	KPID Provinsi Sumatera Selatan	8	UU Cipta Kerja tentang Penyiaran Televisi teresterial dari teknologi analog ke teknologi digital atau yang dikenal sebagai proses ASO (Analog Switch Off),
22	30 September 2021	Anggota Parlemen Remaja Nasional Tahun 2021	15	Melaporkan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI ke KPI Pusat
23	1 Oktober 2021	Anggota Parlemen Remaja Jawa Barat Tahun 2021	10	Melaporkan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI

				pada tanggal 13-17 September 2021 selaku peserta perwakilan dari Dapil Provinsi Jawa Barat ke KPI Pusat
24	4 Oktober 2021	KPID Provinsi Jawa Barat	20	Penyerahan Usulan P3SPS Masyarakat Peduli Penyiaran Jawa Barat & Sharing Session Siaran Pernikahan Artis
25	4 Oktober 2021	DPRD Provinsi Sulawesi Barat	10	Konsultasi Tahapan Perekrutan KPID Sulawesi Barat
26	5 Oktober 2021	Timsel Komisioner KPID Provinsi Riau 2021-2024	10	Konsultasi Tahapan Perekrutan KPID Riau
27	5 Oktober 2021	LSM Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Lembaga Negara	7	Audiensi Koalisi Masyarakat Peduli Korban Kekerasan Seksual Dalam Lembaga Negara
28	14 Oktober 2021	KPID Provinsi Bali	10	Menyampaikan hasil rapat dengan Lembaga Penyiaran Televisi se-Bali
29	26 November 2021	KPID Provinsi Sulawesi Selatan	10	melakukan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas dan program kerja KPI Daerah kepada KPI
30	10 Desember 2021	DPRD Provinsi Sumatera Utara	10	Mekanisme pemilihan Komisioner KPI Daerah kepada KPI
31	15 Desember 2021	DPRD Provinsi Banten	17	Konsultasi kemungkinan adanya tuntutan dari Calon Anggota KPI Daerah pasca pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatuhan
32	15 Desember 2021	DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta	17	Konsultasi/Koordinasi penyiaran digital, dukungan anggaran dan pengawasan lembaga penyiaran di daerah
33	28 Desember 2021	DPRD Provinsi Jawa Barat	35	Pembahasan persiapan Analog Switch Off (ASO) Tahun 2022

#### IX.4. Data Kunjungan Selama Tahun 2022

NO	TANGGAL	INSTANSI	JUMLAH	KETERANGAN
01	5 Januari 2022	Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur	5	Konsultasi hasil seleksi uji kelayakan dan kepatuhan calon Anggota KPI Daerah Provinsi Kalimantan

				Timur
02	13 Januari 2022	Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo	2	Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang
03	21 Januari 2022	KPID Provinsi Sulawesi Barat	3	Koordinasi Kelembagaan KPI
04	28 Januari 2022	KPID Provinsi Banten	13	Koordinasi Kelembagaan KPI
05	2 Februari 2022	DISKOMINFO Provinsi Bangka Belitung	2	Konsultasi hasil seleksi uji kelayakan dan kepatuhan calon Anggota KPI Daerah Provinsi Bangka Belitung
06	7 Februari 2022	DPRD Provinsi Jawa Tengah	17	Konsultasi penyusunan naskah akademik dan draf Raperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran
07	2 Maret 2022	KPID Provinsi Sumatera Barat	7	Penguatan bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran di daerah
08	11 Maret 2022	DPRD Aceh	5	Konsultasi dan koordinasi penerapan Analog Switch Off (ASO) di Aceh dan konten siaran digital yang berdasarkan aturan hukum syariat islam
09	16 Maret 2022	KPID Provinsi Sulawesi Barat	8	Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) Tahap I di Provinsi Riau
10	13 April 2022	Lembaga Negara BNN RI	7	Koordinasi terkait Sinergi Program dan rencana kerja sama demi mewujudkan "Indonesia bersih Narkoba(bersiner)"
11	20 April 2022	KPID Prov. Sumatera Barat	1	Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO)
12	21 April 2022	DPRD Kota Padang Panjang	1	Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO)
13	3 Juni 2022	KPID Provinsi Riau	5	Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) Tahap I di Provinsi Riau
14	6 Juni 2022	LSM DPP PETRI	9	Audiensi antara KPI Pusat dengan dari Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Tunarungu Indonesia (DPP PETRI) terkait standar penggunaan bahasa isyarat Tunarungu di Televisi
15	17 Juni 2022	KPID Provinsi Sulawesi Selatan	10	Koordinasi dengan Bidang Pengawasan Isi Siaran guna

				pengembangan sistem dan teknis pemantauan Siaran Digital di Wilayah Sulawesi Selatan
16	23 Juni 2022	KOPRI PB PMII	5	Audiensi antara KPI Pusat dan Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI PB PMII)
17	28 Juni 2022	DPRD Provinsi Riau	20	Konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau
18	29 Juni 2022	KPID Maluku	15	Koordinasi terkait pelaksanaan Analog Switch Off (ASO)
19	29 Juni 2022	IAIN Pekalonga	154	Kunjungan Studi
20	5 Juli 2022	Lembaga Negara LPSK	6	Koordinasi terkait layanan perlindungan terhadap Sdr. Muhmmad Syaid Agustiar
21	6 Juli 2022	KPID Provinsi Kalimantan Timur	10	Kunjungan Kerja Kelembagaan
22	14 Juli 2022	Lembaga Penyiaran Trans Media	5	Menjalin komunikasi serta kerjasama/kemitraan dalam perancangan dan implementasi komunikasi pada sosial media
23	20 Juli 2022	Conselho De Imprensa De Timor-Leste	5	Kunjungan Kelembagaan
24	20 Juli 2022	KOHATI PB HMI	5	Silaturahmi dan koordinasi kelembagaan terkait magang
25	22 Juli 2022	KPID Provinsi Kalimantan Selatan	5	Kunjungan Kelembagaan
26	27 Juli 2022	Akademisi Universitas Ibn Khaldun Bogor	10	Audiensi antara Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan KPI Pusat
27	27 Juli 2022	Diskominfo Provinsi Kepulauan Riau	7	Audiensi rencana penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dan Hari Penyiaran Nasional Tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau
28	29 Juli 2022	Trans Media Sosial	6	Menawarkan Kerja sama pengelolaan media sosial
29	12 Agustus 2022	DPRD Provinsi Sulawesi Utara	5	Migrasi siaran analog ke digital

30	29 Agustus 2022	KPID Provinsi Sumatera Utara	-	Silaturahmi atas dilantiknya KPID Sumut periode 2022-2025
31	30 Agustus 2022	Lembaga Riset Nielsen	2	Menawarkan kerja sama dalam pengelolaan Indeks Kualitas Televisi
32	06 September 2022	Dewan Pengurus Pusat Barisan Ksatria Nusantara (DPP BKN)	15	Audiensi antara KPI Pusat dan Dewan Pengurus Pusat Barisan Ksatria Nusantara (DPP BKN) terkait penyiaran
33	06 September 2022	Akademisi Alumnus Universitas Chicago	2	Artificial Inteligent pemantauan siaran
34	08 September 2022	KPID Provinsi Sumatera Barat	10	Koordinasi Kelembagaan KPI
35	16 September 2022	Akademisi Universitas Mulawarman	25	Koordinasi Kelembagaan
36	21 September 2022	Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	Permasalahan Seleksi Calon Komisioner KPID Prov. Kep. Bangka Belitung
37	23 September 2022	DPRD Provinsi Riau	18	Koordinasi terkait materi Ranperda tentang penyelenggaraan penyiaran
38	13 Oktober 2022	Berita Satu Media Holdings	6	Koordinasi terkait perubahan nama lembaga penyiaran
39	31 Oktober 2022	Lembaga Negara Komisi Pelindungan Anak Indonesia	4	Koordinasi kelembagaan dan Anggaran KPI
40	16 November 2022	DPRD Provinsi DIY	-	Koordinasi tentang tatakelola kelembagaan KPI dan Penganggarannya
41	24 November 2022	DPRD Provinsi Sumatera Selatan	13	Koordinasi terkait dengan kebijakan Analog Switch Off (ASO) dan penerapan siaran berbasis digital
42	30 November 2022	DPRD Provinsi Sulawesi Utara	10	Koordinasi terkait dengan Penyaluran Set Top Box Digital Gratis untuk keluarga miskin
43	12 Desember 2022	KPID Provinsi Bangka Belitung	4	Koordinasi Kelembagaan KPI
44	19 Desember 2022	KPID Provinsi Sumatera Barat	2	Koordinasi tentang Kegiatan Rakornas
45	23 Desember 2022	KPID Provinsi Riau	3	MoU KPI Pusat dengan Universitas Islam Riau dan

				MoA KPID Riau dengan Universitas Islam Riau
--	--	--	--	---------------------------------------------

#### IX.5. Data Praktek Kerja Lapangan Selama Agustus – Desember 2019

NO	PERIODE	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	1 Agus - 1 Sep	Rolivia Virginia	Universitas Persada Indonesia Y.A.I
02	2 Sep - 2 Nov	Atikah Fatmawati	Universitas Brawijaya
03	2 Sep - 2 Nov	Melinda Aprilia Wulandari	Universitas Brawijaya
04	9 Sep - 9 Des	Friandes Aromadoen	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
05	23 Sep - 23 Des	Retno Dwi Putri	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
06	2 Sep - 31 Des	Ratnasari Elizabeth Batubara	Binus University
07	2 Sep - 2 Okt	Abby Bagaskara	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
08	2 Sep - 2 Okt	Annisa Rahmadani	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
09	2 Sep - 2 Okt	Yuda Sulistiyono	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
10	3 Sep - 31 Des	Tasya Yuniar	Binus University
11	1 Okt - 31 Des	Aden Waluyo	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim
12	8 Okt – 8 Nov	M. Thabrani	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
13	28 Okt - 28 Des	Anastasia Widyastuti	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
14	4 Nov - 4 Des	Fitri Mursidah	Institut Seni Indonesia Surakarta
15	4 Nov - 4 Des	Ni'matul Faizah	Institut Seni Indonesia Surakarta
16	16 Des 2019 - 16 Feb 2020	Zulfikar Iqomaddin	Universitas Ibn Khaldun
17	23 Des 2019 - 21 Jan 2020	Asyifa Aulia Rochmah	Universitas Airlangga

#### IX.6. Data Praktek Kerja Lapangan Selama Tahun 2020

NO	PERIODE	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	2 Jan - 2 Feb	Brilian Nadiba	Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
02	6 Jan - 14 Feb	Nazla Eka Rahmi	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
03	6 Jan - 14 Feb	Siska Irma Diana	Universitas Islam Negeri Syarif

			Hidayatullah Jakarta
04	6 Jan - 14 Feb	Anjas Ahmad Munjazi	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
05	6 Jan - 14 Feb	Aji Nur Hidayat	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
06	6 Jan - 6 Apr	Frisca Lorenza Wantalangi	Universitas Kristen Satya Wacana
07	6 Jan - 6 Mar	Gabriella Alfani	Universitas Kristen Satya Wacana
08	6 Jan - 6 Mar	Alodia Okta Azzahra	Universitas Kristen Satya Wacana
09	13 Jan - 28 Mar	Kelvin Yonathan Simatupang	Universitas Kristen Satya Wacana
10	27 Jan - 29 Feb	Elisa Handayani	Universitas Budi Luhur
11	27 Jan - 29 Feb	Nabila Ayuningtyas	Universitas Budi Luhur
12	27 Jan - 29 Feb	Putri Nada Pratiwi	Universitas Budi Luhur
13	27 Jan - 29 Feb	Bella Septriyanti	Universitas Budi Luhur
14	3 - 28 Februari	Nabila Ramadhani	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung

#### IX.7. Data Praktek Kerja Lapangan Selama Tahun 2021

NO	PERIODE	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	7 Juni s.d. 7 Agustus 2021	Alya Despani	XI/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Bekasi
02	1 Oktober – 31 Desember 2021	Moh. Alif Ashrareza Rukka	Universitas Paramadina
03	15 Desember 2021 – 15 Maret 2022	M. Fajar Ghifari	SMK Jakarta Dua
04	15 Desember 2021 – 15 Maret 2022	M. Irfan Zakri	SMK Jakarta Dua

#### IX.8. Data Praktek Kerja Lapangan Selama Tahun 2022

NO	PERIODE	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	21 Februari – 21 Agustus 2022	Ryan Riwanto Dwitomo	Universitas Bina Nusantara
02	1 Februari – 1 Maret 2022	Viego Sabilla Erlangga	Universitas Brawijaya
03	15 Maret - 28 Juli 2022	Muhammad Gerald Uray	Universitas Multimedia Nusantara
04	4 April – 4 Mei 2022	Erra Faninditya Fadilla Usmanto	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
05	25 Maret - 25 Juni 2022	Matatula Gideon Marudut Doaputra	Universitas Tarumanegara

06	1 Juli - 31 Agustus 2022	Muhammad Alfath Handika	Universitas Brawijaya
07	1 Juli - 31 Agustus 2022	Ryan Arya Aditya	Universitas Brawijaya
08	1 September - 30 November 2022	1. Khofifah Nur Hidayah 2. Jihan Arisanti	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
09	1 September - 31 Oktober 2022	Mutawaqqil Hanreng Hakim	Universitas Mercu Buana
10	22 Agustus - 22 Desember 2022	1. Deri Chandra Rakhmadani 2. Usman Zatal Helmi	Sekolah Teknik Malang/International Multimedia University
11	19 September - 31 Oktober 2022	Nadya Meirizka	Universitas Al Azhar Indonesia
12	5 September - 5 Oktober 2022	Sifa Fadila	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
13	19 September - 16 November 2022	1. Esti Astriyani 2. Nabila Aulia Zahra	Universitas Ibnu Khaldun Bogor
14	19 September - 19 Desember 2022	Magali Primu Anggoro	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
15	7 November - 24 Desember 2022	Qori Khoiri Nur Hudatul Fatah	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
16	7 November - 24 Desember 2022	Ananda Ichlasul Amal	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
17	9 Januari - 24 Februari 2023	Siti Setyaningrum	Universitas Al Azhar Indonesia

#### IX.9. Data Penelitian di KPI Selama Agustus – Desember 2019

NO	TANGGAL	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	2 Agustus 2019	Muhammad Muamiluddin	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
02	14 Juli dan 13 Agustus 2019	Amalia Dwi Jayanti	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
03	16 Oktober 2019	Riko Aghista Wicaksono	Universitas Islam Indonesia
04	15 November 2019	Claudia Rachma Widhiarindra	Universitas Brawijaya
05	19 November 2019	Arief Rahman Hakim	Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

#### IX.10. Data Penelitian di KPI Selama Tahun 2020

NO	TANGGAL	NAMA	ASAL LEMBAGA
01	5 Januari 2020	Mardhiyah	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
02	8 Januari 2020	Rifa Nur Faizah	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

03	13 Maret 2020	Fedrick Ivan Hasudungan Harianja	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
04	22 Mei 2020	Agung Prasetyo Nugroho	Universitas Bina Nusantara
05	9 Juni 2020	Carara Geofany Sugiyono	Universitas Negeri Jakarta
06	18 Juni 2020	Tasya Yuniar	Universitas Bina Nusantara
07	24 Juni 2020	Herman	Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta
08	30 Juni 2020	Maria Wuri Kurnia Astuti	Universitas Bina Nusantara
09	27 dan 29 Juli 2020	Abby Bagaskara	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

#### IX.11. Data Penelitian di KPI Selama Tahun 2021

NO	TANGGAL	NAMA / ASAL LEMBAGA	JUDUL PENELITIAN
01	29 Januari 2021	Yuliani Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Strategi Humas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Melalui Instagram @KPIPusat Guna Meningkatkan Citranya Bagi Followers
02	4 Mei 2021	Anita Pinasthika Universitas Padjajaran	Netralitas Media Massa di Masa Kampanye Pemilu 2019 Pada Studi Kasus: Media Televisi MNC Group Dalam Pemberitaan Partai Perindo Di Masa Kampanye Pemilu 2019
03	15 September 2021	Muhammad Firdaus Al Hakim Universitas Negeri Yogyakarta	Efektivitas Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam Mengawasi Program Siaran Infotainment Tahun 2017–2019
04	03 November 2021	Kurnia Intisyah Nurmanita Universitas Mercu Buana	Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengawasi Konten Talkshow Di Televisi Pada Masa Pandemi Covid-19
05	18 Desember 2021	Rusdika Agung Pramono Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Peran Penyiaran Indonesia dalam Meningkatkan Kesadaran Media Televisi dalam Menerapkan Program P3SPS di Indonesia

#### IX.12. Data Penelitian di KPI Selama Tahun 2022

NO	TANGGAL	NAMA / ASAL LEMBAGA	JUDUL PENELITIAN
01	24 Maret 2022	Umroh Mahbubah / Universitas Mercu Buana	Strategi Pemanfaatan Instagram Untuk Sosialisasi Regulasi Siaran Sehat Oleh KPI Pusat tahun 2021
02	11 Juli 2022	Fatmawati / Universitas	Pengawasan Komisi Penyiaran

		Hasanuddin	Indonesia Terkait Pelaksanaan P3SPS pada Siaran Televisi Tak Ramah Anak
03	23 Juni 2022	Firna Tihurua / Universitas Ibnu Chaldun	Strategi Komunikasi Organisasi dalam Menunjang Pelayanan Publik (Studi Kasus Komisi Penyiaran Indonesia)
04	2 Agustus 2022	Annisa El Sakinah / Universitas Pamulang	Pengaruh Petisi Online dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat terhadap Pemerintah Di Indonesia (Analisis Yuridis Pada Kasus Petisi Online Alyzza Terkait Hentian Siaran “Suara Hati Istri”)
05	02 September 2022	Iga Mawarni / Universitas Azzahra	Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mencegah Tayangan Negatif Televisi (Studi Kasus Tayangan Sinetron Jendela SMP Di SCTV Selama 2021)
06	30 Desember 2022	1. Miftahul Jannah 2. Mochammad Raihan 3. Rio Putra Pamungkas 4. Zahra Azkia 5. Muhammad Ziad Imtiyaas / Universitas Al Azhar Indonesia	Kegiatan dan kebijakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

## X. LAPORAN PRODUK KERJA HUMAS

Laporan Media Sosial KPI Pusat selama Tahun 2019 – 2022

### Tahun 2019

#### Januari 2019.

Selama bulan Januari terdapat 5 kali kunjungan universitas dimana pada kunjungan tersebut menjelaskan bagaimana media center berjalan serta aplikasi apa saja yang ada di media center KPI Pusat. Sedangkan bagi mahasiswa yang melakukan penelitin terkait media social KPI juga menerima wawancara terkait cara kerja pengelolaan social media KPI, mengajarkan pada mahaiswa yang sedang melakukan praktirk kerja lapangan untuk menganalisa sentiment masyarakat kepada KPI seluruh media online

#### Februari 2019.

Pada bulan Februari dari total keseluruhan yaitu 6419 Mention sentimen Positif KPI berjumlah 1777 sedangkan Negatif berjumlah 1179 serta sentimen bersifat netral berjumlah 3463. Terkait media yang paling banyak memberitakan KPI selama bulan januari antara lain

Detik, Kompas serta Liputan 6. Dilihat dari urutan 3 teratas Detik menempati peringkat pertama dengan jumlah follower 14.961.331 serta netizen yang membaca berita terkait KPI sejumlah 38.097.906. Detik memberitakan KPI sebanyak 15 kali bulan Februari 2019, diikuti dengan Kompas dengan jumlah follower sebesar 10.925.718 serta netizen yang membaca berita terkait KPI sejumlah 4.910.250. Kompas memberitakan KPI sebanyak tiga kali selama Februari 2019, dan terakhir adalah Liputan 6 dengan pemberitaan sebanyak 3 kali serta mereka memiliki jumlah follower sebanyak 8.583.509. Terkait jumlah netizen yang membaca berita Liputan 6 terkait KPI sebanyak 3.862.579.

### **Maret 2019.**

Selama bulan Maret 2019 terdapat satu isu besar yang terjadi yaitu mengenai Program KPI jumpa warganet. Kegiatan tersebut mendapat respon besar dari masyarakat, banyak masyarakat yang ingin berpartisipasi mengikuti kegiatan itu dari berbagai daerah. Kegiatan yang baru saja dicetuskan tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Sejak awal bulan terdapat 5829 mentions yang dalamatkan ke seluruh sosial media KPI Pusat dengan rincian 1869 Positif sedangkan 840 negatif dan sisanya adalah netral. Seperti yang sudah dijelaskan di atas kegiatan KPI jumpa warganet memberi dampak positif kepada citra KPI Pusat di masyarakat.

### **April 2019.**

Selama bulan April 2019 terdapat satu isu besar yang terjadi yaitu mengenai masalah pemilu lebih tepatnya terkait keputusan mengenai quick count serta real count yang ditampilkan di televisi. Terdapat polarisasi antara masyarakat yang meminta agar quick count serta real count dihentikan maupun tetap ditampilkan, walaupun jika kita teliti lebih dalam kejadian ini berhubungan dengan kepentingan politik, dan dibutuhkan kehati-hatian dalam menyikapi. Masalah juga terjadi saat adanya hoax yang memberitakan mengenai Ketua KPI Pusat yang meminta seluruh stasiun TV untuk menghentikan quick count, namun berita yang disebar di sosial media merupakan berita lama yaitu tahun 2014. Hal ini semakin meningkatkan traffic sosial media KPI Pusat, banyak masyarakat yang termakan hoax itu dan tentu pendukung salah satu paslon mendukung langkah KPI ini. Menyikapi hal itu KPI Pusat mengeluarkan 3 berita yang mengklarifikasi hal itu dan disebar ke seluruh media sosial KPI Pusat.

### **Mei 2019**

Selama bulan Mei 2019 terdapat satu isu besar yang terjadi yaitu mengenai pemberian sanksi kepada program acara anak langit dan itu mendapat respon positif dari masyarakat yang memang sudah jenuh dengan program tersebut. Sedangkan isu negatif terkait KPI adalah mengenai program ramadhan yang masih dianggap jauh dari kata baik dan banyak masyarakat yang mengeluhkan acara ramadhan.

Selama bulan Mei terdapat 3284 mentions yang dalamatkan ke seluruh sosial media KPI Pusat dengan rincian 1024 Positif sedangkan 707 negatif dan sisanya adalah netral. Seperti yang sudah dijelaskan diatas respon kpi terhadap suatu permasalahan masih sangat lambat dan ini menjadi perhatian serta sorotan dari masyarakat.

### **Juni 2019**

Selama bulan Juni 2019 terdapat satu isu besar yang terjadi yaitu mengenai rencana perpindahan agama Deddy Corbuzier yang akan disiarkan di tv nasional namun mendapat larangan dari KPI dan itu mendapat beragam respon dari masyarakat dimana terjadi polarisasi sebagian masyarakat hal tersebut tidak masalah untuk ditayangkan dan sebagian keberatan karena dianggap tidak menghormati bhineka tunggal ika dan berpotensi menimbulkan sara. Tidak lama setelah itu KPI mengeluarkan kebijakan yang dinilai bernada diplomatis. Pada kebijakan tersebut KPI menghimbau agar setiap tayangan menghormati perbedaan yang ada di Indonesia.

Juni 2019 terdapat 2314 mentions yang dalamatkan ke seluruh sosial media KPI Pusat dengan rincian 752 Positif sedangkan 481 negatif dan sisanya adalah netral. Respon KPI terhadap masalah ini dapat dikatakan kurang baik mengingat statement KPI hanya disiarkan di website hal ini membuat banyak masyarakat yang tidak mengetahui langkah apa yang telah di ambil oleh KPI.

### **Juli 2019.**

Selama bulan Juli 2019 terdapat tiga isu yang terjadi yaitu mengenai pemberian anugerah penyiaran ramah anak 2019, Anugerah Syiar Ramadhan 2019, serta pemberian sanksi KPI/ traffic sosial media baik twitter, instagram maupun facebook mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan adanya program polling program anak favorit dengan menggunakan sosial media.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberi penilaian program anak yang menurut mereka paling baik, khususnya bagi anak – anak, netizen menyukai cara seperti ini dalam pendekatan. Hasil polling ini juga mendapat apresiasi yang tinggi dari netizen jika kita lihat

bagaimana sentimen masyarakat terhadap KPI yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan bulan – bulan sebelumnya. pada bulan Juli 2019 terjadi lonjakan traffic di sosial media pada tanggal 8 Juli, 22 Juli serta 29 Juli 2019 . Jika kita bedah lebih dalam pada lonjakan tanggal 8 Juli terdapat publikasi terhadap nominasi Anugerah Syiar Ramadhan 2019 inetraksi pada tanggal tersebut mengalami lonjakan hal tersebut dapat dilihat dari grafik diatas, begitupun tanggal 22 Juli saat Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2019.

### **Agustus 2019.**

Selama bulan Agustus 2019 terjadi peningkatan sentiment negatif yang cukup signifikan di sosial media KPI Pusat, baik twitter, instagram maupun facebook. Peningkatan terjadi karena digulirkannya wacana tentang pengawasan media baru oleh KPI Pusat.

Traffic tertinggi terjadi pada tanggal 12 Agustus, akibat penolakan warganet atas wacana tersebut. Selain menyebabkan traffic tinggi, kejadian ini juga berdampak terhadap meningkatnya sentiment negatif masyarakat lainnya terhadap KPI Pusat.

Selama bulan Agustus terdapat 25957 mentions yang dalamatkan ke seluruh sosial media KPI Pusat dengan rincian 2290 Positif sedangkan 9414 negatif dan sisanya adalah netral. Bulan Agustus merupakan bulan dengan interaksi dan sentiment terbaik dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya karena adanya wacana pengawasan media baru oleh KPI Pusat

### **September 2019.**

Selama bulan September pada instagram memposting sebanyak 35 kali sedangkan untuk twitter sebanyak 55 kali, hal ini terjadi di sebabkan pada twitter KPI juga memposting berita KPID hal ini bertujuan agar netizen juga lebih mengenal kepada tugas dan fungsi KPID. Selama bulan September terdapat sekali kunjungan universitas dimana pada kunjungan tersebut selalu dijelaskan bagaimana media center berjalan serta aplikasi apa saja yang digunakan oleh media center KPI Pusat dalam menganalisa media.

Selain itu juga mengajarkan pada anak magang untuk menganalisa sentiment masyarakat kepada KPI seluruh media online. Pada bulan September 2019 terjadinya lonjakan traffic di sosial media pada tanggal 15 September 2019 akibat tingginya sentimen negatif terhadap sanksi spongebob yang diberikan oleh KPI Pusat. Sejak awal bulan terdapat 7820 mentions yang dalamatkan ke seluruh sosial media KPI Pusat dengan rincian 46 Positif sedangkan 5319 negatif dan sisanya adalah netral. Bulan September merupakan bulan dengan interaksi

dan sentiment negatif lebih sedikit dibanding dengan bulan sebelumnya yaitu saat mengulirkan wacana pengawasan media baru.

### **Oktober 2019.**

Selama bulan Oktober terdapat 425 Komentar positif terhadap KPI dan 257 Komentar negatif di semua sosila media KPI, adanya peningkatan komentar positif diakibatkan banyaknya sanksi yang diberikan oleh KPI termasuk penghentian sementara terhadap beberapa program. Sedangkan program yang banyak dikeluhkan oleh netizen pada komentar sosial media KPI didominasi oleh sinetron dan juga azab, berikut ini penjelasannya. Selama bulan Oktober pada instagram memposting sebanyak 35 kali sedangkan untuk twitter sebanyak 55kali, hal ini terjadi disebabkan pada twitter KPI juga memposting berita KPID hal ini bertujuan agar netizen juga lebih mengenal kepada tugas dan fungsi KPID. Selama bulan September terdapat sekalikunjungan universitas dimana pada kunjungan tersebut selalu dijelaskan bagaimana media center berjalan serta aplikasi apa saja yang digunakan oleh media center KPI Pusat dalam menganalisa media. Selain itu juga mengajarkan pada anak magang untuk menganalisa sentiment masyarakat kepada KPI Seluruh media online

### **November 2019.**

Selama bulan November 2019 terdapat isu terkait penguatan kelembagaan KPI melalui RUU penyiaran yang saat ini sedang dalam pembahasan DPR RI.traffic sosial mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan banyaknya media yang membahas terkait wacana tersebut. Traffic tertinggi terjadi pada tanggal 25November, banyak pro dan kontra yang terjadi akibat adanya wacana tersebut, sebagian mendukung wacana penguatan KPI dan disatu sisi menolak, adanya statement dari Geryantika selaku perwakilan kominfo yang menyatakan KPI tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi media baru, dan ini menyebabkan banyak masyarakat yang memberikan dukungan kepada wacana tersebut dan mulai menghujat KPI karena sebelumnya pernah menyampaikan keinginannya dalam mengawasi media baru

### **Desember 2019.**

Selama bulan Desember 2019 terdapat 2 isu terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi, diantaranya terkait sensor yang terjadi pada acara miss universe dimana masyarakat sebagian besar menyalahkan KPI Pusat terkait masalah tersebut serta rencana penutupan IndoXXI dan pemblokiran Netflix oleh Telkom, yang mana kejadian tersebut turut

menyeret KPI. Sebagaimana besar masyarakat menyangkan penutupan dan pemblokiran tersebut mengingat konten tayangan TV pun masih jauh dari kata baik, sehingga masyarakat kesulitan mencari hiburan yang bermutu.

Traffic tertinggi terjadi pada tanggal 5-11 Desember dan 24 Desember, pada tanggal 4-11 Desember 2019 bertepatan dengan adanya penyelenggaraan miss universe terjadi penyensoran yang sangat banyak oleh salah satu lembaga penyiaran yang menampilkan tayangan tersebut, hal itu membuat sebagian besar masyarakat yang belum tahu tugas dan kewenangan KPI menghujat KPI karena sensor tersebut, hal itu menunjukkan bahwa sosialisasi pada masyarakat mengenai tugas dan kewenangan KPI masih sangat kurang.

## **Tahun 2020**

### **Januari 2020.**

Selama bulan Januari terdapat isu terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi yaitu terkait isu Iklan TV yang menyangkut BTS (Boyband Korea) pada e-commerce Tokopedia yang dituding mengandung unsur dan mempromosikan LGBT, saat isu pertama bergulir KPI mendapat banyak sorotan terkait kebijakan apa yang akan diambil, tidak lama semenjak isu bergulir KPI Pusat mengeluarkan kebijakan yang memutuskan bahwa iklan tersebut tidak ada unsur LGBT apalagi mempromosikannya, sedangkan untuk kehidupan pribadi personil bukan kewenangan KPI Pusat

Setelah mengeluarkan kebijakan tersebut banyak dukungan yang dialamatkan kepada KPI Pusat, hal tersebut membuat sentiment positif masyarakat ke KPI Pusat meningkat cukup signifikan. Walaupun ada sentimen negatif akibat postingan @awkarin terkait sensor yang dilakukan KPI Pusat jumlah tersebut tidak sebanyak sentimen positif.

Traffic tertinggi terjadi pada tanggal 9-11 Januari 2020. Pada tanggal tersebut bertepatan dengan kebijakan yang dikeluarkan KPI untuk iklan BTS dan juga tweet awkarin terkait sensor KPI Pusat.

### **Februari 2020.**

Selama bulan Februari terdapat isu terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi yaitu literasi media yang diselenggarakan di Surabaya. Kegiatan ini merupakan pembuka dari seluruh rangkaian Literasi media.

Persebaran dan dukungan masyarakat akan kegiatan ini cukup tinggi, selain itu masyarakat jugamemberi respon positif akan kegiatan ini, dapat dikatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang mendapat dukungan dari masyarakat.

Selain mengenai kegiatan literasi, terdapat juga sentiment negatif terkait isu KPAI, yaitu pendapat salah satu komisioner yang mengatakan bahwa wanita dapat hamil jika berenang di tempat umum. Banyak masyarakat yang menghujat pernyataan tersebut, namun mereka salah me-mention lembaga. Sebagian besar masyarakat mulai menghujat KPI karena statement tersebut, walau salah alamat hal ini membuat sentiment negatif kepada KPI Pusat melonjak cukup tinggi.

### **Maret 2020.**

Selama bulan Maret terdapat isu terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi yaitu sanksi terhadap program acara Pagi-Pagi Pasti Happy. Persebaran dan dukungan masyarakat akan kegiatan ini cukup tinggi, selain itu masyarakat juga memberi respon positif akan sanksi ini, dapat dikatakan bahwa sanksi oleh KPI kepada masih menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat.

Namun diawal bulan terjadi sedikit peningkatan meski tidak signifikan terkait aduan masyarakat terhadap program TV One yang dinilai terlalu berlebihan dalam memberitakan perihal Virus Corona. Meski setelah itu KPI telah meminta klarifikasi terhadap TV One. Selain itu juga terdapat masalah tentang Komentator bola yang dinilai merendahkan wanita melalui ujarannya saat siaran langsung dan ini juga ditindak oleh KPI dengan cepat

Selain mengenai sanksi, masalah surat edaran oleh KPI terkait social distancing untuk program acara ditengah wabah covid-19 saat ini juga mendapat dukungan yang dari masyarakat.

### **April 2020.**

Masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, bahwa pemberian sanksi masih merupakan salah satu tema yang paling mendapatkan sorotan publik, perlu menjadi catatan bahwa pada bulan April ini KPI cukup sering mengeluarkan sanksi yang dipublish disosial media, sanksi tersebut diantaranya:

- a. Brownis, Penghentian Sementara (Trans TV)
- b. Kilau DMD Ratu Casting, Teguran Tertulis Ke Dua (MNC TV)
- c. ANTV 27 Tahun Untukmu Indonesiaku, teguran Tertulis, (ANTV)
- d. Jalan batin Ningsih Tinampi, Teguran Tertulis (ANTV)

- e. Tawa-Tawa Santai, Teguran Tertulis (Net)
- f. Jendela Dunia, Teguran Tertulis (TVRI)

Adapun dari keenam sanksi yang dipublish ada dua sanksi yang mendapat sorotan cukup banyak yaitu Jalan Batin Ningsih Tinampi, serta Jendela Dunia. Untuk Jalan Batin Ningsih Tinampi sebagian besar masyarakat tidak suka akan acara tersebut, serta sanksi ini dipublish saat Ningsih Tinampi mendapat sorotan publik karena klaim dirinya telah menemukan obat penyembuh corona, tak pelak hal ini mendapat hujatan dari netizen dan berimplikasi kepada KPI, dimana sebagian besar masyarakat mendukung KPI akan sanksi ini. Sedangkan untuk Jendela Dunia yang baru saja dikeluarkan mendapat sorotan karena sebagian besar masyarakat tidak menyangka bahwa stasiun TV TVRI mendapat sanksi, mereka beranggapan bahwa TVRI milik negara sehingga tidak mungkin ada sanksi.

### **Mei 2020.**

Untuk bulan Mei sendiri tidak ada sanksi yang diberikan oleh KPI kepada program acara televisi, sedangkan untuk program bicara siaran baik ramadhan sendiri tidak mendapat respon yang tinggi jika dibandingkan dengan bicara siaran baik kategori program reguler. Hal itu disebabkan untuk bulan ramadhan hanya ditayangkan selama bulan ramadhan sedangkan reguler setiap hari, hal itu membuat masyarakat kurang memberi respon terhadap challenge ini. Hampir sama dengan program reguler challenge bicara siaran baik program ramadhan dilakukan dengan beberapa kali postingan dengan memberikan gambaran program apa saja yang berkualitas selama ramadhan berdasarkan penilaian anugerah ramadhan 2019 dan juga penilaian tayangan selama paruh ramadhan. Kegiatan ini sendiri dipecah menjadi 2 periode yaitu Pra Ramadhan dan Paruh Ramadhan.

Sedangkan tanggal 29 ada sedikit lonjakan positif saat munculnya gugatan Inews dan RCTI agar media baru tunduk kepada RUU Penyiaran, dan ini merupakan angin segar bagi KPI yang selama ini memperjuangkan agar media baru juga harus mendapat pengawasan. Untuk rincian respon publik akan dipaparkan pada bab selanjutnya.

### **Juni 2020.**

Selama bulan Juni terdapat beberapa topik terkait penyiaran yang menjadi bahan pembicaraan warganet diantaranya:

- a. Sanksi Jalan Kesembuhan Angga Praja Buana
- b. Webinar Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa
- c. Ketidaksetujuan KPI akan kerjasama antara Kemendikbud dengan Netflix

- d. Tayangan Dari Jendela SMP
- e. Acara baru RTV “Boku No Hero Academia”

Jika dibedah satu persatu pada tanggal 11 Juni 2020 KPI mempublish sanksi acara jalan kesembuhan Angga Praja Buana yang tayang di Net, dari sanksi tersebut respon masyarakat ada dua. Pertama setuju akan sanksi itu dan menyatakan bahwa kualitas tayangan Net sudah jauh menurun jika dibandingkan dengan sebelumnya, namun disisi lain banyak yang mengatakan bahwa masih banyak tayangan lain yang lebih tidak mendidik namun tidak pernah kena sanksi oleh KPI.

### **Juli 2020.**

Selama bulan Juli terdapat beberapa topik terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi yaitu sanksi terhadap program acara Dari Jendela SMP, selain itu Anugerah Syiar Ramadan juga mendapat perhatian lebih dari masyarakat, hal itu dapat dilihat dari cukup tingginya tingkat partisipasi masyarakat.

Masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, bahwa pemberian sanksi masih merupakan salah satu tema yang paling mendapatkan sorotan publik, perlu menjadi catatan bahwa pada bulan April ini KPI cukup sering mengeluarkan sanksi yang dipublish disosial media, sanksi tersebut diantaranya:

- A. Inayah (ANTV)
- B. Ruqyah (Trans 7)
- C. Dari Jendela SMP (SCTV)
- D. Garis Tangan (ANTV)
- E. Buanglah Cinta di Hatiku (SCTV)
- F. Pesantren Rock n Dut (SCTV)
- G. Revolutionary Love
- H. 10 Sanksi kepada 10 program Infotainment terkait pemberitaan Dewi Persik

### **Agustus 2020.**

Selama bulan Agustus terdapat beberapa topik terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi yaitu permasalahan penggunaan kata anjay yang dilarang digunakan oleh Komnas Perlindungan Anak namun akibat hal tersebut KPI Pusat turut terbawa dalam permasalahan tersebut sehingga membuat sentimen negatif cukup tinggi.

Selain itu gugatan yang diajukan oleh MNC untuk Undang-undang Penyiaran juga membawa dampak KPI, dimana bagi sebagian besar masyarakat hal tersebut akan mengekang

kebebasan dalam menggunakan sosial media. Masyarakat beranggapan bahwa masalah ini juga disebabkan adanya keinginan KPI untuk mengawasi media baru.

Kedua hal tersebut menyumbang sentimen negatif yang cukup tinggi dibanding hal lain, sedangkan untuk hal positif adalah saat penganugerahan penyiaran ramah anak dimana acara tersebut cukup mendapat respon positif dari warganet.

### **September 2020.**

Selama bulan September terdapat beberapa topik terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi yaitu permasalahan statement KPI untuk meminta RTV menayangkan konten local yang disalah persepsikan oleh masyarakat yang beranggapan KPI meminta RTV menghapus kartun dan juga meminta menayangkan sinetron. Selain itu permasalahan aduan tayangan samudera cinta juga mendapat engagement tinggi khususnya saat adegan dikamar yang discreenshoot seolah-olah tayangan dewasa hal ini menjadi bola liar di social media dan membuat sentimen negatif cukup tinggi,

Permasalahan samudera cinta yang mendapat sentiment negative yang lebih tinggi hal tersebut akan dipaparkan pada subbab selanjutnya, namun secara keseluruhan hampir disemua sosial media potongan adegan samudera cinta ini muncul serta dibarengi dengan sentiment ataupun komentar negatif netizen..

Kedua isu tersebut menyumbang sentiment negatif yang cukup tinggi dibanding hal lain, sedangkan untuk hal positif dibulan ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

### **Oktober 2020.**

Selama bulan Oktober terdapat beberapa topik terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi yaitu Sanksi kepada program Samudera Cinta yang banyak dikeluhkan masyarakat, namun engagement itu berupa sentimen negatif, hal tersebut disebabkan masyarakat menilai sanksi yang diberikan KPI sangat terlambat. Hal tersebut dikarenakan program tersebut sudah pindah jam tayang dan masyarakat telah mengeluhkan acara itu sejak lama

Selain itu Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa yang menghadirkan Lyodra juga mendapat perhatian yang tinggi dari netizen hal tersebut dilihat dari persebaran yang cukup tinggi di tanggal 21 Oktober 2020.

## **November 2020.**

Selama bulan November terdapat beberapa topik terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi yaitu Sanksi kepada program Rumpi No Secret, banyak masyarakat yang mendukung sanksi tersebut. Masyarakat beranggapan acara tersebut patut mendapatkan sanksi. Perlu diingat sanksi yang diberikan KPI berupa pengertian sementara, jika ditilik dari komentar yang ada diposting sebagian masyarakat menginginkan penghentian yang lebih lama.

Selain sanksi tersebut, kegiatan Digital Movie Competition juga mendapat perhatian yang cukup tinggi dari masyarakat, animo yang tinggi tersebut dapat dilihat dari jumlah pendaftar yang hingga saat ini mencapai 69 karya. Sedangkan sentimen publik untuk postingan ini sebagian besar adalah positif.

## **Desember 2020.**

Selama bulan Desember terdapat beberapa topik terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi yaitu Anugerah KPI 2020 yang mendapatkan perhatian tinggi dari netizen khususnya pada kategori talkshow berita yang dimenangkan oleh mata najwa. Pada postingan tersebut mendapatkan like paling tinggi dibandingkan seluruh postingan yang ada selama bulan Desember 2020, sedangkan untuk kategori lain pada anugerah KPI kali ini juga mendapat respon yang cukup tinggi.

Selain anugerah, sanksi jugamendapat respon yang cukup tinggi. Pada bulan ini KPI mengeluarkan 3 sanksi program infotainment. Infotainment merupakan program yang paling tidak disukai netizen sehingga saat pemberian sanksi masyarakat memberikan apresiasi terhadap KPI dan berharap KPI dapat lebih tegas lagi kedepannya.

## **Tahun 2021**

### **Januari 2021.**

1. Prokontra faceshield dan masker di TV
2. Tiktok Award yang akan tayang di akhir bulan
3. Artis tiktok yang tampil di TV dalam hal ini adalah cika
4. Isu pembatasan jumlah durasi sinetron striping seperti di Korea
5. Tayangan ranjang buku harian seorang Istri
6. Tayangan kisah nyata indosiar yang menampilkan adegan tersadar dari koma melalui tiktok
7. Screenshootan adegan ranjang buku harian seorang istri SCTV

8. Tidak ada protokol kesehatan saat shooting ikatan cinta RCTI

### **Februari 2021.**

1. Keberatan oleh Nikita Mirzani akibat sanksi yang diberikan oleh KPI
2. Statement Deddy Corbuzier yang mempertanyakan sinetron tanpa masker
3. Dr. Tirta yang juga mempertanyakan tayangan sinetron tanpa masker
4. Kebijakan KPI Pusat yang mempublikasikan tayangan yang berpotensi melanggar protokol Kesehatan
5. Sanksi terhadap program asing di RTV
6. Sanksi terhadap program catatan harian seorang istri SCTV

### **Maret 2021.**

Selama bulan maret terdapat beberapa topik terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi. Diantaranya pernikahan Atta dan Aurel yang disiarkan di TV yang menuai prokontra, sebagian besar netizen kurang setuju dengan acara tersebut, kejadian ini memunculkan respon yang dapat dikatakan terlalu berlebihan dari Komite Nasional Revolusi Penyiaran (KNRP) yang membuat surat terbuka yang dialamatkan oleh KPI terkait acara ini, berikut ini surat yang dikeluarkan oleh KNRP.

### **April 2021.**

Selama bulan April Instagram memposting sebanyak 46 kali sedangkan untuk Twitter sebanyak 39 kali. Hal serupa juga terjadi pada bulan sebelumnya pada bulan April 2021 tidak ada kunjungan Universitas yang biasanya dalam kunjungan tersebut akan selalu ada penjelasan bagaimana media center bekerja serta aplikasi apa saja yang ada di media center KPI Pusat kepada peserta yang dijelaskan langsung oleh Humas.

Selama bulan April terdapat beberapa topik terkait isu penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi diantaranya launching Polri TV dan radio. Respon MUI terhadap kualitas tayangan TV selama bulan Ramadhan KPI Pusat selama Bulan April serta beberapa sanksi yang dikeluarkan 2021 sanksi diantaranya;

1. Hardrock FM Jakarta
2. Jodoh Wasiat Bapak Babak 2
3. Kopi Viral
4. Pesbuker New Normal

### **Mei 2021.**

Selama bulan Mei pada instagram memposting sebanyak 27 kali sedangkan untuk twitter sebanyak 112 kali, hal ini terjadi disebabkan pada twitter KPI juga memposting berita KPID hal ini bertujuan agar netizen juga lebih mengenal kepada tugas dan fungsi KPID serta promosi harsiaras yang bisa 3 postingan dalam sekali posting mengingat adanya Batasan karakter dalam satu kali postingan twitter.

Selama bulan Mei dapat dikatakan hampir tidak ada isu yang menarik yang terjadi, bahkan sanksi yang dikeluarkan oleh KPI Pusat pun yang biasanya mendapat perhatian publik, namun kali ini tidaklah mencapai engagement yang memuaskan. Hal ini didasari sanksi yang diberikan tidak memiliki nilai jual dan berbeda dengan apa yang publik harapkan. Selama bulan Mei, KPI Pusat mengeluarkan sanksi sebanyak dua kali kepada program India di Antv.

### **Juni 2021.**

Selama bulan Juni pada instagram memposting sebanyak 32 kali sedangkan untuk twitter sebanyak kali, hal ini terjadi disebabkan pada twitter KPI juga memposting 32 kali

Selama bulan Juni terdapat dua isu besar yang terjadi diantaranya adalah polemic tayangan sinetron Zahra yang menampilkan pemeran dibawah umur yang memerankan istri ke tiga, hal itu membuat publik marah dan tidak setuju. Publik berasumsi hal itu seolah menggambarkan pelegalan pedophilia. Kejadian itu membuat sentiment negative melonjak sangat tinggi.

Kejadian kedua adalah saat berita pelarangan 42 lagu untuk diputarkan di radio jam 22.00 kebawah, hal ini memicu kemarahan publik kepada KPI, kejadian ini menarik beberapa publik figure memberikan pendapat, ada 3 tokoh yang paling berpengaruh diantaranya Tretan Muslim bersma Coky Pardede yang membuat kolom komentar KPI Pusat diserang dengan kata-kata why dan semakin memancing kemarahan public hingga saat ini, namun jauh sebelum itu sudah ada public figure yang mengutarakan kemarahannya yaitu Ernest Prakarsa, namun dampaknya tidak separah tretan muslim.

### **Agustus 2021.**

Selama bulan Agustus pada Instagram memposting sebanyak 25 kali sedangkan untuk Twitter sebanyak 16 kali. Diawal bulan Agustus terjadi sebuah isu yang melibatkan KPI Pusat yang mendapat sorotan cukup tinggi dari publik, yaitu terkait aduan masyarakat tentang tayangan olimpiade di cabang olahraga volly pantai, aduan masyarakat tersebut mematik respon publik yang beranggapan bahwa tayangan tersebut biasa saja dan wajar saja namun di

lain hal masyarakat menilai yang mengatakan bahwa tayangan tersebut mengandung unsur pornografi.

### **September 2021.**

Selama bulan September terdapat isu yang mendapat sorotan publik tinggi yaitu terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh karyawan KPI, dapat dikatakan bahwa kasus ini merupakan kejadian yang memiliki sentiment negatif tertinggi selama tahun 2021 ini. Kasus ini pula berlangsung cukup lama bahkan masih dibahas netizen hingga akhir bulan.

Selain permasalahan ini terdapat juga sanksi KPI yang mendapat engagement cukup tinggi dari masyarakat yaitu tentang sanksi program acara bioskop trans TV: Homefront. Sebelum homefront terjadi juga peningkatan sentiment negatif saat terkait glorifikasi pembebasan saipul jamil. Ada beberapa masukan yang dapat dilakukan oleh KPI Pusat terkait permasalahan yang terjadi selama bulan September ini.

### **Oktober 2021.**

Selain itu Gerakan literasi sejuta pemirsa yang menghadirkan Lyodra juga mendapat perhatian yang tinggi dari netizen hal tersebut dilihat dari persebaran yang cukup tinggi di tanggal 21 Oktober 2020.

Sedangkan untuk konsistensi isu yang terjadi dibulan Oktober adalah aduan terkait tayangan iklan shopee yang dianggap masyarakat terlalu vulgar, sebagian masyarakat mengeluhkan kepada KPI, namun disatu sisi hingga saat ini tidak ada respon dari KPI terkait perhal tersebut. namun hingga akhir bulan aduan tersebut terus berdatangan melalui sosial media KPI.

### **November 2021.**

Selama bulan November terdapat beberapa topik terkait penyiaran yang mendapat engagement cukup tinggi yaitu Sanksi kepada program “Rumpi No Secret”, banyak masyarakat yang mendukung sanksitersebut. Masyarakat beranggapan acara tersebut patut mendapatkan sanksi. Perlu diingat sanksi yang diberikan KPI berupa penghentian sementara, jika ditilik dari komentar yang ada diposting sebagian masyarakat menginginkan penghentian yang lebih lama.

Selain sanksi tersebut, event Digital Movie Competition juga mendapat perhatian yang cukup tinggi dari masyarakat, animo yang tinggi tersebut dapat dilihat dari jumlah pendaftar yang hingga saat ini mencapai 69 karya. Sedangkan sentimen publik untuk postingan ini sebagian besar adalah positif.

### **Desember 2021.**

Pada postingan tersebut mendapatkan like paling tinggi dibanding seluruh postingan yang ada selama bulan November 2021, sedangkan untuk kategori lain pada anugerah KPI kali ini juga mendapat respon yang cukup tinggi.

Selain anugerah sanksi juga mendapat respon yang cukup tinggi. Pada bulan ini KPI mengeluarkan 3 sanksi program infotainment. Infotainment merupakan program yang paling tidak disukai netizen sehingga saat pemberian sanksi masyarakat memberikan apresiasi terhadap KPI dan berharap KPI dapat lebih tegas lagi kedepannya.

### **Tahun 2022**

#### **Januari 2022**

Selama di bulan Januari tahun 2022, Media sosial KPI terutama twitter masih heboh dengan dugaan kasus pelecehan seksual MS. Dalam laman Twitter di tanggal 7 Januari 2022 masih didapati komen dan sentimen yang negatif dari netizen terkait dengan alih status para terduga pelaku dan pemindahan lokasi kerja MS ke Kominfo.

Selain mention terkait MS, didapati juga traffic mention soal statement Arteria Dahlan yang membuat heboh jagat maya yang menurut sebagian pendapat mengungkapkan pernyataan Arteria Dahlan telah menyinggung perasaan masyarakat Jawa Barat.

#### **Februari 2022**

Selama bulan Februari 2022, pergerakan sosial media KPI Pusat diwarnai dengan berbagai isu menarik. Di tanggal 8 Februari terdapat 24 jumlah respon positif dan 27 respon negatif dari netizen. Pertama, terkait dengan isu perayaan Hari Pers Nasional, banyak juga netizen yang mengaitkan kegiatan ini dengan kerja KPI. Kedua respon positif juga terlihat dari postingan Gubernur Kalimantan Utara untuk pembentukan KPID Kalimantan Utara.

Selanjutnya respon positif juga di terima oleh KPI pusat dari postingan dua kegiatan KPI yaitu, Literasi Media yang di selenggarakan di Waingapu, Sumba Timur, NTT dan kunjungan

Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis yang datang mengunjungi Gubernur Bali dengan tujuan mempersiapkan kegiatan KPI di Bali.

Selama bulan Februari 2022 jumlah mention yang menuju ke sosial media KPI Pusat sebanyak 11.572 dengan rincian pada instagram sebanyak 445 kali sedangkan untuk twitter sebanyak 7817, facebook 23, berita 1706, video 231, website 1130. Selama bulan Februari 2022, Instagram KPI Pusat dan juga twitter KPI juga memposting berita KPID hal ini bertujuan agar netizen juga lebih mengenal kepada tugas dan fungsi KPID. Selama bulan Februari, Twitter KPI Pusat dikunjungi 63,9 ribu profil dan didapati sebanyak 283 akun yang menjadi pengikut baru.

### **Maret 2022**

Selama bulan Maret 2022, masih menjadi pekerjaan rumah bagi KPI untuk dapat bijak dalam menghadapi isu pelecehan seksual yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Respon netizen pun beragam cenderung secara terbuka menyerang media sosial KPI Pusat dengan tema tersebut.

Selanjutnya tren yang mendapat respon cukup baik adalah tentang surat edaran KPI yang melarang Lembaga Penyiaran menampilkan gerakan tubuh atau ungkapan yang bersosialisasi cabul, vulgar hingga erotis secara perseorangan mau pun bersama orang lain. Selain itu, KPI juga melarang Lembaga Penyiaran menampilkan pendakwah yang berlatar belakang dari organisasi terlarang.

Selama Bulan Maret 2022 terdapat 17.270 mentions dengan rincian 818 Positif sedangkan 5.466 Negatif dan sisanya merupakan netral.

Selama bulan Maret 2022 KPI Pusat memposting sebanyak 44 kali kali sedangkan sejumlah 92,1 ribu netizen melihat profil KPI Pusat. Terjadi peningkatan follower sebanyak 30 orang.

Untuk jumlah *mention* sendiri sebanyak 1.799 kali. Akun Twitter KPI Pusat sendiri saat ini sudah terverifikasi atau sudah terdaftar di Twitter Pusat hal ini akan semakin meyakinkan publik mengenai kebenaran akan akun ini, tidak semua instansi memiliki tanda *badge* biru ini hanya yang lolos verifikasi saja yang mendapat logo centang biru di akun KPI Pusat.

Memasuki bulan Maret jumlah follower Instagram KPI Pusat sebanyak 127.216 akun peningkatan pengikut terjadi sekitar 499 Follower baru sepanjang bulan Maret 2022. Sedangkan untuk komposisi usia pengikut Instagram KPI sejumlah 50,1% direntang usia 25-34 dan 25,1%, usia 18-24. Dapat disimpulkan rata – rata pengikut Instagram KPI Pusat berasal dari kalangan Millennial atau anak muda. Hal ini tentu sangat positif oleh karena itu KPI Pusat harus menyiapkan langkah – langkah untuk mendekati kaum milenial dengan konten yang bervariasi.

Untuk komposisi secara jenis kelamin sendiri, Instagram dan Twitter cenderung mengalami perbedaan yaitu 56,9 persen laki-laki 43 persen adalah wanita.

### **April 2022.**

Selama bulan April 2022, masih menjadi pekerjaan rumah bagi KPI untuk dapat bijak dalam menghadapi isu pelecehan seksual pegawai KPI Pusat yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ini dikaitkan dengan temuan dari respon netizen yang secara terbuka menyerang media sosial KPI Pusat dengan tema tersebut.

Selanjutnya tren yang mendapat respon cukup baik adalah tentang postingan yang menginformasikan tentang pembagian Set Top Box (STB) di laman Instagram KPI Pusat di tambah postingan ucapan selamat menjalankan Ibadah Puasa tahun 2022 memiliki impresi yang cukup baik di media sosial KPI Pusat.

Bulan April 2022 terdapat 11.936 mentions dengan rincian 458 Positif sedangkan 2.487 Negatif dan sisanya merupakan netral

Selama bulan April 2022 KPI Pusat memposting sebanyak 12 kali kali sedangkan sejumlah 32,2 ribu netizen melihat profil KPI Pusat. Terjadi peningkatan follower sebanyak 35 orang.

Hingga Saat ini jumlah follower Instagram KPI Pusat sebanyak 127.216 akun peningkatan pengikut terjadi sekitar 32 Follower baru sepanjang bulan April 2022. Hingga saat ini jumlah pengikut di Instagram KPI Pusat berjumlah 127.445 akun dengan 15,9 persennya berada di Jakarta disusul dengan Bandung, Bekasi.

Sedangkan untuk komposisi usia pengikut Instagram KPI sejumlah 50,1% direntang usia 25-34 dan 25,1%, usia 18-24. Dapat disimpulkan rata – rata pengikut Instagram KPI Pusat berasal dari kalangan Millennial atau anak muda.

Hingga saat ini jumlah Follower halaman KPI berjumlah 57.377 orang jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah netizen yang menyukai halaman KPI Pusat sebanyak 56.365.

### **Mei 2022**

Selama bulan Mei 2022, Media sosial KPI Pusat menerima respon kurang baik dari masyarakat yang menilai KPI bekerja mengawasi portal layanan Internet. Dapat di lihat pada 13 Mei 2022, netizen memention KPI dari postingan meme Ruhut Sitompul yang mengedit foto Gubernur DKI Jakarta mirip dengan tokoh film Joker. Dan masi dengan respon masyarakat tentang konten siaran televisi yang masih di bawah standart.

Mei 2022 terjadi lonjakan lalu lintas pergerakan di sosial media pada tanggal 16 mei 2022 di mana ada satu pemberitaan terkait cuplikan tayangan ceramah yang memberikan motivasi.

Pada tanggal 31 Mei 2022, media sosial KPI mendapatkan tren positif dari temuan berita terkait usulan kerja sama dalam bidang penyiaran dengan Malaysia. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jhony G. Plate menyebutkan Pemerintah Malaysia mengajak pemerintah Indonesia untuk bekerja sama di sektor penyiaran dengan harapan terbukanya ruang kerja sama bisnis yang lebih luas.

Selama Bulan Mei 2022 dapat 8.493 mentions dengan rincian 523 Positif sedangkan 1.068 Negatif dan sisanya merupakan netral

Selama bulan Mei 2022 KPI Pusat memposting sebanyak 16 kali kali sedangkan sejumlah 17,1 ribu netizen melihat profil KPI Pusat. Selama bulan Mei sendiri terjadi peningkatan follower sebanyak 16 akun baru. Untuk jumlah *mention* sendiri sebanyak 523 kali.

Saat ini jumlah follower Instagram KPI Pusat sebanyak 126.721 orang peningkatan Follower terjadi sekitar 868 Follower baru sepanjang bulan Mei 2022. Sedangkan untuk komposisi usia pengikut Instagram KPI sejumlah 50,1 persen direntang usia 25-34. Usia 18-24 24,8 persen. Dapat disimpulkan rata – rata pengikut Instagram KPI Pusat berasal dari kalangan Millennial atau anak muda. Hal ini tentu sangat positif oleh karena itu KPI Pusat harus menyiapkan langkah – langkah untuk mendekati kaum milenial dengan konten yang bervariasi.

Hingga saat ini jumlah Follower halaman KPI berjumlah 57.271 orang jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah netizen yang menyukai halaman KPI Pusat sebanyak 56.236.

## **Juni 2022**

Selama bulan Juni 2022, tren pergerakan media sosial KPI Pusat masih diwarnai dengan berbagai isu, baik yang negatif mau pun positif. Salah salah satu isu negatif yang berseliweran media sosial KPI adalah tentang dugaan kasus pelecehan seksual. Disamping itu juga media sosial KPI juga diwarnai dengan sosialisasi penerapan siaran digital pada November tahun 2022 mendatang.

Selanjutnya isu positif terkait salah satu contoh tayangan ceramah keagamaan yang memotivasi untuk dapat di adopsi oleh Lembaga Penyiaran.

Juni 2022 dapat 8.437 mentions dengan rincian 330 Positif sedangkan 881 Negatif dan sisanya merupakan netral. Selama bulan Mei 2022 KPI Pusat memposting sebanyak 10 kali kali sedangkan sejumlah 12,7 ribu netizen melihat profil KPI Pusat. Selama bulan Juni sendiri

terjadi peningkatan follower sebanyak 4 akun baru. Untuk jumlah *mention* sendiri sebanyak 427 kali

Saat ini jumlah follower Instagram KPI Pusat sebanyak 126.669 orang peningkatan Follower terjadi sekitar 19 pengikut baru sepanjang bulan Juni 2022

Hingga saat ini jumlah Follower halaman KPI berjumlah 57.638 orang jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah netizen yang menyukai halaman KPI Pusat sebanyak 56.588.

## **Juli 2022**

Selama bulan Juli 2022, tren pergerakan media sosial KPI Pusat masih diwarnai dengan berbagai isu, baik yang negatif mau pun positif. Salah satu isu negatif yang berseliweran media sosial KPI adalah tentang dugaan kasus pelecehan seksual. Selanjutnya isu positif terkait salah satu contoh tayangan ceramah keagamaan yang memotivasi untuk dapat di adopsi oleh Lembaga Penyiaran.

Selama Bulan Juni 2022 dapat 8.437 mentions dengan rincian 330 Positif sedangkan 881 Negatif dan sisanya merupakan netral

Selama bulan Mei 2022 KPI Pusat memposting sebanyak 10 kali kali sedangkan sejumlah 12,7 ribu netizen melihat profil KPI Pusat. Selama bulan Juni sendiri terjadi peningkatan follower sebanyak 4 akun baru. Untuk jumlah *mention* sendiri sebanyak 427 kali.

Saat ini jumlah follower Instagram KPI Pusat sebanyak 126.669 orang peningkatan Follower terjadi sekitar 19 pengikut baru sepanjang bulan Juni 2022.

Hingga saat ini jumlah Follower halaman KPI berjumlah 57.638 orang jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah netizen yang menyukai halaman KPI Pusat sebanyak 56.588.

## **Agustus 2022**

Selama bulan Agustus 2022, tren pergerakan media sosial KPI Pusat masih diwarnai dengan berbagai isu, baik yang negatif mau pun positif. Salah satu isu negatif yang berseliweran media sosial KPI adalah tentang dugaan kasus pelecehan seksual. Selain itu media sosial KPI Pusat juga menerima mention terkait Peran Media Dalam Perlindungan Data Pribadi.

Selama Bulan Agustus 2022 dapat 7.447 mentions dengan rincian 316 Positif sedangkan 1128 Negatif dan sisanya merupakan netral. Selama bulan Agustus 2022 KPI Pusat memposting sebanyak 14 kali kali sedangkan sejumlah 16,2 ribu netizen melihat profil KPI

Pusat. Selama bulan Agustus 2022 sendiri terjadi peningkatan follower sebanyak 58 akun baru. Untuk jumlah *mention* sendiri sebanyak 515 kali.

Saat ini jumlah follower Instagram KPI Pusat sebanyak 126.208 orang peningkatan Follower terjadi sekitar 771 pengikut baru sepanjang bulan Agustus 2022. Hingga saat ini jumlah Follower halaman KPI berjumlah 58.445 orang jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah netizen yang menyukai halaman KPI Pusat sebanyak 56.744.

### **September 2022**

Selama bulan September 2022, tren pergerakan media sosial KPI Pusat masih diwarnai dengan berbagai isu, baik yang negatif maupun positif. Salah satu postingan Media Sosial KPI Pusat kembali mendapatkan respon positif terkait pembatasan pelaku KDRT untuk tampil di media massa. Seruan ini dilontarkan oleh Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah lantaran salah satu public figur mendapat laporan kekerasan dan sebaiknya agar memperhatikan dirinya ketika akan tampil di lembaga penyiaran.

Selama Bulan September 2022 dapat 7.625 mentions dengan rincian 259 Positif sedangkan 1091 Negatif dan sisanya merupakan netral. Selama bulan September 2022 KPI Pusat memposting sebanyak 9 kali kali sedangkan sejumlah 38,2 ribu netizen melihat profil KPI Pusat. Selama bulan September 2022 sendiri terjadi peningkatan follower sebanyak 31 akun baru. Untuk jumlah *mention* sendiri sebanyak 402 kali.

Saat ini jumlah pengikut Instagram KPI Pusat sebanyak 128.693 orang peningkatan Follower terjadi sekitar 1.728 pengikut baru sepanjang bulan September 2022. Hingga saat ini jumlah Follower halaman KPI berjumlah 57.992 orang jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah netizen yang menyukai halaman KPI Pusat sebanyak 56.750.

### **Oktober 2022**

Selama bulan Oktober 2022, tren pergerakan media sosial KPI Pusat masih diwarnai dengan berbagai isu, baik yang negatif maupun positif. Salah satu postingan Media Sosial KPI Pusat kembali mendapatkan respon positif terkait pembatasan pelaku KDRT untuk tampil di media massa, namun isu ini tidak bertahan lama di bulan Oktober.

Postingan terkait Anugerah KPI yang terselenggara di Kompas TV pada Minggu ke-2 bulan Oktober juga memberikan sentiment positif di media sosial KPI Pusat. Selama Bulan Oktober 2022 dapat 14.427 mentions dengan rincian 599 Positif sedangkan 2.978 Negatif dan sisanya merupakan netral.

Selama bulan Oktober 2022 KPI Pusat memposting sebanyak 11 kali kali sedangkan sejumlah 40 ribu netizen melihat profil KPI Pusat. Selama bulan Oktober 2022 sendiri terjadi peningkatan follower sebanyak 116 akun baru. Untuk jumlah *mention* sendiri sebanyak 402 kali.

Saat ini jumlah pengikut Instagram KPI Pusat sebanyak 144.597 akun. Peningkatan Follower terjadi sekitar 902 pengikut baru sepanjang bulan Oktober 2022.

Hingga saat ini jumlah Follower halaman KPI berjumlah 58.133 orang jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah netizen yang menyukai halaman KPI Pusat sebanyak 56.754.

### **November 2022.**

Selama bulan November 2022, tren pergerakan media sosial KPI Pusat masih diwarnai dengan berbagai isu, baik yang negatif mau pun positif. Media sosial KPI tentang evaluasi pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) pada 2 November 2022. Ragam isu yang hadir pada media sosial KPI salah satu diantaranya terjadi banyak keluhan masyarakat tentang suntik mati penyiaran analog.

Dalam sebuah tulisan yang berjudul “DPR Minta Kominfo Segera Matikan Siaran TV Analog Seluruh RI” yang di publish pada media detik.com Senin, 28 November 2022 menceritakan tentang pelaksanaan ASO masih menyisakan berbagai persoalan dengan 284 kabupaten/kota yang belum diterapkannya ASO.

Selama Bulan November 2022 dapat 16.457 mentions dengan rincian 830 Positif sedangkan 4.570 Negatif dan sisanya merupakan netral. Berkaca dari temuan mention ini mencakup key word yang digunakan, sehingga apa pun yang masuk berupa kata key KPI akan masuk ke dalam analisa data yang ada di aplikasi Brand24. Jadi dapat disimpulkan, mention negative yang masuk tidak seluruhnya mengacu pada halaman sosial media Komisi Penyiaran Indonesia.

Selama bulan November 2022 KPI Pusat memposting sebanyak 16 kali kali sedangkan sejumlah 9.024 ribu netizen melihat profil KPI Pusat. Untuk jumlah *mention* sendiri sebanyak 402 kali.

Saat ini jumlah pengikut Instagram KPI Pusat sebanyak 144.737 akun. Peningkatan pengikut terjadi sekitar 15 pengikut baru sepanjang bulan November 2022.

Hingga saat ini jumlah pengikut halaman KPI berjumlah 58.156 orang jumlah tersebut hampir sama dengan jumlah netizen yang menyukai halaman KPI Pusat sebanyak 56.781

## Desember 2022

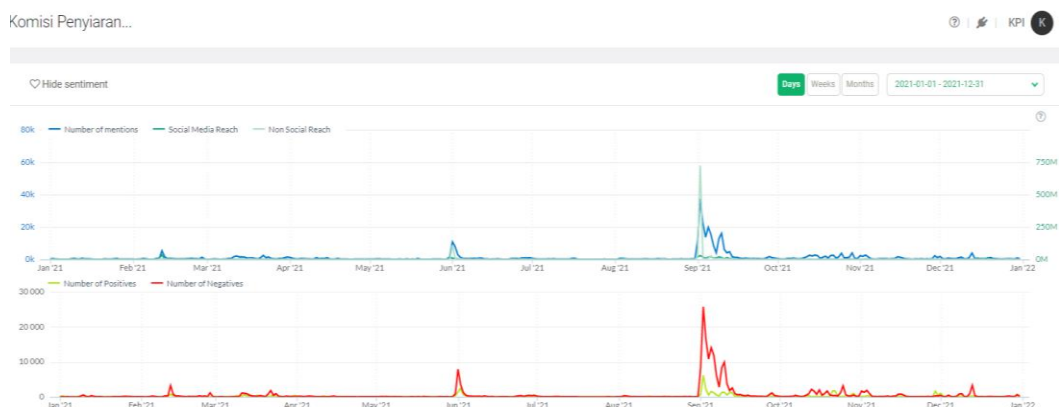
Selama bulan Desember 2022, tren pergerakan media sosial KPI Pusat masih diwarnai dengan berbagai isu, baik yang negatif mau pun positif. Media sosial KPI tentang evaluasi pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) di wilayah Jawa Timur khususnya zona Surabaya I. Ragam isu yang hadir pada media sosial KPI salah satu diantaranya terjadi banyak keluhan masyarakat tentang suntik mati penyiaran analog.

Pelaksanaan Analog Switch Off (AS) di Jabodetabek berdampak pada meningkatnya penetrasi digital. Sejak tanggal 1 Desember, penetrasi digital mencapai 70 persen yang disinyalir dipengaruhi Piala Dunia. Termasuk di kota Nielsen, penetrasi digital memperlihatkan tren peningkatan mencapai 59%.

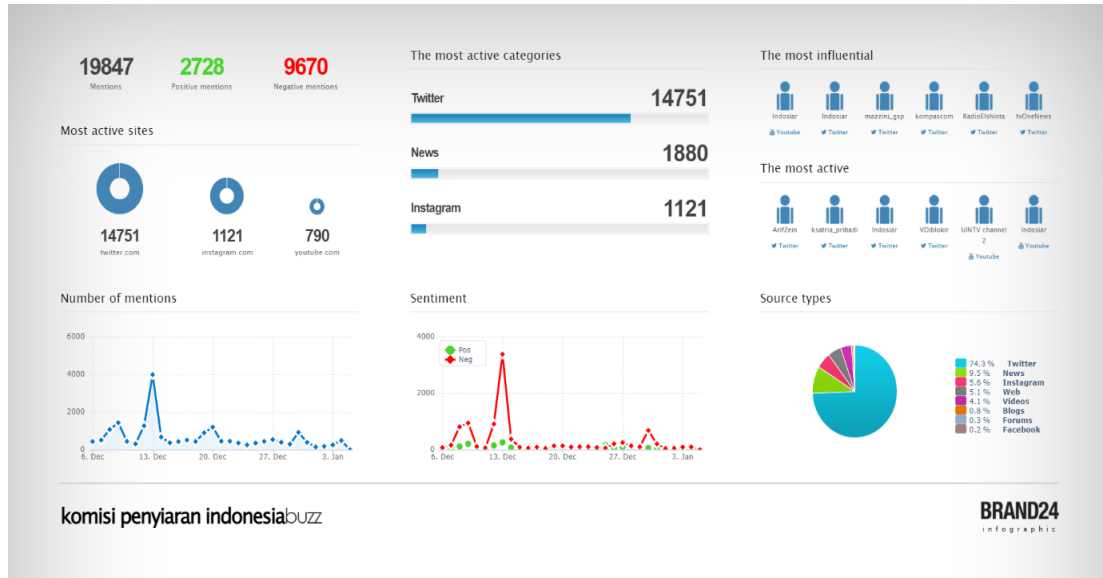
Dalam salah satu artikel disebutkan ditulis “Kemenkominfo Sebut Migrasi Analog ke Digital Bikin Internet Tambah Kencang” menyebut internet lemot ternyata berhubungan erat dengan migrasi analog ke digital.

(<https://klikpositifcom.wordpress.com/2022/12/06/kemenkominfo-sebut-migrasi-analog-ke-digital-bikin-internet-tambah-kencang/>)

## Grafik Tahunan.



## Sentimen 1 tahun



## Newsletter KPI

Sepanjang Juli 2019 - 2022, Newsletter KPI terbit sebanyak 21 kali dengan tema sebagai berikut :

Edisi 4 - 2019: Profil Komisioner KPI periode 2019-2022



Edisi 5-2019: Meretas Jalan Gerakan Literasi



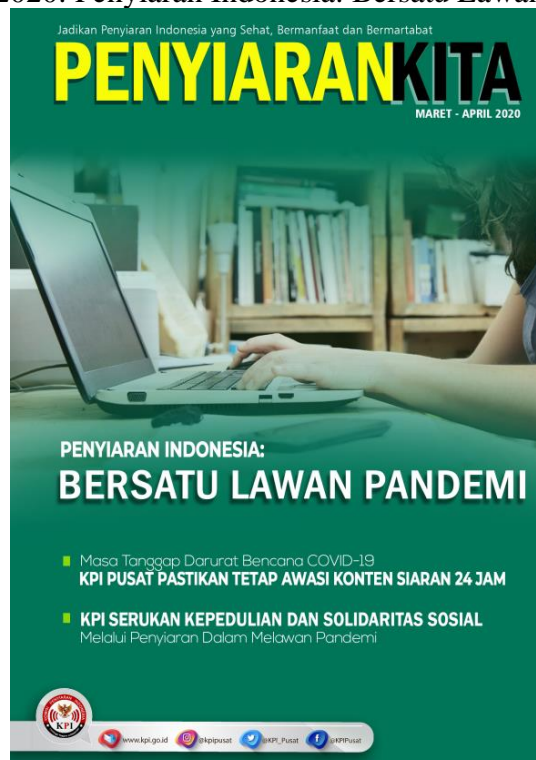
Edisi 6-2019: KPI Serukan Bicara Siaran Baik



## Edisi 1-2020: Indonesia Majemuk Dalam Siaran Lokal



## Edisi 2-2020: Penyiaran Indonesia: Bersatu Lawan Pandemi



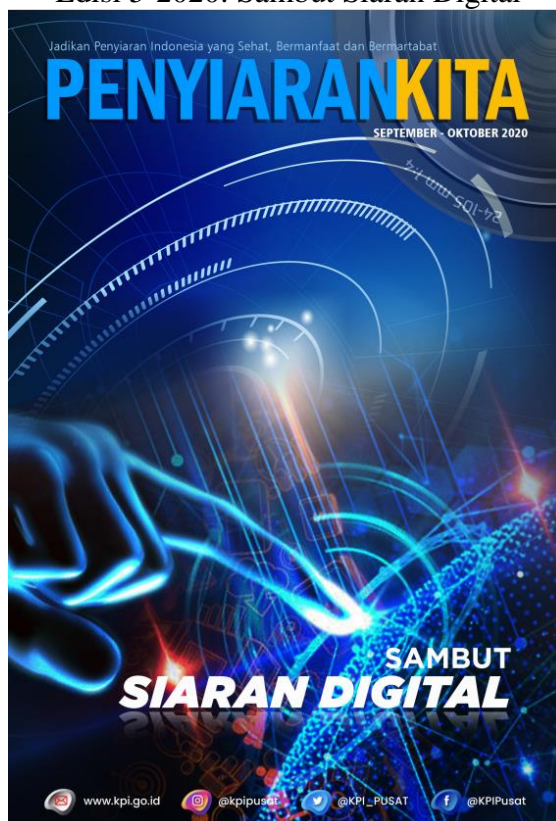
Edisi 3-2020: Wajah Siaran Di Tengah Pandemi



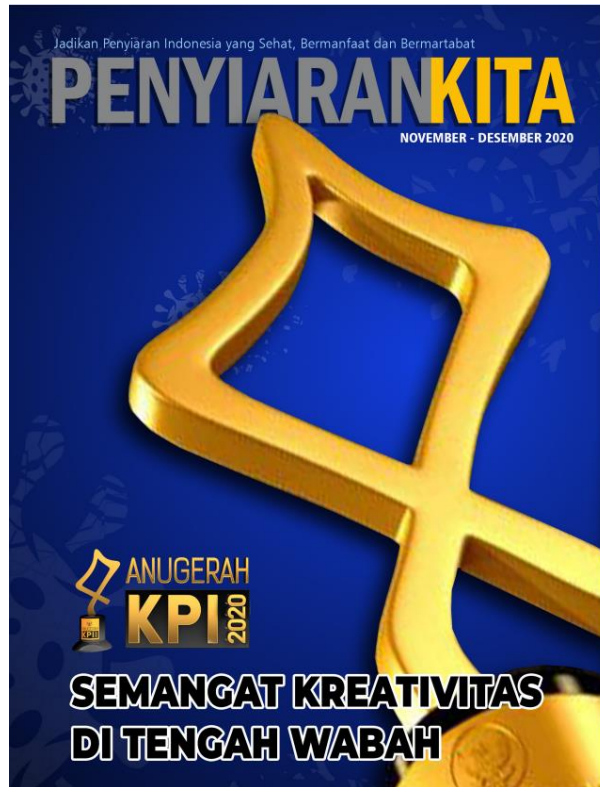
Edisi 4-2020: Penuhi Hak Anak Lewat Siaran Ramah Anak



## Edisi 5-2020: Sambut Siaran Digital



## Edisi 5-2020: Semangat Kreativitas Di Tengah Wabah



Edisi 1-2021: Evaluasi Kepatuhan Televisi Atas Protokol Kesehatan



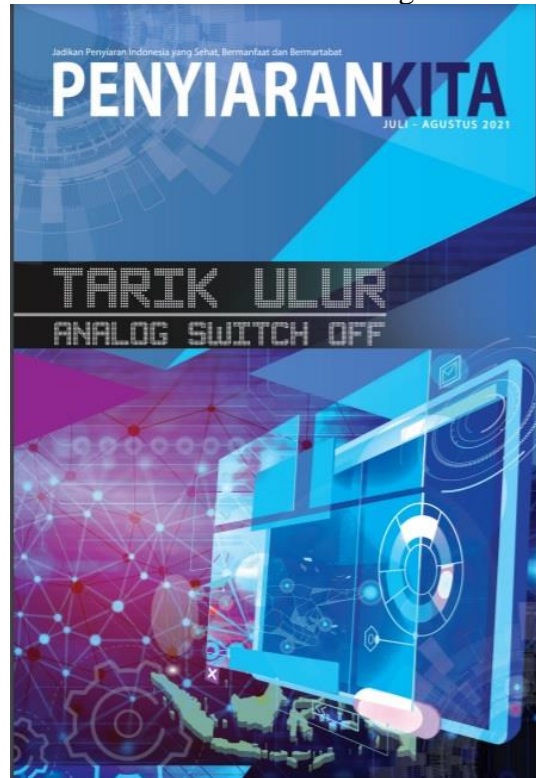
Edisi 2-2021: Penyiaran Sebagai Pendorong Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi



Edisi 3-2021: Perlindungan Anak dan Perempuan di Layar Kaca



Edisi 4-2021: Tarik Ulur Analog Switch Off



Edisi 5-2021: Revisi Regulasi Penyiaran



Edisi 6-2021: Kolaborasi Pentahelix Untuk Ciptakan Ekosistem Penyiaran Terbaik



Edisi 1-2022: Radio “Tak Akan Mati”



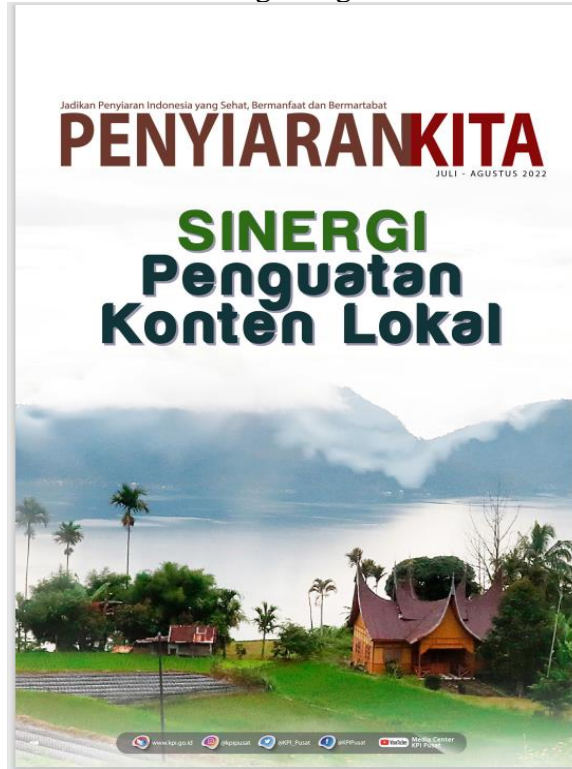
Edisi 2-2022: Transformasi Penyiaran Digital



Edisi 3 – 2022: Mengusung Pancasila sebagai Dasar Etika Konten Siaran



Edisi 4 – 2022: Sinergi Penguatan Konten Lokal



Edisi 5 – 2022: Bangkit Bersama Penyiaran Indonesia



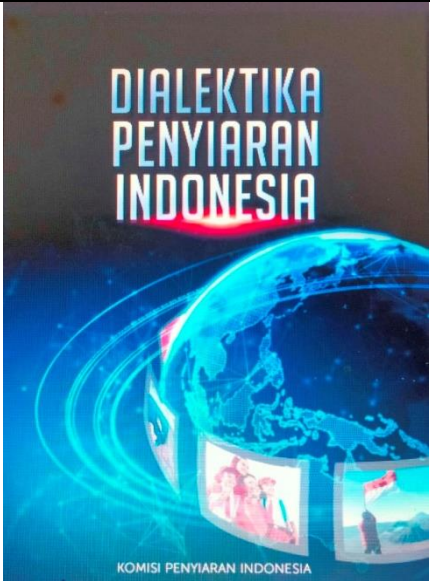

Edisi 6 - 2022: Membangun Optimisme Bangsa Melalui Penyiaran



**BUKU – BUKU YANG DIPRODUKSI KPI PUSAT PERIODE 2019-2022**

NO	DESKRIPSI	BUKU
	<p><b>Judul : Modul Sekolah P3SPS</b>  <b>Jumlah Halaman: 144 Halaman</b>  <b>Cetakan Pertama November 2020</b>  <b>Jumlah BAB : IV BAB</b></p> <p>Tujuan menerbitkan Buku Modul Sekolah P3SPS ini untuk memberikan petunjuk operasional pada kegiatan Sekolah P3SPS yang diselenggarakan KPI, baik bagi penyelenggara pemateri/narasumber, maupun peserta, dan pihak lainnya yang berkomitmen ikut serta menyukseskan Sekolah P3SPS.</p> <p>Buku yang merupakan petunjuk pembelajaran Sekolah P3SPS ini berisi penjelasan tentang petunjuk penggunaan, dan evaluasi kemampuan yang bersumber pada regulasi penyiaran, seperti UU Nomor 32</p>	

<p>01</p>	<p>Tahun 2002 tentang Penyiaran dan P3SPS Tahun 2012.</p> <p>Fokus pembelajaran mengangkat kasus-kasus program siaran yang pernah dikenakan sanksi oleh KPI, sehingga pengajar dan peserta didik dapat memahami implementasi dari pasal-pasal P3SPS yang dikenakan kepada program siaran yang melanggar ataupun berpotensi melanggar.</p>	
<p>02</p>	<p><b>Judul: Pedoman Pengawasan dan Penyiaran Pemilihan Kepala Daerah</b>  <b>Jumlah Halaman: 151 Halaman</b>  <b>Cetakan Pertama 2020</b>  <b>Jumlah BAB : V BAB</b></p> <p>Tujuan penerbitan buku adalah pertama mengotimalisasikan tugas pengawasan, fungsi dan kewenangan KPI dalam melakukan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio yang dalam hal ini penyiaran pemilihan kepala daerah. Kedua melakukan standarisasi pola pengawasan penyiaran di seluruh Indonesia.</p> <p>Kemudian manfaat buku ini adalah memberikan sumbangan pemikiran perihal pengawasan penyiaran kepala daerah dari komisioner periode 2019-2022 kepada komisioner selanjutnya dimana buku ini berisikan metode pengawasan dan solusi dalam menjamin hak seluruh masyarakat dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio.</p>	
	<p><b>Judul : Dialektika Penyiaran Indonesia</b>  <b>Komisi Penyiaran Indonesia Pusat</b>  <b>Cetakan Pertama, Desember 2020</b>  <b>Jumlah Halaman : 306 hlm</b>  <b>Jumlah BAB : IV BAB</b></p>	


03	<p>Buku ini merupakan karya aktual hasil kolaborasi pemerhati, akademisi, dan regulator penyiaran di Indonesia. Di dalam buku ini terdapat saran-saran akademis yang bisa menjadi bahan pertimbangan stakeholder penyiaran dalam pengambilan keputusan.</p>	
04	<p><b>Judul : Komisi Penyiaran Indonesia (Antara Tantangan Zaman Dan Harapan Masyarakat)</b>  <b>Cetakan Pertama 2022</b>  <b>Jumlah Halaman: 136 Halaman</b>  <b>Jumlah BAB : VII BAB</b></p> <p>Buku ini berisi tentang bagaimana menggambarkan posisi strategis KPI untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Khususnya, dalam bidang pengawasan penyiaran. Media penyiaran di era internet menghadapi tantangan yang kompleks. Masyarakat menaruh harapan besar agar KPI berperan aktif dalam menciptakan atmosfer penyiaran yang baik.</p> <p>Buku ini ditulis oleh Nuning Rodiyah Selaku Komisioner Bidang kelembagaan sebagai Karya atas apa yang sudah beliau dedikasikan selama 2 periode menjabat sebagai komisioner KPI Pusat. Karya Buku ini juga diharapkan menjadi rujukan dan dapat melitersi bagi pembaca terfokus yang konsen di dunia Penyiaran.</p>	
	<p><b>Judul: Literasi Media (Dari Politik, Ekonomi, Budaya, Pendidikan Sampai Agama)</b>  <b>Jumlah Halaman: 145 Halaman</b>  <b>Cetakan Pertama 2022</b></p>	

<p>05</p>	<p><b>Jumlah BAB : VIII BAB</b></p> <p>Buku ini memaparkan tentang urgensi literasi media di segala bidang. Saat ini banyak pihak-pihak yang kerap mengambil keuntungan dari perpecahan. Jangan sampai masyarakat gampang terpancing dengan informasi yang keliru dan <i>hoaks</i>. Di samping itu, literasi media penting untuk membangun spirit kritis dari tiap warga negara. Melalui cara tersebut, konten-konten yang bagus, informatif, edukatif, dan menghibur dari media massa akan terus bermunculan.</p> <p>Buku ini ditulis oleh Nuning Rodiyah Selaku Komisioner Bidang kelembagaan sebagai Karya atas apa yang sudah beliau dedikasikan selama 2 periode menjabat sebagai komisioner KPI Pusat. Karya Buku ini juga diharapkan menjadi rujukan dan dapat meliterasi bagi pembaca terkhusus yang konsen di dunia Penyiaran.</p>	
<p>06</p>	<p><b>Judul: TVRI &amp; DIGITALISASI PENYIARAN</b>  <b>Jumlah Halaman: 120 Halaman</b>  <b>Cetakan Pertama 2022</b>  <b>Jumlah BAB : IV BAB</b></p> <p>Mempotret kiprah Lembaga Penyiaran Publik ini. Utamanya, berkenaan dengan penerapan <i>Analog Switch Off</i> di Indonesia. <i>TVRI</i> tidak hanya berperan sebagai multiplekster. Lebih dari itu, <i>TVRI</i> harus bisa bertahan di era digital, sekaligus menjadi teladan bagi lembaga-lembaga penyiaran lain, baik dari sisi produksi maupun manajemen</p> <p>Buku ini memaparkan sejumlah hal</p>	


<p>tentang digitalisasi penyiaran dan hubungan dengan TVRI. Dimulai dari seluk beluk digitalisasi penyiaran, termasuk soal konsep sejarah, regulasi hingga sampai pelaksanaannya di Indonesia. Dikemukakan pula profil TVRI sebagai LPP yang mengemban tanggung jawab sosial di bidang media massa. Lembaga penyiaran paling tua di Indonesia ini memiliki infrastruktur yang menjangkau seluruh kawasan di Indonesia dengan cakupan paling luas dibandingkan lembaga penyiaran lainnya. Oleh karena itu bangsa ini menaruh harapan kepada TVRI untuk bisa menjawab tantangan digitalisasi di negara ini.</p> <p>Buku ini ditulis oleh Nuning Rodiyah dan Hardly Stefano F.P, selaku Komisioner KPI Pusat yang menjabat selama dua periode dari tahun 2016-2022, buku ini hasil dinamika selama di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat khususnya dalam proses digitalisasi penyiaran. Buku ini juga di dedikasikan sebagai upaya penguatan kelembagaan TVRI yang merupakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP).</p>	
<p><b>Judul: TVRI MENYATUKAN BANGSA</b>  <b>Jumlah Halaman: 119 Halaman</b>  <b>Cetakan Pertama 2022</b>  <b>Jumlah BAB : IV BAB</b></p> <p>Buku ini mendeskripsikan tentang apa saja tantangan yang dihadapi oleh TVRI di era kekinian. Dipaparkan pula strategi yang sudah dijalankan oleh stasiun televisi ini untuk ikut merawat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga integrasi sosial, dan ikut mempertegas jatidiri bangsa di ruang publik. Proyeksi mengenai apa hal-hal yang mesti ditempuh di masa datang turut diformulasikan. Analisis didasarkan pada observasi baik melalui kanal siaran, akun media sosial, maupun literatur pendukung</p>	

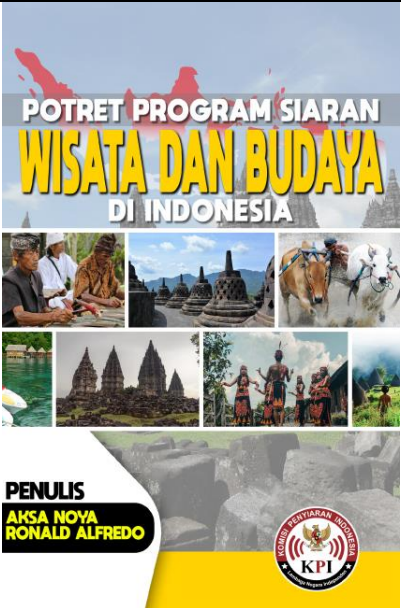
07	<p>yang otoritatif.</p> <p>Manfaat yang bisa diambil dari buku ini bisa di aspek teoritik, sehubungan dengan pola bermedia maupun berkomunikasi dari lembaga penyiaran. Terdapat pula manfaat di aspek praktik, berkenaan dengan kondisi faktual atau fenomena yang bisa dijadikan bahan pembelajaran di kemudian hari, baik oleh pihak TVRI maupun bagi masyarakat yang memetik manfaat dari siaran LPP tersebut.</p> <p>Buku ini ditulis oleh Nuning Rodiyah Selaku Komisioner Bidang Kelembagaan sebagai Karya atas apa yang sudah beliau dedikasikan selama 2 periode menjabat sebagai Komisioner KPI Pusat. Karya Buku ini juga diharapkan menjadi rujukan dan dapat meliterasi bagi pembaca terkhusus yang konsen di dunia Penyiaran</p>	
08	<p><b>Judul: GERAKAN LITERASI SEJUTA PEMIRSA TAHUN 2021</b>  <b>Jumlah Halaman: 255 Halaman</b>  <b>Cetakan Pertama 2022</b>  <b>Jumlah BAB : V BAB</b></p> <p><i>Catatan Perjalanan GLSP KPI Tahun 2020-2021</i> berisi tentang seluk-beluk program Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa yang dilaksanakan oleh KPI sepanjang 2020 dan 2021. Awal KPI Pusat melakukan penyuluhan ke seluruh pelosok tanah air. Program ini merupakan langkah kolaboratif yang melibatkan banyak elemen, mulai KPI Daerah, pemerintah, kalangan masyarakat, praktisi penyiaran, organisasi masyarakat, serta unsur-unsur lainnya.</p> <p>Konten-konten media penyiaran yang sehat merupakan kebutuhan bersama. Oleh sebab itu, tiap orang harus ikut melakukan pemantauan terhadap isi</p>	

	<p>siaran. Tayangan harus dipastikan ramah anak, tidak bias gender, tetap menjaga kearifan lokal kultur Indonesia, dan selaras dengan nilai-nilai moral keagamaan yang ada. Hal-hal semacam itu yang terus disuarakan dalam Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa.</p> <p>Buku ini merupakan perjalanan tim GLSP selama dua tahun ini, yang penuh dinamika karena adanya pandemi maka harus menyesuaikan kondisi kegiatan. Buku ini di tulis oleh Nuning Rodiyah dan tim dalam rangka dokumentasi memory perjalanan GLSP di KPI pusat, dan juga bisa sebagai rujukan masyarakat secara umum untuk dapat meliterasi masyarakat terkhusus dalam bidang penyiaran.</p>	
<p>09</p>	<p><b>Judul : Selaksa Ide dan Kerja Nyata Perubahan Komisi Penyiaran Indonesia Menuju Transformasi Digitalisasi Penyiaran</b>  <b>Jumlah Halaman : 250 halaman</b>  <b>Cetakan Pertama, Mei 2022</b>  <b>Jumlah BAB : V BAB</b></p> <p>Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019, dengan segala upayanya, meningkatkan pengaturan dan pengembangan pengawasan isi siaran, kelembagaan serta pengelolaan struktur dan sistem penyiaran untuk memenuhi kepentingan maupun hak-hak publik atas penyiaran.</p> <p>Saat itu, KPI melakukan berbagai terobosan dan pembenahan serta mampu mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi informasi dan penyiaran untuk membawa KPI menjadi lembaga yang siap dengan perubahan.</p> <p>Kepemimpinan yang kolektif kolegial dan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan merupakan</p>	

	<p>kunci yang membawa KPI menjadi lembaga negara independen dengan sederet prestasi, baik di dalam negeri hingga ke manca negara di tengah samudera penyiaran yang penuh gelombang.</p> <p>Buku ini hadir untuk memberikan pandangan positif dan beberapa catatan kritis dari berbagai pihak terhadap keberadaan KPI, khususnya periode 2016-2019. Tentu tidak ada gading yang tak retak. Banyak kekurangan dalam penyampaian di buku ini. Meski demikian, atas nama semangat tak berkesudahan, kami hanya memanjat doa kepada Tuhan YME, semoga apa yang kami lakukan bermanfaat untuk semua.</p>	
10	<p><b>Judul : Potret Kualitas Siaran Televisi Program Berita di Indonesia</b></p> <p>Penulis: Ni Made Ras Amanda Gelgel Alem Febri Sonni Editor: Pinckey S. Putra Deskripsi Fisik Buku: 15cm x 22 cm; X + 210 halaman Publikasi Pertama Desember 2022</p> <p>Berita yang disajikan televisi kerap kali menjadi sebuah magnitudo yang besar dalam meraup pemirsa. Informasi aktual yang hadir di ruang siar masyarakat, juga memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi ketimbang berita dan informasi yang dapat diakses dari media lain, media sosial misalnya.</p> <p>Buku ini mengulas kualitas program siaran berita di stasiun televisi yang bersiaran secara jaringan di Indonesia. Kualitas dinilai dalam kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang berlangsung sejak tahun 2015 dan bekerja sama dengan 12 Perguruan Tinggi di 12 kota di Indonesia. Buku</p>	

	<p>ini juga mengutip prinsip-prinsip jurnalistik yang menjadi acuan dalam penilaian kualitas program berita.</p>	
<p>11</p>	<p><b>Judul : Religiositas Dari Layar Kaca</b> (Potret Program Siaran Religi Di Televisi Indonesia)</p> <p>Penulis: Alip Yog Kusnandar Harmonis Bono Setyo</p> <p>Deskripsi fisik buku: 15x23 cm, xii + 270 halaman Publikasi Pertama Desember 202</p> <p>Buku ini memotret kualitas program siaran religi di stasiun televisi yang bersiaran secara jaringan di Indonesia. Kualitas ini dalam kegiatan Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang berlangsung sejak tahun 2015 dan bekerja sama dengan 12 Perguruan Tinggi di 12 kota di Indonesia.</p> <p>Dalam buku ini diulas perkembangan siaran keagamaan di televisi, yang pada awalnya hanya sebagai sebuah kewajiban semata dalam mewarnai program televisi secara umum. Namun selanjutnya, siaran keagamaan dikembangkan dengan ide-ide kreatif para pelaku industri penyiaran. Apalagi jika bicara saat bulan Ramadhan. Siaran keagamaan dikemas hingga mampu menjadi program unggulan yang mampu menuai banyak iklan.</p>	 <p>The image shows the front cover of the book 'Religiositas Dari Layar Kaca'. The cover has a modern, geometric design with blue and white diagonal stripes. The title 'RELIGIOSITAS' is written in large, bold, blue capital letters at the top. Below it, 'DARI LAYAR KACA' is written in smaller, black capital letters. Further down, the subtitle 'POTRET PROGRAM SIARAN RELIGI DI TELEVISI INDONESIA' is displayed in black capital letters. The authors' names, 'Penulis: Alip Yog Kusnandar, Harmonis, Bono Setyo', are listed in a smaller font. At the bottom left, there is a logo for the Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) and the text 'Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat'.</p>

<p>12</p>	<p><b>Judul : Perbincangan Bermakna di Layar Kaca: Potret Kualitas Program Talkshow di Televisi Indonesia</b></p> <p>Penulis:  FX Ari Agung Prastowo  Dadang Rahmat Hidayat  Rinda Aunillah Sirait</p> <p>Deskripsi Fisik Buku: 15,5cm x 22,5 cm; XVI + 164 halaman  Publikasi Pertama Desember 2022</p> <p>Sinopsis:  Program talkshow di televisi adalah sebuah siasat menghadirkan informasi lebih dalam dan bermakna ke hadapan pemirsa, dengan cara yang lebih rileks dan fleksibel. Dalam sejarahnya, talkshow juga menjadi saksi yang merekam tingkah laku figur publik. Talkshow bahkan menjadi sarana para pesohor memoles citra di muka publik, tapi tak jarang juga muncul watak dan karakter asli lantaran kepiawaian host membawakan acara.</p> <p>Buku ini merekam kualitas talkshow yang berlalulalang di televisi, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Tentunya buku ini layak menjadi rujukan para pengelola program televisi, untuk mendapat insight yang utuh tentang talkshow yang berkualitas. Kita tentu berharap ke depannya, layar kaca kita, baik dalam program talkshow atau pun program lainnya, dapat menjadi ruang publik untuk berdialektika mengemukakan konsep, ide kreatif, dan juga gagasan dalam membangun Indonesia ke depan. Sebagaimana kita yakini, lewat televisi dan radio pula, demokratisasi di negeri ini akan terus kita jaga.</p>	
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<p>13</p>	<p><b>Judul : Potret Program Siaran Wisata dan Budaya di Indonesia</b></p> <p>Penulis:  Aksa Noya  Ronald Alfredo</p> <p>Deskripsi Fisik Buku :  15 cm x 23 cm, XIV + 246 halaman.  Publikasi Pertama: Desember 2022</p> <p>Sinopsis:  Siaran Wisata dan Budaya yang hadir di televisi, selalu berhasil memanjakan mata dengan pesona keindahan Indonesia lewat ragam budaya dan destinasi wisata. Potret Indonesia yang demikian beragam selayaknya dapat hadir dengan durasi yang lebih intens sebagai upaya membuka cakrawala pikir pemirsa, tentang kebhinekaan negeri ini. Dalam indeks kualitas program siaran televisi yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), program siaran wisata budaya selalu mendapat penilaian berkualitas, dari para informan ahli.</p> <p>Buku ini memberikan potret lebih komprehensif tentang tayangan siaran budaya yang hadir di televisi swasta yang bersiaran secara jaringan se-Indonesia. Harapannya, buku ini dapat menginspirasi para pengelola televisi dalam membuat ide-ide kreatif terkait tayangan yang sarat nilai budaya di televisi. Dengan demikian, wajah kebhinekaan negeri ini juga mewujud dalam keberagaman konten siaran di televisi.</p>	
-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

## PENDANAAN DAN SARANA ORGANISASI

Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran Pasal 9 ayat 6 menyebutkan “Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Komposisi anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terdiri dari tiga kelompok besar. **Pertama**, Belanja Pegawai yang digunakan untuk membayar gaji terdiri dari tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, uang lembur, dan uang makan pegawai Sekretariat KPI Pusat (PNS) serta honor komisioner. **Kedua**, Belanja Barang digunakan untuk membayar biaya operasional seluruh program/kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat termasuk untuk membayar operasional perkantoran, dan pemeliharaan ruang kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. **Ketiga**, Belanja Modal, digunakan untuk membeli peralatan pendukung operasional kegiatan perkantoran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

### 1. PENDANAAN

#### 1.1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Pada tahun 2019 pagu DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebesar Rp. 54.134.130.000,- terealisasi Rp.50.800.301.605,- atau 93,84%. Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar sebesar Rp.3.333.828.395,- (7,25%).

**Tabel Pagu Anggaran KPI dan Realisasi 2019**

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2019			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	7.000.570.000,-	6.645.698.895,-	94,93%	354.871.105,-
2	Belanja Barang	44.551.938.000,-	41.654.789.776,-	93,50%	2.897.148.224,-
3	Belanja Modal	2.581.622.000,-	2.499.812.934,-	96,83%	81.809.066,-

<b>Jumlah</b>	<b>54.134.130.000,-</b>	<b>50.800.301.605,-</b>	<b>93,84%</b>	<b>3.333.828.395,-</b>
---------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------------------------

Pada tahun 2019 realisasi anggaran KPI Pusat sebesar 93,84% dengan sisa anggaran sebesar Rp3.333.828.395,-. Adapun penyebab sisa anggaran yang tidak terserap sebagai berikut :

1. Honor PPNPN tidak terserap seluruhnya, karena pembayaran besaran THR dan gaji ke-13 disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural. Pada perencanaan anggaran KPI Tahun 2019 anggaran gaji 13 dan THR untuk PPNPN disiapkan sebesar honor yang dibayar dalam satu bulan.
2. Terdapat Efisiensi penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan KPI seperti Penyusunan SOTK dan RENSTRA KPI 2020-2024, kegiatan FGD tentang Penyiaran, kegiatan penyusunan database dan direktori KPI, kegiatan pengawasan siaran pemilu tahun 2019, dan pada kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor.

## **1.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020**

Alokasi anggaran KPI Pusat Tahun 2020, bersumber dari APBN melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI ) Pusat, tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-059.01.1.664323/2020 tanggal 12 November 2019, Pagu Anggaran Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia pada awalnya, sebesar Rp. 55.065.754.000,- (Lima puluh lima miliar enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi serta dalam rangka pencegahan penyebaran wabah COVID-19, pemerintah melakukan penyesuaian anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tanggal 04 April 2020 serta Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 519-520/SJ.01/PR.01.01/04/2020 tanggal 14 April 2020 perihal Penyesuaian Postur Anggaran Kemenkominfo TA 2020. Akibat dari kebijakan tersebut pagu anggaran Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dipotong sebesar Rp. 12.199.489.000 (Dua belas

miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga menjadi Rp. 42.866.265.000 (Empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai .....=Rp. 8.701.086.000,-
- b. Belanja Barang .....=Rp. 32.845.179.000,-
- c. Belanja Modal .....=Rp. 1.320.000.000,-
- d. Total Pagu Anggaran .....Rp. 42.866.265.000,-

Selanjutnya total realisasi anggaran KPI Tahun 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 39.560.442.553,- (92,29%) sisa anggaran sebesar Rp. 3.305.822.447,- (7,71%). Yang terdiri dari sisa belanja pegawai yang cukup besar sebesar Rp.2.125.917.804,- (4,96%) (Dua miliar seratus duapuluh lima juta Sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat rupiah). Sisa dana pada belanja barang sebesar Rp. 1.159.772.943,- (2,71%) (Satu miliar seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), dan sisa dana pada belanja modal sebesar Rp. 20.131.700,- (0,05%) (Dua puluh juta seratus tiga puluh satu tujuh ratus rupiah).

**Tabel Pagu Anggaran KPI dan Realisasi 2020**

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2020			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	8.701.086.000,-	6.575.168.196,-	75,57%	2.125.917.804,-
2	Belanja Barang	32.845.179.000,-	31.685.406.057,-	96,47%	1.159.772.943,-
3	Belanja Modal	1.320.000.000,-	1.299.868.300,-	98,47%	20.131.700,-
<b>Jumlah</b>		<b>42.866.265.000,-</b>	<b>39.560.442.553,-</b>	<b>92,29%</b>	<b>3.305.822.447,-</b>

Adapun penyebab anggaran tidak terserap sebagai berikut :

1. Dalam perencanaan usulan kenaikan honor komisioner anggarannya sudah disiapkan, namun karena adanya pandemi Covidnya 19, pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium semua usulan kenaikan honor diseluruh Kementerian / Lembaga
2. Dalam perencanaan besaran pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PNS dianggarkan penuh untuk gaji berikut tunjangan kinerjanya, namun karena adanya pandemi Covidnya 19, pemerintah mengeluarkan kebijakan tunjangan kinerja dalam pembayaran THR dan Gaji 13 tidak termasuk yang dibayar.
3. Dalam perencanaan anggaran gaji dan tunjangan untuk delapan orang CPNS sudah dianggarkan, namun ada kebijakan pemerintah perihal penundaan penerimaan CPNS ditahun 2020.
4. Dalam perencanaan besaran pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk PPNPN dianggarkan penuh sebesar honor yang dibayar dalam satu bulan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural besaran THR dan Gaji 13 tidak sebesar seperti yang direncanakan..

### 1.3. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

Alokasi anggaran KPI Pusat Tahun 2021, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-059.01.1.664323/2021 tanggal 23 November 2020, Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia, pagu anggarannya sebesar Rp. 52.513.706.000,- (Lima puluh dua miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah) terdiri atas :

a) Belanja Pegawai .....	=Rp. 7.138.724.000,-
b) Belanja Barang .....	=Rp. 45.146.565.000,-
c) Belanja Modal .....	= <u>Rp. 228.417.000,-</u>
 Total Pagu Anggaran .....	 =Rp. 52.513.706.000,-

Selanjutnya dari pagu anggaran sebesar Rp. 52.513.706.000,- tersebut, total realisasi anggaran KPI sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 49.572.343.952,- (94,40%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.941.362.048,- (5,60%). Terdapat sisa anggaran

pada belanja barang yang cukup besar yang tidak terserap sebesar Rp. 2.252.310.017,- (Dua miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh belas rupiah).

**Tabel Pagu Anggaran KPI dan Realisasi Tahun 2021**

NO	Uraian	Anggaran Tahun 2021			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	7.138.724.000,-	6.450.430.569,-	94,40%	688.293.431,-
2	Belanja Barang	45.146.565.000,-	42.894.254.983,-	90,36%	2.252.310.017,-
3	Belanja Modal	228.417.000,-	227.658.400,-	99,67%	758.600,-
<b>Jumlah</b>		<b>52.513.706.000,-</b>	<b>49.572.343.952,-</b>	<b>94,40%</b>	<b>2.941.362.048,-</b>

Adapun penyebab anggaran tidak terserap sebagai berikut :

1. Gaji dan tunjangan untuk 7 (tujuh) orang CPNS sudah dianggarkan, namun tidak dapat terealisasi sepenuhnya karena di tahun 2021 hanya terdapat 2 orang CPNS yang diterima.
2. Dalam perencanaan besaran pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk Komisioner, PNS, PPNPN dianggarkan penuh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk komisioner, PNS, dan PPNPN tidak dibayar penuh.
3. Terdapat efisiensi anggaran untuk kegiatan Rakornas, Harsiarnas, FGD Informan Ahli dan Diseminasi Riset Indeks Kulaitas Program Siaran TV.
4. Anggaran pencetakan buku KPI yang sudah dianggarkan pada tahun 2021 tidak terealisasi.
5. Dalam perencanaan anggaran sewa rumah/apartemen disiapkan untuk sembilan orang komisioner, namun satu orang tidak terealisasi.

#### 1.4. Pagu dan Realisasi Anggaran 2022

Alokasi anggaran KPI Pusat Tahun 2022, tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-059.01.1.664323/2021 tanggal 23 November 2021, Satuan Kerja Komisi Penyiaran

Indonesia, sebesar Rp. 66.628.792.000,- (Enam puluh enam miliar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) terdiri atas :

- a) Belanja Pegawai ..... =Rp. 9.948.687.000,-
- b) Belanja Barang ..... =Rp. 50.855.137.000,-
- c) Belanja Modal ..... =Rp. 5.824.968.000,-
  
- Total Pagu Anggaran ..... =Rp. 66.628.792.000,-

Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah perihal pemulihan penanganan Covid 19 dimana seluruh anggaran kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah dipotong. Atas kebijakan ini anggaran KPI Pusat juga dipotong sebesar Rp.7.596.008.000,- (Tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ribu rupiah), sehingga total pagu anggaran KPI Pusat Tahun 2022 menjadi Rp.59.032.784.000,- (Lima puluh sembilan miliar tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

**Tabel Pagu Anggaran KPI dan Realisasi Tahun 2022**

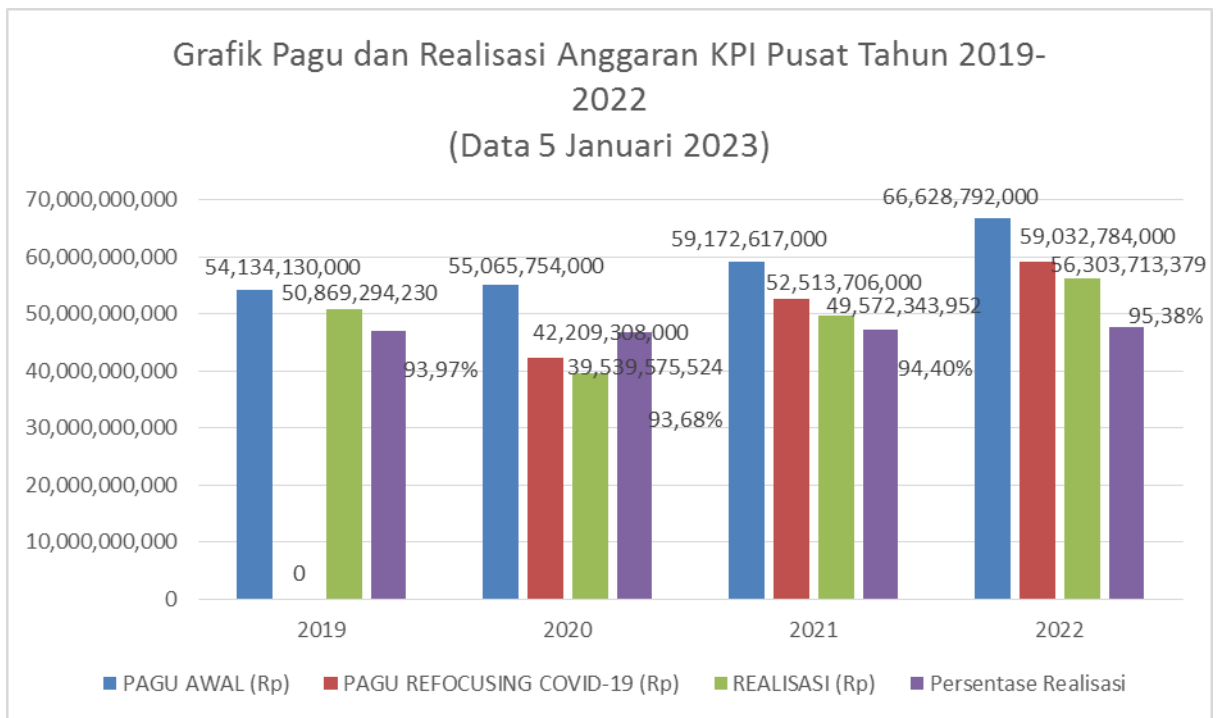
NO	Uraian	Anggaran Tahun 2022			
		Pagu Anggaran Pasca Pemotongan / (Blokir)	Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	7.851.775.000,-	7.269.602.403,-	92,59%	582.172.597,-
2	Belanja Barang	47.979.021.000,-	46.735.798.801,-	97.41%	1.243.222.199,-
3	Belanja Modal	3.201.988.000,-	2.298.312.175,-	71,78%	903.675.825,-
<b>Jumlah</b>		<b>59.032.784.000,-</b>	<b>56.303.713.379,-</b>	<b>95.38%</b>	<b>2.729.070.621,-</b>

Adapun penyebab anggaran tidak terserap sebagai berikut :

1. Gaji dan tunjangan untuk CPNS sudah dianggarkan selama 12 bulan diperkirakan mulai masuk bulan Januari namun baru masuk bulan Maret.
2. Dalam perencanaan besaran pembayaran THR dan gaji ke-13 untuk Komisioner, PNS, PPNPN dianggarkan penuh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 tidak dibayar penuh.

- Adanya sisa anggaran dari seluruh kegiatan KPI Pusat yang sudah terealisasi.

### 1.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran KPI Pusat Tahun 2019-2022



## 2. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sejak tahun 2018 Komisi Penyiaran Indonesia Pusat berkantor di Gedung Sekretariat Negara Jl. Juanda No. 36 Lt. 1, 2 3 dengan luas Gedung Kantor  $\pm 2.290M^2$  dengan luas halaman kantor  $\pm 600M^2$ .

Dalam menjalankan fungsi utamanya memantau siaran televisi dan radio KPI Pusat mempunyai alat pemantau isi siaran televisi dan radio berjaringan dan media center yang terdiri dari :

Tabel Daftar Inventaris Alat pemantau isi siaran Televisi, Radio Berjaringan dan Alat Media Center

NO	PERANGKAT	SPESIFIKASI	QTT	SATUAN	STATUS	
					BAIK	RUSAK
<b>A</b>	<b>PEMANTAUAN ISI SIARAN</b>					
<b>A1</b>	<b>ANALIS ISI SIARAN</b>					
1	MINI PC	CentOS 7, AMD G-Series T48E Dual Core 1.4GHz (w/ Radeon HD 6250), 4GB (1x4GB) 1600MHz DDR3L Memory, 16GB SATA FLASH, Optical Mouse - Black, Wired Keyboard	46	unit	√	
2	Printer		2	unit	√	
3	Monitor	23.8 inch	46	unit	√	
4	A.C. Split dan A.C Centre		5	unit	√	
5	STABILIZER	500W	26	unit	√	
6	Headset	USB-A Plug and Play, Adjustable Headband, Microphone Noise Cancelling.	120	unit	√	
7	Display	65", 60Hz New Edge, Storage 8GB, Screen Mirroring, Touchscreen, Resolution 4K, Portrait Position 16/7, Input Port : 3xHDMI, DVI, DP, 2xUSB, 2x Touch Out RS232, RJ45.	1	Unit	√	
<b>A2</b>	<b>VISUAL DATA</b>					
1	PC Unit	windows 7, core I7,RAM 8,Keyboard + Mouse	19	unit	√	
2	Monitor	23.8 inch	7	unit	√	
3		18.5 inch	10	unit	√	
4	STABILIZER	500W	8	unit	√	
5	Headset	Leatherette Cushions, Padded, Adjustable Headband, Noise Isolating Standard 3.5mm Plug with 1/4" Adapter	19	unit	√	
6	A.C. Split	2 PK	2	unit	√	
7	Printer	600 x 600 dpi, Hitam & Putih, 19ppm.	1	unit	√	
8	Laptop	14.0-inch HD, 8th Generation Intel Corei5-8250U Processor, 4 GB DDR4, 2400 MHz, Radeon 520 2GB	1	unit	√	

<b>A3</b>	<b>TENAGA AHLI ISI SIARAN</b>					
1	PC DESKTOP	-windows 10, core I5, RAM 4, Keyboard + Mouse	7	unit	√	
2	Monitor	23.8 inch	6	unit	√	
3		18.5 inch	1	unit	√	
4	STABILIZER	500W	7	unit	√	
5	Headset	USB-A Plug and Play, Adjustable Headband, Microphone Noise Cancelling.	7	unit	√	
<b>A4</b>	<b>SERVER PEMANTAUAN</b>			unit		
1	Analog dan digital capture card	44 port,hd	11	unit	√	
2	converter HDMI to SDI		46	unit	√	
3	Converter RCA to HDMI	720P	12	unit	√	
4	Radio Tuner	Digital	20	unit	√	
5	UPS	30KVA/10KW UPS 230V/400V include battery,	1	unit	√	
6	Application Server	Server Umum dan Aplikasi running hyperV, 2 x Intel® Xeon® E5-2697 v4 2.3GHz, 45M Cache, 8 x 32GB RDIMM, PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache, 2 x 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, Redundant Power Supply (1+1), 750W, 1 x Windows Server 2012R2	2	unit	√	
7	Recording Server	Chassis with up to 8, 2.5" Hard Drives, 2 x Intel® Xeon® E5-2689 v4 3.1GHz, PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache, 2 x 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA, 2 x Deskside Power Cord, Redundant Power Supply (1+1), 750W, 1 x Windows Server 2012R2 Datacenter Edition	4	unit	√	
8	Storage Server	1 x 8Gb Fibre Channel Dual Controller, 24 x 600GB, SAS 12Gb, 15K, 2.5", HDD, 2 x Jumper Cord, Basic Deployment Storage SCv2080 Exp Enclosures 5U. Kapasitas HDD 28 x Dell 10TB	1	unit	√	
9	Backup Server	Geovision, HDD 2 TB x 20	5	unit	√	

10	A.C. Split dan Portabel Air Conditioner		4	unit	√	
11	Antena Digital		6	unit	√	
12	Set Top Box		24	unit	√	
<b>B</b>	<b>MEDIA CENTER</b>					
1	Wall Display	Screen Size 46inch. Number of Pixels 0.53025x0.53025. Brightness 500 cd/m2. Power Consumption 120 W Maximum. Seam Gap 3.5 mm In/Output DVI-D/PC(D-sub)/Component/Display Colors 16.7M(8bit Contrast Ratio (Typ.) 3,500 : 1 Life Life Time 50.000 Hour Run Time 7/24.	12	unit	√	
2	Wall Display Chassis	DVI-U Inputs/Outputs: (HDMI/CV/YC/RGB/YPbPr). SDI Inputs/Outputs: (SD/HD/3G-SDI) High Resolution Inputs/Outputs: Analog: PC to 1920x1080, HDTV to 1080p/60 DVI: PC to 1920x1200, HDTV to 1080p/60 w/EDID SDI: SD, HDTV to 1080p/60 Supports: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM HDMI-Compatible Input & Output with HDCP Automatic Incoming Resolution Detection	1	unit	√	
3	Input Slot Card	Input Module 2x DVI-U (DVI, HDMI, RGB/YUV, CV,YC) via DVI-I	3	unit	√	
4	Output Slot Card	Output Module with Scaling 2x DVI-U via DVI-I Connectors	6	unit	√	
5	PC WORKSTATION	Core I7, Windows 10, VGA 4 Gb,RAM 8 GB +Keyboard dan Mouse	1	unit	√	
6	SMART TV	32 inch,Smart	10	Unit	√	
7	Laptop		4	Unit	√	
8	PC DESKTOP		11	Unit	√	
9	Kamera Digital		6	Unit	√	
10	Kamera Video		2	Unit	√	

### **Kendaraan Operasional Kantor dan Pimpinan**

- Kendaraan operasional kantor, terdiri dari :
  - a. Sepeda Motor Yamaha 5 (lima) unit kondisi baik.
  - b. Isuzu Panther tahun 2006 sebanyak 1 (satu) unit masih layak operasional
  - c. Mitsubishi Xpander tahun 2019 (sewa) sebanyak 5 (lima) unit kondisi baik.
  
- Kendaraan Operasional Pimpinan, terdiri dari :
  - a. Toyota Fortuner tahun 2020 sewa 6 unit kondisi baik.
  - b. Mitsubhisi Pajero Sport tahun 2020 sewa 3 unit kondisi baik.
  - c. Honda CRV tahun 2020 sewa 1 unit kondisi baik.

### **3. Dukungan Kepegawaian**

Dalam melaksanakan fungsi Kesekretariatan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat saat ini mempunyai personalia sebanyak 260 orang dengan rincaian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS + CPNS) sebanyak 35 orang, terdiri dari :
  - a. Jabatan Tinggi Pratama (Sekretaris KPI Pusat) : 1 orang
  - b. Jabatan Fungsional Madya (Kabag) : 3 orang
  - c. Jabatan Fungsional Muda (Kasubag) : 5 orang
  - d. Jabatan Fungsional Pertama : 1 orang
  - e. Jabatan Fungsional Terampil : 1 orang
  - f. Jabatan Administrasi : 10 orang
  - g. CPNS : 14 orang
  
2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) sebanyak 225 orang yang terdiri dari :
  1. Tenaga Ahli : 28 orang
  2. Tenaga Analisis Isi Siaran : 113 orang
  3. Visual Data : 18 orang
  4. Asisten Komisioner : 9 orang
  5. Sekretaris Komisioner : 11 orang
  6. Staf Administrasi : 18 orang
  7. Keamanan : 8 orang
  8. Pramubakti : 4 orang
  9. Supir : 11 orang
  10. Cleaning Service : 5 orang

**Tabel Data Pegawai KPI Pusat Tahun 2022  
Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	JENIS KELAMIN	PNS	PPNPN	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	21	152	173
2	PEREMPUAN	15	72	87
TOTAL		36	224	260

**Tabel Data Pegawai KPI Pusat Tahun 2022  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	PEGAWAI	SD	SMP	SMA/SMK	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
1	PNS	1	0	3	0	0	9	1	18	4	0	36
2	PPNPN	0	3	24	0	1	9	0	173	14	0	224
TOTAL		1	3	27	0	1	18	1	191	18	0	260

**oooo000oooo**

**BAGIAN III**

**PROFIL ANGGOTA KPI PUSAT**



Agung Suprio  
Ketua KPI

Sangat dinamis, mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Agung Suprio. Pria kelahiran 2 September 1975 ini memulai karir sejak kuliah di program sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Agung menempuh kuliah sangat lama yaitu tujuh tahun dari tahun 1994-2001. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab pada masa itu peralihan kekuasaan terjadi dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Agung menjadi demonstran jalanan sejak 1997 sampai 1998, hingga kemudian dia dipercaya sebagai Koordinator Nasional UNFRELL (University Network For Free and Fair Election) pada tahun 1999, yaitu lembaga pemantau pemilu demokratis pertama sejak masa Orde Baru yang berbasis perguruan tinggi dari Aceh sampai Papua. Usai pemilu, Agung menjadi anggota Badan Pekerja Cetro (Center for Electoral Reform) pada 2000 – 2001 bersama tokoh nasional seperti almarhum Nurcolish Madjid dan Todung Mulya Lubis.

Di sela-sela kesibukan sebagai aktivis, Agung menjadi penyiar di radio MS 3 FM sebuah radio yang berada di frekuensi 104.2 FM pada tahun 1999 – 2001. Gaya siaran Agung tidak mengandalkan langgam lama seorang penyiar yang mengutamakan golden voice (suara emas) tetapi lebih menonjolkan kritikan dan lawakan spontan atas peristiwa sosial politik yang ada. Pada tahun 2001, Agung bekerja di radio Smart FM yang berada pada frekuensi 95.9 FM.

Kiprah berikutnya adalah mendirikan Vilters (Center for Civil Military Studies) bersama koleganya dari UI di tahun 2001. Vilters adalah obsesinya merealisasikan skripsi di bidang Ilmu Politik tentang hubungan sipil-militer di era baru. Hasilnya Vilters menerbitkan sebuah *master piece*, sebuah buku tentang pergeseran hubungan sipil militer pada tahun 2001 dengan model penelitian kualitatif di dua puluh daerah tingkat dua di Indonesia.

Agung melanjutkan pendidikannya pada program pasca sarjana ilmu politik di Universitas Indonesia, yang berujung didaulatnya Agung sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa dan Alumni Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pada tahun 2015, dia menjabat sebagai Direktur eksekutif Indonesia Public Policy Intitute (IPPI). Selanjutnya, di tahun 2016, Agung terpilih menjadi penyiar tamu di TVRI dalam acara “titik temu”.

Pada tahun 2016, Agung terpilih menjadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2016-2019 dengan amanah sebagai Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran. Pada periode selanjutnya, Dia mendapatkan kepercayaan menjadi Ketua KPI Pusat 2019-2022.



Drs. Mulyo Hadi Purnomo, M.Hum  
Wakil Ketua KPI Pusat

Nama Mulyo Hadi Purnomo tidaklah asing bagi para pegiat penyiaran di Jawa Tengah dan Indonesia. Lelaki kelahiran Jepara 56 tahun lalu ini, tercatat sebagai Komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Tengah selama dua periode. Dalam rentang pengabdianya tersebut, Mulyo ikut memberikan kontribusi dalam penyusunan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI 2012. Mulyo salah satu tim penyusun yang dibentuk oleh KPI Pusat bersama dengan perwakilan dari beberapa KPID lainnya.

Tidak hanya itu, Mulyo merupakan penggagas pembatasan lagu-lagu yang ber lirik cabul dan kasar di radio se-Jawa Tengah. Setidaknya sejak tahun 2011 terdapat 54 lagu yang dibatasi siarannya di radio di Jawa Tengah. Hal ini merupakan bentuk concern Mulyo atas kepentingan anak di ranah penyiaran.

Selain aktif dalam agenda penyiaran, Mulyo tercatat sebagai dosen di Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang. Ayah dua anak ini dikenal dengan kepakarannya dalam kajian budaya, sastra dan film. Mulyo juga aktif sebagai pekerja seni di Semarang. Dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Kesenian Semarang dan juga terlibat dalam produksi beberapa film layar lebar.

Setelah terpilih sebagai Komisioner KPI Pusat periode 2019-2022, Mulyo Hadi didaulat sebagai Wakil Ketua KPI Pusat. Komitmen Mulyo terhadap perbaikan kualitas isi siaran dia tunjukkan pula dengan mengambil bidang Pengawasan Isi Siaran. Baginya, kerja meningkatkan kualitas televisi dan radio di tanah air, adalah bagian dari mengejawantahkan prinsipnya, “hidup untuk sesama”.



Irsal Ambia  
Komisioner KPI Pusat

Irsal Ambia didaulat menjadi Koordinator bidang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022. Lelaki kelahiran Banda Aceh ini memang bukan orang baru di KPI. Selama dua periode Irsal telah mengabdikan sebagai anggota KPI Aceh dengan rotasi tugas di berbagai bidang. Periode pertama di KPI Aceh, Irsal membidangi pengawasan isi siaran. Sedangkan di periode kedua, dirinya menangani bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran (PS2P).

Kiprah Irsal di dunia penyiaran sudah dimulai sejak tahun 2000. Dia meniti karir di berbagai radio hingga televisi yang ada di Banda Aceh. Memulai karir di dunia radio sebagai penyiar, reporter hingga stasion manager. Irsal juga pernah berkiprah di dunia industri televisi sebagai vice branch manager salah satu televisi swasta nasional berjangkauan yang ada di Aceh.

Selain menjadi “anak radio”, ayah dari 2 anak ini juga pernah terlibat dalam tim media Palang Merah Irlandia (Ireland Red Cross) yang beroperasi di Aceh dalam program pemulihan pasca bencana pasca tsunami. Mantan Sekretaris Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) yang mengantongi ijazah S2 Notariat ini tercatat pula sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia.

Menata kelembagaan KPI dengan regulasi yang adaptif terhadap dinamika zaman merupakan misi besar yang akan dia tuntaskan. Menurut Irsal, sebagai regulator penyiaran, KPI juga harus menampilkan wajah sebagai regulator dengan menghasilkan kebijakan yang sesuai kebutuhan dalam mewujudkan kualitas penyiaran yang lebih baik. “Agar spektrum frekuensi yang sejatinya milik publik ini, dapat memberi manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat,”pungkasnya.



Mimah Susanti  
Komisioner KPI Pusat

Perempuan kelahiran 2 Oktober 1979 ini lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Palembang, Sumatera Selatan. Santi, sapaan akrabnya memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 122, Palembang, dan lulus pada tahun 1991. Pasca lulus, dari pendidikan dasarnya, Santi melanjutkan sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12, Palembang. Di tahun 1994, melanjutkan pendidikan menengahnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Palembang.

Pada tahun 1998, Santi menuntut ilmu ke pulau Jawa. Ia kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dan menyelesaikan studinya di tahun 2005. Pada masa ini lah kemudian, minat, bakat dan jiwa kritisnya mengenai problematika sosial dan demokrasi terbangun. Hal ini dapat dilihat dari keaktifannya pernah menjadi pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Bersama sahabat-sahabat pergerakan ia menerbitkan Buletin “Geliat”. Di organisasi eksternal kampus, ia aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari pengurus Rayon sampai dengan Pengurus Koordinator Cabang Jawa Barat.

Selain bergelut di bidang kemahasiswaan, Santi pun terlibat aktif di bidang kepemiluan dengan menjadi pemantau pemilu di Komite Independen Pemantau Pemilihan Umum (KIPP) Bandung pada tahun 1999. Atas ketertarikannya mendalami kepemiluan, pada tahun 2003-2004 ia bekerja di Panitia Pengawas Pemilu Pusat sebagai staf pelaporan. Pasca Pemilu tahun 2004 selesai, ia bekerja sebagai Staf Administrasi dan Advokasi di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tahun 2006-2008. Bukan hanya itu, ia juga pernah menjadi Volunter di Democratic Reform Support Program (DRSP).

Wawasan di bidang kepemiluan mulai tampak di tahun 2009, di mana ia mulai dipercaya negara untuk ikut terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah dengan menjadi Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI hingga tahun 2012. Atas kemampuan dan pengalamannya ini kemudian, Wanita yang selalu berjilbab ini mendaftarkan diri menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017, pada seleksi yang terbuka untuk umum. Dalam seleksi ini, Santi berhasil terpilih menjadi anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dipercaya oleh anggota lainnya mengemban tanggungjawab sebagai Ketua periode 2012-2017.

Menjelang berakhirnya masa tugas sebagai Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2017 bersama sahabat-sahabatnya, ia mendirikan lembaga yang bergerak di bidang hukum dan demokrasi. Lembaga ini dideklarasikan pada bulan Oktober 2017 dengan nama Indonesia Voter Initiative for Democracy (IViD), dan terdaftar di Kemendagri maupun Kemenkum dan HAM. Di lembaga yang didirikannya ini, Santi mengemban tugas menjadi Sekretaris Nasional IViD yang juga tersebar di 18 Provinsi.

Di luar organisasi kepemiluan, perempuan berzodiak Libra ini aktif juga di Nahdlatul Ulama. Hal ini ditunjukkannya dengan menjadi Pengurus Pusat (PP) Fatayat NU Periode 2015-2022 di bidang Advokasi dan HAM, serta Pengurus di PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) sebagai Koordinator Bidang Pengkaderan.

Sebagai bukti komitmennya terhadap perkembangan kehidupan demokrasi yang menjamin kebebasan pers, penyiaran, dan didukung kemampuan serta pengalamannya di bidang pengawasan Pemilu, Laskar wong kito ini, di tahun 2018 mendaftarkan diri dan terpilih menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022. Di bawah kepemimpinan Agung Suprio sebagai Ketua KPI Pusat 2019-2022, perempuan pencinta tekwan dan pempek dipercaya melalui rapat pleno menjadi Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran.



Mohamad Reza  
Komisioner KPI Pusat

Mohamad Reza terpilih sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2019-2022. Perpaduan latar belakang Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dan Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, membuatnya cepat menguasai permasalahan-permasalahan pada layanan publik. Ini dibuktikan dengan kelihaiannya saat menjadi wartawan; reporter di Radio Swara Selebes Gorontalo yang kemudian ia menjadi Pimpinan Redaksi sampai 2005; Program Director di M-Radio Gorontalo; General Manager di Radio Civica FM Gorontalo.

Setelah lama berkiprah di dunia radio, pria yang lahir di Batudaa – Gorontalo ini, mengabdikan diri menjadi regulator penyiaran yakni sebagai anggota KPI Daerah Gorontalo. Tepatnya di bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran periode 2014-2017. Selain itu Reza juga terdaftar sebagai intelektual dan dosen UNG dengan mengampu topik ajar: Media Massa, Politik dan Produksi Media. Aktivitas lain yang digelutinya di kampus adalah melakukan pelatihan untuk peningkatan kapasitas mahasiswa di bidang komunikasi, khususnya penyiaran.

Pria kelahiran 17 Mei 1980 ini aktif di berbagai organisasi sejak menjadi mahasiswa di UNG. Ia mengawalinya dari Himpunan Mahasiswa, aktif di Pers Kampus, PMII Gorontalo, Massika-ICMI, ASPIKOM, Sekretaris Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama dua periode dan tergabung dalam Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi.

Dalam menjalani tugasnya di KPI Pusat, Reza memiliki visi untuk mewujudkan penyiaran yang adil dan berprikemanusiaan untuk persatuan Indonesia. Menurutnya, adil bukan hanya soal radio dan televisi yang bersiaran di semua daerah di nusantara. Akan tetapi kepemilikan dan konten siaran juga harus ada cita rasa lokal agar terwujud diversity of ownership dan diversity of content dalam rangka menegakkan demokratisasi penyiaran. Reza pun ditunjuk sebagai Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran.



Nuning Rodiyah  
Komisioner KPI Pusat

Nuning Rodiyah kembali terpilih sebagai anggota KPI Pusat untuk masa bakti 2019-2022. Selama tiga tahun di KPI pada periode 2016-2019, Nuning dipercaya mengawal bidang Pengawasan Isi Siaran bersama tiga komisioner KPI Pusat lainnya. Dengan spesialisasi pengawasan pada siaran pemilu/pilkada dan pornografi, Nuning dengan lihai mengembangkan jaringan untuk menghadirkan berbagai kerja sama antar lembaga dengan KPI.

Perempuan kelahiran tahun 1979 di Ponorogo ini, terkenal dengan aktivitasnya di berbagai organisasi. Dirinya pernah menjadi Ketua Pusat Studi Gender dan Perlindungan Anak Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Wakil Ketua KNPI Jawa Timur Bidang Diplomasi Publik dan Luar Negeri, Wakil Sekretaris ICMI Jawa Timur, Ketua Umum KOHATI Badko Jawa Timur, dan Manajer Program Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Timur. Tak hanya itu, Nuning pun saat ini menjabat sebagai Presidium Majelis Nasional Forum Alumni HMI Wati (FORHATI).

Untuk periode keduanya di KPI Pusat, Nuning kali ini menjadi anggota bidang kelembagaan. Tekadnya, KPI harus semakin eksis di masyarakat sebagai lembaga yang terpercaya mengemban amanah publik di dunia penyiaran. Untuk itu, Nuning akan meluaskan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan penyiaran penguatan program literasi media di tengah masyarakat. Baginya kerja sama antar lembaga serta literasi media merupakan kata kunci dalam menghadirkan sinergi KPI dengan masyarakat guna menghadirkan serta mendukung eksistensi program siaran berkualitas.

Perempuan yang pernah menerima penghargaan sebagai Tokoh Peduli Budaya Lokal dalam ajang International celaket cross cultural festival (ICCCF) 2017, meyakini bahwa banyak persoalan kebangsaan yang sesungguhnya sangat berkaitan dengan kebijakan penyiaran saat ini. Oleh karena itu, Nuning merasa harus memaksimalkan fungsi penyiaran dalam ikut serta memperbaiki kondisi kebangsaan yang sedang karut marut ini.



Hardly Stefano Fenelon Pariela, SE., M.KP  
Komisioner KPI Pusat

Hardly Stefano Fenelon Pariela adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) periode 2016-2019 dan 2019-2022. Mantan Ketua Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur ini sebelumnya pernah menjadi bagian dari tim pembuatan materi siaran publikasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan juga menjadi narasumber pada berbagai lembaga penyiaran di Jawa Timur.

Pria berdarah Maluku ini mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 2001 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ketertarikan pada pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, mendorong dirinya mengambil studi Magister Kebijakan Publik di Universitas Airlangga Surabaya, yang diselesaikan pada tahun 2014. Pengembangan kapasitas kepemimpinan berwawasan kebangsaan diperoleh melalui melalui Program Pendidikan Reguler Angkatan 53 pada Lembaga Ketahanan Nasional, pada 2015.

Pada masa jabatan 2016 - 2019 pria kelahiran Ambon 17 Februari 1978 ini dipercaya sebagai Koordinator bidang pengawasan isi siaran KPI. Di bawah koordinasinya, KPI membangun sistem dengan mempergunakan teknologi informasi, yang mengintegrasikan seluruh proses pengawasan konten siaran.

Pada masa jabatan yang kedua, 2019 - 2022, ayah dari satu orang putri ini memilih untuk berkiprah di bidang kelembagaan agar dapat meningkatkan peran KPI melalui optimalisasi partisipasi masyarakat. Hardly memiliki pandangan bahwa dalam mewujudkan penyiaran yang berkualitas sebagaimana amanat UU Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran, KPI harus mampu menjalin relasi dan membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.



Yuliandre Darwis, M.Mass.Comm, Ph.D  
Komisioner KPI Pusat

Memimpin lembaga negara independen sebesar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberi tantangan sekaligus harapan bagi pria kelahiran Jakarta 21 Juli 1980. Pada usia 36 tahun, Yuliandre Darwis dipercaya mengemban amanah Ketua KPI Pusat periode 2016-2019. Yuliandre menjadi pemimpin termuda dari sebuah lembaga negara di Indonesia.

Sejak lulus Sarjana (S1) Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran 2004, pria yang menyukai dunia media, broadcasting, dan komunikasi ini menyanggah gelar S2 Mass Communication, Communication and Media Studies Faculty, UiTM, Malaysia 2007. Tiga tahun setelah menyanggah master komunikasi, Duta Muda UNESCO Untuk Indonesia 2005 ini memperoleh gelar S3 Mass Communication and Media, Communication and Media Studies Faculty, UiTM, Malaysia 2010.

Dedikasi Yuliandre pada dunia akademik khususnya komunikasi begitu tinggi. Tidak heran jika ilmuan komunikasi Indonesia memberi mandat kepada penerima Penghargaan TOYP Junior Chamber International (JCI) dalam bidang Academic Leadership 2013 ini sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) pada tahun 2013 dalam Kongres ke-VI di Kota Padang, Sumatera Barat. Yuliandre pun dicatat dalam album sejarah ISKI sebagai Ketua Umum ISKI termuda.

Kini, penerima Penghargaan Tokoh Peduli Penyiaran 2016 memimpin regulator penyiaran: KPI Pusat, dengan semangat perubahan, dedikasi yang tinggi dan dengan pikiran positif. Yuliandre yakin dengan spirit itu serta kepedulian bersama dan kerja sama berbagai pihak maka cita-cita terwujudnya dunia penyiaran yang sehat dan bermartabat di negeri ini bukan harapan kosong tapi akan menjadi kenyataan.



Aswar Hasan  
Komisioner KPI Pusat

Aswar Hasan adalah sosok yang sarat dengan berbagai pengalaman dalam mengelola lembaga negara. Dosen tetap di Universitas Hasanudin ini memiliki kualifikasi keilmuan di bidang komunikasi dengan konsentrasi media massa. Sebelum mengemban amanah sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Aswar pernah menjadi Ketua KPID Sulawesi Selatan, serta Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan.

Maju sebagai anggota KPI Pusat, Aswar mengusung misi mewujudkan tatanan informasi penyiaran yang sehat dan harmonis berdasar prinsip demokrasi yang mengintegrasikan bangsa. Aswar menilai, penyiaran memiliki kontribusi besar dalam menghadirkan informasi yang sehat di tengah masyarakat, yang menjadi dasar untuk memajukan kehidupan bangsa dan menjaga kepentingan negara.

Meskipun Aswar memegang gelar doktor di bidang administrasi kebijakan publik, dirinya juga dikenal sebagai supervisor utama untuk penelitian mahasiswa S1 dan S2 untuk peminatan media massa dan kajian media. Dinamika dunia media massa termasuk juga penyiaran di dalamnya, menjadi keseharian Aswar dalam dunia akademik. Aswar juga pernah mendirikan komunitas tentang analisa dunia perfilman, yakni “Liga Film Makassar”. Pria kelahiran Palopo tahun 1963 ini, tercatat sebagai anggota Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), serta pengurus Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulawesi Selatan.

Selama di KPI Pusat, misi yang dibawa Aswar adalah menghadirkan lembaga penyiaran sebagai cermin yang indah, jujur dan bertanggungjawab atas masa depan bangsa dan negara.

**BAGIAN IV**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**